

T  
345.0268  
WIS  
h  
1997

16 DEC 1997



# **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KOMPUTER**

## **TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ALOYSIUS WISNUBROTO**

**Pembimbing :**

**PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**1997**

Disusun Oleh :  
**ALOYSIUS WIJNUBROTO**

~~ALOYSTIS WENÜBOTO~~

~~NUM. 5102~~

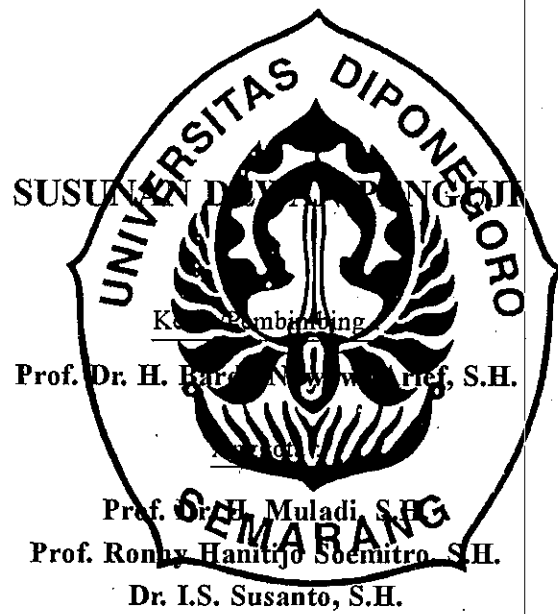


## Pembimbing

King

Mengetahui Ketua Program  
PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN DIPONEGORO  
Magister Ilmu Hukum

**Prof. H. Purwahid Patrik; S.H.**  
NIP. 130.307.058



Sekretaris :

**Eko Soponyono, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Tak ada kalimat yang paling pantas diucapkan di awal kata pengantar ini selain ucapan puji syukur sedalam-dalamnya ke hadirat Tuhan Yang Maha Asih atas besarnya kemurahan, petunjuk dan karuniaNya yang penulis rasakan sehingga sekalipun proses penyusunan Tesis ini disertai dengan berbagai pengalaman suka dan duka, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Tesis yang berjudul: "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer" ini merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penyalahgunaan Komputer sebagai salah satu dampak negatif dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada era yang telah mengarah pada kehidupan global ini merupakan permasalahan yang kompleks dan rumit, terlebih lagi jika dikaitkan dengan aspek-aspek yuridis. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran-pemikiran mengenai kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangannya melalui sarana hukum pidana. Penulis mengamati bahwa selama ini upaya penanggulangan melalui proses peradilan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang terjadi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai pendekatan penafsiran yang kurang terarah atau kurang terpola. Demikian pula upaya penanggulangan yang mengarah pada kebijakan legislatif nampaknya masih kurang mendapat perhatian. Hal-hal tersebut yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan bertolak dari dua permasalahan pokok yakni: bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer pada saat ini dan di masa mendatang.



Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari adanya keterlibatan dan bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan juga sebagai Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketekunan dan keikhlasan membimbing penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. I.S. Susanto, S.H. dan penerusnya Bapak Prof. H. Purwahid Patrick, S.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan, dorongan serta berbagai fasilitas yang menunjang penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., serta semua dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP yang telah berkenan menularkan semua ilmunya serta memberi motivasi pada penulis untuk mengembangkannya, terutama dalam rangka memperkaya wawasan penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak F.X. Soedijana, S.H. dan penerusnya Bapak Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H. selaku Ketua Yayasan Slamet Rijadi penyelenggara Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Drs. Sivester A. Kodhi dan penerusnya Bapak Drs. E. Kusunadmo, M.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. dan penerusnya Bapak JB. Daliyo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan dorongan pada penulis untuk melanjutkan

studi ke jenjang yang lebih tinggi serta telah mengupayakan semua biaya yang diperlukan.

5. Bapak Sarwata, S.H. selaku Ketua Mahkamah Agung RI yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan Mahkamah Agung RI, Khususnya pada Ibu Chairani A. Wani, S.H. selaku Direktur Pidana MA RI yang memperkenankan penulis untuk mencari berkas perkara yang diperlukan, Bapak Din Muhammad, S.H. selaku Kepala Litbang/Diklat MA RI dan Bapak H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, S.H., M.C.J., Ph.D. Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang diperbantukan di MA RI atas bahan-bahan, informasi dan diskusi-diskusinya.
6. Bapak Hasan Gasim Shahab, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Bapak R. Imam Soetopo, S.H. Ketua Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta, Bapak I Gde Ketut Sukarata, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ibu Sri Budiastuti, S.H. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Bapak Ismed Ilahode, S.H. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, yang kesemuanya telah memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang dipimpinnya.
7. Para Hakim dan Hakim Tinggi yang telah berkenan menjadi narasumber atau responden dalam penelitian ini, khususnya pada Bapak Pipin Purba, S.H., Bapak Soenarjo, S.H., Bapak Sahlan Said, S.H. dan Ibu Soegijati, S.H. yang disamping memberikan banyak informasi juga berkenan menyediakan waktu khusus untuk diskusi-diskusi kecil dengan penulis. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan pada Ayahnda Stephanus Kasihan, S.H. yang telah berkenan membagi pengalaman empirisnya sebagai Hakim/Hakim Tinggi, ter-

utama yang berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus dengan modus operandi canggih.

8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI yang telah memperkenankan penulis melakukan penelitian di lingkungan DPR RI, terutama pada Bapak Soenarto, S.H. Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan Bapak Moeljono, S.H. Anggota Komisi III DPR RI yang telah berkenan sebagai narasumber dalam penelitian ini.
9. Pimpinan PT. Microsoft Indonesia dan PT. Usaha Sistem Informasi Jaya, terutama pada Ibu Dra. Lilies dan kawan-kawan atas informasinya.
10. Rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas dorongan semangat dan bahan-bahan masukan yang mendukung penulisan tesis ini, terutama pada Bapak Tonny Pongoh, S.H., LL.M. yang telah berkenan mengirimkan beberapa cuplikan literatur langsung dari Queensland Australia, dan Bapak F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M. atas diskusi-diskusinya terutama yang berkaitan dengan pengalaman empiris dalam mengamati sistem hukum di Amerika.
11. Rekan-rekan Peserta Program Pascasarjana Ilmu hukum UNDIP yang ikut memperkaya wawasan pemikiran penulis melalui diskusi-diskusi kecil selama penulis menyusun tesis.
12. Rekan-rekan Pengacara dari IKADIN atas informasi dan diskusi-diskusinya.
13. Semua pihak atas peran sertanya baik secara langsung maupun tidak langsung telah menunjang keberhasilan studi penulis, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian penulisan tesis ini.

Akhirnya sembah bakti penulis sampaikan pada Bapak dan Ibu dan rasa terima kasih pada adik-adik serta tidak lupa pula

pada Diajeng Maria Biati Widyastuti, atas dukungan semangat, pengertian dan doa-doanya, yang semuanya itu telah memacu penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga Tuhan Yang Mahakasih membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis tersebut.

Dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis, penulis telah mencoba untuk menyajikan karya ilmiah yang berupa tesis ini dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca yang budiman.

Semoga laporan penelitian ini bermanfaat dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Semarang-Yogyakarta, Juli 1997,  
penulis,

Al. Wisnubroto  
-----  
Nim. B.102.94.0053

# **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KOMPUTER**

Aloysius Wisnubroto

## **INTI SARI**

Salah satu tantangan hukum yang cukup serius dalam menghadapi pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada era globalisasi adalah bagaimana cara menanggulangi kejahatan-kejahatan bentuk baru seperti penyalahgunaan komputer yang bersifat kompleks, rumit dan terus berkembang. Masalah tersebut juga dialami oleh negara berkembang seperti Indonesia, terlebih lagi karena hingga saat ini belum ada ketentuan dalam perundang-undangan hukum pidana yang ada di Indonesia yang mengatur masalah penyalahgunaan komputer, sehingga muncul dua persoalan pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu: bagaimana kebijakan (aplikatif) hukum pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan komputer yang terjadi pada saat ini dan bagaimana kebijakan (legislatif) hukum pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan komputer di masa mendatang.

Penelitian untuk menjawab dua permasalahan pokok tersebut dilakukan dengan metode pendekatan kajian yuridis-normatif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui studi literatur yaitu dengan melakukan inventarisasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus serta beberapa Undang-Undang Hukum Administrasi yang memuat ketentuan pidana, yang berlaku di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara mengkaji relevansi dan eksistensinya terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer tertentu. Langkah yang sama juga dilakukan terhadap Konsep Rancangan KUHP (Baru). Penelitian ini juga dilengkapi dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis secara kualitatif data yang berupa kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang pernah terjadi di Indonesia dan pandangan-pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengaturan penyalahgunaan komputer melalui studi lapangan. Studi yuridis-komparatif juga dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati dan mengkaji pengaturan penyalahgunaan komputer di beberapa negara maju. Selanjutnya hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif dan preskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai sumber hukum pidana yang ada, melalui metode penafsiran, dapat diterapkan terhadap beberapa bentuk penyalahgunaan komputer. Hal ini nampak pula pada realita penyelesaian kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Namun demikian, karena ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia pada saat ini tidak dipersiapkan untuk secara khusus menjangkau penyalahgunaan komputer, maka untuk dapat diterapkan terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer tertentu harus ditempuh dengan pendekatan penafsiran

secara ekstensif. Demikian pula dengan segala keterbatasan, aparat penegak hukum dalam proses peradilan kasus-kasus penyalahgunaan komputer cenderung memilih menerapkan pasal-pasal sekitar delik korupsi atau delik pencurian saja. Oleh sebab itu guna meningkatkan upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer dengan mengoperasionalisasikan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu didukung dengan berbagai faktor penunjang kebijakan aplikatif seperti: pengembangan metode penafsiran; pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum; pengembangan sistem yurisprudensi tetap dan yang tidak kalah penting adalah pengembangan sumber daya manusia (dalam hal ini adalah aparat penegak hukum).

Untuk mengantisipasi perkembangan penyalahgunaan komputer di masa mendatang perlu adanya kebijakan hukum pidana di bidang legislatif yaitu dengan merancang rumusan perbuatan dan sanksi pidana yang sesuai dengan karakteristik penyalahgunaan komputer yang khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengaturan yang diterapkan dalam Konsep Rancangan KUHP (Baru) yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 dipandang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia. Namun demikian, model pengaturan dengan cara memperluas pengertian "barang" sehingga meliputi data, program dan jasa komputer seperti dalam Pasal 162 (144) Konsep KUHP (Baru) tersebut masih perlu disempurnakan dan dikembangkan lagi agar dapat manjangkau seluruh aspek perbuatan penyalahgunaan komputer. Demikian pula sekalipun dalam penelitian tidak ditemukan adanya jenis sanksi khusus untuk pelaku penyalahgunaan komputer, latar belakang yang khas dari pelaku penyalahgunaan komputer dapat dirumuskan sebagai unsur pemberat sanksi pidana. Dengan penyempurnaan dan pengembangan, diharapkan model pengaturan dalam konsep tersebut memiliki kelebihan seperti: menghindari terjadinya kriminalisasi yang berlebihan, bersifat fleksibel, tidak terlalu bersifat teknis dan tetap memperhatikan aspek kepastian hukumnya. Terlebih lagi jika ketentuan dalam konsep tersebut dilaksanakan secara konsekuen serta didukung dengan profesionalisme aparat penegak hukum.

# THE PENAL POLICY IN PREVENTING OF COMPUTER ABUSE

Aloysius Wisnubroto

## ABSTRACT

One of serious legal challenges in anticipating the fastgrowing science and technology of globalization era is how to combat new kinds of crimes, such as complex and complicated computer abuse. The problem has also been faced by developing nations such as Indonesia, and it is getting more serious due to the absence of criminal law covering the issue of computer abuse. The legal issues raised in the following research are how the applicative penal policy (criminal law policy) handles recent computer abuse, and how legislative penal policy anticipates computer abuse in the future.

Data analyzed in the following normative-legal research are collected through library study by making inventory of regulations existing in criminal code (KUHP) including the draft criminal code (Konsep KUHP Baru), several statutes of specific crimes, and administrative regulations imposing criminal sanctions. Those data are qualitatively analyzed by examining the relevance and existence of certain computer abuse. The normative-legal approach is also associated with empirical-legal approach, namely, collecting and qualitatively analyzing data concerning cases of computer abuse taking place in Indonesia and opinions by competent authorities dealing with regulations on computer abuse. Comparative-legal approach is also employed by examining and analyzing regulations on computer abuse in several developed nations. The outcome of analysis will be then presented descriptively and prescriptively.

The research finding shows that the existing sources of criminal law can, through interpretation method, be applied to several kinds of computer abuse. It can also be seen on the reality of legal solutions of computer abuse occurring in Indonesia recently. However, since regulations provided in criminal code and other regulations existing in Indonesia are not yet prepared to cover computer abuse cases, extensive interpretation approach should be applied to cover those cases. In addition, legal enforcers tend to apply articles relating to corruption or theft in dealing with computer abuse cases. To speed up the efforts to tackle computer abuse by applying the existing provisions, it should, therefore, be associated with supporting factors of applicative policy, such as developing interpretation method, system of legal information and documentation, judge-made law system, and last but not least, developing human resources (especially legal enforcers).

In order to anticipate computer abuse in the future, penal policy of legislative aspect should be made available by drafting the formulation of crime and criminal sanction based upon the characteristic of computer abuse. Research

finding also shows that the mode of regulating employed in the draft criminal code drafted by criminal code committee of 1991/1992 is regarded the most suitable one in Indonesia. However, mode of regulating by extending the meaning of "item/object" so far as to include computer data, programs and services as stipulated in Article 162 (144) draft criminal code should be made more perfect and further developed to cover the whole aspect of computer abuse. Though the research does not show the type of sanction specifically imposed on computer abuser, the specific background of the offender can be formulated as incriminating criminal sanction. Through further perfection and development, the mode of regulating applied in the draft criminal code is expected to have some advantages such as avoiding overcriminalization, being flexible, being not too technical, and keeping legal certainty. It will be much better if the provisions in the draft code are implemented consequently and associated with professionalism of the legal enforcers.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
INTI SARI	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan dan Batasan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENYALAHGUNAAN KOMPUTER</b>	<b>20</b>
A. Landasan Pemahaman Mengenai Kebijakan Hukum Pidana .....	20
1. Pengertian dan ruang lingkup Kebijakan Hu- kum Pidana .....	21
2. Hubungan antara Kebijakan Hukum Pidana de- ngan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan So- sial .....	24
3. Beberapa pendekatan dalam Kebijakan Hukum Pidana .....	27
B. Penyalahgunaan Komputer dan Pokok Permasalah- annya .....	31
1. Pengertian dan klasifikasi penyalahgunaan komputer .....	32
2. Permasalahan Mendasar yang berkaitan de- ngan karakteristik teknologi komputer ....	47
3. Bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer yang dikenal dalam literatur .....	49

4. Perkembangan penyalahgunaan komputer ....	58
5. Faktor intelektual dan peranan "orang dalam" dalam penyalahgunaan komputer .....	70
C. Sekilas Masalah Asas Legalitas dan Metode interpretasi .....	74
D. Konsep Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer Dengan Sarana Hukum Pidana .....	83
<b>BAB III : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KOMPUTER DI INDONESIA PADA SAAT INI</b>	<b>88</b>
A. Beberapa Sumber Hukum Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Kasus Penyalahgunaan Komputer Pada Saat ini .....	88
1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ..	89
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) .....	119
3. Undang-Undang Nomor 11/PnPs/1963 (Undang-Undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi) .....	125
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan .....	131
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Undang-Undang Hak Cipta) .....	137
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 (Undang-Undang Perbankan) .....	141

<b>B. Penerapan Hukum Terhadap Perkara Penyalahgunaan Komputer Di Indonesia .....</b>	<b>149</b>
1. Kasus manipulasi dana bank di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Brigjen. Katamso Yogyakarta .....	151
2. Kasus " <i>Computer Crime Unauthorized Transfer</i> " dana bank di Bank Negara Indonesia 1946 New York Agency .....	165
3. Kasus "transfer fiktif" di Bank Bumi Daya Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan ...	185
4. Kasus penarikan hasil "setoran warkat fiktif" (melalui pengimputan data komputer) di PT. Bank Bali Jakarta Barat .....	196
5. Kasus "Pembajakan Program Komputer <i>Wordstar 5.0</i> " .....	203
6. Kasus "manipulasi data saldo pada <i>Master File</i> " Bank Danamon Cabang Glodok Plaza ..	211
 <b>C. Beberapa Gagasan Pemikiran Yang Berkaitan Dengan Masalah Operasionalisasi Perundang-Undangan Hukum Pidana Yang Ada Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Komputer ....</b>	 <b>226</b>

**BAB IV : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KOMPUTER DI INDONESIA DI MASA MENDATANG 246**

<b>A. Sekilas Mengenai Pengaturan Penyalahgunaan Komputer Di Beberapa Negara .....</b>	<b>246</b>
1. Amerika Serikat ( <i>United State</i> ) .....	251
2. Inggris ( <i>United Kingdom</i> ) .....	257
3. Perancis .....	262
4. Belanda .....	266

B. Pengaturan Penyalahgunaan Komputer Dalam Konsep KUHP Baru .....	272
C. Pandangan Umum Dari Pihak-Pihak Yang Terkait Atau Yang Berkepentingan Dengan Masalah Pengaturan Penyalahgunaan Komputer .....	280
1. Perusahaan yang bergerak di bidang komputer .....	281
2. Hakim .....	284
3. Dewan Perwakilan Rakyat RI .....	288
D. Beberapa Gagasan Pemikiran Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer Dengan Hukum Pidana di Masa Mendatang .....	292
 BAB V : PENUTUP .....	 308
A. Kesimpulan .....	308
B. Saran/Rekomendasi .....	311
 DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	 314
DAFTAR SINGKATAN .....	323
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	325

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia telah mencapai era tinggal landas. Hal ini antara lain ditengarai oleh semakin meningkatnya dua faktor utama yang dianggap sebagai kunci keberhasilan pembangunan dalam rangka memenuhi tuntutan era globalisasi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Salah satu produk IPTEK yang kecanggihannya berkembang pesat dan hampir menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat modern adalah Teknologi Komputer.

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan fasilitas-fasilitas serta kemudahan-kemudahan yang sangat membantu pekerjaan manusia serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Perpaduan teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi telah mampu menciptakan jaringan-jaringan (*computer network*) yang bersifat mendunia. Aplikasinya-pun kini semakin berkembang, bukan lagi hanya dilingkungan universitas, pusat penelitian dan laboratorium untuk keperluan yang bersifat ilmiah/riset, akan tetapi kini telah berkembang di lingkungan perusahaan, perbankan, instansi pemerintah, militer/Hankam, hukum dan peradilan dan individu/perorangan. Kini ada kecenderungan bahwa berbagai kebijakan didasarkan pada sistem komputer.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi komputer, sehingga komputer merupakan teknologi kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Dengan kata lain kehadiran teknologi dibidang komputer

merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan untuk menunjang pembangunan nasional.

Namun disamping itu patut pula disadari bahwa perkembangan teknologi komputer tersebut dapat atau telah menimbulkan pelbagai kemungkinan yang buruk, baik yang diakibatkan oleh keteledoran dan kekurangkemampuan, maupun kesengajaan yang dilandasi dengan ikhtikad buruk. Oleh sebab itu kebijakan pengembangan teknologi komputer harus pula diimbangi dengan kebijakan dibidang proteksinya, terutama kebijakan yang berkaitan dengan proteksi yuridisnya (dengan peraturan perundang-undangan).

Akhir-akhir ini muncul jenis kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai modus operandinya yaitu yang dikenal dengan istilah Penyalahgunaan Komputer<sup>1</sup>. Dengan memanfaatkan teknologi komputer, para pelaku kejahatan tidak perlu lagi bersusah payah mendatangi korbannya dan menghadapi resiko menghindari desingan peluru petugas keamanan maupun keroyokan massa, akan tetapi cukup dengan keahliannya mengendalikan tuts-tuts komputer, mereka mampu memindahkan uang dalam jumlah yang sangat besar kedalam rekening pribadinya. Bahkan jika komputer yang dijarah dalam keadaan *on-line* dalam sistem jaringan komputer maka pelaku dapat melakukan aksinya dari jarak jauh dengan mempergunakan saluran sarana telekomunikasi yang dihubungkan dengan modem yakni suatu alat yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam suatu jaringan sistem komputer.

---

<sup>1</sup>Dalam berbagai literatur juga dikenal dengan istilah : Kejahatan Komputer (*Computer Crime; Computer Misdriff*), *Computer Abuse, Computer Related Crime, Computer Fraud, Computer Assisted Crime*.

Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menyangkut permasalahan yang sangat kompleks dan rumit, sehingga diperlukan peraturan (khususnya hukum pidana) yang tepat. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini (KUHP dan Undang-Undang Hukum Pidana di luar kodifikasi) dirasa sudah tidak memadai lagi dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan komputer. Apalagi karakteristik penyalahgunaan komputer menyangkut hal-hal yang bersifat immaterial yaitu data, program atau informasi yang dihasilkan komputer. Bahkan dalam perkembangannya penyalahgunaan komputer tidak hanya berkaitan dengan delik harta kekayaan, tetapi terdapat unsur *challenge*, dimana yang dipikirkan oleh pelaku tidak hanya profit semata, melainkan bagaimana mengakali (*outsmarting*) suatu sistem komputer dan melakukan untuk kesenangan<sup>2</sup>. Misalnya mengintip atau mengacak-acak data/informasi/program komputer yang bukan haknya.

Dewasa ini telah diperkenalkan dan dikembangkan jaringan internet sebagai sarana lintas informasi. Informasi yang berada dalam *cyberspace* ini tanpa sensor dan dapat diakses oleh siapapun. Sayangnya informasi-informasi tersebut tidak seluruhnya positif. Komunikasi global dengan internet tidaklah sebebaskan berbicara melalui telepon, namun juga tidak mensyaratkan profesionalisme dan tanggung jawab terhadap isi sebagaimana media massa, sehingga informasi yang beredarpun tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan isinya. Informasi yang dinilai tidak pantas yang secara bebas berkeliaran di internet misalnya informasi yang bersifat bualan, gosip, dan

---

<sup>2</sup>Muladi dan Barda Nawawi A., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992. Halaman 27.

pornografi (dikenal dengan istilah *cybersex*). Disamping itu internet dapat pula dipergunakan sebagai media penyebaran agrepro (agregasi dan promosi) politik.

Dengan demikian akibat dari tindak penyalahgunaan komputer tidak lagi hanya membahayakan secara ekonomi saja melainkan juga membahayakan nilai-nilai fundamental seperti moral, etika dan sebagainya, bahkan akibat dari penyalahgunaan komputer dapat pula membahayakan secara politis.

Sekalipun Indonesia dapat dikatakan sebagai *the later-comers to modernization*<sup>3</sup> termasuk juga dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi komputer, namun sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang bahwa pengguna teknologi komputer telah merambah hampir keseluruhan instansi dan lapisan masyarakat. Demikian pula sekalipun internet masih merupakan sesuatu yang tergolong baru, namun sekarang telah tercatat sekitar 20000 pelanggan internet dengan 5 *provider* (agen komersial internet)<sup>4</sup>. Jumlah ini dipastikan akan bertambah pesat, bahkan kini banyak instansi pemerintah termasuk juga instansi militer/ABRI telah masuk ke jaringan internet<sup>5</sup>. Para pengguna teknologi komputer tersebut tentunya semakin memerlukan perlindungan terhadap ancaman penyalahgunaan komputer.

Dalam hal demikian teknologi (misalnya dengan menciptakan *simakom-pen.*) semata tidak dapat memberikan perlindungan, akan tetapi perlu dilengkapi dengan kebijakan umum yang

---

<sup>3</sup>Sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dalam kolomnya yang berjudul "Otoritas Hukum", *Forum Keadilan*, Nomor 15 Tahun IV, 6 November 1995. Halaman 35.

<sup>4</sup>*Bernas*, 3 November 1995. Halaman 1.

<sup>5</sup>*Jawa Pos*, 20 Oktober 1995. Halaman 1.



berupa undang-undang<sup>6</sup>. Dalam hal ini Konggres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Nara Pidana ke-8 di Havana-Cuba, dalam salah satu resolusinya (dokumen A/CONF.144/1.11) mengusulkan negara-negara di dunia untuk meningkatkan upayanya secara lebih efektif untuk menanggulangi kejahatan yang berhubungan dengan komputer, antara lain dengan usaha pengamanan komputer dan meningkatkan upaya internasional dalam penanganan kejahatan yang berkaitan dengan komputer yang salah satunya adalah mengadakan langkah-langkah yang mengarahkan pada upaya penyesuaian atau pembaharuan perundang-undangan hukum pidana nasional masing-masing negara.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan komputer diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus di kosentrasikan pada dua arah. Yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan Perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini (termasuk KUHP) dalam rangka menangani penyalahgunaan komputer yang terjadi pada saat ini. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan yang mengarah pada kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan Konsep KUHP Baru) yang tepat dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan komputer pada masa mendatang.

---

<sup>6</sup>lihat: Bill Gates, "Menyimpan Rahasia dalam Jaringan Komputer", Kompas, 5 November 1995. Halaman 11.

Penyalahgunaan komputer memiliki karakteristik yang khas dan menyangkut permasalahan yang amat kompleks, oleh sebab itu kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer merupakan langkah yang rumit dan harus didasari pertimbangan yang sangat hati-hati, agar kebijakan yang dihasilkan mampu/efektif menanggulangi penyalahgunaan komputer tanpa harus diikuti eksekusi yang menghambat pengembangan IPTEK dibidang komputer. Oleh sebab itu penentuan dan penyusunan kebijakan ini harus didukung dengan kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang bersifat mendalam dan komprehensif. Dalam hal ini penulis mengamati bahwa kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan komputer di Indonesia masih sedikit, apalagi kajian yang didasarkan pada hasil riset. Kalaupun ada, jumlahnya tidak seberapa dan biasanya tersebar dalam bentuk makalah atau kertas kerja yang ditulis dengan kajian dan data yang bersifat elementer untuk keperluan seminar, simposium, lokakarya atau pertemuan-pertemuan lainnya yang bersifat insidental dan tidak berkesinambungan. Tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam bentuk buku/monografi-pun masih dapat dihitng dengan jari dan kebanyakan hanya bersifat memberikan deskripsi dasar saja (bahkan kebanyakan bersifat "transfer ide" dari literatur asing), dalam arti belum mengarah pada kajian yang didasarkan pada penelitian yang bersifat khusus, mendalam dan komprehensif.

Langkanya kajian/penelitian mengenai penanggulangan penyalahgunaan komputer tersebut yang mendorong penelitian ini disamping masalah penyalahgunaan komputer merupakan masalah yang aktual dan perlu segera mendapatkan jalan peme-

cahan melalui kebijakan yang akurat.

Dengan penelitian-penelitian yang bersifat mendalam dan komprehensif diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam menentukan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer yang pada akhirnya kebijakan tersebut mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

## B. Perumusan dan Batasan Masalah

Penyalahgunaan komputer merupakan permasalahan yang aktual sehingga perlu mendapat pemecahan melalui kebijakan hukum pidana yang serius. Bertolak dari asumsi yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka pada hakekatnya terdapat dua permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana positif di Indonesia pada saat ini belum ada satupun memuat ketentuan yang mengatur/berkaitan dengan penyalahgunaan komputer. Hal ini menimbulkan permasalahan yang besar bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang akhir-akhir ini mulai bermunculan di Indonesia, sehingga permasalahannya adalah kebijakan (aplikatif/yudikatif) apa yang diterapkan dalam memanfaatkan perundang-undangan hukum pidana yang ada dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan komputer yang timbul; *Kedua*, muncul pemikiran untuk segera terwujud adanya ketentuan dalam perundang-undangan hukum pidana (terutama dalam KUHP Nasional) yang mampu menjangkau penyalahgunaan komputer. Hal ini akan berkaitan dengan masalah kriminalisasi, perumusan delik, penetapan sanksi yang

sangat rumit jika dikaitkan dengan kompleksnya masalah penyalahgunaan komputer, dengan demikian permasalahannya adalah bagaimana kebijakan (formulatif/legislatif) dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan komputer dengan sarana hukum pidana.

Berdasarkan dua permasalahan pokok tersebut maka dengan demikian perumusan permasalahannya dapat dirancang sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer?
2. Bagaimana seyogyanya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer di masa mendatang?

Mengingat permasalahan tersebut disusun dengan rumusan yang luas, maka perlu adanya perincian yang bersifat membatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Untuk membahas permasalahan pertama maka penelitian akan difokuskan pada:
  - a. Aturan atau ketentuan mana saja dalam perundang-undangan hukum pidana positif yang ada di Indonesia pada saat ini yang dimungkinkan untuk diterapkan pada bentuk penyalahgunaan komputer tertentu; Bagaimana relevansinya dan apa kelemahannya.
  - b. Bagaimana penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan komputer yang pernah terjadi di Indonesia.
2. Untuk membahas permasalahan kedua maka penelitian akan difokuskan pada:

- a. Bagaimana bentuk pengaturan mengenai penyalahgunaan komputer dan bagaimana cara merumuskan ketentuan yang mengatur perbuatan penyalahgunaan komputer dalam perundang-undangan hukum pidana di masa mendatang.
- b. Perlukah adanya sanksi khusus untuk perbuatan penyalahgunaan komputer, adakah sanksi khusus yang sesuai dengan karakteristik penyalahgunaan komputer yang bersifat khas, jika ada bagaimana cara menetapkan sanksi terhadap perbuatan penyalahgunaan komputer dalam perundang-undangan hukum pidana di masa mendatang.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman mengenai bagaimana konsep kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer. Dalam hal ini jika dikaitkan pada permasalahan pokok yang harus dicari jawabannya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer pada saat ini, mengkaji, mengembangkan untuk selanjutnya memberikan semacam sumbangan pemikiran sebagai solusi alternatif.
2. Untuk mendapatkan gambaran serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi penyalahgunaan komputer.

Selanjutnya diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan dua manfaat atau signifikansi, yaitu manfaat dari segi praktis dan manfaat dari segi teoritis.

1. Manfaat dari segi praktis:

- a. Bagi aparat penegak hukum: diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, sehingga membantu tugas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara/kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer secara lebih profesional.
- b. Bagi produsen/pengusaha komputer: diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai betapa rumitnya permasalahan hukum di bidang yang terkait dengan aplikasi teknologi komputer sehingga mendorong mereka untuk mengembangkan sistem proteksi terhadap kemungkinan munculnya bahaya penyalahgunaan komputer.
- c. Bagi masyarakat khususnya para *User* (pengguna teknologi komputer): diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan penaggulangan penyalahgunaan komputer melalui sarana hukum pidana, sehingga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan peransertanya dalam menanggulangi penyalahgunaan komputer.
- d. Bagi para penentu kebijakan (legislatif): diharapkan penelitian ini dapat memberikan gagasan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum pidana, yang dalam hal ini terkait dengan upaya penyusunan peraturan perundang-undangan yang mampu menjangkau masalah penyalahgunaan komputer, khususnya dalam rangka penyusunan KUHP Baru.
- e. Bagi peneliti: diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sarana bagi peneliti untuk lebih memperdalam

pengetahuan mengenai materi kebijakan hukum pidana dan mengembangkan gagasan pemikiran dalam menghadapi permasalahan yang aktual.

## 2. Manfaat dari segi teoritis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana. Hasil penelitian yang dituangkan ke dalam Karya Ilmiah (Tesis) ini diharapkan dapat melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan Hukum dan Komputer, terutama yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan komputer.

## D. Metode Penelitian

### 1. Desain/spesifikasi penelitian dan metode pendekatan

Bertolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini maka penelitian ini, disamping termasuk jenis "penelitian deskriptif" (*deskriptive research*) yaitu penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan<sup>7</sup>, juga merupakan "penelitian preskriptif" yaitu penelitian yang sifat analisisnya mengarah pada prediksi masa yang akan datang, guna menemukan kebijakan yang seyogyanya (yang diharapkan). Adapun penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada *pendekatan yuridis-normatif*, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan

---

<sup>7</sup> Soenaryo, *Metode Riset I*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1985. Halaman 8.

hukum, terutama bahan hukum primer (dalam hal ini berupa perundang-undangan hukum pidana positif dan perundang-undangan non-hukum pidana yang memuat ketentuan pidana, yang relevan) dan bahan hukum sekunder (yang berupa rancangan perundang-undangan hukum pidana, terutama dalam hal ini adalah Konsep KUHP Baru). Disamping itu penelitian ini dilengkapi pula dengan *pendekatan yuridis-empiris*, yaitu dengan mengkaji/-menganalisis data primer yang berupa putusan-putusan pengadilan yang menyangkut perkara penyalahgunaan komputer<sup>8</sup> dan pendapat/sikap dari para responden/narasumber yang relevan (misalnya praktisi hukum terutama hakim, akademisi hukum, serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah perlindungan komputer, misalnya asosiasi pengusaha komputer). Selanjutnya karena masalah kebijakan hukum pidana tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi, atau para teoritis belaka, namun juga ikut ditentukan oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional, maka penelitian ini perlu dilengkapi dengan *pendekatan yuridis-komparatif*. Dalam hal ini penulis mempelajari tentang bagaimana pengatur-

---

<sup>8</sup> Dalam literatur lain ada pendapat bahwa putusan pengadilan termasuk data sekunder karena termasuk data yang diperoleh dari sumber data tertulis. Penulis memasukkan putusan pengadilan ke dalam data primer ini, mengacu pada pendapat Endang Saefullah yang pada intinya menyatakan bahwa sumber tertulis seperti misalnya dokumen, putusan-putusan dan lain sebagainya merupakan data primer jika sumber data tersebut didapat langsung di lapangan dan benar-benar asli dalam arti bukan merupakan salinan, terjemahan atau photocopy. Lihat: E. Saefullah W., *Metode dan Teknik Pengumpulan Data Melalui Penelusuran Dokumentasi Hukum*, Bahan Penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia, Cisarua-Bogor, Desember 1991. Halaman 3 - 4.



an penyalanggunaan komputer di negara-negara maju yaitu: Amerika, Inggris, Perancis dan Belanda. Pemilihan negara Amerika dan Inggris berdasarkan alasan bahwa kedua negara itu dianggap mewakili negara-negara Anglo Saxon (dengan tradisi hukum *Common Law*-nya) disamping Amerika merupakan negara pertama yang berhasil mengembangkan teknologi komputer. Sedangkan pemilihan negara Perancis dan Belanda berdasarkan alasan bahwa kedua negara tersebut dianggap mewakili negara-negara Eropa Kontinental (dengan tradisi hukum *Civil Law*-nya) disamping karena berdasarkan sejarahnya pembentukan hukum modern di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda.

## 2. Lokasi penelitian

Dalam rangka mencari data/informasi yang akurat maka penulis memilih DKI Jakarta dan DI Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Pertimbangan yang mendasari pemilihan kedua lokasi ini adalah mengingat teknologi komputer tidak dapat dipisahkan dengan persepsi modernisasi dan intelektualitas. Dalam hal ini DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan sebagai kota metropolitan sangat mewakili gambaran dari kehidupan dunia modern. Yogyakarta sekalipun bukan merupakan kota metropolitan namun sebagai kota pendidikan dimana banyak memiliki cendekiawan maka kota ini sangat identik dengan masalah intelektualitas. Dengan karakteristik yang khas tersebut diasumsikan kedua kota ini kaya dengan kasus/perkara, literatur, responden dan data/informasi lainnya yang relevan dan diperlukan dalam penelitian ini.

Guna melacak data/informasi yang diperlukan maka lokasi penelitian dapat diperinci sebagai berikut:

- Mahkamah Agung RI
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta
- Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Asosiasi Pengusaha Komputer/Perusahaan Komputer
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
- Dewan Perwakilan Rakyat RI
- Biro Pusat Statistik

### 3. Populasi, sampel dan teknik sampling

Karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan yuridis normatif dimana sumber utamanya adalah data sekunder, maka sebenarnya masalah populasi, sampel dan teknik sampling bukan merupakan sesuatu yang urgen. Namun karena penelitian ini juga dilengkapi dengan data empiris yang bersumber dari data primer guna menunjang kajian normatif tersebut, maka perlu sedikit dikemukakan permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan sampel.

Populasi dalam penelitian ini sebenarnya meliputi kasus-kasus, praktisi hukum (hakim), Akademisi maupun pengusaha/pengguna komputer di seluruh Indonesia. Hal ini tercermin dari judul dan permasalahan yang menda-

sari penelitian ini. Oleh sebab itu sebenarnya jika berdasarkan pada penentuan lokasi penelitian serta perincian responden sebagaimana telah diuraikan di atas jelas tidak memenuhi syarat jika dijadikan sebagai sampel. Dengan demikian penentuan penentuan sampel di sini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan keseluruhan populasi, namun sekedar mendeskripsikan fakta empirisnya dan dipakai sejauh mendukung kajian normatifnya. Adapun teknik sampling yang dipakai adalah "*purposive sampling*" yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya, yang ditentukan dengan berdasarkan tujuan tertentu dan harus memenuhi persyaratan antara lain: didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi; subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi; dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan<sup>9</sup>.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan pada dua pendekatan dalam penelitian ini (yuridis-normatif dan empiris), maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

##### a. Studi kepustakaan (*library research*)

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data sekunder

---

<sup>9</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Bhakia Indonesia, Jakarta, 1990. Halaman 51.

yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari Bahan-bahan Hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier), Dokumen-dokumen (berkas perkara, kertas kerja dll.), Monografi (buku-buku literatur), dan berbagai artikel dari media massa.

b. Studi lapangan (*field research*)

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh dari narasumber atau responden secara langsung. Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara (interview). Dengan teknik ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber. Agar wawancara berlangsung secara terarah, maka penulis berpedoman pada daftar pertanyaan. Cara wawancara secara langsung ini dipilih dengan maksud untuk menghindari adanya bias dalam komunikasi.

## 5. Metode analisis data

Data yang bersifat kualitatif setelah dikumpulkan, lalu diidentifikasi dan dikategorikan dalam suatu sistematika tertentu, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi/interpretasi, komparasi dan sejenis itu<sup>10</sup>. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif yang dipergunakan seba-

---

<sup>10</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1986. Halaman 95.

gai pendukung data kualitatif, akan disajikan dalam bentuk tabel untuk kemudian diinterpretasikan.

Metoda berpikir yang dipakai dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*, yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk mengkaji persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### E. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini disusun sebagai suatu karya ilmiah yang berupa Tesis. Setelah diketahui bagaimana latar belakang masalah serta perumusan masalah pokoknya yang disertai pula dengan gambaran metode atau langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti, mengkaji dan membahas permasalahan pokok sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I (Pendahuluan) ini, maka selanjutnya dalam Bab berikutnya (Bab II) penulis akan menguraikan Tinjauan Umum (tinjauan atau kajian kepustakaan) mengenai segala hal yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum Pidana dan Penyalahgunaan Komputer. Dalam Bab ini penulis mencoba memberi gambaran tentang berbagai landasan pemikiran dalam kebijakan hukum pidana dan pokok-pokok permasalahan dalam penyalahgunaan komputer yang bersifat khas, kompleks dan rumit. Bab II ini merupakan landasan analisis dalam bahasan bab-bab berikutnya oleh sebab itu penulis perlu memasukan pula masalah metode penafsiran, asas legalitas dan beberapa pedoman yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan komputer.

Selanjutnya dalam Bab III penulis menyusun suatu bahasan berdasarkan data yang berhubungan dengan permasalahan pokok yang pertama. Diawali dengan kajian normatif terhadap beberapa sumber hukum pidana dan dapat diterapkan terhadap kasus penyalahgunaan pada saat ini. Adapun sumber hukum pidana yang akan dijadikan bahan kajian di sini meliputi hukum pidana positif (KUHP; UU. No. 3 Tahun 1971; UU. No. 7/Drt/1955 dan UU. No. 11/PnPs/1963) dan perundang-undangan hukum lainnya yang memuat sanksi pidana yang dalam hal ini dipilih undang-undang yang paling relevan yaitu Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Perbankan). Selanjutnya bab ini akan dilengkapi dengan kajian terhadap data empiris yaitu yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap perkara penyalahgunaan komputer di Indonesia. Berdasarkan kedua kajian tadi pada bagian akhir dari bab ini akan dibahas mengenai beberapa gagasan pemikiran yang berkaitan dengan masalah operasionalisasi perundang-undangan hukum pidana yang ada dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan komputer di Indonesia.

Analisis data untuk membahas permasalahan pokok kedua dituangkan dalam Bab IV. Dalam bab ini penulis mengawali dengan kajian komparatif terhadap pengaturan penyalahgunaan komputer di beberapa negara, yang dalam hal ini (dengan berbagai pertimbangan) dipilih negara Amerika, Inggris, Perancis dan Belanda. Selanjutnya bertolak dari perbandingan hukum tersebut akan dikaji mengenai pengaturan penyalahgunaan komputer dalam konsep rancangan KUHP Baru di Indonesia. Karena penerapan kebijakan hukum pidana akan mengandung kosekuensi dari berbagai pihak yang berkepentingan, maka

selanjutnya akan dides-kripsikan data empiris mengenai pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, terutama hakim dan pengusaha/pemakai komputer. Akhirnya dari berbagai kajian terdahulu akan dibahas mengenai beberapa gagasan pemikiran yang berkaitan dengan kebijakan legislatif dalam penetapan dan perumusan perbuatan dan sanksi pidana dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan komputer dalam perundang-undangan hukum pidana di masa mendatang.

Akhirnya pada bagian penutup yang akan dituangkan dalam Bab V, penulis mencoba untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil analisis data, yang pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan pokok yang diangkat dalam penulisan ini. Bab penutup ini akan diakhiri dengan beberapa saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PENYALAHGUNAAN KOMPUTER

#### A. Landasan Pemahaman Mengenai Kebijakan Hukum Pidana

Perkembangan masyarakat di jaman modern yang begitu pesat akibat berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) ini, perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya.

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK dewasa ini, perlu pula ditanggulagi dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif, dalam hal ini salah satunya adalah penanggulangan dengan sarana hukum pidana.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Dalam hal ini Marc Ancel mengatakan bahwa "modern criminal science" terdiri dari tiga komponen yaitu: "Criminology", "Criminal Law" dan "Penal Policy". Selanjutnya Marc Ancel mengatakan bahwa "Between the study of criminological factor on the one hand, and the legal technique on the other, there is the room for science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strife, but as fellowworkers engaged in common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, and healthily progressive penal policy". Lihat: Barda Nawani Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Halaman 23 - 24.



## 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris: "*policy*" atau dalam bahasa Belanda: "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum -pen.) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)<sup>2</sup>.

Selanjutnya "politik hukum" (*law policy/rechtspolitiek*) dapat diartikan sebagai:<sup>3</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

---

<sup>2</sup>Lihat: Henry Campbell Black, et.al., ed., *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, St. Paul: West Publishing Co., 1979. Halaman 1041. Antara lain disebutkan bahwa *Policy* merupakan: "The general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community".

<sup>3</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977. Halaman 159 dan Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, 1983. Halaman 20.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang<sup>4</sup>". Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna<sup>5</sup>.

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "Pembaharuan Perundang-undangan hukum pidana Hukum Pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan

<sup>4</sup>Dalam hal ini Marc Ancel mendefinisikan *penal policy* sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dalam hal ini hukum pidana) dirumuskan secara lebih baik". Lihat: Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Halaman 28.

<sup>5</sup>*Ibid.*

melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana,
- b. kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana,
- c. kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif.

Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana berserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana<sup>6</sup>. Sehingga dalam hal ini, A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:<sup>7</sup>

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

---

<sup>6</sup>Ibid., Halaman 29.

<sup>7</sup>"Strafrechtspolitik is de beleidslijn om te bepalen: in welk opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden; wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen; hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen". Lihat: Ibid., Halaman 28-29.

c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

## **2. Hubungan antara Kebijakan Hukum Pidana dengan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial.**

Berdasarkan uraian-uraian dalam subbab tersebut di atas, nampak bahwa kebijakan hukum pidana bukan merupakan suatu kebijakan yang berdiri sendiri. Sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari "Kebijakan Kriminal" (*Criminal Policy*)<sup>8</sup>. Dengan demikian dalam rangka penanggulangan kejahatan secara terpadu maka kebijakan hukum pidana (pendekatan penal) dalam pengembangannya harus senantiasa memperhatikan alternatif penanggulangan yang lain yaitu pendekatan non-penal, yaitu upaya menanggulangi kejahatan dengan mempergunakan sarana lain selain hukum pidana. Pendekatan penal yang cenderung mengarah pada upaya represif dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan, sehingga dalam hal ini perlu diimbangi dengan pendekatan non-penal yang cenderung merupakan upaya preventif. Bahkan jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal<sup>9</sup>. Namun hal ini tidak berarti bahwa upaya penal tidak penting atau dapat dikesampingkan begitu saja. Justru upaya penal merupakan sarana yang sangat vital dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini dipertegas dalam salah satu kesimpulan Seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*", G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*", sedangkan Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu : dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dalam arti yang paling luas (beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Lihat: *Ibid.* Halaman 1 - 2.

<sup>9</sup>*Ibid.*, Halaman 49.

"Hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai *salah satu sarana untuk 'social defence'* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si-pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat"<sup>1</sup>

Kebijakan kriminal baik yang dilakukan dengan pendekatan penal maupun non-penal sebagai sarana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan (*social defence*) merupakan bagian integral dari Kebijakan Sosial (*Social Policy*) yang bersama-sama dengan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*Social Welfare Policy*) mengupayakan suatu tujuan akhir yang lebih luas yaitu "perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat"<sup>11</sup>.

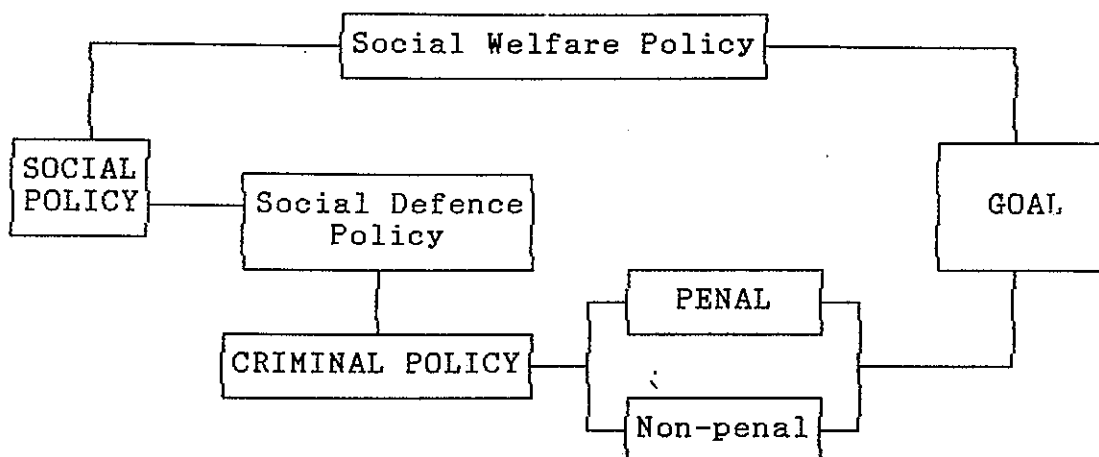
Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan-kebijakan yang lain, terutama dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992. Halaman 92.

<sup>11</sup>Dalam salah satu laporan kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo Tahun 1973 antara lain menyatakan: "Most of group members agreed some discussion that 'protection of the society' could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like 'happiness of citizens', 'a wholesome and cultural living', 'social welfare' or 'equality'." Lihat: Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Halaman 2 - 3.

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 9-13 September 1991, Halaman 3. Bandingkan dengan: Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Halaman 3.



Berdasarkan uraian dan bagan di atas maka upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu (integral), dalam arti: ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan dengan sarana penal dan non-penal. Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan yang terintegrasi dalam kebijakan sosial perlu diintegrasikan pula dalam perencanaan pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional<sup>13</sup>.

### 3. Beberapa pendekatan yang perlu diperhatikan dalam Kebijakan Hukum Pidana.

Dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana yang penganalisisannya tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan pembangunan nasional adalah masalah penentuan:<sup>14</sup>

a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;

---

<sup>13</sup>Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan tersebut terungkap dalam pernyataan-pernyataan para ahli seperti Sudarto dan W. Clifford dan dalam berbagai kongres PBB mengenai "Prevention of Crime and the Treatment of Offenders". Periksa: *Ibid.*, Halaman 4 - 8.

<sup>14</sup>*Ibid.*, Halaman 32.

- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Hal ini berarti bahwa kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan masalah kriminalisasi dan penalisasi. Oleh sebab itu dalam menangani masalah sentral tersebut di atas, terutama masalah sentral yang pertama, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dengan demikian maka kebijakan hukum pidana harus dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat hati-hati, cermat dan rasional dengan memperhatikan berbagai faktor yang relevan. Apalagi sebagaimana diuraikan tadi, bahwa kebijakan hukum pidana antara lain berkaitan dengan masalah kriminalisasi, maka dalam menentukan dan menyusun ketentuan pidana harus memperhatikan pertimbangan atas faktor kebijakan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan hukum) pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

---

<sup>15</sup> Disarikan dari pendapat Sudarto dan Bassiouni, serta dari laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Semarang pada bulan Agustus 1980. Lihat: *Ibid.* Halaman 33 - 36. Lihat pula: Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977. Halaman 44 - 48.



- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, tidak disukai atau dibenci oleh warga masyarakat yaitu perbuatan yang merugikan (material atau spiritual) atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Selain itu harus pula dipertimbangkan sejauhmana perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Perhitungan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*) dari penggunaan hukum pidana tersebut, yaitu apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegak hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- d. Kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dan keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
- e. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Nampak berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas bahwa penentuan kebijakan kriminal dengan sarana hukum pidana senantiasa mengacu pada kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial.

Selanjutnya karena masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas penentuan perbuatan apa

yang seharusnya dijadikan tindak pidana, namun juga sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada sipe-langgar, maka disamping pertimbangan atas beberapa faktor kebijakan tersebut di atas, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas dari bermacam-macam sanksi.

Dalam hal ini Bassiousi menegaskan bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial seperti: **pemeliharaan tertib masyarakat; perlindungan warga masyarakat** dari kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; **memasyarakatkan kembali** (resosialisasi) para pelanggar hukum; dan **memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu**<sup>16</sup>.

Dengan demikian maka penetapan kebijakan hukum pidana harus diawali dengan penelitian atau pengkajian yang mendalam dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat pragmatis dan rasional, maupun yang bersifat humanistik. Ini berarti bahwa kebijakan hukum pidana harus dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan kebijakan (dalam hal ini adalah kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum) dan pendekatan nilai (dengan cara melakukan *reorientasi* dan *reevaluasi* nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Halaman 39 - 40.

substantif hukum pidana yang dicita-citakan)<sup>17</sup>. Hal ini berarti pula bahwa kebijakan hukum pidana bukan semata-mata bersifat yuridis-normatif saja, namun juga bersifat yuridis-faktual (dengan pendekatan sosiologis, historis, komparatif dan komprehensif).<sup>18</sup> Orientasi Ilmiah tersebut sangat diperlukan agar penetapan kebijakan hukum pidana dapat mencapai tujuan yang diharapkan, tanpa mengakibatkan eksese yang antara lain berupa *overcriminalization* dan atau *overreach of the criminal law*.

## B. Penyalahgunaan Komputer dan Pokok Permasalahannya

Dalam bab pendahuluan telah diungkapkan bahwa merebaknya teknologi komputer telah membentuk fenomena baru dalam kehidupan manusia di abad modern ini. Dengan sifat atau karakteristiknya yang khas, komputer telah mampu membuat perubahan-perubahan yang mendasar pada segala aspek kehidupan manusia, yang akhirnya membawa persoalan-persoalan yang semakin rumit dan kompleks.

Penyalahgunaan Komputer sebagai salah satu dampak yang diakibatkan oleh perkembangan komputer juga tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dan kompleks serta sulit dipecahkan berkenaan dengan masalah

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 31 - 32. Lihat pula dalam: Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pad Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juli 1994. Halaman 16.

<sup>18</sup> Selain itu harus pula diingat bahwa analisis kebijakan diidentifikasi didasarkan pada efisiensi, efektifitas, feasibilitas, dan etik. Analisis kebijakan adalah seseorang yang bekerja berpasangan dengan penyusun kebijakan dengan mengkaji informasi-informasi yang relevan yang berkaitan dengan pilihan-pilihan nilai yang dihadapi dalam penyusunan keputusan. Lihat: Robert R. Meyer dan Ernest Greenwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, (*The Design of Social Policy Research*, alih bahasa oleh: Sutan Santi Arbi, et.al.), Rajawali, Jakarta, 1984. Halaman 27.

penanggulangannya (meliputi masalah pengaturannya, penegakan hukumnya maupun pencegahannya).

Berikut ini penulis mencoba untuk mendiskripsikan serta menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan teknologi komputer dan penyalahgunaan komputer, mulai dari persoalan yang mendasar hingga persoalan-persoalan yang bersifat teknis.

### 1. Pengertian dan Klasifikasi Penyalahgunaan Komputer.

Hingga tulisan ini disusun belum terdapat satu kesatuan pandangan mengenai pengertian atau definisi dari penyalahgunaan komputer. Beberapa ahli telah mencoba untuk mendefinisikan pengertian dari penyalahgunaan komputer, baik dalam suatu literatur (pengertian kriminologis) atau dalam undang-undang/rancangan undang-undang (pengertian yuridis) sehingga muncul berbagai definisi mengenai penyalahgunaan komputer, sesuai dengan dasar kepentingan dan sudut pandang masing-masing.

Pengertian Penyalahgunaan Komputer (Ing: *computer abuse*, Bld: *computermisbruik*) atau yang dalam beberapa sumber sering disebut sebagai Kejahatan Komputer (Ing: *computer crime*, Bld: *computercriminaliteit*)<sup>19</sup> berawal dari pengertian komputer itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Dalam literatur-literatur maupun undang-undang yang sudah berlaku maupun yang sedang dirancang terdapat istilah-istilah sebagai berikut: *Computer Crime*; *Computer Abuse*; *Computer Fraud*; *Computer Related Crime*; *Computer Assisted Crime* dll. lihat: J. Sudama Sastraandjaja, *Kejahatan Komputer: Suatu Masalah Hukum Kontroversial Yang Perlu Diperhatikan/Dipecahkan Dalam Era Pembangunan*, Prasaran dalam Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 18 - 19 Januari 1988. Halaman 12. Dalam hal ini Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa "Penyalahgunaan Komputer" dan "Kejahatan Komputer" dipergunakan dalam istilah yang sama. Lihat: Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Komputer: Suatu Catatan Sementara Dalam Rangka KUHP Nasional Yang Akan Datang*, Prasaran dalam Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 18 - 19 Januari 1988. Halaman 2.

Istilah Komputer berasal dari bahasa asing "*computer*" dengan kata dasar "*to compute*" yang berarti menghitung atau menaksir, namun dalam perkembangannya komputer memiliki fungsi yang lebih luas dari pada sekedar menghitung (*to calculate* = calculator).

Ada berbagai definisi mengenai komputer, dari berbagai definisi tersebut setidaknya terungkap dua definisi yang dianggap paling mewakili ciri-ciri komputer:<sup>20</sup>

- a. Serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi/program yang diberikan kepadanya.
- b. Suatu rangkaian peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronik, bekerja di bawah kontrol suatu *operating systems* melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi-instruksi yang disebut program, serta mempunyai *internal storage* yang digunakan untuk menyimpan sistem-sistem operasi, program dan data yang diolah.

Kedua pendapat di atas memberikan gambaran bahwa komputer itu memiliki beberapa ciri sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Komputer itu merupakan suatu sistem, yaitu serangkaian atau kelompok peralatan yang bekerja bersama secara elektronik;

---

<sup>20</sup>Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987. Halaman 14 - 15. Bandingkan dengan definisi yang terdapat dalam *Illinois Criminal Code*: "Computer means internally programmed general purpose digital device capable of automatically accepting data, processing data and supplying results of operation"

<sup>21</sup>*Ibid.*, Halaman 15.

- b. Komputer itu mempunyai suatu alat penyimpan data dan program yang disebut dengan *internal storage* atau memori komputer;
- c. Komputer itu bekerja di bawah kontrol sistem operasi (*operating systems*) dan melaksanakan tugas berdasarkan instruksi-instruksi yang disebut program.

Selanjutnya dikenal pula apa yang dinamakan sebagai "Sistem Komputer" yaitu satu set alat yang saling berhubungan, yang meliputi komputer dan perlengkapan lainnya, termasuk (namun tidak terbatas pada) alat input-output data dan penyimpanannya, jalur komunikasi data, program dan data komputer, yang membuat sistem tersebut dapat menyelenggarakan tujuan khusus dalam pemrosesan data yang mana hal itu telah ditentukan<sup>22</sup>.

Pengertian komputer dan sistem komputer yang menyangkut fungsi sarana dan cara kerja yang luas dan kompleks sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan sulitnya para ahli untuk mendefinisikan secara tepat apa yang dimaksud sebagai penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer itu.

Hingga saat ini para ahli masih mencoba-coba untuk merumuskan definisi yang tepat mengenai penyalahgunaan komputer, sehingga muncul berbagai pengertian penyalahgunaan komputer sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Karena belum ada kesepakatan diantara para ahli untuk memilih dan menentukan mana definisi yang paling baik atau

---

<sup>22</sup>Pengertian tersebut diambil dari *Illinois Criminal Code*, yang memisahkan pengertian antara "Computer" dengan "Computer System". Bandingkan dengan rumusan dalam *California Code Penal* yang memasukkan pengertian komputer ke dalam pengertian sistem komputer, yaitu: "...a machine or collection of machines excluding pocket calculator which are not programmable and capable of being used in conjunction with external files, one or more of which containing computer program and data, that perform function, including but not limited to, logic, arithmetic, data storage, and retrieval, communication and control"

paling tepat, maka berikut ini penulis akan mengutip beberapa pengertian penyalahgunaan komputer, sekedar sebagai gambaran dalam pembahasan selanjutnya:

- a. Pengertian penyalahgunaan komputer menurut U.S. Department of Justice: "...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution"<sup>23</sup>
- b. Pengertian penyalahgunaan komputer menurut Jusuf Randy: "...kejahatan dengan modus operandi baru yakni kejahatan dengan menggunakan atau memperdaya komputer"<sup>24</sup>
- c. Pengertian penyalahgunaan/kejahatan komputer menurut Andi Hamzah:  
"Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal"<sup>25</sup>
- d. Pengertian penyalahgunaan/kejahatan komputer menurut Kadish Sanford dan Morrison (guru besar pada Law University of California):  
"Service. When people gain unauthorized access to a computer and use the service for their own puposes, the crime is also often discribed as theft of computer time. If the unauthorized use continue for the extended period, if can result in a conciderable less in term of service value - without permission from the employer, employees have established own companies and have used the employer's computer for the new company. Sometimes the employer's existing data and programs have been used"<sup>26</sup>

<sup>23</sup> H. Kadish Sanford ed., *Encyclopedia of Crime and Justice: Volume 1*, The Free Press A Division of Mac millan Inc, New York, 1983. Halaman 218.

<sup>24</sup> Jusuf Randy, *Kejahatan Komputer, Prasaran*, disampaikan dalam lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Dep.Keh.RI, Jakarta, 19-19 Januari 1986, Halaman 1.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* Halaman 26.

<sup>26</sup> Kadish Sanford W.A.F. AND May T. Morrison Ed. *Encyclopedia of Crime and Justice*, Law University of California, Berkeley, Volume I, hal. 220.

- e. Pengertian kejahatan komputer menurut *IBM. Inc. JAPAN.* (perancangan dan spesialis komputer):<sup>27</sup>
- 1) *Crime using computer as a tool of theft, fraud, embezzlement and so forth.*
  - 2) *Crime through computer system, such at tempering stealing, and elimination of the computer data and programs*
- f. Pengertian penyalahgunaan komputer menurut *National Police Agency*: "*Computer crime is a crime toward to computer*"<sup>28</sup>
- g. Pengertian penyalahgunaan komputer menurut *Organization of European Community Development*: "*Any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the authomathic processing and/or the transmission of data*"<sup>29</sup>
- h. Pengertian penyalahgunaan komputer menurut *Kaspersen*: "*Any illegal act which directly interferes with the planned course of authomated data processing*"<sup>30</sup>

Nampak dari definisi yang bermacam-macam tersebut bahwa pada dasarnya ada perumusan definisi mengenai penyalahgunaan komputer secara luas yaitu perbuatan melawan hukum

<sup>27</sup> Djoko Sarwoko, "Computer Crime" Sebagai "Dimensi Baru Tindak Pidana Ekonomi", *Varia Peradilan*, Nomor 21 Tahun II, Juni 1987, Halaman 150 (garis bawah dari penulis). Nampaknya IBM. Inc. menganut konsep "computer" dan "computer system" dalam dua pengertian yang terpisah (perhatikan rumusan pengertian "computer" dan "computer system" pada halaman 32) sehingga merumuskan pengertian penyalahgunaan komputer menjadi dua golongan yaitu kejahatan dengan komputer dan kejahatan yang bertalian dengan sistem komputer.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV. Tanjung Agung, Jakarta, 1993, Halaman 3.

<sup>30</sup> *Ibid.*



yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain; dan perumusan definisi secara sempit yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih<sup>31</sup>. Selanjutnya dari beberapa pendapat mengenai definisi kejahatan komputer di atas dapat ditarik suatu gambaran secara umum mengenai ciri-ciri dari kejahatan komputer:

- a. Merupakan kejahatan dengan atau berkaitan dengan komputer dan/atau sistem komputer.
- b. Merupakan kejahatan dengan modus operandi dengan cara memperdaya komputer.
- c. Perbuatan itu dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis.
- d. Perbuatan tersebut membuat komputer tidak dapat berfungsi secara benar.
- e. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil (waktu, nilai, jasa, pelayanan dan lain-lain).

Munculnya definisi penyalahgunaan komputer yang bermacam-macam tersebut barangkali disebabkan karena para ahli berusaha membatasi rumusan definisi penyalahgunaan/kejahatan komputer sedemikian rupa agar tidak mengaburkan batas-batas dari penyalahgunaan komputer itu sendiri. Sebab jika kurang hati-hati dalam merumuskan definisi

---

<sup>31</sup>Lihat/bandingkan: *Ibid*.

penyalahgunaan komputer, misalnya dengan memberikan rumusan yang sedemikian luasnya agar mampu mencakup seluruh permasalahan penyalahgunaan komputer yang cukup kompleks tanpa memberikan batas-batas yang pasti maka hal itu justru akan mengaburkan pengertian dari kejahatan komputer.

Berkaitan dengan adanya bermacam-macam pengertian tentang kejahatan komputer, maka hingga saat ini belum terdapat kesatuan pandangan masalah klasifikasi atau katagorisasi kejahatan komputer, mengenai mana yang dapat dimasukkan kedalam ,kejahatan komputer dan mana yang merupakan kejahatan biasa meskipun menyangkut masalah komputer. Justru perbedaan pendapat masalah klasifikasi ini merupakan penyebab dari berbagai rumusan definisi atau pengertian tentang kejahatan komputer, karena suatu pengertian biasanya bertolak dari klasifikasi tertentu.

Seandainya kejahatan komputer diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut komputer dan peralatan-peralatan yang berhubungan dengannya atau sarana-sarana penunjangnya, maka sebenarnya tidak semua kejahatan yang biasanya disebut "Kejahatan Komputer" merupakan kejahatan komputer.

Sebagai gambaran barangkali dapat diillustrasikan sebagai berikut: bilamana ada seseorang mencuri *flopy disk* yang "kosong" (tidak memuat program atau data) dan bermaksud untuk dimilikinya sendiri atau dijual kepada orang lain, maka kiranya perbuatan orang tersebut belum dapat digolongkan sebagai kejahatan komputer. Perbuatan tersebut lebih tepat disebut sebagai pencurian biasa seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Berbeda dengan jika seseorang tersebut mencuri *flopy disk* itu dengan mengetahui atau

setidak-tidaknya menduga bahwa didalam floppy disk tersebut terdapat program atau data komputer dan orang tersebut bermaksud memiliki atau menjual kepada orang lain "data" atau "program" yang terdapat dalam *disk* tersebut (jadi bukan *floppy disk* itu sendiri) atau punya maksud lain misalnya untuk balas dendam atau untuk memperoleh imbalan yang tidak wajar dengan "menyandera" benda-benda vital tersebut agar suatu pusat komputer tidak dapat menjalankan operasinya, maka kiranya perbuatan ini baru pantas bila disebut sebagai kejahatan komputer.

Berikut ini penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa klasifikasi atau kategorisasi mengenai kejahatan komputer dari berbagai pendapat.

Jongerius membagi penyalahgunaan komputer dalam kategori sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Manipulasi komputer;
- b. Spionase komputer (menyangkut data rahasia);
- c. Sabotase komputer (dengan merusak atau menghancurkan peralatan dan atau sistem jaringan komputer);
- d. Unauthorized Use (pemakaian secara tidak sah) komputer;
- e. Unauthorized Access (memasuki secara tidak sah) sistem komputer.

Dalam suatu study dari konggres di Amerika Serikat terdapat empat kategori kejahatan komputer yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Hardjono Reksodiputro, *Op.Cit.* Halaman 3.

<sup>34</sup>J. Sudama Sastraandjaja, *Op.Cit.* Halaman 15.

- a. Pemasukan data yang tidak benar (*fraudulent*) kedalam komputer.
- b. Pemakaian fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan komputer.
- c. Merubah atau merusak informasi atau arsip.
- d. Pencurian apakah secara elektronik atau dengan cara-cara lain uang, benda, fasilitas-fasilitas dan data yang berharga.

Selanjutnya ada klasifikasi lain yang meletakkan sebagian besar dari kejahatan komputer kedalam empat kategori:<sup>35</sup>

- a. Sabotase dan vandalisme terhadap sistem komputer itu sendiri.
- b. Penggunaan atas fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang sebagai pencurian.
- c. Kejahatan terhadap barang (pencurian melalui penggunaan komputer).
- d. Kejahatan terhadap data (pencurian informasi)

Dalam ensliklopedi tentang Kejahatan dan Keadilan (*The Encyclopedia of Crime and Justice*) dikemukakan mengenai kategorisasi penyalahgunaan komputer sebagai berikut:

*"It has two main categories. In the first, the computer is a tool of a crime, such as fraud, embezzlement, and theft of property, or is used to plan manage a crime. In the second, the computer is a object of a crime, such as sabotage, theft or alteration of storage data, or theft of it service"*<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Halaman 16.

<sup>36</sup> Stanford H. Kadish ed., *Loc.Cit.*

Ada lagi klasifikasi dari Donn Parker yang lebih sistematis yaitu kejahatan komputer dipandang dari sudut empat peranan komputer dalam kejahatan komputer, yakni:<sup>37</sup>

a. Komputer sebagai objek.

Dalam hal ini termasuk kasus-kasus kerusakan terhadap komputer, data atau program yang terdapat di dalamnya atau kerusakan terhadap sarana-sarana komputer seperti AC dan peralatan listrik yang menunjang operasi komputer.

b. Komputer sebagai subjek.

Komputer dapat merupakan atau menimbulkan tempat atau lingkungan untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian penipuan dan pemalsuan yang tidak tradisional akan tetapi yang menyangkut harta-harta benda dalam bentuk baru yaitu berbentuk pulsa-pulsa elektronis dan guratan-guratan magnetis.

c. Komputer sebagai alat.

Dalam beberapa tipe dan cara-cara kejahatan dipergunakan komputer, sehingga peristiwa kejahatannya adalah sangat kompleks dan susah diketahui. Salah satu contoh disini adalah mengenai seseorang yang mengambil warkat-warkat penyeteroran dari suatu bank dan mencetak nomor nomor rekeningnya sendiri dengan tinta magnetis pada warkat-warkat tersebut, yang kemudian diletakkan kembali pada tempatnya di bank, dari mana kemudian para nasabah mengambil dan mengisinya sebagai bukti penye-

---

<sup>37</sup>J. Sudana Sastraandjaja, *Op.Cit.*, Halaman 16 - 17.

toran. Pada waktu komputer memproses data pada warkat-warkat tersebut, komputer mengkreditir rekening dari oknum itu yang kemudian menarik uangnya dengan cek dari rekeningnya sebelum para nasabah yang menyeter tadi kemudian mengajukan protesnya.

d. Komputer sebagai simbol.

Suatu komputer dapat dipergunakan sebagai simbol untuk melakukan penipuan atau ancaman. Hal ini termasuk suatu penipuan melalui iklan dari suatu "Biro Jodoh" yang menyatakan bahwa biro jodoh tersebut memakai komputer untuk membantu si korban mencari jodoh, akan tetapi ternyata biro jodoh tersebut sama sekali tidak memakai komputer untuk keperluan tersebut.

Andi Hamzah mengklasifikasikan kejahatan komputer berdasarkan tugas-tugas yang dibebankan dengan sifat kecurangan dibidang komputer, yaitu:<sup>38</sup>

a. Kejahatan terhadap sistem komputer:

- 1) Pada masukan (input), dengan penghapusan, penambahan bahan-bahan masukan dan sebagainya.
- 2) Pada pengolahan data, dengan perubahan, pengrusakkan dan sebagainya.
- 3) Pada program komputer, dengan pencurian dan penjualan program, pengrusakan program, memasukan instruksi yang bersifat curang dan sebagainya.
- 4) Pada pengeluaran (output), dengan pemalsuan dan sebagainya.

---

<sup>38</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.* Halaman 49 - 50.

b. Kejahatan terhadap peralatan komputer.

Perbuatan yang dapat dimasukkan di sini misalnya, kecurangan pada dana pembelian peralatan komputer dan sebagainya, disamping kecurangan yang dilakukan dengan merusak peralatan komputer (*hardware*) dengan tujuan menghancurkan prestasi dan reputasi pihak lawan.

Dari beberapa pandangan mengenai klasifikasi kejahatan/penyalahgunaan komputer yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata kejahatan komputer dapat dilihat dari banyak segi. Ternyata antara klasifikasi yang satu dengan yang lainnya terdapat kesamaan dalam beberapa hal, oleh karena itu untuk memudahkan klasifikasi kejahatan komputer maka beberapa klasifikasi di atas dapat dirangkum sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
- b. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau software komputer.
- c. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- d. Tindakan-tindakan mengganggu operasi komputer.
- e. Tindakan merusak peralatan-peralatan komputer atau peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana-sarana penunjangnya.

---

<sup>39</sup>J. Sudama Sastraandjaja, *Op.Cit.*, Halaman 17.

Nampak bahwa klasifikasi atau kategorisasi penyalahgunaan komputer cenderung bersifat luas, sehingga dalam "*The International Handbook on Computer Crime*" yang diproduksi pada tahun 1986 menganjurkan untuk membuat kategorisasi penyalahgunaan atau kejahatan komputer sebagai berikut:

"A. *Computer-related Economic Crimes*

1. Fraud by Computer Manipulation
2. Computer Espionage and Software Piracy
3. Computer Sabotage
4. Theft of Services
5. Unauthorized Access to DP Systems and 'Hacking'
6. The Computer as a Tool for traditional Business Offences

B. *Computer-related Infringements of Privacy*

1. Use of Incorrect Data
2. Illegal Collection and Storage of Correct Data
3. Illegal Disclosure and Misuse of data
4. Infringements of Formalities of Privacy Laws

C. *Further Abuses*

1. Offences Against State and Political Interests
2. The Extension to Offences Against Personal Integrity"<sup>40</sup>

Dari klasifikasi atau kategorisasi tersebut nampak bahwa sebagian besar dari penyalahgunaan komputer sebenarnya merupakan perbuatan atau kejahatan biasa dengan melibatkan peranan komputer, baik sebagai sarana atau alat maupun sebagai objek, misalnya pencurian dengan komputer, sabotase terhadap komputer, kegiatan mata-mata dengan memanfaatkan teknologi komputer dan lain sebagainya. Hanya sebagian kecil dari perbuatan atau kejahatan itu yang benar-benar bersifat khas sebagai kejahatan komputer, misalnya '*hacking*'.

---

<sup>40</sup>The Hon. Adrian Roden G.C., *Computer Crime and The Law*, dalam *Criminal Law Journal*, t.p., t.k., 1991. Halaman 399.



Berkaitan dengan hal tersebut perlu dikemukakan suatu kesimpulan dari John K. Taber dalam "*A Survey of Computer Crime Studies*" yang dimuat dalam *Computer/Law Journal* Vol. II No. 2, 1980, bahwa ada:<sup>41</sup>

- a. Kejahatan-kejahatan terkenal yang dianggap kejahatan-kejahatan komputer sebetulnya bukanlah merupakan kejahatan-kejahatan komputer.
- b. Kejahatan-kejahatan komputer yang diberitakan oleh media massa yang sebetulnya tidak pernah terjadi.
- c. Beberapa kejahatan komputer yang hanya merupakan karangan fiktif yang sebenarnya menggambarkan kemungkinan dilakukan kejahatan komputer dengan modus operandi tertentu.

Dengan melihat pada kenyataan sulitnya merumuskan definisi dan menklasifikasikan atau membuat kategorisasi penyalahgunaan komputer secara tepat, untuh, uniform, dan mampu mengakomodasi perkembangan penyalahgunaan komputer<sup>42</sup>, maka muncul pertanyaan: perlukah dalam merencanakan kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan komputer harus diawali dengan kesepatan dalam menentukan definisi dan klasifikasi mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan komputer?

---

<sup>41</sup>J. Sudama Sastraandjaja, *Op.Cit.* Halaman 14.

<sup>42</sup>Bahkan di negara-negara maju dan tempat asal mula dikembangkan teknologi komputer-pun hingga saat ini masih kesulitan untuk merumuskan definisi dari penyalahgunaan komputer, seperti yang dikemukakan oleh C.D. Chen : "*The first and most basic difficulty with computer crime is the lack of consensus as to what constitutes a computer crime. Judges, lawyers, legislators, and experts in the computer field, have struggled, without success, to come up with a definition that adequately describes computer crime*". Lihat: Christopher D. Chen, *Computer Crime and The Computer Fraud and Abuse Act of 1986*, dalam *Computer/Law Journal*, Vol. X, t.p., t.k. 1990. Halaman 72.

Dalam hal ini kebanyakan pendapat menyatakan perlu diadakan definisi dan kategorisasi mengenai penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer, seperti yang dikemukakan oleh Ina M. Samadikun sebagai berikut:

*"Definisi mengenai apa yang dimaksud kejahatan dengan sarana komputer seyogyanya ada uniformitasnya, dan diusahakan agar mengakomodir jenis komputer canggih yang bakal diproduksi di kemudian hari, sehingga ketentuannya dapat luwes dalam penerapannya"*<sup>43</sup>

Sementara itu hasil sidang kelompok II tentang kejahatan komputer dalam Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, dalam salah satu usulannya menyatakan demikian.

*"Mengadakan kategorisasi dan definisi agar terdapat keseragaman yang dimasukkan ke dalam Ketentuan Umum Konsep Rancangan Undang-undang termaksud, dengan mempelajari/memperbandingkan kasus-kasus yang terjadi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain, paling tidak di negara-negara ASEAN"*<sup>44</sup>

Sedangkan penulis berpendapat perlu tidaknya perumusan definisi berkaitan langsung dengan tujuan kebijakan hukum pidana itu sendiri. Oleh sebab itu hal ini akan dibahas secara lebih lanjut pada bagian analisis.

---

<sup>43</sup>Ina M. Samadikun Hardjodarsono, *Kejahatan Dengan Sarana Komputer*, Sumbangan Pikiran dalam Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Depkeh. RI., Jakarta, 18 - 19 Januari 1988, Halaman 9.

<sup>44</sup>Laporan Hasil Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1988, Halaman 15.

## 2. Permasalahan Mendasar Yang Berkaitan Dengan Karakteristik Teknologi Komputer.

Permasalahan besar yang dihadapi oleh para ahli hukum (meliputi aparat penegak hukum, akademisi hukum dan pembuat undang-undang) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer terkait erat dengan karakteristik yang khas dari teknologi komputer beserta sarana penunjangnya yang sangat berbeda dengan sarana tradisional/konvensional. Segala sesuatu yang telah tersentuh oleh komputerisasi sangat berbeda ketika dilakukan secara manual, baik dari segi cara, bahan, hasil beserta segala konsekuensinya.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan yang sangat mendasar antara proses manual dengan proses komputerisasi maka berikut ini akan disajikan penjelasan dalam bentuk bagan:

MANUAL	COMPUTERIZED
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data tertulis/tercetak dalam kertas sehingga dapat dilihat secara langsung dengan mata</li> <li>2. Data tidak begitu peka, setiap perubahan akan mudah terlihat (setidaknya akan meninggalkan bekas). Dalam surat atau dokumen resmi, setiap perubahan selalu ada paraf atau tanda validasi dari pihak yang berwenang.</li> <li>3. Data penting (yang tertulis/tercetak di kertas) biasanya disimpan dalam sebuah tempat penyimpanan yang dianggap paling aman yaitu lemari besi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data tersimpan dalam media penyimpanan elektronik seperti <i>diskette</i>, <i>floppy disk</i> <i>pita magnetic</i> dll. sehingga tidak dapat dilihat langsung dengan mata.</li> <li>2. Data menjadi sangat peka dan sensitif terhadap perubahan. Dengan suatu perintah atau instruksi tertentu data dapat dirubah tanpa meninggalkan bekas. Dalam data resmi tidak ada paraf atau tanda validasi.</li> <li>3. Data penting disimpan dalam <i>disk</i> atau dalam peralatan komputer.</li> </ol>

4. Akses dilakukan dengan membuka lemari besi secara manual, yaitu dengan kunci dan atau dengan memutar nomor-nomor kombinasi yang tepat.	4. Akses dilakukan dengan <i>key-ing in user ID</i> dan dengan <i>password</i> yang tepat pada terminal.
5. Pencarian data dilakukan secara manual, yaitu dengan melihat daftar indeks atau daftar katalog lalu dicari dengan membuka/membongkar arsip atau berkas.	5. Pencarian data dilakukan secara elektronis yaitu dengan menekan tuts-tuts komputer (memasukkan kode-kode tertentu), data yang diperlukan langsung muncul pada <i>screen</i> .
6. Perubahan-perubahan data harus sesuai dengan prosedur manual.	6. Perubahan-perubahan data harus sesuai dengan prosedur komputer (melalui <i>computer program and computer system</i> ).
7. Pembayaran dilakukan dengan uang, cek, giro, bilyet atau media transaksi lainnya yang dilakukan secara nyata.	7. Pembayaran dilakukan secara elektronis, melalui pulsa-magnetis, sehingga program, data atau informasi yang dihasilkan oleh komputer memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.
8. <i>Privacy</i> seseorang dibatasi oleh lingkungan fisik seperti badan, rumah, pekarangan, jalan dan lain sebagainya.	8. <i>Privacy</i> seseorang dibatasi oleh lingkungan non-fisik seperti <i>computer network, system, cyberspace</i> dll.

Dari sekilas gambaran tersebut di atas, nampak bahwa persoalan dasarnya adalah perubahan dari hal-hal yang bersifat riil/materiel/*tangible* pada proses manual menjadi sesuatu yang bersifat unriil/immateriel/*intangible* pada proses komputerisasi. Hal ini disebabkan karena objek yang semula secara fisik dapat dilihat atau diraba kini telah digantikan dengan denyut elektronis (*electronic impulses*).

Karakteristik yang khas atau unik yang berkaitan dengan teknologi komputer tersebut pada kenyataannya menjadi persoalan yang sangat serius terhadap masalah penanganannya sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat khusus.

### 3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Komputer Yang Dikenal Dalam Literatur.

Berdasarkan karakteristik yang unik atau khas dari teknologi komputer sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, muncul bentuk-bentuk perbuatan baru yang dilakukan dengan teknik-teknik modern yang tentu saja berbeda dengan perbuatan yang dilakukan dengan cara tradisional/konvensional.

Perbuatan baru dengan memanfaatkan kecanggihan dari teknologi komputer secara menyimpang, tidak sah dan dapat merugikan tersebut disebut sebagai penyalahgunaan komputer. Dalam literatur (kajian akademis) setidaknya dikenal beberapa bentuk dari penyalahgunaan komputer yaitu:<sup>45</sup>

#### a. Joycomputing.

Istilah *Joycomputing* ini merupakan pendapat dari N. Keyzer dalam ceramahnya tentang Hukum Pidana Belanda dan Penyalahgunaan Komputer, di BPHN Jakarta. Maksud Joy computing adalah seseorang yang menggunakan komputer secara tidak sah/tanpa izin, dan mempergunakannya melampaui wewenang yang diberikan.

(Istilah *joycomputing* mengingatkan orang kepada istilah "*Joyriding*" - memakai mobil orang lain tanpa izin untuk bersenang-senang setelah itu mobil tersebut dikembalikan lagi -pen.)

---

<sup>45</sup>Sumber utama: Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Halaman 36 - 48, dilengkapi dengan beberapa literatur pembandingan seperti: Eddy Djunaedi Karna Sudirdja, *Op.Cit.*, Halaman 58; Jusuf Randy, Edi Noer Sasongko, Gayatri Kusumawardhani, *Proteksi Terhadap Kriminalitas Dalam Bidang Komputer*, LPKIA, Jakarta, 1985, Halaman 23; *Tempo*, Nomor 30 Tahun XVII, 26 September 1987, Halaman 39 dan *New England Law Review*, Volume 21:4, 1985-1986, Halaman 763.

Jadi yang dimaksudkan disini adalah perbuatan seseorang dengan memanfaatkan waktu penggunaan komputer (mencuri waktu penggunaan atau pelayanan komputer) secara tidak sah untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya pada saat dinas<sup>46</sup>.

Misalnya, seorang pegawai suatu perusahaan tanpa izin dari atasannya telah mempergunakan komputer (yang menjadi salah satu tugasnya) dengan tujuan memprogram permasalahan untuk kepentingan pribadi di luar tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh atasan/pimpinannya.

#### b. Hacking.

Ini juga merupakan istilah dari Nico Keyzer dalam ceramahnya di BPHN Jakarta.

*Hacking* adalah suatu perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa izin/secara melawan hukum, dari pemilik sah jaringan komputer tersebut<sup>47</sup>.

Perkembangan teknologi komputer seiring dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi hingga akhirnya terjadi perpaduan antara kedua bidang teknologi tersebut.

Perkembangan pemakaian peralatan komputer pada setiap aspek kehidupan masyarakat membawa pengaruh terhadap

---

<sup>46</sup>Dalam beberapa literatur perbuatan ini dikenal dengan istilah "theft of computer time and services", lihat: R.A. Brown, *Computer-Related Crime Under Commonwealth Law, and the draft Federal Criminal Code*, dalam: *Criminal Law Journal*, University of Sydney, Sydney, 1986, Halaman 378.

<sup>47</sup>Dalam beberapa literatur perbuatan ini dikenal dengan istilah "Computer Trespass", seperti misalnya dalam Pasal 9A (baru) *Victoria Crimes Act* ditentukan bahwa: *Computer trespass: ...access to, or enter, a computer system or part of computer system without lawful authority to do so....*

pembangunan. Pusat Pengelolaan Data (CPU) yang bersifat umum, yang akan melayani pemakaian komputer rumah tangga dan atau komputer pada perusahaan/instansi tertentu melalui suatu terminal sistem.

Dalam suatu sistem jaringan komputer (*computer network system*) terdapat suatu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam suatu sistem komunikasi elektronis. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut sebagai "LAN" (*Local Area Network*). Dgedung lain ada lagi LAN. Jika beberapa LAN ini digabung atau dirangkai menjadi satu akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut sebagai "WAN" (*Wide Area Network*). Beberapa WAN ini dapat dirangkai lagi menjadi WAN yang lebih besar dan banyak dan bukan saja berhubungan antar gedung tetapi sudah menjadi antar kota antar provinsi bahkan antar negara, yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah *Internet*<sup>48</sup>.

Rangkaian-rangkaian komputer tersebut tidak sekedar dirangkai tetapi dalam setiap rangkaian pada ujungnya ada yang disebut sebagai "server" (bank data). Oleh sebab itu rangkaian atau jaringan komputer tersebut kebanyakan bersifat eksklusif (tertutup), sekalipun ada juga yang bersifat umum (terbuka) seperti halnya dengan internet yang kita kenal dan sedang *ngetrend* pada saat ini. Baik yang bersifat eksklusif maupun yang bersifat terbuka tentunya tidak begitu saja orang bisa masuk ke

---

<sup>48</sup> Meganet, "Mengapa Harus Melalui Provider?", Jawa Pos, 24 September 1996, Halaman 15.

suatu jaringan komputer, terutama pada jaringan-jaringan komputer yang bersifat eksklusif karena di dalamnya banyak menyangkut data atau informasi yang bersifat rahasia. Pendeknya jaringan komputer hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang secara sah mendapat ijin untuk mengakses, apakah ia sebagai anggota, peserta, atau pihak lain yang secara sah memperoleh dispensasi dari pemilik jaringan tersebut. Dalam internet yang bersifat terbuka "pintu masuk" tersebut disediakan oleh yang dinamakan "*provider*. Provider inilah yang mendaftarkan peserta dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat masuk ke salah satu ruang di jaringan internet. Jika ada seorang asing hendak masuk ke sistem jaringan komputer tersebut tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik terminal komputer terdahulu ataupun pemilik/penanggung jawab sistem jaringan komputer, maka perbuatannya itu dinamakan Hacking.

#### c. The Trojan Horse.

Istilah *The Trojan Horse* diambil dari pendapat Yusuf Randy, dalam bukunya "Proteksi terhadap Kriminalitas dalam bidang komputer."<sup>49</sup>

*The Trojan Horse* (istilah umum yang dipakai oleh N. Keyzer: Manipulasi data atau program) adalah suatu prosedur menambah, mengurangi atau mengubah data atau

---

<sup>49</sup>Sebenarnya "*The Trojan Horse*" telah menjadi istilah umum. Dalam berapa literatur di negara-negara anglosaxon-pun telah banyak yang mempergunakan istilah tersebut. Lihat: Edward F. Patch, *Addressing Computer Crime in Massachusetts: The Problems With Comprehensive New Criminal Statutes - The Advantages to a Multifaceted Approach*, dalam: *New England Law Review*, Volume 21, t.p., t.k., 1985-1986. Halaman 763.



instruksi pada sebuah program, sehingga program tersebut selain menjalankan tugas yang sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah, juga membuat data atau instruksi pada sebuah program menjadi tidak terjangkau (menghilangkan data atau instruksi pada sebuah program dengan tujuan untuk kepentingan pribadi/kelompok).

Sebagai contoh: programmer suatu Bank telah mengubah program sehingga perhitungan bunga nasabah Bank tersebut akan dikurangi beberapa sen untuk dimasukkan ke dalam rekening bank miliknya (programmer tersebut), para korban biasanya tidak menyadari kecurangan yang dilakukan programmer tersebut, biasanya para nasabah selalu kesulitan dalam menghitung bunga uangnya, apalagi hasil perhitungannya selisih beberapa sen saja, mereka biasanya tidak peduli<sup>50</sup>.

#### d. Data Leakage.

Ini juga merupakan istilah dari Yusuf Randy dalam bukunya "Proteksi terhadap Kriminalitas dalam bidang Komputer"

*Data Leakage* (Kebocoran Data) adalah suatu pembocoran data rahasia yang dilakukan dengan cara menulis data-data rahasia tersebut ke dalam kode-kode tertentu sehingga data tersebut bisa dibawa keluar tanpa diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab.

---

<sup>50</sup>Dalam literatur lain perbuatan ini dikenal dengan istilah "Salami" yaitu: *the slicing off of a little money from each of many accounts*. Lihat: *Ibid*.

Hal ini dapat terjadi misalnya kebocoran tentang data rahasia negara, kebocoran tentang rahasia perusahaan dan lain sebagainya. Masalah kebocoran data ini dapat pula menyangkut pihak-pihak (orang pribadi) yang telah dipercaya penuh atau telah diberi kepercayaan penuh oleh pihak pemakai jasa orang tersebut untuk menyimpan data atau keterangan yang bersifat rahasia serta diwajibkan untuk mengamankan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang dimaksud disini adalah profesi atau jabatan seseorang (dokter, advokat, notaris, phsykolog, dan sebagainya).

e. Data Diddling.

Istilah inipun merupakan pendapat dari Yusuf Randy dalam bukunya "Proteksi terhadap Kriminalitas dalam bidang komputer".

Data Diddling maksudnya adalah suatu perbuatan yang mengubah data valid/sah dengan cara yang tidak sah, yaitu dengan mengubah input data atau output data.

Yang dimaksudkan dengan mengubah data di sini adalah perbuatan sedemikian rupa yang mengakibatkan isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga data tersebut menjadi lain dari yang asli/valid/sah. Dengan demikian tidak senantiasa perlu bahwa data itu diganti dengan yang lain, tapi dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari data itu. Misal: seorang pegawai *computer operation* pada suatu universitas membantu seorang mahasiswa di situ karena dia adalah saudaranya, agar mahasiswa tersebut mencapai prestasi tertentu. Adapun caranya adalah dengan merubah

prestasi akademis yang direkam dalam komputer universitas tersebut. Ia telah menaikkan nilai-nilai mahasiswa tersebut atau menambah kredit (SKS) dari yang sebenarnya atau mengubah pernyataan "tidak lulus" menjadi pernyataan sebaliknya (lulus).

**f. Penyia-nyiaan data komputer.**

Istilah penyia-nyiaan data komputer merupakan istilah umum dari Nico Keyzer.

Yang dimaksud dengan penyia-nyiaan data komputer adalah suatu perbuatan membuat data atau program komputer tidak dapat menjalankan fungsinya lagi sehingga pekerjaan-pekerjaan yang melalui proses komputer tidak dapat dilaksanakan, yaitu dengan cara merusak/menghancurkan media disket atau media penyimpanan sejenis lainnya.

Perusakan atau penghancuran media tersebut dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik (dengan memanfaatkan teknologi komputer pula) dengan tujuan agar data/program komputer tidak berfungsi lagi. Yang dilakukan secara fisik misalnya dengan membakar, memotong, mengolesi dengan zat kimia atau membuang media disket yang dimaksud hingga menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi atau tidak dapat menjalankan fungsinya lagi. Sedang yang dilakukan secara non fisik misalnya :

1) Dengan menyisipkan sebuah "*logic bomb*".

Ini adalah program yang sengaja dibuat untuk melakukan tindakan yang tidak sah sewaktu-waktu (pada saat-saat tertentu) apabila dikehendaki oleh pelakunya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Jusuf Randy, Edi Noersasongko, Gayatri Kusumawardani, *Proteksi Terhadap Kriminalitas Dalam Bidang Komputer*, Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA), Jakarta, 1985. Halaman 23.

Misalnya seorang programmer sebuah perusahaan dengan tujuan agar perusahaan tersebut selalu tergantung padanya, telah memasukkan/menyisipkan sebuah *logic bomb* kedalam suatu sistem. Apabila nama dari programmer tersebut dihapus dari file personil atau diganti dengan nama lainnya, maka seluruh file akan musnah atau rusak<sup>52</sup>.

2) Dengan memasukkan "*Virus*"

Ini merupakan "penyakit baru" di dunia komputer. Program virus merupakan program pendek yang bertingkah laku mirip virus penyakit pada tubuh manusia, yang mana bila program ini telah menyusup pada suatu sistem komputer, apabila dibiarkan, maka program ini akan merekam (mengkopikan) dirinya hingga tersebar pada seluruh program. Pada waktu yang ditentukan oleh programmer, virus tersebut dapat keluar dari persembunyiannya secara serentak dan membuat data yang ter-"infeksi" tersebut menjadi tidak terbaca (rusak) atau melakukan tindakan lain sesuai dengan keinginan si perancang virus.<sup>53</sup>

Cara-cara melakukan kejahatan komputer yang telah diuraikan di atas dipastikan akan terus berkembang atau bertambah jenisnya/bentuknya lagi seiring dengan perkembangan dunia perkomputeran. Misalnya saja berkaitan dengan perkembangan internet akhir-akhir ini mengakibatkan munculnya bentuk penyalahgunaan komputer yang baru yang dikenal dengan istilah "*cybersex*" dan "*cyberagripro*" yaitu

---

<sup>52</sup>Dalam literatur lain perbuatan ini disebut dengan istilah "*Time Bomb*", yaitu: *programmed instructions to, when certain conditions occur, damage or destroy the computer system*. Lihat: Edward F. Patch, *Loc.Cit.*

<sup>53</sup>"Kuda Troya di NASA", *Tempo*, Nomor 30 Tahun XVII 26 September 1987, Halaman 39.

perbuatan menyebarluasan berbagai bentuk sarana pornografi (gambar, film, teks dll. yang berhubungan dengan pornografi) dan perbuatan menyebarluasan agregasi dan provokasi politik yang isinya mengandung ungkapan rasa kebencian atau rasa permusuhan atau menyerang integritas suatu negara yang berdaulat atau terhadap suatu pemerintahan yang sah<sup>54</sup>.

Dari bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer tersebut nampak jelas bahwa penyalahgunaan komputer tidak hanya terbatas pada perbuatan yang mengarah pada harta benda yang bernilai ekonomis saja (*property* atau *article*), namun juga menyangkut perbuatan yang merusak atau membahayakan nilai-nilai etika, moralitas dan perbuatan yang bermuatan politis yang membahayakan pertahanan dan keamanan serta integritas suatu negara atau pemerintahan yang sah. Atau dengan kata lain penyalahgunaan komputer dapat menimbulkan kerugian secara materiel maupun immateriel.

Dalam praktek kejahatan komputer yang sering terjadi, cara-cara tersebut berkembang dengan modus operandi tertentu, yaitu misalnya dengan menerapkan satu cara atau gabungan dari beberapa cara tersebut pada suatu prosedur tertentu. Hal ini tentu saja untuk menyesuaikan dengan kondisi sistem komputer tertentu (yang dituju), tujuan/-maksud yang diharapkan maupun faktor-faktor lainnya baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Kasus pembobolan BNI 1946 di New York pada tahun 1986 seperti yang telah penulis uraikan di muka adalah contoh dari penerapan gabungan antara teknik *Hacking* dan *Data Diddling*.

---

<sup>54</sup>Baca: *Jawa Pos*, 5 April 1995, Halaman 1 dan 20.

#### 4. Perkembangan Penyalahgunaan Komputer.

Masyarakat sekarang ini berada dalam tahap peralihan dari masyarakat industri menuju ke masyarakat informasi<sup>55</sup>. Kebutuhan akan informasi semakin meningkat dan teknologi komputer dapat dipakai sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi ini. Lalu berkembanglah teknologi komputer dari masa ke masa.

Hampir semua pengamat kriminal sependapat bahwa kriminalitas berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa perkembangan penyalahgunaan komputer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi komputer itu sendiri. Oleh sebab itu sebelum menguraikan mengenai gambaran perkembangan penyalahgunaan komputer, berikut ini penulis mencoba memberikan gambaran secara singkat mengenai perkembangan teknologi komputer.

Adapun sejarah singkat perkembangan komputer adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

1933, Charles Babbage, Proffessor Matematics Cambrige University England, mendesain *the analytical machine, an prototype computer*.

1937, Prof.Howard Aiken dari Havard University mendesain "*an automatic calculating machine*". Proyek selesai 1944.

<sup>55</sup> Sunaryati Hartono dengan melengkapi pendapat Alvin tovlar, membagi masyarakat ke dalam empat tahap/gelombang yaitu: Masyarakat Prasejarah yang mengunggulkan kekuatan fisik, Masyarakat Agraris yang mengunggulkan luas lahan atau tanah, Masyarakat Industri yang mengunggulkan besarnya modal, kekuatan buruh dan kemampuan manajemen, dan Masyarakat Informasi atau Masyarakat Pascaindustri yang mengunggulkan kecepatan perolehan dan kevalidan informasi.

<sup>56</sup> Ilustrasi ini disarikan dari sumber-sumber: Fred Ameln, *Kriminalitas Di-Bidang Komputer Dilihat dari Segi Hukum*, t.p., t.k., t.t., Halaman 6 - 7 dan J. Sudama Sastraandjaja, *Op.Cit.*, Halaman 4 - 8

1939, Team J. Presper Eckert Cs. mengkonstruksi "*the first electrionic digital computer*" di Pennsylvania University Proyek selesai pada tahun 1946.

1946, Team John Van Neumann, seorang jenius matematika dalam suatu makalah mensarankan pembuatan komputer yang mempergunakan "*binary number system*" dan "*computer instruction*" dan manipulasi data yang kemudian disimpulkan dalam komputer. Ini adalah suatu bagian dasar dari suatu disain komputer dihari kemudiannya.

1949, EDVAC komputer di Cambridge University, yang merupakan "*the first stored program electronic computer*".

1954, UNIVAC I komputer yang pertama yang khusus untuk pengolahan data dan penyimpanan data dalam organisasi-organisasi bisnis.

1959 Introduksi dari komputer generasi kedua. Pada generasi ini selain untuk aplikasi-aplikasi ilmiah di universitas-universitas, komputer mulai dipakai pula untuk aplikasi-aplikasi komersial atau umum, sehingga badan-badan pemerintahan dan perusahaan-perusahaan mulai memakainya untuk menunjang kegiatan sehari-hari, meskipun masih terbatas pada bidang-bidang tertentu karena pada saat itu komputer hanya mampu melakukan satu atau dua kegiatan processing saja. Saat itu komputer hanya dipakai dalam suatu ruangan komputer, penggunaan komputer dari jarak jauh melalui terminal masih langka. Dengan demikian pemakai komputer dapat dilihat dan dikontrol, hal ini mempersulit terjadinya penyelewengan di bidang komputer.

1964, Introduksi dari komputer generasi ketiga oleh IBM. (Sistem 360). Pemakaian komputer sudah mulai meluas,

mulailah pekerjaan-pekerjaan yang dahulunya manual dialihkan pada komputer, sedangkan data yang biasanya ditulis/disimpan dalam bentuk digital yang tidak kelihatan oleh mata yaitu pada media seperti *magnetic tape* atau *floppy disk*, sehingga suatu badan atau perusahaan makin tergantung pada komputer dan timbullah masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan data dan program komputer serta pengoperasian komputer. Selain itu pengawasan pemakaian komputer mulai sulit dilakukan dan timbulah kejahatan-kejahatan yang menyangkut komputer.

Perkembangan teknologi komputer berjalan terus dengan hadirnya komputer generasi keempat. Kini komputer tersebut mempergunakan "*chip technology*" dan "*large-scale*" sampai "*very large-scale intergrated circuits*" sehingga kemampuan dan kapasitas *processingnya* adalah besar dan sanggup melakukan berbagai macam kegiatan *processing*. Pada generasi ini (sekitar tahun 1970-an) sejalan dengan berkembangnya teknologi telekomunikasi, terjadilah perkawinan antara teknologi komputer (timbul disiplin baru yaitu "*communications*" atau "*telematique*"), Ini membuat teknologi komputer berkembang lebih kompleks lagi dengan dapatnya hubungan suatu komputer dengan komputer-komputer lain dalam suatu jaringan (*network*) yang rumit.

Kini pengoperasian suatu komputer tidak musti dilakukan di terminal yang ada diruang komputer, namun dapat pula dilakukan dari terminal lain yang posisinya ada ditempat lain yang jaraknya beribu-ribu mil. Ini bisa dilakukan dengan mempergunakan lin telepon maupun dengan memanfaatkan satelit. Selain itu suatu komputer dapat melayani



puluhan, bahkan ratusan pemakai dan permasalahannyapun semakin kompleks lagi karena dengan demikian sulit untuk menentukan siapa-siapa yang mempergunakan fasilitas-fasilitas komputer pada suatu ketika. Andaikata suatu saat terjadi penyalahgunaan komputer yang dilakukan dari jarak jauh, maka sulit untuk mengetahui siapa pelakunya.

Akhir-akhir ini telah dikembangkan generasi kelima komputer. Generasi tersebut menekankan pada "*Parallel Processing*" yang memungkinkan komputer melakukan *processing* dari beberapa aplikasi secara paralel bersamaan dan serentak, sehingga daya processingnya lebih cepat daripada generasi-generasi terdahulu. Selain itu juga menekankan pada "*Artificial Intelligence*" atau "AI" yaitu suatu disiplin yang berusaha memogramkan komputer untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya memerlukan pikiran manusia (*intelligence*) tanpa mencoba menduplikasi atau meniru proses berfikir yang secara khas yang dimiliki manusia. Suatu saat nanti dimungkinkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh komputer.

Menyimak kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah perkembangan komputer, yang mengalami perkembangan bukan hanya di bidang teknologinya saja, melainkan juga dalam segi pemanfaatannya juga dalam hal kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau kejahatan di bidang komputer.

Perkembangan komputer yang berkaitan dengan aspek teknologi kiranya sudah cukup jelas diuraikan diatas. Sedangkan perkembangan komputer yang berkaitan dengan

aspek pemanfaatannya, nampak sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang komputer. Pada awalnya komputer hanya dipakai pada universitas-universitas untuk aplikasi-aplikasi ilmiah. Kemudian komputer dipakai oleh badan-badan pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar untuk aplikasi-aplikasi komersial dan umum (manajemen, administrasi, dll), lalu bidang-bidang perbankan dalam rangka peningkatan pelayanan pada nasabah, mulai menerapkan teknologi komputer. Akhir-akhir ini sedang dicoba penerapan teknologi komputer di bidang hukum dan peradilan untuk aplikasi-aplikasi yang bersifat yuridis.

Kenyataan mengatakan bahwa pemanfaatan peralatan komputer selalu berkembang seiring dengan perputaran waktu dan perkembangan kehidupan manusia hingga bisa dikatakan tidak ada celah kosong disetiap bidang yang terelakkan dari program komputerisasi. Bahkan kini pemanfaatan komputer telah menjangkau pada lingkungan yang paling kecil yaitu pada lingkungan rumah tangga.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi akan mempengaruhi pula perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut membawa dampak positif yaitu dengan pemanfaatannya di segala bidang kehidupan manusia namun juga tidak terlepas dari dampak negatifnya yaitu pemanfaatan hasil-hasil teknologi tersebut sebagai sarana yang mengarah kepada perbuatan melanggar hukum.

Kejahatan atau penyalahgunaan komputer merupakan akibat dari dampak negatif dari perkembangan pemanfaatan teknologi komputer. Kenyataan menunjukkan bahwa penyalahgunaan komputer berkembang dari masa ke masa baik bentuk maupun

modus operandinya, seiring dengan perkembangan teknologi di bidang perkomputeran.

Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa kasus kejahatan atau penyalahgunaan komputer yang pernah terjadi di luar negeri, yang kiranya dapat memberikan gambaran sekaligus tentang perkembangan kejahatan di bidang tersebut:

- a. Tahun 1974, 12 mahasiswa dari Brooklyn College New York yang dapat berhubungan dengan pusat komputer sekolah telah berhasil untuk memasukkan data akademis fiktif melalui terminal di kantor registrasi akademis. Mereka memuat 9 (sembilan) perubahan fiktif dalam daftar prestasi akademis (*grade changes*) dari antara mereka sendiri dan dari teman mereka. Bermula dari kecurigaan salah seorang profesor pada hasil akademis dari salah seorang mahasiswa, kemudian dibentuk suatu *Faculty Committee* untuk meneliti data akademis mahasiswa yang telah dikomputerisasi dan dibandingkan dengan daftar data akademis yang dimasukkan oleh para dosen, akhirnya manipulasi data yang dilakukan para mahasiswa tersebut terungkap.<sup>57</sup>
- b. Tahun 1977, dua orang *programmer* yang bekerja pada suatu perusahaan, mendirikan sendiri suatu "*Company*" lain. Kemudian selama 3 tahun mereka berhasil memakai "*computer time*" dari perusahaan dimana mereka bekerja, untuk kepentingan perusahaan semu yang mereka dirikan.<sup>58</sup>
- c. Tahun 1978, Stanley Mark, seorang ahli komputer, telah berhasil mengelabui *Security Pacific National Bank* di

---

<sup>57</sup>Fred Ameln, *Op.Cit.*, Halaman 21.

<sup>58</sup>*Ibid.*, Halaman 15.

Los Angeles dengan sarana komputer, yaitu dengan menguasai *access* pada *data base bank* tersebut, sehingga Stanley Mark dapat mentransfer uang milik nasabah bank tersebut ke rekening pribadinya. Akibatnya bank tersebut menderita kerugian sebesar US\$ 10.200.000,- hanya dalam waktu beberapa menit.<sup>59</sup>

- d. Tahun 1979, dalam kasus *United States v. Gerald*, terdakwa telah bekerja sama dengan seseorang yang mengaku bernama James Bond membawa sejumlah narkotika dari Meksiko ke wilayah Amerika Serikat. Untuk menghindari penyidikan mereka mencoba untuk mengetahui berapa dan siapa nama-nama pejabat narkotika federal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan tercantumnya petugas federal dalam komplotannya. Informasi ini diperoleh dari "orang-orang dalam" yang mengetahui data komputer yang berisi daftar petugas narkotika, dengan cara membuat *copy* atas daftar tersebut lalu dikirimkan pada komplotan tersebut<sup>60</sup>.
- e. Tahun 1981, seorang *robot operator* yang bernama Kendi Urawa yang bekerja pada Kawasaki Heavy Industries Japan yaitu suatu *leading robot maker*, Tewas dibunuh oleh salah satu robot di tempat ia bekerja. Mulanya ia masuk pada suatu tempat robot dimana tempat itu terdapat larangan untuk masuk. Maksud sebenarnya adalah untuk memperbaiki (*adjust*) salah satu instrumen, namun ia lupa *disconnect* dan mematikan hubungan listrik. Akibatnya ketika tanpa sadar menyentuh suatu tombol/knop (*touched*

---

<sup>59</sup>Alexander Pattipeilay, *Di Balik Kecanggihan sebuah Teknologi*, Dalam: *Majalah Komputer dan Elektronika*, No. 5 Tahun III April 1985, Halaman 42.

<sup>60</sup>Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Op.Cit*, Halaman 81.

a control button) sewaktu meng-adjust instrumen tersebut, salah satu robot yang berdekatan dengannya bergerak menghampirinya dan meremuk tubuhnya hingga mati dengan mengerikan. Pada kejadian itu tidak ada seorang operatorpun yang sanggup mengendalikan robot tersebut karena tidak mengetahui cara menghentikan sang "robot pembunuh" itu.<sup>61</sup>

Beberapa ilustrasi kasus di atas memberikan gambaran tentang perkembangan kejahatan komputer sebagai berikut: mulanya yang banyak memanfaatkan komputer adalah universitas-universitas, di sini pula kejahatan komputer mula-mula timbul, kemudian kejahatan komputer mulai menjalar di lingkungan perusahaan dan perbankan tatkala kedua bidang tersebut mulai memanfaatkan jasa teknologi komputer. Bahkan teknologi komputer telah pula dimanfaatkan oleh komplotan penjahat narkoba<sup>62</sup>. Akhirnya kejahatan komputer dapat dilakukan oleh komputer itu sendiri (oleh robot yang dijalankan dengan program komputer) manakala perkembangan teknologi komputer telah sampai pada penerapan *Artificial Intelligence Program*.

Sementara itu semenjak teknologi komputer diperkenalkan, di Indonesia dan kemudian mulai di terapkan di berbagai bidang dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja, bibit-bibit kejahatan komputer mulai bermunculan di Indonesia, meskipun tidak sebanyak yang terjadi di luar

---

<sup>61</sup>Fred Ameln, *Op.Cit.*, Halaman 22.

<sup>62</sup>Baca pula bagaimana bahayanya teknologi komputer jika jatuh di tangan Mafia, Triad atau Yakuza dalam: "Di tangan Triad dan Yakuza, Betapa Bahaya", *Jawa Pos*, 30 Mei 1995. Halaman 1 dan 16.

negeri. Ternyata setelah diamati kejahatan komputer di Indonesia-pun mengalami perkembangan meskipun dengan dimensi yang berbeda dengan perkembangan kejahatan komputer di luar negeri. Hal ini mengingat kejahatan komputer di Indonesia boleh dikatakan masih langka dan belum secanggih yang terjadi di luar negeri.

Untuk sekedar memberikan gambaran tentang perkembangan kejahatan komputer di Indonesia, berikut ini penulis akan mengutarakan beberapa kasus kejahatan komputer yang pernah terjadi di Indonesia (dan wilayah hukum RI di luar negeri)

a. Tahun 1983, Atjen (liauw Joen Tjin) bekerja sama dengan Salip Jamhari (orang dalam), telah berhasil mengelabui Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang jalan Brigjen. Kاتمso Yogyakarta dengan cara mempermainkan catatan komputer bank tersebut. Akibatnya bank tersebut menderita kerugian sebesar hampir satu milyar rupiah.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara apabila Atjen mengambil uang di rekeningnya dengan warkat cek, kartunya langsung dibawa oleh Salip yang bekerja di bagian komputer. Setiap kali kartu Atjen masuk, *developi* (kertas yang merekam isi layar komputer) diangkat, sehingga angka yang ditekan tidak terekam lagi, akibatnya berapapun jumlah yang diambil Atjen tidak akan mengurangi saldo simpanannya, padahal Atjen sudah tak pernah lagi menyetor uang di BRI. Perbuatan Salip dan A Cen tersebut tidak segera terungkap karena jika diadakan pemeriksaan maka neraca yang diperiksa adalah yang tercantum dalam *developi*, jarang pemeriksaan dilakukan juga pada neraca yang tertulis dalam warkat. Dengan

cara operasinya itu Atjen menarik cek kontan dan biro bilyet sampai 44 kali dan jumlah yang diambilnya total mencapai 845 juta rupiah<sup>63</sup>.

- b. Tahun 1986, dari sebuah kamar hotel di New York, dua orang muda yakni Rudy Demy dan Seno Adji berhasil men-transfer uang Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) di Citibank dan Mantrust New York ke beberapa bank di Panama, Hong Kong dan Luksemburg sebesar US \$. 18.700.000,00 atau sekitar 30 milyar rupiah dengan mempergunakan Personal Komputer yang dilengkapi dengan "Modem" (alat yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan komputer lain yang jaraknya berjauhan). *Unauthorized Transfer* Dana Bank dari jarak puluhan kilometer itu dapat terlaksana karena Rudy Demy adalah eks karyawan BNI 1946 cabang Citybank New York, sehingga ia mengetahui *Test key* komputer dan *password release* komputer BNI 1946 New York Agency, lagi pula Rudy Demy dan Seno Adji sangat menguasai pengoperasian komputer<sup>64</sup>.
- c. Tahun 1988, dua orang karyawan PT. Bayer Indonesia, yaitu Rachmat Waluyo yang bekerja sebagai staf *Marketing* Divisi Promosi bekerja sama dengan rekannya, Mudianto yang bekerja dibagian *Accounting* telah memalsu tanda tangan dan manipulasi data keuangan (PO/*Purchase order*) pemasangan iklan obat produksi PT. Bayer dengan mempergunakan komputer. Mereka dengan PO palsu/fiktif bertindak sebagai supplier, seakan-akan telah melakukan pema-

---

<sup>63</sup>"Merampok Bank dengan Mesin Canggih", *Tempo*, Nomor 34 Tahun XVII, 24 Oktober 1987, Halaman 41.

<sup>64</sup>"Men-'Digger' Dana BNI 1946, Rp 30 Milyar", *Tempo*, Nomor 24, Tahun XVII, 24 Oktober 1987, Halaman 34 - 40.

sangan iklan obat-obatan produksi PT. Bayer, sementara itu Mudianto bisa "mengamankan" semua data PO fiktif dan pembayaran jasa pemasangan iklan (untuk tujuh PO fiktif tersebut) dengan kemahirannya menggunakan komputer di tempat ia bekerja. Akibatnya PT. Bayer menderita kerugian untuk keseluruhan mencapai sekitar 197 juta rupiah. Uniknya kejahatan ini bisa berlangsung selama dua tahun.<sup>65</sup>

- d. Tahun 1990, seorang pemilik dan pimpinan Toko *Data Soft Computer* bekerja sama dengan beberapa karyawannya telah melakukan penggandaan program komputer yang disebut: "*Wordstar Profesional Version 5.0*" atau yang biasa disingkat dengan "WS 5.0". Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan beberapa peralatan komputer yang diset sedemikian rupa selanjutnya mengcopy dengan cara memberikan beberapa *commands* tertentu sehingga CPU dapat bekerja secara magnetis mengcopy seluruh program WS 5.0 yang hasilnya sama dengan aslinya<sup>66</sup>.

Terlihat dari beberapa kasus di atas bahwa pada mulanya kejahatan komputer banyak terjadi di lingkungan perbankan. Barangkali ini disebabkan karena di Indonesia lembaga yang sedang menerapkan program komputerisasi secara optimal untuk saat ini kebanyakan adalah lembaga perbankan. Keadaan laju tumbuh dan berkembangnya sistem perekonomian, peredaran uang, lintas pembayaran, dan tuntutan para nasabah untuk memperoleh pelayanan yang memuaskan, seolah telah menuntut bank-bank untuk menerapkan teknologi komputer di

---

<sup>65</sup>"Memalsu Lewat Komputer", *Tempo*, Nomor 6, Tahun XIX, 8 April 1989, Halaman 29.

<sup>66</sup>Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Op.Cit.*, Halaman 127 - 132.



segala bidang. Manakala perusahaan-perusahaan lain mulai banyak menempatkan fasilitas pemakaian komputer, makin banyak pula celah-celah untuk melakukan kejahatan dengan memanfaatkan fasilitas komputer tersebut.

Andi Hamzah menanggapi perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan komputer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"Bahwa kejahatan di bidang komputer itu dewasa ini semakin meningkat seiring dengan kemajuan taraf hidup dan pola berpikir masyarakat yang dibarengi dengan kerasnya persaingan hidup diantara sesama manusia. Dimana penggunaan peralatan komputer di terapkan, disitulah akan timbul bentuk kejahatan baru yang cukup canggih tersebut. Kecanggihannya kadang kala masih dapat diikuti perkembangannya, namun demikian kerap kali kecanggihannya itu terlampaui sehingga untuk mendeteksi se-dini mungkin akan keterlibatan peralatan komputer atas sesuatu delik yang terjadi adalah sangat sulit"<sup>67</sup>

Dari cuplikan beberapa kasus penyalahgunaan komputer yang telah diuraikan di atas nampak bahwa dari tahun ke tahun penyalahgunaan komputer mengalami perkembangan, baik teknik maupun modus operandinya, seiring dengan perkembangan teknologi komputer serta perkembangan masyarakat. Hal ini akan membawa persoalan yang cukup pelik di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Indonesia sekalipun nampak perkembangan penyalahgunaan komputer belum sebanyak dan secanggih yang terjadi di luar negeri, namun perlu pula adanya pemikiran dan tindakan yang bersifat antisipatif untuk menanggulangnya.

Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana yang ditujukan untuk menanggulang penyalahgunaan komputer yang berkembang pesat telah merupakan suatu keharusan yang bersifat mendasak.

---

<sup>67</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Halaman 29.

## 5. Faktor Intelektual dan Peranan "Orang Dalam" dalam Penyalahgunaan Komputer.

Penyalahgunaan komputer biasanya dilakukan dengan teknik tinggi baik menyangkut sarana, cara maupun motifnya. Jelaslah bahwa faktor intelektual bagi pelaku penyalahgunaan komputer sangat penting. Seorang pelaku penyalahgunaan komputer harus menguasai teknologi komputer dalam arti mampu mengoperasikan komputer atau setidaknya mengetahui seluk beluk yang berkaitan dengan proses bekerjanya komputer. Karena pengoperasian komputer menyangkut program, data atau sistem tertentu yang disamping rumit juga seringkali menyangkut suatu kerahasiaan maka biasanya penyalahgunaan komputer disamping memerlukan keahlian tertentu juga seringkali harus melibatkan seorang profesional yang memiliki pekerjaan atau jabatan di bidang komputer. Oleh sebab itu penyalahgunaan komputer erat kaitannya dengan "kejahatan intelektual" atau yang lazim di sebut sebagai "*White-Collar Crime*"<sup>68</sup>.

Munculnya kejahatan komputer tidak terlepas dari peranan pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola komputer (*the man behind the machine*). Bekerjanya komputer itu bagaimanapun juga sangat tergantung pada pihak-pihak di belakang peralatan tersebut (*User/pengguna*)<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup>*White-collar crime* merupakan istilah kriminologis yang pertama kali dilontarkan oleh Edwin H. Sutherland dalam pidatonya di hadapan *American Sociological Society* pada tahun 1939. Menurut Sutherland, *White collar crime* adalah: "a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation". Lihat: Donald J. Newman, *White-Collar Crime: An Overview and analysis*, dalam Gilbert Geis and Robert F. Meier (ed.), *White-Collar Crime: Offenses in Business, Politics, and in Professions*, The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York, 1977, Halaman 53.

<sup>69</sup>Berfungsinya komputer setidaknya ditentukan oleh tiga unsur yang sangat vital yaitu: 1) *Hardware* (perangkat keras) yaitu mesin komputer itu sendiri, seperti CPU, Keyboard, Monitor, Printer, Modem dll.; 2) *Software* (perangkat lunak) yaitu data dan program komputer yang memungkinkan komputer beroperasi; 3) *Brainware* (faktor manusia) yaitu orang-orang yang berada di belakang komputer, yang membuat komputer dapat menjalankan fungsinya. Mereka terdiri dari perancang (pencipta), pembuat (perakit), pengguna (*user*) sampai dengan mereka yang secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan bekerjanya komputer.

Yang dimaksud dengan User dalam suatu computer network antara lain adalah seorang eksekutif yang sering mempergunakan *spread sheet*, seorang sekretaris yang menggunakan program pengolah/pengelola data atau seorang ilmuwan, seorang *data entry operator* pada suatu bank atau seorang teknisi yang menggunakan komputer untuk melakukan pekerjaannya<sup>70</sup>. Jadi yang termasuk user antara lain adalah programmer, system analyst dan operator komputer.

Victor Sitorus mengatakan bahwa pelaku kejahatan dengan menggunakan komputer, tidaklah sendirian, dengan kata lain kejahatan korupsi dengan menggunakan komputer tidak akan terjadi apabila tidak ada kerja sama dengan pihak lain.<sup>71</sup>

Bantuan pihak lain dalam kasus-kasus korupsi yang dimaksud tersebut diatas biasanya adalah "orang dalam" yaitu pejabat/pegawai/karyawan/petugas dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini tidak hanya dijumpai dalam satu atau dua kasus saja. Statistik pihak FBI mencatat bahwa lebih dari 80% dari kasus kejahatan komputer justru dilakukan oleh pegawai yang bekerja di tempat kejadian<sup>72</sup>.

Jusuf Randy dkk. dalam bukunya "Proteksi Terhadap Kriminalitas Dalam Bidang Komputer", mencantumkan perbandingan kejahatan di dalam suatu perusahaan/instansi ditin-

---

<sup>70</sup>Jusuf Randy, *Op.Cit.*, Halaman 5.

<sup>71</sup>*Clipping Hukum dan Peradilan*, Bagian Humas dan Protokol, Biro Umum Mahkamah Agung RI, tanggal 24 Oktober 1989, Halaman 17. Pendapat tersebut diungkapkan pada saat Victor Sitorus diajukan sebagai saksi ahli dari BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) dalam sidang kasus korupsi 1,5 milyar di BDN Bintaro Jaya.

<sup>72</sup>*Ibid.*

jau dari sudut pelakunya sebagai berikut:<sup>73</sup>

- 59% dilakukan oleh orang dalam
- 21% dilakukan kerjasama antara orang dalam dengan orang luar
- 16% dilakukan oleh orang luar
- 4% karena faktor alam

Perbandingan tersebut menunjukkan betapa besarnya peranan "orang dalam" terhadap terjadinya kejahatan komputer atau kejahatan lainnya dalam suatu instansi/perusahaan (80%).

Orang dalam sebagai pelaku kejahatan di tempat ia bekerja tersebut apabila diperinci lebih lanjut, maka perbandingannya adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 26% pelakunya adalah *Clerk/Key punch*
- 17% pelakunya adalah *Programmer* dan *Eksekutif Perusahaan*.
- 14% pelakunya adalah *Operator*
- 10% pelakunya adalah *Manager*
- 7% pelakunya adalah *Buruh* dan *Analyst*
- 2% pelakunya adalah *Designer* dan *Konsultan*

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa semakin vital/-penting/rawan peranan atau kedudukan seseorang di tempat penyelewengan/kejahatan dengan memanfaatkan kedudukannya tersebut<sup>75</sup>.

<sup>73</sup>Jusuf Randy, Edi Noersasongko, Gayatri Kusumawardhani, *Op.Cit.*, Halaman 95.

<sup>74</sup>*Ibid.*, Halaman 96.

<sup>75</sup>Data perbandingan pelaku penyalahgunaan komputer tersebut di atas hanya sebagian dari sekian banyak hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga di beberapa negara. Periksa selengkapnya dalam: Eddy Djunaedi Karnasudirdja *Op.Cit.*, Halaman 26 - 29. Dari sekian banyak hasil penelitian tersebut nampak bahwa hasilnya mendekati data perbandingan yang dikemukakan oleh Jusuf Randy dkk. tersebut di atas, yaitu sebagian besar penyalahgunaan komputer dilakukan oleh "orang dalam" dan dari sekian banyak pelaku "orang dalam" tersebut rata-rata yang menduduki posisi teratas adalah *Operator*, *Clerk* dan *Manager*

Edi Noersasonko menegaskan lagi bahwa setiap kasus kejahatan komputer selalu melibatkan "orang dalam" dari suatu instansi/lembaga yang mengoperasikan komputer tersebut untuk gerak aktifitasnya.<sup>76</sup>

Kejahatan komputer selalu melibatkan orang dalam adalah logis karena sebagaimana telah dikemukakan pada awal bahasan ini bahwa kejahatan komputer menyangkut rahasia-rahasia dari suatu instansi/lembaga dan rahasia-rahasia suatu computer system tertentu. Kunci-kunci untuk membuka rahasia-rahasia itu seperti code-code rahasia (password, test key) hanya boleh diketahui oleh orang yang secara sah diberi kepercayaan untuk memakainya untuk menjalankan tugasnya.

Selanjutnya perlu kiranya disimak kesimpulan yang ditarik oleh Jusuf Randy dari berbagai kasus kejahatan komputer pada perusahaan:<sup>77</sup>

- a. Semakin besar suatu perusahaan, umumnya semakin besar sistem komputer yang digunakan. Hal ini tentu saja akan melibatkan lebih banyak operator atau-user. Dengan demikian ada banyak orang yang dapat "didekati" oleh pihak luar yang bermaksud mencuri rahasia SIMANKOM (Sistem Keamanan Komputer - pen.) suatu perusahaan.

---

<sup>76</sup>"Kejahatan Komputer Selalu Libatkan Orang Dalam", *Suara Merdeka*, 14 Juli 1988, Halaman 4. Edi Noersasonko mengemukakan pendapatnya ini dalam kapasitasnya sebagai Direktur IMKA (Institut Manajemen Komputer dan Akuntansi).

<sup>77</sup>Jusuf Randy, *Op.Cit.* Halaman 5 - 6.

- b. Semakin besar suatu perusahaan umumnya kesadaran para karyawan akan perlunya menjaga perusahaan justru semakin menurun.

Bahaya psikologis ini selain harus ditandingi dengan Sistem Keamanan Komputer yang kuat juga perlu diimbangi dengan perangkat peraturan-peraturan (baik peraturan perundang-undangan, maupun peraturan-peraturan di lingkungan perusahaan yang bersangkutan) yang memadai, terutama yang berkaitan dengan ketentuan pidananya. Hal ini dimaksudkan pula sebagai langkah penanggulangan baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Besarnya peranan "orang dalam" terhadap terjadinya kejahatan perlu pula dipertimbangkan dalam rangka penyusunan konsep-konsep dan langkah-langkah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer pada saat ini maupun di masa mendatang, terutama berkaitan dengan kebijakan penetapan dan penentuan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan komputer.

### C. Sekilas Masalah Asas Legalitas dan Metode Interpretasi

Kebijakan hukum pidana, terutama kebijakan aplikatif, sangat erat dengan sistem hukum yang dipengaruhi oleh tradisi hukum tertentu.

Sekalipun jika diamati secara menyeluruh sistem hukum Indonesia nampak sebagai "*mixed-system*"<sup>78</sup>, namun tak dapat

<sup>78</sup>Rene David dan John E.C. Brierley menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia termasuk sistem gabungan (*mixed system*) yaitu gabungan dari *Civil Law System* (*Romano-Germanic family*) karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, dengan *Muslim and customary law* (hukum Islam dan hukum Adat). Lihat: Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Op.Cit., Halaman 24.

disangkal bahwa pengaruh tradisi hukum *civil law* telah menga-  
kar kuat dalam sistem hukum formal di Indonesia dan nampaknya  
dalam pembangunan (pengembangan) hukum di Indonesia, terutama  
di bidang hukum pidana, sistem hukum yang berkembang di Eropa  
Kontinental masih akan tetap dominan.

Penentuan politik hukum yang cenderung mengarah pada  
tradisi hukum *civil law* tersebut mengandung konsekuensi-kon-  
sekuensi tertentu, yaitu antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara te-  
liti dan lengkap sehingga diharapkan mampu menjangkau se-  
mua permasalahan yang timbul.
2. Asas legalitas ditempatkan sebagai landasan yang bersifat  
fundamental dan dalam pelaksanaannya harus dijunjung  
tinggi tanpa terkecuali.
3. Operasionalisasi peraturan perundang-undangan diupayakan  
seoptimal mungkin untuk menangani berbagai kasus yang  
bervariasi dengan pendekatan penafsiran (interpretasi).

Sebagaimana diketahui bahwa tradisi hukum *civil law*  
menempatkan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang  
paling utama. Ciri-ciri negara yang menganut sistem hukum ini  
nampak dengan kebijakan *kodifikasi* dan *unifikasinya*, dimana  
perundang-undangan biasanya diatur secara cermat, terperinci,  
abstrak dan sistematis (tidak sekedar kumpulan peraturan  
tetapi memuat pula asas-asas hukum). Kegiatan penemuan hukum  
nampak sebagai hakim yang terikat untuk mencari dan menerap-  
kan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang ada

untuk menyelesaikan kasus konkret. Oleh sebab itu kebijakan hukum (pidana), khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aplikatif, sangat terkait erat dengan asas legalitas dan metode penafsiran<sup>79</sup>.

Makna isi dari undang-undang sering tidak jelas susunan kata-katanya atau dapat diartikan lebih dari satu kata. Pembuat undang-undang sengaja merumuskan kata-kata dalam setiap pasalnya sedemikian rupa agar undang-undang tersebut dapat selalu *up to date* dan senantiasa relevan seiring dengan perkembangan jaman, sehingga tentu saja undang-undang tersebut dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang lama.

Dalam prakteknya, sekalipun undang-undang tersebut disusun secermat mungkin, sering kali ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut sulit untuk langsung bisa diterapkan dalam kasus-kasus konkret yang sangat bervariasi bentuknya. Apalagi sebagaimana diketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang jauh lebih pesat dibanding dengan perkembangan di bidang hukumnya, sehingga kadang-kadang terjadi kasus-kasus baru yang nampaknya tidak terjangkau oleh undang-undang yang ada, misalnya saja munculnya kasus-kasus penyalahgunaan komputer akhir-akhir ini.

---

<sup>79</sup>Sejarah dan ciri-ciri civil law system selengkapnya dapat dibaca pada: Aloysius Wisnubroto, *Quo Vadis Tata Hukum Indonesia: Suatu Pemikiran Berdasar Kajian Teori Hukum*, t.p., Semarang, 1996, Halaman 5 - 7; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Halaman 235 - 252; dan H. Kadish Sanford (ed.), *Encyclopedia of Crime and Justice Volume 2*, The Free Press A Division of Macmillan Inc., New York, 1983, Halaman 484 - 512.



Dilain pihak hakim harus dapat menyelesaikan semua kasus/perkara yang diterimanya dengan undang-undang yang ada, sebab kalau tidak demikian maka hakim tersebut akan terkena ketentuan Pasal 22 Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië*, disingkat "AB") yang menyatakan bahwa: "Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara"<sup>80</sup>

Oleh sebab itu, untuk dapat mengatasi hal tersebut hakim harus melakukan interpretasi atau penafsiran hukum terhadap rumusan perundang-undangan yang ada.

Dalam ilmu hukum, dikenal berbagai macam interpretasi yang lazim dipergunakan oleh para hakim, antara lain adalah:<sup>81</sup>

1. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran secara tata bahasa artinya hanya mengingat bunyi kata-kata dalam arti kalimat itu saja. Misalnya dalam suatu ketentuan menyatakan larangan berhenti di daerah bebas parkir bagi "kendaraan", disini kita harus menjabarkan sendiri arti dari kendaraan

---

<sup>80</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (disusun menurut sistem Engelbrecht), PT. Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989, Halaman 117. Rumusan asli Pasal 22 AB: "De regter, die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid of onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van rechtsweigering vervolgd worden". Lihat dalam: *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen, Benevens De Grondwet van De Republiek Indonesië* (d/h Engelbrecht), PT. Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989, Halaman 45.

<sup>81</sup> S. Wiratno, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1979. Halaman 52 - 53.

itu, apakah itu kendaraan bermotor atau kendaraan roda dua atau apakah binatang seperti kuda dapat dimasukkan sebagai kendaraan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.

2. Penafsiran historis (*historiche interpretatie*), yaitu memberikan penafsiran berdasarkan sejarahnya, baik berdasarkan sejarah terjadinya hukumnya maupun berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undangnya. Misalnya ketentuan denda dalam KUHP pada saat ini dikalikan lima belas ini mendekati harga-harga pada waktu KUHP itu dibentuk.
3. Penafsiran sistematika (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*), yaitu penafsiran yang didasarkan pada susunan dan hubungannya dengan bunyi pasal-pasal lain atau penafsiran yang didasarkan sesuai tidaknya dengan sistem hukum itu, misalnya : "hak milik" harus diartikan/-ditafsirkan milik menurut sistem hukum Indonesia (hak milik adalah fungsi sosial).
4. Penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Misalnya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ditujukan untuk memberantas pengacau perekonomian masyarakat, maka orang yang melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat secara sosiologis dapat ditafsirkan sebagai telah melakukan tindak pidana ekonomi karena perbuatannya tersebut dianggap bisa mengacaukan perekonomian masyarakat.
5. Penafsiran Autentik/resmi/sahih (*authentieke interpretatie*), yaitu memberi interpretasi yang pasti seperti yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, seperti misalnya penafsiran terhadap kata-kata yang terda-

pat dalam Titel IX Buku I KUHP yaitu tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang.

6. Penafsiran *extensif/luas*, yaitu memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam ketentuan undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan, misalnya: "aliran listrik" dapat dimasukkan ke dalam pengertian kata "benda".

Kebalikannya adalah *penafsiran restriktif* yaitu penafsiran dengan mempersempit/membatasi kata-kata dalam ketentuan undang-undang.

7. Penafsiran *analogi*. 'Sebetulnya analogi ini sudah tidak termasuk interpretasi, karena analogi sama dengan *qiyas*, yaitu memberi ibarat kepada kata-kata tersebut sesuai dengan azas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya: menyambung "aliran listrik" dianggap sama dengan "mengambil/mencuri" aliran listrik.

Dalam hukum pidana terdapat asas-asas dasar/pokok yang merupakan prinsip yang mencerminkan sifat/ciri utama hukum pidana tersebut secara filsafati yaitu: Asas Legalitas/*legisme (Principle of Legality)* yang dikenal pula dengan istilah: Asas *Nullum Delictum (Nullum Crimen)*, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Anselm von Feuerbach merumuskan asas legalitas yang dirangkum dalam satu kalimat: "*Nullum crimen, nulla poena sine*

*praevia lege*" (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang lebih dahulu)<sup>82</sup>.

Asas legalitas ini dimaksudkan agar terdapat adanya kepastian hukum, agar undang-undang pidana dapat menjamin perlindungan bagi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas oleh pemerintah dan agar suatu undang-undang pidana dapat merupakan suatu *Lex certa* (Undang-undang yang dapat dipercaya)<sup>83</sup>.

Asas legalitas merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia, terbukti dengan tersiratnya asas ini dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan"

Nampaknya asas ini masih akan tetap dipertahankan untuk masa mendatang di Indonesia. Hal ini disimpulkan dengan tetap dicantumkannya asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Konsep Rancangan KUHP (Baru)<sup>84</sup> yang berbunyi: "Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukannya atau tidak dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan".

---

<sup>82</sup>Nico Keijzer, *Asas Legalitas (Legaliteitsbeginsel)* blok I-bagian I, (diktat, diterjemahkan oleh Wonosusanto), t.p., t.k., t.t., Halaman 4.

<sup>83</sup>*Ibid.*, Halaman 3.

<sup>84</sup>Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru)*, Disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993.

Berbeda dengan perumusan asas legalitas di dalam KUHP yang berlaku sekarang, Konsep KUHP (Baru) memperluas perumusan asas legalitas sehingga batas-batas tidak pidana tidak hanya terbatas pada kriteria formal sebagaimana yang secara tegas telah dirumuskan dalam undang-undang, namun juga meliputi kriteria materiel sehingga termasuk pula perbuatan-perbuatan yang menurut "hukum yang hidup dalam masyarakat" (hukum tidak tertulis/hukum adat) dipandang sebagai delik<sup>85</sup>.

Asas legalitas tersebut pada dasarnya mengandung aspek-aspek sebagai berikut:<sup>86</sup>.

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. Tidak ada penerapan undang-undang hukum pidana secara analogis/qiyas.
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
4. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
5. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh Undang-undang.
6. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari keenam aspek asas legalitas tersebut apabila dikaitkan dengan masalah interpretasi, maka yang paling relevan adalah aspek kedua, yaitu aspek yang secara tegas tidak memperkenankan penerapan penafsiran analogi terhadap keten-

---

<sup>85</sup>Perumusan asas legalitas secara materiel tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP (Baru) yang bunyinya: "Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan"

<sup>86</sup>Nico Keijzer, *Op.Cit.*, Halaman 5.

tuan perundang-undangan<sup>87</sup>. Sedangkan cara-cara penafsiran lain-nya pada dasarnya diperkenankan. Namun demikian khusus untuk cara penafsiran extensif masih ada perbedaan pendapat diantara para ahli hukum, ada yang setuju dengan penerapan cara penafsiran extensif seperti halnya cara penafsiran lainnya, ada pula yang tidak setuju dengan cara penafsiran extensif, alasannya antara lain karena sebenarnya penafsiran extensif merupakan "analogi yang terselubung" sehingga juga dikawatirkan akan merusak eksistensi asas legalitas.

Untuk menghindari 'dilemma tersebut satu-satunya jalan yang paling tepat adalah dengan merumuskan undang-undang pidana yang secermat mungkin. Dalam kaitannya dengan munculnya jenis-jenis perbuatan baru yang bersifat merugikan, meresahkan atau mengarah pada tindak kriminal yang muncul akhir-akhir ini seperti misalnya penyalahgunaan komputer yang pada saat belum diatur dalam suatu undang-undang, apabila dengan penerapan pasal-pasal dalam KUHP dianggap akan membahayakan kedudukan asas legalitas karena sering terpaksa harus menerapkan cara penafsiran extensif atau sering kali bahkan harus memakai cara analogi, maka kiranya pemecahan yang paling ideal adalah dengan segera menetapkan kebijakan hukum pidana yang mengarah pada upaya pembaharuan perundang-undangan hukum pidana.

---

<sup>87</sup> Dalam Konsep RUU KUHP (Baru) hal ini lebih ditegaskan lagi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Untuk menetapkan adanya tindak pidana tidak dapat digunakan penafsiran undang-undang secara analogi"

D. Konsep Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia dan Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan Dalam Rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer Dengan Sarana Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia<sup>88</sup>.

Dengan demikian maka penentuan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer yang ditempuh melalui pembaharuan hukum pidana agar mampu menjangkau delik komputer di masa yang akan datang, harus dipersiapkan secara matang melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

Sebagaimana telah dikemukakan pada awal bab ini bahwa dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana adalah masalah penentuan perbuatan dan sanksi pidana. Oleh sebab itu berikut ini penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam membahas kedua masalah sentral tersebut, berkaitan dengan kompleksitas karakteristik dari penyalahgunaan komputer dan kedua orientasi pendekatan yang harus ditempuh dalam kebijakan hukum pidana.

Bertolak dari pendekatan kebijakan (mencangkup kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum

---

<sup>88</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.*, Halaman 30 - 31.

yang berkaitan secara integral)), maka faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan perbuatan penyalahgunaan komputer apa yang harus dijadikan tindak pidana adalah:

1. Teknologi komputer merupakan aset pembangunan nasional yang sangat besar artinya. Dengan kata lain komputer merupakan salah satu teknologi strategis dalam rangka pembangunan nasional menuju ke kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi era globalisasi. Oleh sebab itu pengaturan delik komputer harus dipertimbangkan secara utuh agar jangan sampai menimbulkan akibat sampingan yang justru dapat menghambat pengembangan teknologi komputer beserta pengaplikasiannya dan perkembangan industri komputer yang ditujukan pada kemajuan bangsa dan negara.
2. Berkaitan dengan butir 1, maka pemilihan dan penetapan perbuatan penyalahgunaan komputer yang akan diatur dan dijadikan delik harus dilakukan secara selektif dan limitatif, yaitu perbuatan penyalahgunaan komputer yang benar-benar tidak dikehendaki, tidak disukai atau dibenci oleh warga masyarakat yaitu perbuatan yang merugikan (materiel atau spiritual) atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Selain itu harus pula dipertimbangkan sejauhmana perbuatan-perbuatan penyalahgunaan komputer tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat.
3. Perlu diperhitungkan apakah biaya yang harus dikeluarkan (*cost*) dalam pembuatan undang-undang yang memuat delik komputer yang sangat rumit dan kompleks, *cost* untuk pengawasan dan penegakan hukum yang memerlukan fasilitas atau sarana teknologi tinggi pula, serta beban yang dipikul oleh korban dan kejahatan, akan seimbang dengan hasilnya



(*benefit*) yaitu situasi tertib hukum yang akan dicapai. Jangan sampai terjadi biaya penuntutan lebih besar dari pada besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan komputer, atau jangan sampai terjadi biaya yang diperlukan untuk penuntutan sangat besar namun pengaruhnya terhadap pencapaian situasi tertib hukum sangat kecil.

4. Selanjutnya perlu pula dipertimbangkan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum di Indonesia dalam menegakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah delik komputer. Dalam hal ini harus diprediksi bagaimana kondisi personil aparat penegak hukum baik secara kuantitas maupun kualitas, misalnya menyangkut tingkat pendidikan, tingkat profesionalisme, pengalamannya serta bagaimana penyebarannya di seluruh Indonesia. Selain itu harus pula ditinjau bagaimana kondisi-kondisi yang menyangkut pelaksanaan tugasnya atau cara kerjanya, misalnya menyangkut birokrasinya, prosedur maupun sistem hukum acaranya serta fasilitas-fasilitas penegakan hukumnya. Kesemuanya itu dikaitkan dengan karakteristik dari penyalahgunaan komputer yang memerlukan pengetahuan, teknik dan dukungan teknologi tinggi untuk dapat mengungkapkannya.
5. Akhirnya perlu pula dikaji akibat sosial dari pengkriminalisasian atau pendekriminalisasian dari penyalahgunaan komputer. Misalnya, bagaimana kemungkinan pengaruh dari kriminalisasi atau dekriminalisasi penyalahgunaan komputer terhadap perilaku atau sikap pelaku pada khususnya atau masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya bertolak dari pendekatan nilai (meliputi nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultu-

ral) maka dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan komputer harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial seperti:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat dan perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya lain yang tak dapat dibenarkan. (Dalam hal ini faktor-faktor yang perlu diperhitungkan berkaitan dari karakteristik yang bersifat khas dari penyalahgunaan komputer adalah:
  - a. Penyalahgunaan komputer menyangkut sesuatu yang sangat peka/sensitif, seperti data, program, sistem dan informasi serta fasilitas-fasilitas lainnya yang dihasilkan oleh komputer. Hal ini menimbulkan berbagai kerawanan terjadinya kejahatan yang mengganggu, merugikan dan membahayakan masyarakat.
  - b. Penyalahgunaan komputer membuka kemungkinan untuk mengeruk hasil dalam jumlah yang sangat besar dengan cara-cara yang "aman". Disamping itu penyalahgunaan komputer dalam hal-hal tertentu dapat pula membahayakan jiwa manusia dan keamanan negara.
2. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum. Dalam hal ini faktor-faktor yang perlu diperhitungkan berkaitan dari karakteristik yang bersifat khas dari penyalahgunaan komputer adalah: penyalahgunaan komputer memerlukan teknik-teknik canggih sehingga biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas tertentu seperti mereka yang memiliki intelektual tinggi, profesi, keahlian atau posisi/kedudukan penting (biasanya penyalahgunaan komputer dilakukan atau melibatkan "orang dalam").

3. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu. Dalam hal ini faktor-faktor yang perlu diperhitungkan berkaitan dari karakteristik yang bersifat khas dari penyalahgunaan komputer adalah: bahwa penyalahgunaan komputer tidak selalu mengarah pada tujuan atau maksud yang bersifat materiil (*property/money*) namun seringkali berorientasi pada tujuan yang bersifat tantangan (*challenge*) atau petualangan (*adventure*) dari para pelakunya. Sekalipun perbuatan tersebut secara materi tidak merugikan namun dilihat dari aspek sosial, kultural dan politis bertentangan dengan nilai etika, moral dan pandangan politik suatu pemerintahan (misalnya dapat menimbulkan perpecahan, rasa kebencian atau permusuhan dll.).

Dari faktor-faktor yang perlu dipertimbangan tersebut nampak bahwa pelaku penyalahgunaan komputer memerlukan perlakuan (dalam arti pembinaan) khusus. Namun apakah untuk perlakuan khusus tersebut memerlukan sanksi yang bersifat khusus pula, hal ini masih perlu pengkajian lebih lanjut yang nantinya akan dibahas pada bagaian analisis.

Dengan demikian disamping perlu adanya pemikiran bentuk dan perumusan perbuatan penyalahgunaan komputer yang ideal, perlu pula diimbangi dengan pemikiran mengenai bentuk dan bobot sanksi pidana yang mampu mengakomodasi perbuatan-perbuatan tersebut. Pada akhirnya penetapan perbuatan dan sanksi dalam pengaturan penyalahgunaan komputer tersebut diharapkan dapat dijadikan salah satu sarana yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan komputer.

### BAB III

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KOMPUTER DI INDONESIA PADA SAAT INI

#### A. Beberapa Sumber Hukum Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Kasus Penyalahgunaan Komputer Pada Saat Ini

Sekalipun pada saat ini di Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus memuat ketentuan mengenai penyalahgunaan komputer, namun aparat penegak hukum, khususnya hakim, dituntut untuk mampu menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang muncul.

Asumsi yang mendasari kebijakan aplikatif ini adalah bahwa penyalahgunaan komputer bukan merupakan delik khusus yang berdiri sendiri sehingga ketentuan-ketentuan hukum pidana positif yang ada dapat diterapkan terhadapnya. Konsep tersebut nampaknya sangat sederhana, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Hal ini disebabkan karena karakteristik penyalahgunaan komputer bersifat khas, sehingga tidak mudah untuk menafsirkan rumusan ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang ada untuk diterapkan terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer tertentu secara tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka dalam kajian berikut ini penulis mencoba untuk menelaah beberapa perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dan beberapa perundang-undangan lainnya yang memuat sanksi pidana dan kemungkinannya untuk diterapkan terhadap bentuk penyalahgunaan komputer tertentu.

## 1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Diantara sumber hukum pidana yang lainnya, KUHP menduduki posisi yang amat penting. Sebagai sumber hukum yang disusun melalui sistem kodifikasi, maka KUHP tidak hanya sekedar kumpulan peraturan hukum pidana saja namun juga memuat asas-asas hukum pidana<sup>1</sup>.

KUHP yang berlaku pada saat ini berasal dari WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië*) yang *nota bene* merupakan peninggalan dari jaman kolonial Hindia Belanda yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Pada mulanya WvS.NI. ini merupakan turunan dari WvS yang berlaku di negeri Belanda sejak tahun 1886 yaitu berdasarkan asas konkordansi (*concordantie beginsel*) dengan berbagai perubahan-perubahan untuk menyesuaikan keadaan di Indonesia (Hindia Belanda) pada saat itu. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, WvS.NI. yang aslinya berbahasa Belanda tersebut diberlakukan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sejak diberlakukannya, KUHP telah mengalami berbagai perubahan maupun penambahan. Perubahan dan penambahan tersebut dilakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan sosial masyarakat. Permasalahan-permasalahan baru tersebut seringkali secara

---

<sup>1</sup> Enschede mengatakan bahwa KUHP mempunyai dua fungsi yaitu disamping sebagai kitab undang-undang juga sebagai ilmu hukum pidana. Lihat: Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1993, Halaman 16. Pendapat ini beliau ambil dari: Gedenboek, *Honderd Jaar Wetboek van Strafrecht*, Guida Quint BV, Arnhem, 1986.

eksplisit maupun implisit belum di atur dalam KUHP, seperti misalnya munculnya kejahatan-kejahatan baru. Keadaan yang demikian ini dapat menimbulkan masalah dalam hal penerapan hukum dan dalam hal kepastian hukum, sehingga dapat pula mempengaruhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum maka perubahan-perubahan tersebut dilakukan dengan undang-undang. Oleh sebab itu undang-undang yang merubah atau menambah KUHP juga merupakan sumber hukum pidana yang penting.

Perubahan atau penambahan KUHP yang dilakukan dengan undang-undang antara lain: Perubahan terhadap jumlah denda disesuaikan dengan perubahan nilai uang yaitu dengan dinaikkan lima belas kali (dengan UU. No. 18/Prp/1960); Pemberatan ancaman pidana untuk Pasal-pasal 359, 360 dan 188 yang dianggap terlalu ringan (dengan UU. No. 1 Tahun 1960); Perubahan tentang penertiban perjudian (UU. No. 7 Tahun 1974); dan Penambahan ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan penerbangan (UU. No. 4 Tahun 1976).

Disamping perubahan atau penambahan KUHP yang dilakukan dengan Undang-undang tersebut, ilmu hukum pidana juga berperan mengembangkan norma-norma yang terdapat dalam rumusan pasal-pasal KUHP melalui putusan lembaga peradilan, misalnya dengan dimasukkannya listrik ke dalam pengertian barang/benda dalam pasal 362 KUHP melalui keputusan Hoge Raad Nederland tahun 1921 (dikenal dengan *electriciteit arrest*).

Bagaimana eksistensi KUHP terhadap salah satu bentuk kejahatan modern pada saat ini yaitu penyalahgunaan komputer? Penyusun KUHP seratus tahun yang lalu tidak pernah

membayangkan bahwa kelak akan muncul jenis kejahatan baru yang dinamakan penyalahgunaan komputer, oleh sebab itu wajar jika tidak ada satu pasalpun dalam KUHP yang mengatur masalah penyalahgunaan komputer. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa ketentuan dalam KUHP samasekali tidak dapat diterapkan terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer.

Dengan berdasarkan asumsi bahwa penyalahgunaan komputer merupakan delik umum yang dilakukan dengan sarana atau terhadap komputer beserta sarana penunjangnya dan dengan pendekatan penafsiran (interpretasi), maka rumusan pasal-pasal KUHP dapat diterapkan terhadap bentuk penyalahgunaan komputer dengan memperhatikan unsur, sifat dan motivasi perbuatannya.

**a. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan pembocoran rahasia.**

Data, dokumen, *file* atau berbagai bentuk informasi lainnya seringkali harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan data atau informasi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau untuk menghindari penyalagunaan data/informasi tersebut untuk tujuan yang merugikan/membahayakan, baik bagi pemilik data, pihak-pihak tertentu atau masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlindungan terhadap kerahasiaan data/-informasi perlu dilakukan dengan menetapkan ancaman pidana bagi pelaku perbuatan pembocoran rahasia.

Mengenai delik pembocoran rahasia ini KUHP telah mengaturnya, yakni Pasal 112 KUHP tentang pembocoran

rahasia negara, Pasal 113 dan 114 KUHP tentang pembocoran rahasia pertahanan dan keamanan negara. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka berikut ini penulis akan mengutip rumusan dari pasal-pasal tersebut:

Pasal 112 KUHP berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat atau benda-benda atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

Pasal 113 KUHP berbunyi:

(1)"Barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan, kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia (negara) terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

(2)"Jika adanya surat-surat atau benda-benda pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencahariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga"

Pasal 114 KUHP berbunyi:

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut dalam Pasal 113 yang tentang menyimpan atau menaruhnya menjadi tugasnya, diketahui oleh umum, mengenai bentuk dan susunannya, untuk seluruhnya dan sebagian atau oleh orang yang tidak wenang mengetahui, ataupun jatuh dalam tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah"

Disamping pasal-pasal yang mengatur tentang pembocoran rahasia negara dan pertahanan keamanan sebagaimana telah dikutip di atas, KUHP juga mengatur tentang pembocoran rahasia yang menyangkut profesi atau jabatan seseorang (Pasal 322 KUHP), pembocoran rahasia perusa-



haan (Pasal 323 KUHP) dan pembocoran rahasia dalam situasi tertentu (Pasal 431 KUHP). Sebelum membahas ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, berikut ini penulis akan mengutip rumusan ketentuan dari pasal-pasal tersebut terlebih dahulu.

Pasal 322 KUHP berbunyi:

- (1)"Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang terdahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah"
- (2)"Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu"

Pasal 323 KUHP berbunyi:

- (1)"Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang olehnya supaya dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah"
- (2)"Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu"

Pasal 431 KUHP berbunyi:

"Seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja dan melawan hukum membuka suatu surat, barang tertutup atau paket yang diserahkan kepada lembaga itu, memeriksa isinya, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun"

Bagaimana jika pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan salah satu bentuk penyalahgunaan komputer yaitu pembocoran data komputer (*data leakage*)?

Semakin luasnya komputerisasi di berbagai bidang akhirnya meliputi pula berbagai aspek pengelolaan dan penyimpanan data atau informasi penting yang harus dijaga kerahasiaannya terhadap pihak-pihak yang tidak berwenang. Surat-surat, berkas, arsip atau dokumen

penting yang jumlahnya sangat banyak menimbulkan permasalahan jika disimpan dan dikelola secara manual. Oleh sebab itu kini teknologi komputer merupakan salah satu sarana yang dapat mengatasi penyimpanan data atau informasi tersebut karena media penyimpanan komputer mampu menyimpan ribuan bahkan jutaan data secara aman dan ringkas. Jika diperlukan sewaktu-waktu tinggal menekan tuts-tuts komputer saja dan dalam sekejap data atau informasi yang diperlukan dapat diperoleh.

Penerapan ketentuan pasal-pasal KUHP sebagaimana telah dikutip di atas kiranya dapat diterapkan pada kasus-kasus pembocoran data komputer yang bersifat rahasia. Hal ini tentu saja tergantung dari jenis kerahasiaan dari data komputer yang dibocorkan, misalnya data komputer yang memuat dokumen penting negara (menyangkut rahasia negara) maka Pasal 112 KUHP dapat diterapkan. Demikian pula jika yang dibocorkan adalah data komputer yang menyangkut rahasia pertahanan dan keamanan negara, maka ketentuan dalam Pasal 113 atau Pasal 114 KUHP kiranya dapat diterapkan.

Karena dalam rumusan pasal-pasal tersebut tidak disebutkan kata "data komputer" atau informasi yang dihasilkan oleh komputer, maka dalam hal ini kebijakan penerapan hukum dilakukan dengan pendekatan interpretasi ekstensif yakni dengan memperluas pengertian "benda-benda" dalam rumusan pasal-pasal tersebut sehingga meliputi pula data komputer. Cara lainnya adalah menafsirkan kata "keterangan-keterangan" dalam rumusan pasal tersebut sehingga meliputi pula informasi yang dihasil-

kan oleh komputer. Disamping itu yang perlu dibuktikan dalam kasus ini adalah bocornya atau sampainya data atau informasi yang dirahasiakan di tangan pihak-pihak yang tidak berwenang.

Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan persaingan yang semakin ketat diantara usaha-usaha profesi maupun perusahaan-perusahaan swasta membuat bidang-bidang ini meningkatkan sistem komputerisasi. Data dari klien atau pasien atau pemakai jasa profesi dan berbagai jenis data perusahaan dapat diproses dengan sarana komputer untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam arti lebih cepat, akurat dan efektif. Berkaitan dengan masalah kerahasiaan maka media penyimpanan komputer menawarkan sistem proteksi yang lebih aman. Namun demikian proteksi hukum juga diperlukan guna menanggulangi pembobolan sistem proteksi data komputer oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jika data komputer yang dibocorkan tersebut berkaitan dengan rahasia profesi, misalnya pengacara, psikolog atau dokter yang membocorkan rahasia klien atau pasiennya yang disimpan dalam media penyimpanan komputer, maka kiranya ketentuan Pasal 322 KUHP dapat diterapkan. Demikian pula jika yang dibocorkan adalah rahasia perusahaan, misalnya seorang karyawan atau mantan karyawan perusahaan swasta membuka *file* perusahaan (misalnya yang berisi tentang sistem manajemen, keadaan keuangan, transaksi-transaksi, atau hasil keputusan intern) dan memberitahukan isinya kepada

pihak yang tidak berwenang mengetahui, maka ketentuan Pasal 323 KUHP dapat diterapkan. Kebetulan sekali pasal-pasal tersebut tidak menentukan bentuk media yang memuat data rahasia<sup>2</sup> sehingga tidak perlu adanya penafsiran tentang data komputer.

Selanjutnya masih ada satu bentuk kasus pembocoran data namun dalam suasana atau situasi tertentu. Nico Keijzer berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebocoran data dalam situasi tertentu adalah suatu perbuatan yang tanpa wewenangnya berusaha memperoleh data pihak lain yang bersifat rahasia dengan jalan menghalangi atau merintangi atau tidak menyampaikan data yang dimaksud yang seharusnya diserahkan kepada pihak yang berhak atas data tersebut<sup>3</sup>. Misalnya seorang pegawai kantor pos secara melawan hak membuka surat pemakai jasa pos dengan tujuan untuk mengetahui isinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang telah memperalatnya.

Hal tersebut di atas dapat pula terjadi pada data komputer yang tersimpan dalam berbagai media penyimpanan, misalnya seorang ekspediter suatu biro pengiriman barang mendapat tugas untuk mengirimkan disket yang berisi data penting dan bersifat rahasia pada suatu instansi, namun sebelum disket tersebut sampai pada pihak yang dituju, ia membuka *file-file* yang ada dalam

---

<sup>2</sup>Bandingkan dengan ketentuan Pasal 112 KUHP yang antara lain menyebutkan: "...surat-surat atau benda-benda...", juga Pasal 113 KUHP yang menyebutkan kata-kata: "...surat-surat, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda..."

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987. Halaman 45.

disket tersebut untuk mengetahui isinya. Terhadap kasus seperti ini maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 431 KUHP yaitu dengan menafsirkan *file* sebagai surat atau disket sebagai barang tertutup.

Apabila penafsiran tersebut dirasa terlalu jauh, maka demi menjamin kepastian hukum di masa mendatang, barangkali ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang masalah pembocoran rahasia perlu diperbaharui, misalnya dengan menambah kata "file", "disket" atau "media penyimpanan komputer" diantara kata-kata "surat", "barang", "keterangan-keterangan" dan hal-hal lainnya yang perlu dirahasiakan.

**b. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain tanpa hak.**

Dalam KUHP yang berlaku sekarang ini telah diatur tentang perbuatan memasuki atau melintasi wilayah tanpa hak. Ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 167 KUHP (tanpa hak memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang ditempati orang lain) dan ketentuan Pasal 551 KUHP (tanpa hak melintasi tanah orang lain). Berikut ini penulis kutipsecara lengkap rumusan pasal-pasal tersebut:

Pasal 167 KUHP berbunyi:

- (1)"Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"
- (2)"Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barangsiapa tidak setuju yang berhak lebih dahulu

serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk"

- (3)"Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan"
- (4)"Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Pasal 551 KUHP berbunyi:

"Barangsiapa tanpa wenang, berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya, dengan cara yang jelas dilarang memasukinya, diancam dengan denda paling banyak duaratus duapuluhlima rupiah"

Dalam rumusan pasal-pasal tersebut nampak bahwa wilayah yang tidak boleh dimasuki atau dilalui tanpa hak tersebut merupakan wilayah "fisik" (rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup) sehingga sulit untuk diterapkan pada perbuatan tanpa hak memasuki sistem komputer yang dapat dianggap sebagai wilayah "nonfisik".

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkembangannya teknologi komputer yang "dikawinkan" dengan teknologi telekomunikasi telah memunculkan apa yang disebut sebagai "Sistem Jaringan Komputer" (*computer network system*). Sistem jaringan komputer yang kini dikenal dengan "LAN" (*Local Area Network*), "WAN" (*Wide Area Network*) atau "Internet" tersebut biasanya bersifat eksklusif, dalam arti tidak setiap orang dapat "masukinya" tanpa izin atau tanpa menjadi peserta jaringan komputer tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap eksklusivitas jaringan komputer ini, dimana telah terjadi perbuatan menyambung terminal komputer baru pada suatu jaringan komputer dan pemilik jaringan telah memperingatkan agar pelaku segera "keluar" dari sistem

jaringan yang dimasuki secara ilegal, namun tidak mengindahkan (dikenal dengan istilah "*hacking*")<sup>4</sup>, maka terhadap *hacker* ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 167 atau Pasal 551 KUHP.

Dalam hal ini sistem jaringan komputer ditafsirkan sebagai lingkungan atau wilayah sebagaimana halnya dengan ruangan atau pekarangan,<sup>5</sup> namun demikian wilayah dalam jaringan komputer bersifat non-fisik karena tidak dapat dilihat dengan mata. Oleh sebab itu untuk dapat menerapkan Pasal 167 atau 551 KUHP terhadap perbuatan *hacking* maka diperlukan keberanian untuk menerapkan metode penafsiran analogi atau metode penafsiran ekstensif. Metode analogi diperlukan untuk menafsirkan pengertian "memasuki rumah, ruangan atau pekarangan secara melawan hukum" (*huisvredebreuk*) sebagai "memasuki sistem jaringan komputer secara melawan hukum" (*computervredebreuk*). Sedangkan metode penafsiran ekstensif diperlukan untuk memperluas pengertian kendaraan dalam Pasal 551 KUHP sehingga komputer beserta sarana penunjangnya termasuk di dalamnya dan memperluas pengertian kunci palsu dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP sehingga kunci sinyal elektronis seperti *test-key* dan *password* termasuk di dalamnya.

Jika dikaitkan dengan asas fundamental dalam hukum pidana terutama berkaitan dengan sistem KUHP, maka cara-cara tersebut di atas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam asas legalitas. Oleh sebab

---

<sup>4</sup>Periksa: Bab II, Halaman 50 - 52.

itu hal ini perlu diupayakan solusinya terutama dalam rangka penyusunan/pembaharuan KUHP di masa mendatang.

Untuk menjamin kepastian hukum di masa mendatang, dimungkinkan adanya pembaharuan, misalnya dengan menambahkan kata "sistem tertutup" sebagai pelengkap kata "ruang tertutup" dan "pekarangan tertutup", dengan penjelasan bahwa termasuk dalam sistem tertutup adalah sistem jaringan komputer yang untuk memasukinya diperlukan "kode resmi tertentu" (*password* atau *testkey*).

**b. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan pemalsuan.**

Delik pemalsuan dalam KUHP dimaksudkan sebagai pemalsuan surat (*valsheid in geschrifte*). Lazimnya surat/data/informasi ditulis atau dicetak diatas media kertas yang dapat dipakai sebagai alat bukti secara tertulis (misalnya akte, sertifikat, ijasah, daftar gaji dll.).

Kini dengan hadirnya teknologi komputer, sistim penyimpanan konvensional (di atas kertas) tersebut dialihkan ke dalam media penyimpanan disket, *tape storage*, *disk storage* dan media penyimpanan yang sejenis.

Dengan pengalihan data/keterangan kedalam media disket atau sejenisnya tersebut ternyata masih belum menjamin data/informasi/keterangan tersebut menjadi aman sama sekali dari kejahatan pemalsuan. Ternyata data atau keterangan dalam media disket tersebut masih bisa dipalsu dengan cara yang canggih (dengan memanfaatkan teknologi komputer) yang merupakan perkembangan dari bentuk kejahatan pemalsuan surat.



Kejahatan pemalsuan surat bentuk baru tersebut adalah sebagai perbuatan yang menurut istilah Yusuf Randy disebut "*Data Diddling*" yaitu kejahatan yang berupa perbuatan mengubah data valid/sah dengan cara melawan hukum yaitu dengan mengubah input data maupun output data dengan memakai sarana komputer<sup>5</sup>.

Dalam KUHP pemalsuan surat diatur dalam Bab XII (Pasal 263 - 276). Sebelum membahas kaitannya antara delik pemalsuan surat dengan perbuatan penyalahgunaan komputer yang disebut sebagai *data diddling*, maka terlebih dahulu penulis akan mengutip ketentuan Pasal 263 KUHP untuk memahami unsur-unsur perbuatan pemalsuan.

Pasal 263 KUHP berbunyi:

- (1) "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun"
- (2) "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Yang menjadi masalahnya adalah: apakah data atau keterangan media disket dan sejenisnya dapat dimasukan ke dalam pengertian "surat"? Dalam komentar pasal 263 KUHP disebutkan bahwa: "Yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat yang ditulis dengan

---

<sup>5</sup>Periksa: Bab II Halaman 54 -55.

tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya"<sup>6</sup>

Kalimat "dan lain-lain" dalam komentar Pasal 263 KUHP tersebut mempunyai pengertian yang cukup luas yang memungkinkan surat otentik yang dibuat atau ditulis melalui proses komputer, sehingga data atau keterangan dalam disket atau sejenisnya dapat dimasukkan dalam pengertian surat, asal data/informasi atau keterangan yang tersimpan dalam media disket dan sejenisnya tersebut sudah dituangkan ke dalam bentuk tulisan/naskah (misalnya dengan memakai alat *printer*). Dengan demikian data informasi tersebut dapat dipakai sebagai bahan informasi tertulis<sup>7</sup>.

Permasalahannya menjadi berkembang jika data atau keterangan yang terdapat dalam media penyimpanan komputer tersebut tidak dicetak (*di-print*) ke dalam kertas. Hal ini sangat mungkin sebab dalam perkembangannya dalam menghadapi era globalisasi, teknologi komputer telah menyediakan sarana surat/dokumen dalam bentuk denyut elektronis, yang demi perhitungan efesiensi dan efektifitas, sarana demikian dapat langsung dimanfaatkan tanpa harus dituangkan terlebih dahulu dalam media kertas<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1956, Halaman 156. (garis bawah oleh penulis).

<sup>7</sup>Periksa: Andi Hamzah, *Op.Cit.* Halaman 35.

<sup>8</sup>Salah satu bentuk "surat elektronis" tersebut adalah apa yang dikenal dengan nama "E-Mail", yang memanfaatkan Sistem Jaringan Komputer (Internet dan sejenisnya).

Jika hal ini terjadi, maka diperlukan keberanian dari aparat penegak hukum untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 263 KUHP dengan pendekatan penafsiran secara analogi sehingga huruf-huruf, angka-angka beserta tanda baca yang terdapat dalam media komputer dapat dianggap sebagai surat.

Untuk menjamin kepastian hukum di masa mendatang, barangkali perlu adanya pembaharuan, misalnya dengan menyisipkan satu ketentuan baru yang menjelaskan bahwa termasuk dalam pengertian surat antara lain keterangan-keterangan atau informasi-informasi legal yang dibuat dan atau tersimpan dalam media penyimpanan elektronik (komputer).

**c. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan pencurian.**

Dalam KUHP tindak pidana pencurian (*diefstal*) diatur dalam Pasal 362 KUHP, sedang variasinya diatur dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan) dan Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga).

Pencurian yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer adalah:

- 1) Pencurian terhadap data atau program komputer, yaitu data atau program yang tersimpan di dalam media *disket, floppy disk, magnetic tape* dan media penyimpanan dan sejenisnya<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Tindak pencurian terhadap data atau program komputer dapat dilakukan dengan cara mengkopi atau merekam data atau program dari media komputer ke media komputer yang lain. Jika data atau program atau data komputer tersebut dilindungi oleh hak cipta maka dapat diterapkan Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahannya adalah banyak data atau program yang tidak dilindungi hak cipta, maka yang paling mendekati perbuatan mengkopi atau merekam secara tidak sah adalah tindak pencurian data atau program.

2) Pencurian terhadap "waktu" pemakaian komputer, yaitu bentuk kejahatan yang oleh Nico Keijzer disebut dengan istilah "*Joycomputing*": perbuatan menggunakan komputer secara tidak sah/tanpa ijin menggunakannya melampaui wewenang yang diberikan<sup>10</sup>.

Dapatkah kedua bentuk pencurian tersebut dikenai Pasal 362 KUHP? Untuk mengetahuinya maka harus dicari kesesuaian antara unsur-unsur perbuatan pencurian dalam penyalahgunaan komputer dengan unsur-unsur Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP berbunyi:

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah"

Apabila dijabarkan maka unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 362 KUHP adalah:

1) Unsur obyektif :

- secara melawan hukum.
- mengambil
- barang sesuatu
- barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

2) Unsur subyektif :

- dengan maksud untuk memiliki

---

<sup>10</sup>Periksa: Bab II Halaman 49 - 50.

Diantara unsur-unsur tersebut yang menarik untuk dibahas di sini adalah pengertian dari unsur "mengambil" dan pengertian dari unsur "barang sesuatu", karena apabila unsur tersebut dihubungkan dengan bentuk perbuatan mengambil dan bentuk barang dalam bentuk penyalahgunaan komputer yang bersifat immateriel, maka hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan.

1) Pengertian "mengambil".

Dalam komentar Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah: mengambil untuk dikuasainya (dengan maksud memindahkan kekuasaan atas suatu barang) dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat<sup>11</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan "mengambil" dalam penyalahgunaan komputer adalah:

- a) Mengambil dalam arti nyata (secara fisik) yaitu mengambil disket, *floppy disk* dan sejenisnya yang berisikan data atau program komputer.
- b) Mengambil dalam arti tidak nyata (secara non fisik), yaitu :
  - (1) Mengkopi (merekam) data atau program yang tersimpan di dalam suatu disket dan sejenisnya ke dalam disket lainya atau ke media lainya dengan cara memberikan instruksi-instruksi tertentu pada komputer.
  - (2) Memanfaatkan "waktu" atau "jasa" penggunaan komputer melampaui batas wewenangnya (pada perbuatan *joycomputing*).

---

<sup>11</sup>R. Soesilo, *Op.Cit.* Halaman 199.

Jika dikaitkan dengan komentar Pasal 362 KUHP, maka pengertian mengambil bentuk pertama tidak menjadikan permasalahan. Yang menjadikan permasalahan adalah pengertian mengambil dalam bentuk kedua, dalam hal ini adalah bentuk =b)(1)=, karena sekalipun barang (data atau program) sudah diambil (dengan cara mengkopi atau merekam), namun barang (data atau program komputer) yang asli masih tetap utuh dan tidak berubah dari posisi semula. Untuk itu penjelasan mengenai berpindahnya benda yang diambil harus diartikan bahwa yang berpindah tempat dapat pula turunannya (hasil kopi-nya), jadi tidak perlu harus (dengan) benda aslinya. Selanjutnya kita tetap berpegang pada pengertian: melepaskan kekuasaan atas benda itu dari pemiliknya dengan maksud untuk memiliki, sehingga perbuatan mengkopi data atau program komputer yang dilakukan dengan sengaja tanpa izin dari pemiliknya dapat dikategorikan "mengambil" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Sedang pengertian "mengambil" dalam bentuk =b)(2)= apabila dikaitkan dengan komentar Pasal 362 KUHP dapat diartikan sebagai menguasai "waktu" atau "jasa" pemakaian komputer dengan melepaskan kekuasaan atas waktu atau jasa tersebut dari yang berhak atau pemiliknya. Waktu atau jasa yang diambil tersebut dengan sendirinya berpindah dari pemiliknya atau yang berhak atas waktu atau jasa tersebut<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup>Sekalipun tidak dapat dilihat secara fisik, namun berpindahnya "waktu" atau "jasa" pemakaian komputer dapat dirasakan. Belakangan ini muncul banyak usaha yang bergerak di bidang persewaan komputer (computer rental) dimana pemakaian waktu dan jasa komputer dapat dinilai dengan uang pada setiap jamnya.

2) Pengertian "barang" atau "benda" (*eniggoed*).

Yang dipermasalahkan dengan pengertian "benda" pada penyalahgunaan komputer adalah data atau program yang tersimpan dalam media disket dan sejenisnya (dalam perbuatan mengkopi atau merekam) dan "waktu" atau "jasa" (dalam perbuatan *joycomputing*). Benda-benda tersebut secara fisik tidak dapat kelihatan wujudnya. Data atau program komputer baru dapat dilihat wujudnya apabila ditampilkan pada layar monitor komputer (*screen*) atau dicetak pada alat cetak yang dihubungkan dengan komputer (*printer*).

Melalui pengalaman atas terjadinya keputusan *Hoge Raad der Nederland* tanggal 23 Mei 1921 (Arest listrik), maka agar perbuatan mengkopi data atau program komputer secara melawan hukum dan perbuatan *joycomputing* dapat dijangkau dengan Pasal 362 KUHP maka pengertian "benda" dalam Pasal 362 KUHP harus diperluas sedemikian rupa sehingga data dan program komputer yang terdapat dalam media komputer serta "waktu" atau "jasa" yang merupakan benda-benda tak berwujud, dapat dikategorikan sebagai benda atau barang.

Selanjutnya penulis tetap berpegang pada komentar berikutnya mengenai pengertian "benda" dari Pasal 362 KUHP yaitu bahwa benda yang diambil tersebut bisa berwujud maupun tidak berwujud (listrik, gas) dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus nilai ekonomi) sehingga benda yang dimaksud berharga bagi seseorang. Data atau program yang tersimpan dalam

media komputer juga memiliki nilai tertentu juga nilai ekonomi, karena benda tersebut mempunyai manfaat bagi yang menggunakannya.

Demikian pula halnya dengan "waktu" atau "jasa" yang dapat pula mempunyai nilai tertentu bahkan juga nilai ekonomi bagi seseorang atau suatu badan usaha. Apalagi di jaman modern seperti pada saat ini terutama di kota-kota besar yang didiami oleh masyarakat maju, pemanfaatan waktu dan sektor jasa sangat dihargai dan dapat dinilai dengan uang setiap jamnya bahkan setiap detiknya. Ada semacam semboyan di kalangan bisnis bahwa: "waktu adalah kerja dan kerja berarti uang".

Unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang lain seperti milik orang lain dan secara melawan hukum, pada dasarnya cukup bersesuaian apabila dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam penyalahgunaan komputer. Dengan demikian pada prinsipnya Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian (*diefstal*) bisa diterapkan pada kasus perbuatan mengkopi data atau program komputer secara melawan hukum dan pada kasus perbuatan *joycomputing*, dengan catatan: pengertian "mengambil" dalam pasal tersebut dianalogkan sebagai "mengkopi" atau "merekam" dan pengertian "barang" atau "benda" dalam pasal tersebut diperluas sedemikian rupa sehingga data atau program komputer yang terdapat dalam media komputer (seperti disket, *tape storage* dan sejenisnya) termasuk didalamnya.



Guna menjamin adanya kepastian hukum maka perlu adanya sisipan ketentuan yang menjelaskan atau menegaskan bahwa termasuk dalam pengertian "mengambil" antara lain "menyambung untuk mengalirkan sesuatu", "meng-kopi", "merekam" atau "memotret". Disamping itu perlu pula sisipan ketentuan yang menjelaskan bahwa termasuk dalam pengertian "barang" atau "benda" antara lain: "aliran listrik, data komputer, program komputer, jasa dan pelayanan komputer".

**d. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan penggelapan**

Dalam KUHP delik penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Pasal 372 KUHP, sedangkan variasinya diatur dalam Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 374 KUHP (penggelapan yang dilakukan atas hubungan kerja), 375 KUHP (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 KUHP (penggelapan di lingkungan keluarga).

Dalam penyalahgunaan komputer dikenal adanya bentuk perbuatan "manipulasi data" atau yang dalam berbagai literatur disebut pula "*The Trojan Horse*", yaitu suatu perbuatan yang bersifat mengubah data atau ins-truksi pada sebuah program; menghapus, mengurangi, me-nambah pada data atau program komputer; membuat data atau instruksi pada sebuah program menjadi tidak ter-jangkau (menghilangkan instruksi pada program dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok). Perbu-atan-perbuatan tersebut dapat membuat suatu program komputer selain menjalankan tugasnya juga akan melaksa-nakan tugas lain secara tidak sah. Misalnya, perbuatan

seorang programmer yang bekerja pada suatu bank yang mengubah program komputer sehingga bunga setiap nasabah akan dikurangi beberapa sen dan secara otomatis masuk ke dalam rekening pribadinya<sup>13</sup>.

Dapatkan Pasal 372 KUHP diterapkan terhadap perbuatan manipulasi data (*the trojan horse*) tersebut? Sebagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka berikut ini penulis akan mengawali dengan menguraikan unsur-unsur Pasal 372 KUHP.

Pasal 372 KUHP berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah"

Apabila rumusan tersebut dijabarkan, maka unsur-unsurnya adalah :

1) Unsur objektif:

- secara melawan hukum
- mengaku sebagai milik sendiri (memiliki)
- barang sesuatu
- barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.
- barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Unsur subjektif:

- dengan sengaja

---

<sup>13</sup>Periksa: Bab II Halaman 52 -53.

Diantara unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP tersebut yang perlu dibahas adalah unsur "barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebab unsur ini yang membedakan delik penggelapan dengan delik pencurian (Pasal 362 KUHP). Unsur tersebut berarti bahwa adanya suatu kepercayaan dari pemilik barang terhadap pelaku untuk memakai, membawa atau menyimpan barang tersebut.

Apabila hal ini dikaitkan dengan bentuk perbuatan manipulasi data (*the trojan horse*), maka kajian berikut ini akan mencari letak kesesuaian antara unsur perbuatan manipulasi data dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP, khususnya yang berkaitan dengan unsur "benda ada di tangannya bukan karena kejahatan atau karena adanya kepercayaan dari pemiliknya".

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa hampir setiap penyalahgunaan komputer dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dibelakang atau disekitar lingkungan peralatan komputer itu sendiri (*the man behind the machine*) dalam hal ini misalnya: *programmer*, *operator*, *system analyst* dan sebagainya. Dengan demikian perbuatan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan untuk memegang atau mengelola peralatan komputer beserta perlengkapannya (sarana-sarana penunjangnya) termasuk pula data atau program tertentu.

Kepercayaan untuk memegang komputer beserta perlengkapannya tersebut tidak perlu berdasarkan hubungan karena pekerjaan. Misalnya seorang pimpinan perusahaan

mempunyai teman seorang teknisi komputer, pada suatu saat ia sangat memerlukan bantuan dari temannya tersebut karena sistem komputer pada perusahaannya mengalami gangguan atau kerusakan dan teknisi tersebut menyanggupi secara cuma-cuma, apabila kemudian teknisi ini melakukan perbuatan manipulasi data umpamanya dengan merubah data atau program pada komputer yang sedang diperbaikinya itu maka teknisi tersebut bisa diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Apabila kepercayaan untuk memegang barang (dalam hal ini adalah komputer beserta sarana-sarana penunjangnya) tersebut berdasarkan hubungan karena pekerjaan, atau jabatan atau karena upah maka terhadap pelaku manipulasi data (*the trojan horse*) dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP.

Pasal 374 KUHP berbunyi:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"

Selanjutnya perlu dicatat bahwa mengenai pengertian "mengaku sebagai milik sendiri" atau "memiliki" atau "menghaki" pada Pasal 372 KUHP, pada dasarnya mempunyai pengertian yang mirip dengan pengertian "mengambil" pada Pasal 362 KUHP, dimana maksud memiliki/menghaki disini adalah seseorang yang ingin menguasai atau ingin mempunyai hak atas suatu barang. Sedangkan mengenai pengertian "barang sesuatu", dapat dilihat pada uraian subbab sebelumnya).

e. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan penipuan

Delik penipuan atau delik yang oleh Prof. Moeljatno diterjemahkan sebagai perbuatan curang (*bedrog*) diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedang variasinya diatur dalam Pasal 379 sampai dengan Pasal 395 KUHP.

Akhir-akhir ini bermunculan program-program komputer yang berisikan berbagai permainan yang bersifat spekulatif, seperti misalnya: program untuk mengetahui tingkat kecerdasan (IQ), program untuk meramal nasib, program untuk mengatasi permasalahan pribadi dan lain sebagainya. Program-program yang disimpan dalam bentuk disket atau CD-Rom tersebut memang ada yang dibuat sesuai dengan tujuannya sehingga tingkat akurasinya tinggi, namun banyak juga yang sekedar merupakan permainan saja sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Celakanya program-program komputer yang berisikan permainan ramal-meramal tersebut bisa dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengelabui orang lain, misalnya dengan mendirikan agen biro jasa yang bergerak dalam bidang konsultasi nasib, dengan maksud untuk memperoleh imbalan tertentu. Biasanya korban dalam hal ini adalah para klien sangat tertarik dengan hasil proses komputer "bohong-bohongan" ini. Terlebih lagi biasanya program ini menyajikan tampilan yang sangat memukau, yang dapat dilihat pada layar monitor ataupun dari hasil cetak *printer*.

Jika klien (korban) tersebut menjadi terpengaruh atau mempercayai hasil "permainan bohong-bohongan"

dengan memakai sarana komputer tersebut dan tanpa sadar memberi imbalan yang tidak sesuai dengan hasil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka terhadap pelakunya dapat dijaring dengan Pasal 378 KUHP yang selengkapnya berbunyi:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

**f. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan penghancuran atau perusakan barang**

Pengertian mengenai penghancuran atau perusakan barang (*vernieling of beschadiging van goederen*) diatur dalam Pasal 406 KUHP, sedang variasinya diatur dalam Pasal 407 - 412 KUHP.

Pasal 406 berbunyi:

- (1)"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"
- (2)"Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Beberapa pengertian dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>R. Soesilo, *Op.Cit.* Halaman 223.

1) Pengertian "menghancurkan" (*vernielen*).

Menghancurkan (membinasakan) dimaksudkan sebagai merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, piring, vas bunga dan sebagainya sehingga hancur berkeping-keping.

2) Pengertian "merusakkan"

Merusakkan dimaksudkan sebagai memperlakukan suatu barang sedemikian rupa namun kurang dari pada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul cangkir atau vas bunga dan sebagainya, tetapi tidak sampai hancur, melainkan hanya pecah sedikit, retak atau hanya putus pegangannya.

3) Pengertian "Membikin (membuat) tidak dapat dipakai lagi".

Disini tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepas roda kendaraan dengan mengulir sekrapnya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan jalan memasang kembali roda itu maka kendaraan tersebut masih bisa dipakai.

4) Pengertian "Menghilangkan".

Yang dimaksudkan dengan menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut atau di sungai sehingga tidak bisa ditemukan lagi.

Sedangkan pengertian "menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi dan menghilangkan sesuatu barang" dalam penyalahgunaan komputer, dapat

dijelaskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1) Yang dimaksud dengan tindakan "menghancurkan" pada kasus penyalahgunaan komputer adalah suatu perbuatan menghancurkan disket dan sejenisnya yang berisikan data atau program komputer sehingga mengakibatkan disket dan sejenisnya beserta data atau program di dalamnya menjadi hancur dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

2) Yang dimaksud dengan tindakan "merusak" pada kasus penyalahgunaan komputer adalah suatu perbuatan merusak isi disket dan media penyimpan lainnya.

Contoh: merusak data atau program komputer yang tersimpan dalam disket dan sejenisnya dengan cara menghapus data atau program, membuat cacat data atau program (membuat cacat isi disket dan sejenisnya), menambahkan data baru kedalam disket dan sejenisnya secara acak dengan kata lain mengacaukan isi disket dan media penyimpan sejenisnya.

3) Yang dimaksud dengan "membuat tidak dapat dipakai lagi" (membuat tidak berguna) pada kasus penyalahgunaan komputer adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga data atau program komputer yang seharusnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Hal ini disebabkan karena data atau program tersebut telah dirubah seluruhnya atau pada beberapa bagiannya, atau dirusak seluruhnya atau beberapa bagiannya, atau dihapus seluruhnya atau

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.* Halaman 33 - 34.



beberapa bagiannya, maka maksud penggunaan data atau program komputer tersebut terhalangi (tidak dapat dipakai lagi sesuai dengan fungsinya), dan tidak dapat diperbaiki lagi.

- 4) Yang dimaksud dengan "menghilangkan" pada kasus kejahatan komputer adalah suatu perbuatan menghilangkan atau ~~menghapus~~ data atau program yang tersimpan di dalam disket dan media penyimpan sejenis lainnya sehingga mengakibatkan semua data atau program yang disimpan itu menjadi hapus sama sekali. Dengan kata lain perbuatan yang dimaksud itu menjadikan disket dan sejenisnya itu menjadi kosong dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut di atas, nampak adanya kesesuaian antara pengertian kerusakan barang dengan pengertian kerusakan data atau program komputer yang pada intinya perbuatan tersebut menyebabkan fungsi dari barang yang dalam hal ini data atau program komputer menjadi terganggu.

Dalam penyalahgunaan komputer dikenal adanya bentuk perbuatan yang disebut sebagai "penyia-nyiaan data komputer" yaitu suatu perbuatan dengan sengaja merusak atau menghancurkan media disket dan sejenisnya yang berisikan data atau program komputer sehingga data atau program yang dimaksud menjadi tidak berfungsi lagi dan pekerjaan-pekerjaan yang melalui proses komputer tidak dapat dilaksanakan<sup>16</sup>. Berdasarkan kesesuaian

---

<sup>16</sup>Periksa: Bab II Halaman 55 - 56.

pengertian kerusakan barang dan kerusakan data atau program komputer sebagaimana telah di jelaskan di atas, maka terhadap perbuatan penyalahgunaan data komputer yang pada hakekatnya adalah perbuatan penghancuran atau kerusakan data atau program komputer, pada pelakunya dapat dikenakan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan seterusnya.

Demikianlah kajian beberapa pasal dalam KUHP yang sekiranya dapat diterapkan terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer yang dikenal. Dari uraian mengenai hasil pengkajian tersebut nampak bahwa beberapa bentuk penyalahgunaan komputer telah diatur dalam KUHP, hal ini terbukti dari unsur-unsur delik yang terdapat dalam beberapa pasal KUHP yang dikaji adalah sesuai dengan beberapa bentuk penyalahgunaan komputer.

Mengingat bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini tidak dipersiapkan untuk menjangkau delik-delik kontemporer seperti delik penyalahgunaan komputer maka untuk dapat diterapkan pada kasus-kasus penyalahgunaan komputer, diperlukan profesionalisme (baca: pengetahuan, ketrampilan, kreatifitas dan keberanian) dari aparat penegak hukum (khususnya hakim).

Dengan profesionalisme yang memadai diharapkan pengoperasian pasal-pasal dalam KUHP dapat lebih dioptimalkan lagi. Dengan kejelian untuk mengkaitkan dengan situasi tertentu dalam suatu kasus penyalahgunaan komputer, sangat dimungkinkan untuk menerapkan Pasal-pasal yang lain dalam KUHP selain yang telah dikaji di atas. Misalnya, ketentuan Pasal 281 - 283 KUHP kiranya dapat diterapkan terhadap

penyalahgunaan komputer yang mengarah pada tindakan pelanggaran kesusilaan (*cybersex*), atau ketentuan Pasal 154 - 163 KUHP terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang mengarah pada tindakan agitasi dan propaganda untuk mendeskreditkan pemerintah yang sah (*cyberagripro*)<sup>17</sup>, dan lain sebagainya.

Akan tetapi perlu diingat bahwa untuk dapat diterapkan dalam beberapa bentuk penyalahgunaan komputer, beberapa pengertian dalam pasal-pasal KUHP tersebut seringkali harus ditafsirkan dengan begitu luasnya, yaitu dengan metode interpretasi extensif (seperti pada pengertian "kendaraan" dalam Pasal 551, pengertian "surat" dalam Pasal 263 dan pada pengertian "barang" dalam Pasal 362), bahkan harus pula mempergunakan metode analogi/qiyas (seperti pada pengertian "memasuki" dalam Pasal 167, dan pengertian "mengambil" dalam Pasal 362). Hal ini perlu dijadikan salah satu pertimbangan yang penting sebelum memutuskan untuk memilih salah satu atau beberapa pasal dalam KUHP dalam menyelesaikan suatu perkara tentang penyalahgunaan komputer, sebab, sekali lagi perlu dipahami bahwa apabila terlalu sering mempergunakan kedua macam metode interpretasi tersebut dikawatirkan akan membahayakan eksistensi asas legalitas yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum pidana kita.

Melihat kenyataan-kenyataan tersebut dan mengingat akan kemungkinan-kemungkinan timbulnya bentuk-bentuk baru dari penyalahgunaan komputer di masa yang akan datang, maka

---

<sup>17</sup> Misal nya dengan cara menyebarluarkan sisi buruk dari pemerintah melalui internet.

penulis berpendapat bahwa pada saat ini dipandang perlu bahkan bisa pula mutlak adanya tindakan/langkah-langkah pembaharuan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini, agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya dapat secara tepat untuk diterapkan pada kasus-kasus kejahatan komputer dalam berbagai bentuknya, sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

## 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Sebelum sampai pada pembahasan masalah korupsi dari segi yuridisnya (yaitu terhadap UU. No. 3/1971) apabila dikaitkan dengan masalah penyalahgunaan komputer, ada baiknya jika diawali dengan meninjau masalah korupsi dari segi umumnya.

Kata "korupsi" berakar pada kata "*corruptio*" yang berarti yang berarti: kerusakan, keadaan atau perbuatan busuk dan disangkutkan dengan bidang keuangan<sup>18</sup>. Dengan demikian perbuatan korupsi mencakup tiga tipe fenomena yaitu:<sup>19</sup>

- Penyuapan (*bribery*)
- Pemerasan (*extorsion*)
- Nepotisme

---

<sup>18</sup>Soemitro, *Tindak Pidana Korupsi*, Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum UNS, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1989. Halaman 2.

<sup>19</sup>*Ibid.*

Melihat tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya perbuatan korupsi merupakan kejahatan dengan memanfaatkan kedudukan atau jabatan dari pelakunya atau kepercayaan yang diberikan kepada pelakunya, sehingga sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dapat dinamakan korupsi itu sebagian besar telah diatur dalam KUHP yaitu terdapat dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan jabatan, misalnya: penggelapan (Pasal 372); penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415); pemerasan (Pasal 368); menerima suap (Pasal 418, 419, 420) dan lain sebagainya.

Namun demikian, tampaknya ketentuan-ketentuan tersebut masih kurang kuat atau kurang keras sebagai sarana untuk memberantas perbuatan korupsi di Indonesia, apalagi bentuk perbuatan korupsi itu sendiri berkembang terus dengan berbagai modus operandinya, sehingga hal tersebut sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan sangat menghambat pembangunan nasional.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka sejak tahun 1957 muncullah peraturan-peraturan yang bersifat khusus untuk memberantas perbuatan korupsi (mulai saat itu istilah "korupsi" dikenal sebagai pengertian yuridis) hingga yang berlaku sekarang yaitu UU. No. 3 Tahun 1971.

UU. No. 3 Tahun 1971 diproses dalam jangka waktu yang relatif singkat. Rancangan Undang-undang (RUU)-nya diajukan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 11 Juli 1970 dengan Surat Keputusan No. J.S 5/6/17 dan diteruskan oleh Presiden kepada DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong

Royong) pada tanggal 13 Agustus 1970 No. 07/P.U/VIII/1970. Setelah melalui penyelesaian pembicaraan dalam forum fraksi-fraksi dan setelah melalui rapat pemandangan umum akhirnya DPR-GR menyetujui RUU tersebut dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 29 Maret 1971 menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya UU. No. 3 Tahun 1971 sejak tahun 1957 di Indonesia telah muncul peraturan-peraturan untuk memberantas tindak pidana korupsi dan peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali pergantian. Masing-masing peraturan yang berganti-ganti tersebut memberikan rumusan perbuatan korupsi yang berbeda, namun unsur yang selalu ada dalam perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1957 adalah:

- a. Perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- b. Perbuatan-perbuatan penyalahgunaan kewenangan (jabatan, kedudukan, kepercayaan dll.).

Kedua unsur diatas kemudian banyak dijadikan *pathokan* (acuan) praktek penerapan hukum, yaitu untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana korupsi atau hanya merupakan delik umum. Unsur-unsur tersebut juga terdapat dalam UU. No. 3 Tahun 1971 yaitu terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dan b.

Kini persoalannya adalah: apakah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dapat diterapkan pada masalah kejahatan komputer atau kasus penyalahgunaan komputer?

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini penyalahgunaan komputer banyak terjadi pada instansi-instansi atau badan-badan yang telah menerapkan sistem komputerisasi di segala bidang (terutama pada bidang-bidang yang menyangkut masalah administrasi keuangan).

Melihat sedemikian luasnya rumusan perbuatan korupsi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 3 Tahun 1971 maka setiap pelaku penyalahgunaan komputer dapat diancam dengan pidana berdasar pasal 28 UU. No. 3 Tahun 1971 apabila unsur perbuatan pelaku penyalahgunaan komputer tersebut bersesuaian dengan unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU. No. 3 Tahun 1971. Misalnya saja terhadap perbuatan "manipulasi data atau program komputer" yang dalam pembahasan pada sub bab terdahulu terhadap perbuatan ini dapat diancam pidana berdasar Pasal 372 atau Pasal 374 KUHP, maka selain penerapan dengan kedua pasal KUHP tersebut apabila dalam perbuatan pelaku manipulasi data/program komputer tersebut terdapat unsur "memperkaya diri secara tidak sah (illegal)" atau unsur "penyalahgunaan kewenangan" dan perbuatan tersebut dipandang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, maka terhadap kasus ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub a (apabila merupakan perbuatan memperkaya diri secara illegal) atau sub b (apabila merupakan penyalahgunaan kewenangan) jo. Pasal 28 UU. No. 3 tahun 1971.

Untuk memperjelas uraian tersebut di atas, berikut ini akan dikutipkan secara lengkap rumusan pasal-pasal pokok

yang dapat diterapkan dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer.

Pasal 1 ayat (1) sub a UU. No. 3/1971 berbunyi:

"Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Pasal 1 ayat (1) sub b UU. No. 3/1971 berbunyi:

"Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara"

Pasal 28 UU. No. 3/1971 berbunyi:

"Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e, dan ayat (2) Undang-Undang ini, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah.

Selain daripada itu dapat dijatuhkan tiga hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 34 sub a, b, dan c Undang-undang ini"

Perlu dicatat, bahwa dalam penerapannya unsur "memperkaya diri" dan unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU.No. 3 tahun 1971 sering menimbulkan masalah. Hal tersebut karena dalam realitanya sering terjadi kerancuan penafsiran tentang sejauh mana suatu perbuatan bisa disebut seperti unsur-unsur tersebut. Dalam praktek suatu perbuatan bisa disebut sebagai "dapat merugikan keuangan/perekonomian negara" atau "tidak" adalah tergantung dari pandangan dan pertimbangan dari penegak hukum. Hal ini mengingat sedemikian luasnya jangkauan dari rumusan perbuatan korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b



UU.No. 3 Tahun 1971 sehingga hampir setiap perbuatan memperkaya diri atau penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana terhadap harta kekayaan lainnya, baik yang dilakukan dengan cara yang konvensional maupun dengan teknik yang modern (misalnya pada penyalahgunaan komputer), dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Luasnya jangkauan dalam rumusan perbuatan korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU. No. 3 Tahun 1971 dapat ditinjau dari kalimat "...secara langsung atau tidak langsung..." dan dari kata "...dapat..." karena dalam ketentuan tersebut tidak ada batasan sampai sejauh mana pengertian "tidak langsung" dan "dapat" tersebut.

Namun demikian sekalipun UU.No. 3 Tahun 1971 secara teoritis memiliki perumusan delik korupsi secara luas, akan tetapi dalam pelaksanaannya praktis hanya menjangkau perbuatan korupsi dalam arti yang sempit. Biasanya dalam praktek UU. No. 3 Tahun 1971 hanya diterapkan pada perbuatan yang jelas-jelas secara langsung merugikan keuangan/perekonomian negara. Hal ini mungkin karena kehati-hatian dari para praktisi hukum dengan tujuan agar tidak mengaburkan batasan dari tindak pidana korupsi.

Demikian pula terhadap perbuatan memperkaya diri yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, para penegak hukum harus menelaah kasus tersebut secara cermat dan harus pula dipertimbangkan sejauh mana perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan/perekonomian negara, sehingga dapat menerapkan ketentuan secara tepat, apakah perbuatan tersebut pantas untuk dikategorikan sebagai delik korupsi sehingga dapat diancam pidana berdasar keten-

tuan pidana dalam UU. No. 3 Tahun 1971 atau lebih tepat kalau dikenai ketentuan dalam pasal-pasal KUHP.

3. Undang-Undang Nomor 11/PnPs/1963 (Undang-Undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi).

Pembahasan mengenai UU. No. 11/Pnps/1963 (UU Subversi) dalam sub bab ini akan didahului dengan pengertian dari delik subversi itu sendiri. Ensiklopedia International memberikan batasan umum tentang subversi sebagai: "... *overthrouwing or seeking to overthrow a government from within by secret or illegal means*"<sup>20</sup>.

Dalam penjelasan tentang pemberantasan kegiatan subversi (penjelasan resmi UU. No. 11/Pnps/1963) disebutkan bahwa:

"Hakekat subversi adalah suatu manifesto pertentangan-pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (*bijgelegd*), suatu kelanjutan perjuangan-perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara yang tertutup (*covert*) sering juga dibarengi atau disusul dengan tindakan kekerasan yang terbuka (perang, pemberontakan)"

Dari rumusan pengertian delik subversi tersebut dapat disimpulkan bahwa delik subversi merupakan delik politik.

Sebenarnya KUHP telah memuat beberapa kejahatan yang termasuk tindak pidana politik yakni ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam empat bab pertama dari buku II KUHP (Pasal 104 s/d pasal 153 KUHP). Tetapi karena perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, maka dirasakan bahwa perlindungan bagi negara dan lembaga-lembaganya masih kurang memadai, sehingga masih diperlukan undang-undang yang

---

<sup>20</sup>Soemitro, *Tindak Pidana Subversi* (Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum UNS), Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1989. Halaman 29.

lebih berat ancaman pidananya dan lebih-luas jangkauannya<sup>21</sup>. Oleh karena itu pada tanggal 16 Oktober 1963 ditetapkan berlakunya Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Dengan adanya UU. No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai Undang-undang, maka Penpres No. 11 Tahun 1963 dinyatakan sebagai undang-undang (dengan beberapa perbaikan terutama yang berkaitan dengan istilah dan kata-kata yang tidak sesuai dengan UUD 1945), sistem penomorannya adalah Undang-undang Nomor 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

UU. No. 11/Pnps/1963 (selanjutnya dapat disebut juga sebagai Undang-Undang Subversi) dimaksudkan sebagai perisai untuk menanggulangi serangan terhadap negara, bentuk negara dan lembaga-lembaganya dan situasi negara RI pada saat pembentukan Undang-Undang Subversi ini membuat materi dari Undang-Undang Subversi tersebut sangat eksepsional, sehingga kurang memenuhi syarat sebagai ketentuan hukum terutama apabila dikaitkan dengan azas legalitas dalam hukum pidana.

Salah satu ciri dari Undang-Undang Subversi ini adalah perumusan delik yang samar-samar dan terlalu luas, sehingga memberikan kesempatan yang besar kepada hakim untuk menetapkan apakah hukumnya dalam kasus tertentu. Hal tersebut dapat ditinjau dari salah satu pasalnya yang mem-

---

<sup>21</sup>Salah satu pertimbangan yang mendasari terbentuknya Penpres No. 11 Tahun 1963 adalah perkembangan situasi politik pada saat itu dimana muncul perbuatan-perbuatan yang belum diatur dalam KUHP seperti "sabotase" dan "mata-mata". Sehingga Penpres 11/1963 dipandang sebagai pelengkap KUHP untuk mengisi "kekosongan hukum" pada saat itu. Lihat: Loebby Loqman, *Op.Cit.*, Halaman 34.

berikan batasan delik subversi, yaitu Pasal 1 Undang-Undang Subversi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikutipkan secara lengkap isi dari ketentuan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan subversi itu.

Pasal 1 UU. No. 11/Pnps/1963 berbunyi:

(1) "Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi :

1. Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat:
  - a. memutar-balikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara, atau
  - b. menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewajiban Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara, atau
  - c. menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau di antara Negara Republik Indonesia dengan sesuatu Negara sahabat, atau
  - d. mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat;
2. barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang menyatakan simpati bagi musuh negara Republik Indonesia atau negara yang sedang tidak bersahabat dengan Negara Republik Indonesia;
3. barangsiapa melakukan pengrusakan atau penghancuran bangunan yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum ataupun milik perseorangan atau badan yang dilakukan secara luas;
4. barangsiapa melakukan kegiatan mata-mata;
5. barangsiapa melakukan sabotase.

(2) "Dipersalahkan juga melakukan tindak pidana subversi barang siapa memikat perbuatan tersebut pada ayat (1) tersebut diatas."

Rumusan ketentuan Pasal 1 UU. No. 11/PnPs/1963 tersebut menunjukkan betapa luasnya jangkauan Undang-Undang Subversi, sehingga jika kita mengikuti begitu saja ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Subversi tersebut, maka setiap perbuatan dapat dimasukkan kedalam kategori delik

subversi, termasuk juga perbuatan-perbuatan yang telah diatur dalam KUHP maupun undang-undang pidana lainnya.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan penyalahgunaan komputer, maka pada dasarnya setiap penyalahgunaan komputer dalam bentuk apapun, baik yang terhadapnya dapat diterapkan KUHP atau undang-undang hukum pidana lainnya maupun yang karena bentuk perbuatannya yang canggih atau baru sehingga terhadapnya tidak ada ketentuan dalam KUHP dan undang-undang pidana lainnya yang cocok untuk diterapkan, bisa dikategorikan sebagai perbuatan subversi sehingga dapat diancam pidana berdasar UU. No. 11/PnPs/1963.

Berikut ini penulis mencoba untuk memaparkan beberapa contoh guna memperjelas uraian di atas:

- a. Perbuatan membocorkan rahasia negara (dengan memanfaatkan komputer) yang dapat diancam dengan Pasal 112 KUHP, maka selain itu (berdasarkan pertimbangan tertentu) dapat pula diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) sub 4 (melakukan kegiatan mata-mata) jo. Pasal 13 ayat (1) UU. No 11/PnPs/1963.
- b. Perbuatan memperkaya diri (dengan cara memanfaatkan komputer) sehingga merugikan keuangan/perekonomian negara yang dapat diancam pidana berdasar Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 UU. No. 3 Tahun 1971, dari sisi lain perbuatan tersebut dapat pula dituntut berdasar pasal 1 ayat (1) huruf d UU. No.11/PnPs/1963 (mengganggu, menghambat atau me-ngacaukan bagi industri...dst) jo. pasal 13 ayat (1) UU. No. 11/PnPs/1963.

Dari aspek pemidanaan, Undang-Undang Subversi menetapkan ancaman sanksi relatif lebih berat dari pada undang-undang pidana lainnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 13 UU. No. 11/Pnps/1963 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) "Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) 1, 2, 3, 4, dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (duapuluh) tahun"
- (2) "Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (duapuluh) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tigapuluh) juta rupiah"

Hingga saat ini belum ada suatu pedoman untuk menentukan apakah terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan Undang-Undang Subversi atau lebih tepat apabila diterapkan KUHP atau undang-undang pidana lainnya. Ada dua Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang isinya saling bertolak belakang dalam hal penerapan UU. No. 11/Pnps/1963 dalam suatu perkara. Di satu pihak berpendirian bahwa adanya latar belakang politik merupakan unsur esensial bagi tindak pidana subversi (Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Februari 1969 No. 89/K/Kr/1968, dalam perkara Parto Soengeng), di lain pihak berpendirian bahwa adanya latar belakang politik tidak merupakan unsur esensial bagi tindak pidana subversi karena yang perlu disimpulkan adalah unsur-unsur delik subversi dari perbuatan-perbuatan nyata dari para terdakwa (Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Mei 1971 No. 28/K/Kr/1968, dalam perkara Maedjaeni al Zamad).

Luasnya jangkauan Undang-Undang Subversi (sehingga mendapat julukan sebagai "undang-undang karet") lebih nyata lagi dengan munculnya instruksi-instruksi dari Kejaksaan Agung RI dengan memasukkan beberapa perbuatan pidana yang secara umum bukan termasuk sebagai delik subversi sebagai perbuatan subversi, yakni antara lain: pada tahun 1976 tentang dimungkinkannya tindak pidana penyelundupan dikenakan Undang-Undang Subversi. Sekitar tahun 1988 muncul pemikiran dari Jaksa Agung (waktu itu dijabat oleh Alm. Sukarton Marmosoedjono') bahwa masalah pemalsuan pestisida dan perjudian dapat pula diancam dengan Undang-Undang Subversi.

Sehubungan dengan jangkauan yang terlalu luas dari Undang-undang Subversi ini, B.Z. Komulontang, menandakan demikian: "saya lebih setuju kalau semata-mata dimaksudkan untuk tindak pidana politik (dalam arti murni). Ini sesuai dengan tujuan semula dibentuknya peraturan tersebut"<sup>22</sup>

Di sisi lain, sekalipun Penpres No. 11 Tahun 1963 yang kemudian disahkan sebagai undang-undang menjadi UU. No. 11/Pnps/1963 bukan dimaksudkan sebagai undang-undang darurat, namun dasar dari lahirnya undang-undang itu mempunyai sifat darurat, sehingga seyogyanya Undang-Undang Subversi ini mempunyai sifat darurat pula, dimana apabila keadaan yang dianggap darurat itu sudah tidak ada maka dengan sendirinya kekuatan undang-undang tersebut akan hilang<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup>"Saat UU Subvesif, 'Menggebuk' Penyelundup", *Forum Keadilan*, Nomer 17, Maret 1990, Halaman 63.

<sup>23</sup>Periksa: Loebby Loqman, *Op.Cit.*, Halaman 114.

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan komputer yang dewasa ini muncul dengan teknik-teknik yang amat canggih dan cukup berbahaya serta bisa menimbulkan akibat yang cukup luas, maka seyogyanya para penegak hukum (terutama hakim) harus cermat dalam menerapkan hukumnya, meskipun setiap perbuatan dapat diancam dengan Undang-Undang Subversi, namun sekiranya Undang-Undang Subversi baru pantas/tepat apabila diterapkan pada perbuatan penyalahgunaan komputer yang berlatar belakang politik atau setidaknya tidaknya pada perbuatan penyalahgunaan komputer yang dapat menimbulkan eksese yang secara luas dapat menjurus pada aktivitas politik yang dapat membahayakan kelestarian negara.

Demikian sekilas mengenai gambaran eksistensi dan relevansi KUHP dan beberapa Undang-Undang Tindak Pidana Khusus terhadap penyalahgunaan komputer. Jelaslah bahwa perundang-undangan hukum pidana yang ada pada saat ini dapat diterapkan pada kasus-kasus penyalahgunaan komputer. Hal ini sangat tergantung dengan kesesuaian antara substansi undang-undang hukum pidana dengan sifat-sifat perbuatan penyalahgunaan komputer tertentu. Dengan demikian sangat dimungkinkan penerapan perundang-undangan hukum pidana lainnya (selain yang telah dikaji di atas) terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang lain, asal dengan sarana interpretasi yang diperkenankan dalam sistem hukum pidana Indonesia aparat penegak hukum mampu menghubungkan titik-titik relevansi antara substansi suatu undang-undang hukum pidana dengan sifat-sifat perbuatan penyalahgunaan komputer tertentu. Termasuk dalam substansi undang-undang, disamping isi (unsur-



unsur) rumusan pasal-pasalnya juga politik hukumnya yang meliputi dasar, arah dan tujuan dari undang-undang yang bersangkutan (*the spirit of rule*). Sedangkan yang termasuk dalam sifat-sifat perbuatan adalah cara-cara, maksud/tujuan serta akibat atau kemungkinan akibat dari suatu perbuatan.

Disamping KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, masih ada lagi sumber penting hukum pidana yaitu Undang-Undang selain hukum pidana akan tetapi di dalamnya juga memuat sanksi pidana atau yang dikenal dengan istilah lainnya adalah Undang-Undang Hukum Administratif yang memuat ketentuan pidana.

Berikut ini penulis akan melanjutkan kajian mengenai permasalahan kebijakan penerapan hukum terhadap penyalahgunaan komputer, yaitu dengan mengkaji beberapa perundang-undangan hukum administratif yang memuat ketentuan pidana yang banyak bersinggungan dengan tindak penyalahgunaan komputer tertentu.

#### **4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**

Perkembangan penyalahgunaan komputer dikhawatirkan akan membahayakan pertumbuhan perekonomian suatu negara sehingga muncul permasalahan: bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan komputer yang telah menjangkau bidang-bidang ekonomi. Berkaitan dengan masalah tersebut maka pada bagian ini penulis akan membahas masalah penerapan hukum terhadap penyalahgunaan komputer yang berkaitan dengan salah satu tindak pidana di bidang ekonomi yaitu tindak pidana "penyelundupan".

Pada mulanya pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan-penyelewengan di bidang ekonomi dalam suatu badan usaha, terutama pada perusahaan-perusahaan swasta, tidak dapat diselesaikan menurut hukum pidana karena hal itu dianggap sebagai masalah intern dan kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut dimasukkan dalam kalkulasi "resiko" dari suatu usaha. Apabila diselesaikan menurut hukum, terhadap pelakunya hanya dapat digugat secara perdata (gugatan ganti rugi) atau hanya dikenai tindakan administratif saja.

Dalam perkembangan selanjutnya pelanggaran-pelanggaran itu semakin meningkat, sehingga tidak hanya dapat merugikan perusahaan yang bersangkutan tetapi dipandang dapat membahayakan kondisi perekonomian negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka muncul pemikiran untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran di bidang ekonomi dengan ancaman sanksi pidana.

Sebenarnya apa yang dinamakan Tindak Pidana Ekonomi, sebagian besar dapat ditanggulangi dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, seperti misalnya dengan Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), Pasal 378 KUHP (penipuan) dan sebagainya, namun ternyata pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tersebut dirasa kurang efektif dalam rangka memberantas Tindak Pidana Ekonomi. Hal-hal tersebut diatas merupakan kenyataan yang mendorong timbulnya Undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi yakni Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1955.

Dalam UU. No. 7/Drt/1955 tidak terdapat perumusan tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam pasal 1 sub 1e hanya disebut secara limitatif beberapa macam peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan pidana saja. Untuk menerapkan UU. No. 7/Drt/1955 harus pula menunjuk/mengkaitkan dengan peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1 sub 1e UU. No. 7/Drt/1955 tersebut.

Salah satu jenis tindak pidana ekonomi sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 sub 1e UU. No. 7/Drt/1955 adalah pelanggaran terhadap *Rechten Ordonnantie* (Ordonansi Bea) *Staatblad* Tahun 1882 Nomor 240. Tindak pidana ini secara umum disebut sebagai Tindak Pidana "Penyelundupan".

Pengertian penyelundupan dalam pengertian delik ekonomi adalah: setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan impor atau ekspor barang<sup>23</sup>.

Bentuk-bentuk penyelundupan pada umumnya adalah:<sup>24</sup>

a. Penyelundupan secara fisik.

Yaitu perbuatan mengimpor atau mengekspor barang, tanpa sama sekali mempergunakan dokumen yang melindungi barangnya.

b. Penyelundupan secara administratif.

Yaitu perbuatan mengimpor atau mengekspor barang, dengan mempergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya sehingga seolah-olah barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan.

---

<sup>23</sup>H.A.K. Moch. Anwar (Dading), *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979. Halaman 47.

<sup>24</sup>*Ibid.* Halaman 48.

Jika terjadi penyelundupan maka ketentuan yang diterapkan adalah Pasal 26b R.O. (*Rechten Ordonnantie* = Ordonansi Bea) staatsblad Tahun 1882 Nomor 240 jo. pasal 1 sub 1e jo. pasal 6 ayat (1) huruf a UU. Nomor 7/Drt/1955<sup>25</sup>.

Sekalipun Ordonansi Bea ini sudah dilakukan perubahan dan penambahan dalam rangka menjawab tuntutan pembangunan nasional, namun karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakangnya, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud, sehingga perlu dilakukan pembaharuan. Hal-hal tersebut yang mendasari dibentuknya peraturan tentang bea yang baru yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Salah satu bentuk konkret adanya pembaharuan hukum yang berkaitan dengan kepabeanan dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi dan era globalisasi perdagangan adalah diaturnya masalah penyerahan Pemberitahuan Pabean melalui media elektronik (hubungan antar komputer). Hal ini antara lain dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) UU. No. 10 Tahun 1995 yang berbunyi: "Pemberitahuan Pabean diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dalam bentuk formulir atau melalui media

---

<sup>25</sup>Pasal 26 R.O. berbunyi: "Barangsiapa yang mengimpor (memasukkan) atau mengekspor (mengeluarkan) barang-barang atau mencoba mengimpor (memasukkan) atau mengekspor (mengeluarkan) barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi itu dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang yang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah", Pasal 1 sub 1e UU.No.7/Drt.1955 antara lain menyatakan: "Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan: ... h. *Rechten Ordonnantie* (Ordonansi Bea); ...disebut tindak pidana ekonomi"; dan Pasal 6 ayat (1) huruf a berbunyi: "Dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 1e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya limaratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu". Lihat/bandingkan: *Supra*, catatan kaki 28.

elektronik". Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: "Ayat ini menegaskan bahwa Pemberitahuan Pabean yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean dapat berupa tulisan diatas formulir atau melalui media elektronik berupa disket atau hubungan langsung antar komputer".

Rumusan tentang delik penyelundupan dalam Pasal 102 UU Kepabeanan ini tidak jauh berbeda dengan rumusan dalam Pasal 26 Ordonansi Bea. Perbedaannya terletak pada lebih beratnya ancaman maksimum sanksi pidana yang ditetapkan<sup>26</sup>. Kebijakan ini tentu saja dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan meningkatnya kebutuhan akan perlindungan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dewasa ini.

Tindak pidana penyelundupan yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan komputer adalah perbuatan "pemalsuan keterangan, dokumen atau catatan ekspor/impor" dan "perusakan atau penghapusan keterangan atau catatan ekspor/impor".

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa penyelundupan dapat berupa "penyelundupan fisik" dan "penyelundupan administratif". Dalam perkembangannya seiring dengan kemajuan teknologi, maka pengelolaan administrasi ekspor/impor tidak lagi dilakukan secara manual yakni secara tertulis di atas kertas, namun dimungkinkan pula dilakukan secara elektonis yakni ditulis dalam disket atau dilakukan antar komputer. Lajunya pertumbuhan perdagangan internasional

---

<sup>26</sup>Pasal 102 UU. No. 10 Tahun 1995 berbunyi: "Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba untuk mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Lihat/Bandingkan: *Infra*, catatan kaki 27.

dan tuntutan dalam menghadapi era pasar bebas dewasa ini memerlukan sarana yang cepat dan tepat. Hal ini menyebabkan cara yang terakhir yang banyak dipilih. Namun demikian, hal ini juga membuka peluang terjadinya penyelundupan gaya baru yakni penyelundupan administratif yang dilakukan dengan mempergunakan sarana komputer. Adapun caranya dapat dilakukan langsung pada komputer yang bersangkutan atau karena pemberitahuan atau pencatatan dapat dilakukan antar komputer maka dimungkinkan perbuatan tersebut dilakukan dengan komputer lain yang dihubungkan pada jaringan komputer pemberitahuan atau pencatatan bea.

Jika terjadi manipulasi atau pemalsuan keterangan, dokumen atau pencatatan pabean, maka dapat diterapkan terhadapnya ketentuan Pasal 103 huruf a dan/atau huruf c UU. No. 10 Tahun 1995 yang berbunyi:

"Barangsiapa yang:

- a. menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean;
- b. ...
- c. membuat menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan;
- d. ..., dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)."

Sedangkan jika terjadi pemusnahan atau penghilangan data yang berkaitan dengan pemberitahuan atau pencatatan pabean, terhadapnya dapat diterapkan ketentuan Pasal 104 huruf b dan/atau huruf c UU. No. 10 Tahun 1995, yang berbunyi:

"Barangsiapa yang:

- a. ...
- b. memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;

- c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pabean atau catatan;
- d. ..., dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Untuk menegaskan apakah pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean, meliputi pula data atau keterangan/-tulisan yang dihasilkan dengan proses komputer dan disimpan dalam media komputer yang disediakan untuk keperluan tersebut, maka perlu diatur lebih lanjut oleh Menteri keuangan. Peraturan Menteri ini sangat diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum<sup>27</sup>.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Undang-Undang Hak Cipta).

Menurut sejarahnya pengaturan hak cipta (*copyrights*) telah ada sejak tahun 1709 yaitu bersamaan dengan terbitnya "*The Statute of Anne*" yang membatasi hak cipta yang dipegang oleh penerbit. Selanjutnya ketentuan mengenai hak cipta menyebar dan berkembang di daratan Eropa termasuk di Belanda. Hak cipta di Belanda (*kopijrecht*) berkembang mulai dari Undang-Undang Tahun 1817 (hak cipta pada penerbit), Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1881 (hak khusus pencipta), Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1886 (perlindungan terhadap karya sastra dan seni) hingga terciptanya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912 yang dikenal dengan

---

<sup>27</sup> Dalam penjelasan Pasal 28 UU, No. 10 Tahun 1995 dinyatakan bahwa Undang-undang ini memberi kewenangan kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan Pemberitahuan Pabean, buku catatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean, misalnya bentuk Pemberitahuan Pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas.

"*Auteurswet 1912*". *Auteurswet 1912* inilah yang akhirnya juga berlaku di Indonesia pada masa kolonial hingga masa kemerdekaan<sup>28</sup>.

Perkembangan jaman (dari jaman penjajahan ke jaman kemerdekaan/pembangunan) dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti misalnya muncul media siaran dan rekaman menjadikan *Auteurswet 1912* tidak memadai lagi sehingga munculah Undang-Undang Hak Cipta nasional yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam rangka menjangkau bertambahnya bidang-bidang hak cipta yang perlu dilindungi akibat pesatnya perkembangan IPTEK (antara lain berkembangnya teknologi komputer), maka muncul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Bahkan pada saat naskah ini ditulis, pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru guna mengikuti perkembangan masa.

Sekalipun komputer terkait erat dengan bidang teknologi dan mempunyai peranan yang besar dalam pengembangan industri modern, namun kenyataannya pengaturan yang berkaitan dengan perlindungannya ditempatkan di bidang hak cipta, bukannya di bidang hak paten.

Sebagaimana diketahui bahwa peralatan komputer terdiri dari perangkat keras (*hardware*) yang terdiri dari CPU, *keyboard*, *screen* atau layar monitor, *printer*, disket, CD dll. dan perangkat lunak (*software*) yang terdiri dari program dan data. Perangkat keras yang terkait erat dengan

---

<sup>28</sup>Periksa: Marseno Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990. Halaman 1 - 4.



teknologi dan industri dapat dilindungi dengan hak paten, Sedangkan perangkat lunak seperti misalnya program komputer yang pengembangan dan pengaplikasiannya cenderung menitik beratkan pada aspek seni (*arts* rekayasa, dilindungi dengan hak cipta. Alasan lainnya mengapa program komputer termasuk hak milik intelektual yang perlu dilindungi oleh Undang-Undang Hak cipta adalah bahwa pada dasarnya program komputer juga merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan<sup>29</sup>.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia pada saat ini (UU. No. 6 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU. No. 7 Tahun 1987, selanjutnya disebut dengan singkatan UUHC) terdapat beberapa ketentuan yang mengatur masalah program komputer dan perlindungannya terhadap upaya penyalahgunaan hak ciptanya.

Dalam Pasal 1 huruf g ditentukan bahwa: "Program Komputer atau Komputer Program adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu". Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k diatur bahwa: "Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya: ... k. Program komputer atau Komputer Program; ...".

Jika terjadi penyalahgunaan komputer yang berupa pelanggaran hak cipta di bidang program komputer, misalnya dengan cara mengkopi atau menggandakan program komputer secara tidak sah (tanpa izin pemilik atau pemegang hak

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, Halaman 19.

cipta), maka terhadap pelakunya dapat diancam dengan ketentuan Pasal 14 huruf g. jo Pasal 44 ayat (1) dan atau ayat (2) UUHC. Berikut ini dikutipkan isi dari ketentuan-ketentuan tersebut:

Pasal 14 huruf g UUHC:

"Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta: ... g. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer atau Komputer Program oleh pemilik Program Komputer atau Komputer Program yang semata-mata dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri"

Pasal 44 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-- (seratus juta rupiah)"
- (2) "Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000,-- (lima puluh juta rupiah)"

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas nampak bahwa pada hakekatnya menggandakan (dengan cara mengkopi) program komputer yang bukan miliknya sendiri, merupakan pelanggaran hak cipta, penggandaan tersebut tidan dalam jumlah banyak (hanya satu atau dua) dan dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri (tidak untuk dikomersialkan). Namun dalam praktek yang terjadi di Indonesia pada saat ini, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan yang lebih luar (terutama berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional: "mencerdaskan kehidupan bangsa"), penggandaan program komputer dalam batas yang wajar dan untuk tujuan tertentu (misalnya hanya dalam jumlah kecil, untuk dipergunakan sendiri atau untuk tujuan pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengeta-

huan), diperkenankan dalam arti tidak akan dituntut secara hukum sebagai pelanggaran hak cipta<sup>30</sup>.

Ada satu hal lagi yang perlu dipertanyakan berkaitan dengan pengaturan penyalahgunaan komputer dalam UUHC. Sebagaimana diketahui bahwa perangkat lunak komputer selain program komputer juga terdiri dari data dan informasi yang dihasilkan oleh proses komputer, namun mengapa yang dilindungi hak cipta hanya program komputer saja. Hal ini perlu memperoleh pemikiran untuk pembaharuan UUHC di masa mendatang, karena dalam perkembangannya data komputer dapat disetarakan dengan karya cipta tertulis, terutama data komputer yang tersimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti disket dan *Compactdisc* (CD) yang didalamnya tertera label "Copyright"<sup>31</sup>.

#### 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Undang-Undang Perbankan)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Perbankan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Perubahan dari UU. No. 14 Tahun 1967 menjadi UU. No. 7 Tahun 1992 tersebut antara lain didasarkan atas pertimbangan perlunya perundang-undangan di bidang perbankan yang mampu menjangkau perkembangan

---

<sup>30</sup>Keadaan yang demikian ini dipandang dari aspek normatif tetap menjadi permasalahan, sebab sekalipun dalam realitanya banyak terjadi penggandaan program komputer secara illegal sebagaimana yang sering terlihat di *Computer Rental*, di komputer-komputer pribadi, di kantor-kantor maupun di berbagai tempat pendidikan di Indonesia, yang mana hal tersebut tetap dibiarkan dengan berbagai alasan, namun pada hakekatnya penggandaan secara terbatas tersebut tetap merupakan pelanggaran hak cipta.

<sup>31</sup>Sebagaimana diketahui bahwa seiring dengan kemajuan jaman dan era globalisasi telah banyak beredar berbagai pusat data atau informasi yang berupa journal, literatur, kamus, ensiklopedi dan sebagainya yang dikemas dalam bentuk "CD" (*Compactdisc*), yang didalamnya tertera label "copyright".

perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas.

Salah satu tantangan perkembangan perekonomian pada era globalisasi terutama globalisasi ekonomi adalah pengembangan pengaplikasian teknologi canggih seperti saran telekomunikasi dan komputer di bidang perbankan. Tuntutan peningkatan fasilitas kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen (nasabah) dan peningkatan persaingan antar Bank memacu lembaga perbankan untuk berlomba-lomba menciptakan keunggulan dengan sarana teknologi komputer.

Konsentrasi penciptaan teknologi rekayasa komputer untuk meningkatkan fasilitas pelayanan konsumen (nasabah) tersebut seringkali kurang memperhatikan aspek keamanannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai modus dalam perbuatan menguntungkan diri sendiri yang merugikan pihak nasabah atau bank itu sendiri dan telah mengarah pada tindak kriminal. Barangkali keadaan seperti inilah yang menyebabkan tindak penyalahgunaan komputer banyak terjadi pada lembaga-lembaga keuangan seperti bidang perbankan.

Penyalahgunaan komputer di bidang perbankan yang potensial terjadi adalah masalah pembocoran rahasia dan kecurangan bank.

Sebagaimana diketahui bahwa rahasia bank seperti rahasia tentang keadaan keuangan nasabah merupakan hal yang sangat esensial dan perlu mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 40 UU. No. 7 Tahun 1992 ditentukan bahwa:

(1)"Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada Bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh Bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal, 44."

(2)"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi"

Dalam pasal-pasal selanjutnya ditentukan bahwa Bank diperkenankan memberikan keterangan tentang keadaan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank dalam hal:

- a. Dengan ijin Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41);
- b. Dengan ijin Menteri Keuangan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42);
- c. Oleh Direksi Bank yang bersangkutan dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya (Pasal 43);
- d. Antar direksi Bank dalam rangka tukar menukar informasi antar Bank yang diatur oleh Bank Indonesia (Pasal 44)

Dengan penerapan teknologi komputer dalam operasional kegiatan perbankan, data yang menyangkut rahasia bank tidak lagi terbatas dalam bentuk tertulis di atas kertas, namun juga banyak yang berbentuk "denyut elektronis" yang tersimpan dalam berbagai media penyimpanan komputer. Lalu lintas transmisi data tersebutpun banyak dilakukan dengan mengkaitkan komputer dengan sarana telekomunikasi modern. Oleh sebab itu jika terjadi kasus pembocoran rahasia bank dengan sarana teknologi canggih misalnya dengan cara "*hacking*" dan lain sebagainya, disamping ketentuan lain yang sudah ada, terhadap pelakunya dapat diancam dengan ketentuan Pasal 47 UU. No. 7 Tahun 1992 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis dari menteri kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 atau tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, dengan sengaja memaksa Bank atau pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)."
- (2) "Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 ((dua milyar rupiah)."

Disamping itu sistem otomatisasi dalam rangka peningkatan fasilitas pelayanan dan kinerja di dunia perbankan telah membuka peluang untuk terjadinya kecurangan-kecurangan yang "aman" (sulit terdeteksi) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dengan teknik penyalahgunaan komputer yang disebut dengan "*the trojan horse*" atau yang dalam literatur lain disebut sebagai "*salami*" yaitu dengan memanipulasi program komputer agar secara otomatis mengurangi beberapa sen dari bunga setiap nasabah bank dan memasukkannya pada rekening pribadi atau seseorang (biasanya nasabah mengalami kesulitan dalam menghitung bunga, apalagi sampai ke hitungan sen), maka terhadap pelakunya dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU. No. 7 Tahun 1992. Cara lain yang potensial terjadi adalah dengan cara pemalsuan data komputer (*data diddling*) misalnya dengan menambah suatu catatan transaksi fiktif dalam pembukuan bank, maka terhadap pelakunya dapat diancam berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU. No. 7 Tahun 1992. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikutip secara lengkap isi dari Pasal 49 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1992:

"Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembuyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut;

diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)."

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana di bidang perbankan cenderung dilakukan oleh "orang dalam" (baca: oknum-oknum perbankan). Hal ini dapat dipahami karena sistem perbankan bersifat tertutup dan sulit ditembus oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Apalagi dengan dimanfaatkannya sistem yang didukung oleh teknologi canggih seperti komputer yang otomatis hanya dapat dioperasikan oleh mereka yang memiliki keahlian khusus dan diberi kewenangan secara sah untuk mengoperasikannya (ingat bahwa penyalahgunaan komputer biasanya dilakukan oleh "*the man behind the machine*"). Oleh sebab itu Undang-undang perbankan menetapkan ancaman sanksi yang relatif lebih berat dari pada ancaman sanksi yang ditetapkan dalam KUHP.

Dengan demikian pada hakekatnya UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dapat diterapkan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang terjadi di bidang perbankan.

Demikianlah inventarisasi dan kajian terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan hukum administratif yang memuat ketentuan pidana, yang berlaku di Indonesia saat ini, yang sekiranya dapat diterapkan pada berbagai bentuk kasus penyalahgunaan komputer.

Untuk memperjelas gambaran mengenai operasionalisasi perundang-undangan hukum pidana beserta perundang-undangan hukum administratif yang memuat sanksi pidana sebagaimana telah dikaji di atas, berikut ini akan penulis tampilkan sebuah bagan sebagai rangkuman, sebagai berikut:

JENIS PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PENYALAHGUNAAN KOMPUTER	PASAL YANG DAPAT DITERAPKAN	CATATAN
Menggunakan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau melampaui wewenang yang diberikan ( <i>Joy Computing</i> )	362 KUHP dst.	Dengan penafsiran Ekstensif: waktu atau <i>service</i> merupakan perluasan dari pengertian 'barang'
Menyambung dengan cara menambah terminal komputer baru tanpa izin dari pemilik sah jaringan komputer ( <i>Hacking</i> )	167 KUHP	' <i>Computervredebreuk</i> ' dianalogkan sebagai ' <i>Huisvredebreuk</i> '
	551 KUHP	Pekarangan(fisik) diperluas sebagai ' <i>Computer Network System</i> '
Manipulasi data atau program komputer yaitu menambah, mengurangi atau merubah data atau instruksi pada program sehingga program tersebut selain menjalankan tugas yang sebenarnya juga akan melakukan tugas lain yang tidak sah ( <i>The Trojan Horse</i> )	372 KUHP	Jika terdapat unsur kepercayaan dari pemilik program
	374 KUHP	Kepercayaan karena unsur pekerjaan, jabatan atau upah



	49 (1) 'c' UU. No. 7/1992	'Salami' yang dilakukan di bidang perbankan
	1 (1) 'a' jo. 28 UU. No. 3/1971	terdapat unsur: memperkaya diri/orang lain + merugikan keuangan negara
	1 (2) 'b' jo. 28 UU. No. 3/1971	terdapat unsur: memperkaya diri/orang lain + Penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri
Membocorkan data atau informasi yang dihasilkan oleh komputer (Data Leakage)	112 KUHP	Rahasia Negara
	113 dan 114 KUHP	Rahasia Militer/Hankam
	322 KUHP	Rahasia Jabatan
	324 KUHP	Rahasia Perusahaan
	431 KUHP	Dalam keadaan/situasi tertentu
	1 (1) ke-4 jo.13 UU. 11/PnPs/1963	terdapat muatan Politik dan berdasarkan pertimbangan yang bersifat 'politis'
	41 (2) jo. 40 UU. No. 7/1992	Rahasia Perbankan
Pemalsuan data/informasi komputer: merubah data sah/valid dengan cara yang tidak sah yaitu dengan mengubah input atau output data (Data Diddling)	263 KUHP	Data atau informasi yang dihasilkan komputer, baik yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik/magnetik, maupun hasil cetak printer, dikategorikan sebagai 'surat'
	1 (1) 'a' jo. 28 UU. No. 3/1971	terdapat unsur: memperkaya diri/orang lain + merugikan keuangan negara

	1 (2) 'b' jo. 28 UU. No. 3/1971	terdapat unsur: memperkaya diri/ orang lain + Pe- nyalahgunaan we- wenang oleh Pe- gawai Negeri
	103 huruf a & c UU. No. 10/1995	menyangkut doku- men ekspor/import
	49 (1) 'a' UU. No. 7/1992	kecurangan di bi- dang Perbankan
Merusak data atau program komputer dengan memasukkan <i>virus</i> , <i>time bomb</i> / <i>logic bomb</i> atau dengan cara lain- nya ( <i>Damage to Stored Data and Program</i> )	406 KUHP dst.	Pengertian barang ditafsirkan seca- ra luas sehingga meliputi pula <i>Computer Software</i>
	1 (1) ke-5 jo.13 UU. 11/PnPs/1963	Dengan tujuan po- litis untuk me- ngacaukan stabi- litas nasional
Menyebarkanluaskan gambar, uraian atau informasi lainnya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno me- lalui jaringan internet, sehingga dapat diakses oleh siapa saja ( <i>Cybersex</i> )	283 dan 283 KUHP	Pengertian gambar /uraian/informasi termasuk pula ha- sil dari denyut/ sinyal elektronik
Agitasi dan propaganda (dalam arti negatif: mendeskreditkan pemerin- tah yang sah) melalui jaringan in- ternet atau sistem jaringan kompu- ter	154 - 163 KUHP	Tergantung pada substansi dari 'agipro' tersebut
	1 (1) ke-1 c. jo 13 UU. 11/PnPs/1963	Dengan 'pertim- bangan politis': perbuatan terse- but berbahaya se- cara politis
Memperbanyak data, informasi atau program komputer dengan cara meng- copy atau menggandakan secara ti- dak sah atau tanpa izin dari pemi- liknya	362 KUHP dst.	Dengan penafsiran luas: barang me- liputi pula ' <i>in- tangible objek</i> ' dan mengambil ti- dak harus secara fisik
	14 'g' jo. 44(1) UU. No. 6/1982 yang telah diru- bah dan ditambah dengan UU.7/1987	khusus pada pro- gram komputer yang telah dilin- dungi oleh hak cipta

	14 'g' jo. 44(2) UU. No. 6/1982 yang telah diru- bah dan ditambah dengan UU.7/1987	mengkomersialkan hasil penggandaan program komputer yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hak cipta
--	--	---

Sekalipun dalam catatan bagan tersebut nampak adanya beberapa permasalahan dalam penerapan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini terhadap delik penyalahgunaan komputer, namun setidaknya kajian tersebut dapat dijadikan dasar pemikiran untuk mengatasi penyalahgunaan komputer dengan sarana hukum pidana.

Ketentuan-ketentuan yang berhasil ditelusuri dan dikaji penulis tersebut di atas tentu saja belum bersifat menyeluruh (tuntas). Pemilihan Undang-Undang dan pasal-pasal tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan ketentuan mana yang paling relevan atau paling terkait dengan bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer tertentu dan bagaimana model penerapan hukum terhadap penyalahgunaan komputer yang potensial terjadi. Dengan dasar pengetahuan dan ketrampilan yang memadai disertai dengan keberanian bertindak, diharapkan aparat penegak hukum akan mampu mengembangkan model penerapan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang berkembang dari masa ke masa.

#### **B. Penerapan Hukum Terhadap Perkara Penyalahgunaan Komputer Di Indonesia**

Sekalipun teknologi komputer masih dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru di Indonesia, namun sebagaimana dapat diamati pada saat ini bahwa komputerisasi telah meram-

bah di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terutama nampak sekali pada bidang-bidang yang kini dirasa tidak mungkin dilakukan secara manual lagi, seperti bidang telekomunikasi, bidang industri modern, bidang perekonomian, khususnya bidang keuangan dan perbankan, bidang riset dan lain sebagainya.

Pemanfaatan teknologi maju seperti komputer di Indonesia ternyata juga membuka peluang bagi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan komputer yang mengarah pada tindak kriminal. Hal ini didukung dengan fakta terjadinya beberapa kasus kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer di Indonesia, bahkan beberapa diantaranya diselesaikan melalui proses perdilan pidana. Sekalipun fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa kasus-kasus penyalahgunaan komputer di Indonesia tidak sehebat kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang terjadi di luar negeri, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya, namun kenyataan kasus-kasus tersebut tetap menimbulkan permasalahan yang serius dalam hal pembuktian dan penerapan hukumnya.

Berikut ini penulis akan membeberkan beberapa kasus penyalahgunaan komputer di Indonesia beserta penyelesaiannya dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya penulis juga akan mengupas kasus-kasus tersebut, baik secara umum maupun yang berkaitan dengan penerapan hukumnya. Adapun tidak semua kasus penyalahgunaan komputer dapat dibahas disini sebab dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa sampel dari beberapa perkara penyalahgunaan komputer yang telah diproses di persidangan yang dianggap relevan.

1. Kasus manipulasi dana bank di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Brigjen. Katamso Yogyakarta (tahun 1982)<sup>32</sup>.

a. Identitas pelaku sebagai terdakwa:

Pelaku utama dalam kasus ini adalah: SALIP DJAMHARI, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan BRI Cabang Jl. Brigjen. Katamso Yogyakarta, dan LIAUW JOEN TJIIN alias A CEN, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dagang,

Kedua terdakwa tersebut diperiksa dalam perkara terpisah.

b. Kasus Posisi:

Salip Djamhari sebagai karyawan BRI Cabang Jl. Brigjen. Katamso Yogyakarta bersama dengan Liauw Joen Tjiin alias A Cen sebagai salah seorang nasabah BRI tersebut sejak hari Rabu tanggal 15 September 1982 sampai dengan tanggal 12 Desember 1982 (jadi dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut) telah meng-*clearing*-kan beberapa *cheque*/bilyet giro BRI Cab. Brigjen Katamso Yogyakarta melalui Bank Niaga Cabang Yogyakarta.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara, pertama-tama A Cen memberitahu Salip Djamhari melalui telepon, untuk memilihkan rekening atas nama A Cen pada saat petugas *clearing* BRI tersebut (dalam hal ini saksi Didik Djunaidi) menyerahkan warkat *clearing* yang baru

---

<sup>32</sup> Sumber kasus: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 33/1983/Pid/PN.Yk. tanggal 26 September 1983, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta No. 41/1983/Pid/PTY. tanggal 6 Maret 1984, Salinan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 363/K/Pid/1984 tanggal 25 Juni 1984, masing-masing a.n. Terdakwa LIAUW JOEN TJIIN alias A CEN, dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. 34/1983/Pid/PN.Yk. tanggal 14 September 1983, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta No. 40/1983/Pid/PTY. tanggal 30 Januari 1984, masing-masing a.n. Terdakwa SALIP DJAMHARI.

diambil dari Bank Indonesia Cabang Yogyakarta. Hal tersebut dilaksanakan oleh Salip Djamhari pada saat tugas kartu sedang memilih-milih, Salip Djamhari pura-pura membantu tugas Bagian Kartu (*Kaartkeeper/Card Keeper*) yang sebenarnya bukan merupakan tugasnya, dan pada kesempatan itu Salip mengambil satu *cheque/Bilyet Giro* atas nama A Cen untuk disisihkan dan disembunyikan agar luput dari penelitian Bagian Kartu dan petugas validasi. Selanjutnya terdakwa menuju ke Bagian "Mesin Pembukuan" dengan membawa *cheque/bilyet giro* tersebut untuk ditulis jumlah nominalnya. Mula-mula Salip melakukan pekerjaan sebagai operator mesin pembukuan yang juga bukan merupakan tugasnya. Pada saat inilah Salip kemudian membuka *cheque/Bilyet Giro* yang disembunyikan tersebut ke dalam mesin pembukuan dengan cara-cara yang tidak semestinya yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>33</sup>

- setelah warkat-warkat tersebut sampai di Bagian Pembukuan (*Boekkeeper*), terdakwa Salip memasukkan nominal warkat BB - 48 3441 ke dalam *Bath* dan diteruskan memasukkan ke dalam mesin pembukuan tanpa dengan memasukkan kartu rekening terdakwa A Cen yaitu Rekening No. 13 - 56 - 0557 atas nama Ny. Kartinah.
- selanjutnya terdakwa melakukan pengendoran terhadap mesin pembukuan dengan jalan mengembalikan jalan mesin sehingga dalam kertas daftar tidak tercantum tulisan apapun walau dia telah menekan alat yang mengeluarkan angka.

---

<sup>33</sup> Cara-cara tersebut sesuai dengan peragaan terdakwa Salip Djamhari pada saat pemeriksaan di lokasi/TPK.

Adapun maksud melonggarkan rol dan memutar *strook* mesin sedemikian rupa adalah agar nominal *cheque* atau Bilyet Giro dari A Cen terekam dalam kertas namun tidak tampak dalam *Bath Sheet* sehingga kartu nasabah atas nama Ny. Kartinah tidak mengalami mutasi. Jadi yang dikendorkan adalah rol kertasnya, sehingga kalau diteliti terdapat catatan bintang yang tidak begitu tampak (jika diamati secara seksama baru nampak agak jelas, karena jika tidak ada dananya maka saldonya akan berwarna merah secara otomatis). Dengan demikian uang BRI Cabang Jl. Brigjen. Katamso Yogyakarta dapat dipindahkan ke rekening A Cen di Bank Niaga Yogyakarta tanpa merubah atau mengurangi jumlah uang A Cen di rekening tersebut. Setelah itu lembaran warkat No. BB - 48 3441 dimusnahkan oleh terdakwa Salip.

Selanjutnya mulai dari awal September 1982 sampai dengan Desember 1982 A Cen sering melakukan kliring beberapa *cheque*/Bilyet Giro BRI Cab. Brigjen. Katamso Yogyakarta dengan terlebih dahulu menghubungi Salip Djamhari agar supaya terdakwa dapat bersiap-siap untuk melakukan kliring tanpa dana dengan cara-cara seperti tersebut di atas.

Perbuatan dengan cara-cara tersebut dilakukan berturut-turut, dengan jumlah kliring yang bervariasi (kadang-kadang 10 juta rupiah, 25 juta rupiah sampai 30 juta rupiah). Jarak waktu kliring sekitar 2 sampai 5 hari, bahkan ada yang sehari melakukan dua kali kliring, sehingga terdakwa telah melakukan kliring dengan cara tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat) kali selama 4

(empat) bulan. Semua *cheque*/Bilyet giro tersebut memiliki nilai nominal Rp 845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan dana pada rekening yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk ditarik, karena A Cen tidak pernah setor uang dan melakukan kewajiban selaku nasabah BRI Cab. Brigjen. Katamso Yogyakarta.

Disamping kliring, A Cen juga pernah mengambil uang secara tunai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Hasil jarahan secara kliring maupun dengan penarikan tunai tersebut telah dipergunakan A Cen dan tidak bisa dikembalikan ke BRI sehingga dengan demikian BRI Cabang Jl. Brigjen. Katamso Yogyakarta menderita kerugian sebesar Rp 995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

A Cen mempergunakan hasil perbuatan tersebut antara lain untuk membeli tiga buah mobil (dua Honda Accord dan satu Honda Civic), membeli emas sebanyak 3,02 Kg dan untuk membangun rumah di Jl. Ketandan No. 13 A Yogyakarta. Sedangkan Salip Djamhari sendiri atas "order" tersebut mendapatkan bagian/imbalan berupa uang tunai sebanyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan emas lantakan cap "London" sebanyak 10 (sepuluh) tolas ( $\pm 100$  gr).

c. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa:

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dalam persidangan di Pengadilan mengajukan Surat Dakwaan terhadap terdakwa Salip Djamhari dengan "Dakwaan Tunggal"-nya yaitu pada dasarnya menuduh bahwa terdakwa



telah melakukan manipulasi uang negara (cq. BRI Cabang Brigjen Katamso Yogyakarta) dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam kasus posisi tersebut di atas, sehingga terdakwa didakwa telah melakukan:

- Tindak Pidana Korupsi, ex Pasal 1 ayat (1) sub "b" jo. Pasal 28 UU. No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selajutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana (*Requisitoir*)-nya, berpendirian bahwa terdakwa Salip Djamhari telah terbukti di persidangan pengadilan, telah melakukan perbuatan:

- Tindak Pidana Korupsi, ex Pasal 1 ayat (1) sub "b" jo. Pasal 28 UU. No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

untuk kesalahan terdakwa tersebut, maka Jaksa penuntut Umum menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

- Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Hukuman denda sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; dst.

Sementara itu terdakwa A Cen yang diperiksa dalam perkara tersendiri didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, juga dengan Dakwaan Tunggalnya yakni bahwa terdakwa didakwa melakukan:

- Tindak Pidana Korupsi, ex Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 UU. No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan tersebut dipertahankan oleh Jaksa Penuntut umum dalam Tuntutan Pidananya yang menyatakan bahwa terdakwa A Cen telah terbukti dipersidangan telah melakukan:

- Tindak Pidana Korupsi, ex Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 UU. No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; dst.

d. Putusan Pengadilan Negeri:

Setelah melalui proses persidangan yang meliputi pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan bukti-bukti lainnya, pengajuan tuntutan penuntut umum dan pengajuan pembelaan terdakwa, maka akhirnya terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memperdaya mesin pembukuan di BRI Cabang Brigjen. Katamso Yogyakarta. Oleh sebab itu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan pada kedua terdakwa (diperiksa dalam perkara terpisah) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1) Untuk terdakwa Salip Djamhari:

- Menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan: "Tindak Pidana Korupsi";
- Menghukum terdakwa dengan hukuman 6 (enam) tahun dan denda Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

- Menetapkan bahwa tahanan yang sudah dijalani dikurangkan dari pidananya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos dalam perkara ini sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); dst.

2) Untuk terdakwa Liauw Joen Tjiin alias A Cen:

- Menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana "korupsi";
- Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dst.

e. Putusan Pengadilan Tinggi:

1) Dalam perkara terdakwa Salip Djamhari:

Majelis Hakim Tingkat banding menerima fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, namun Hakim Banding memandang perlu memperbaiki bunyi putusan Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan rumusan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, jenis hukuman yang tidak disebutkan dalam putusan peradilan tingkat pertama dan besarnya biaya perkara yang dinilai terlalu tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan untuk pemeriksaan banding dari terdakwa Salip Djamhari tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 September 1983 No. 34/1983/Pid/PN.Yk. yang dimohonkan banding menjadi berbunyi sebagai tersebut di bawah ini:
  - Menyatakan terdakwa Salip Djamhari bersalah melakukan kejahatan: "melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu, dilakukan berturut-turut sehingga merupakan perbuatan berlanjut;
  - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
  - Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana tersebut;
  - Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); dst.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap terdakwa Salip Djamhari tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian proses penyelesaian kasus korupsi ini hanya sampai tingkat peradilan banding.

- 2) Dalam perkara terdakwa Liauw Joen Tjiin alias A Cen: Majelis Hakim Tingkat banding setelah memeriksa berkas perkara pemeriksaan tingkat pertama yang

dimintakan banding, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menghukum terdakwa untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 September 1983 No. 33/1983/Pid/Pn.Yk. untuk selebihnya; dst. (

Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

f. Putusan Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi dalam perkara terdakwa Liauw Joen Tjiin alias A Cen menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Hal ini dikarenakan hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur sebagai akibat pemohon tidak mengajukan memori kasasi: dst.

Berdasarkan deskripsi kasus korupsi yang dilakukan dengan sarana komputer tersebut di atas, penulis mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan komputer dan kebijakan penerapan hukumnya:

- a. Kasus ini dianggap sebagai kasus penyalahgunaan komputer yang pertama kali di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoirnya* pada perkara terdakwa Liauw Joen Tjiin alias A Cen No. RPK.16/156/VI/1983 tanggal 1 September 1983 halaman 2 yang berbunyi:

"...bahwa perkara yang kita hadapi sekarang ini bukanlah sekedar perkara pidana biasa, tetapi adalah perkara pidana khusus, atau lebih jelasnya lagi adalah perkara korupsi yang sangat merugikan keuangan negara khususnya BRI Cabang Brigjen. Katamso Yogyakarta sampai jumlah 1 milyar lebih, yang dilakukan dengan cara-cara istimewa yang berbahaya yang baru pertama kali ini terjadi di Yogyakarta dan bahkan mungkin yang pertama kali pula terjadi di Indonesia"

- b. Dalam uraian kasus di atas kata tata atau istilah yang sering muncul adalah "mesin pembukuan" dan tidak dijumpai sama sekali kata-kata "komputer" atau istilah-istilah yang pada umumnya terkait dengan komputer. Jika diamati mesin pembukuan ini bentuknya tidak mirip dengan komputer namun lebih mirip sebagai mesin ketik. Sekali-pun demikian mesin pembukuan ini berjalan atau bekerja dengan menerapkan teknologi komputer. Hal ini dapat dilihat dari fungsi mesin pembukuan ini yaitu antara lain dapat diprogram untuk kepentingan operasi sistem pembukuan perbankan, dapat untuk merekam/menyimpan data (misalnya keadaan keuangan nasabah) serta dapat bekerja secara otomatis (misalnya mesin tersebut secara otomatis akan mengeluarkan indikasi berupa saldo yang berwarna merah dalam hal mendebet rekening nasabah yang dananya kurang atau tidak ada sama sekali). Karena mesin pembukuan ini dioperasikan dengan sistem komputer maka perbuatan penyalahgunaan mesin pembukuan ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan komputer.
- c. Cara-cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan kejahatannya terhitung unik, apalagi pada saat itu teknologi komputer belum berkembang pada saat ini sehingga kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat. Perbuatan terdakwa dalam menyiasati prosedur perbankan

dilakukan pula dengan cara memperdaya mesin pembukuan, sehingga sulit dideteksi secara cepat. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa terdakwa melakukan kejahatannya sampai sebanyak 44 kali selama 4 bulan. Disamping itu kasus ini agak menyulitkan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan. Bahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus mengadakan penelitian di lokasi tempat kejadian untuk mengetahui duduk perkaranya dengan jelas)<sup>34</sup>. Sekalipun demikian jika dibandingkan dengan kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang muncul kemudian, kasus ini dapat dikatakan relatif sederhana karena cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa sebenarnya masih konvensional. Hal ini nampak dari cara terdakwa memperdaya mesin pembukuan dilakukan secara manual (fisik) yaitu dengan cara mengendorkan strook mesin tersebut.

- d. Karena kebetulan perbuatan terdakwa dilakukan terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang nota bene merupakan Bank milik negara maka cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa tidak terlalu mempengaruhi masalah penerapan hukumnya. Hal ini disebabkan karena yang harus dibuktikan dalam hal ini adalah tujuan akhir dari perbuatan terdakwa yaitu memperkaya diri dan merugikan keuangan negara. Sehingga kedua terdakwa dapat dijaring dengan Undang-Undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun ketentuan pokok yang didakwakan kepada terdakwa

<sup>34</sup>Sebagaimana di jelaskan oleh Djuwarin Kardjono, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Hakim Anggota Majelis yang memeriksa perkara terdakwa Salip Djamhari, dalam wawancara pribadi dengan penulis pada tanggal 25 Januari 1990. Dikatakannya bahwa hingga terdakwa mengakui kesalahannya, majelis hakim pada saat itu belum menemukan dimana letak hubungan antara kesalahan terdakwa dengan tindakan yang dilakukan terdakwa pada mesin pembukuan. Majelis hakim pada saat itu baru paham setelah terdakwa memperagakan perbuatannya di lokasi TKP.

Salip Jamhari adalah Pasal 1 ayat (1) sub "b" UU. No. 3 Tahun 1971 yang unsur-unsurnya adalah:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, jabatan atau kedudukan;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
- 3) Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hal tersebut apabila dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang digali dalam persidangan sebagaimana dapat dibaca dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum maupun dalam putusan Hakim, dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Identitas terdakwa dalam dakwaan tersebut adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Brigjen. Katamso Yogyakarta sehingga terdakwa dalam melakukan perbuatannya berstatus sebagai pegawai negeri. Fakta ini merupakan penjabaran dari unsur pertama.
- 2) Terdakwa secara melawan hukum baik langsung maupun dengan perantara orang lain telah memperoleh atau mendapat uang dari BRI tersebut. Fakta ini merupakan kata-kata lain yang sama tujuannya dengan unsur kedua.
- 3) Rangkaian ke-45 perbuatan tersebut di atas telah mengakibatkan BRI Cabang Brigjen. Katamso Yogyakarta yang dalam hal ini adalah Bank milik negara, dirugikan dengan jumlah Rp 845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Fakta ini merupakan bukti dari terpenuhinya unsur ketiga.



Sedangkan ketentuan pokok yang didakwakan kepada terdakwa Liauw Joen Tjiin alias A Cen adalah Pasal 1 ayat (1) sub "a" UU. No. 3 Tahun 1971 yang unsur-unsurnya adalah:

- 1) Dengan melawan hukum;
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
- 3) Secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara;

Unsur-unsur tersebut akhirnya dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa selaku nasabah BRI Cabang Brigjen. Katamso Yogyakarta dengan rekening atas nama Ny. Karlina mengetahui bahwa rekening tersebut sudah tidak ada dananya, namun demikian terdakwa telah melakukan kliring cheque/Bilyet Giro melalui Bank Niaga Yogyakarta sebanyak 44 kali hingga mencapai 815 juta rupiah dan melalui validasi tunai sebesar 10 juta rupiah, tanpa melalui suatu mutasi pada kartu nasabah yang bersangkutan. Fakta ini merupakan bukti dari unsur pertama.
- 2) Dengan cara-cara sebagaimana disebutkan dalam butir 1) tersebut terdakwa telah memperoleh hasil lebih dari Rp 815.000.000,00 yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya

antara lain untuk membeli dua buah Honda Accord keduanya tahun 1982, sebuah Honda Civic tahun 1982, emas sebanyak 5 kg lebih, membangun rumah di Jl. Ketandan 13 A Yogyakarta. Disamping itu terdakwa juga memberikan sebagian dari hasil jarahannya yakni 11 batang emas lantakan dan uang Rp 4.000.000,00 kepada Salip Djamhari. Fakta tersebut telah memenuhi unsur kedua.

- 3) Uang sebanyak Rp 845.000.000,00 yang diperoleh terdakwa dengan melalui kliring dan pengambilan tunai tanpa mutasi rekening atas nama Ny. Karlina yang tidak ada dananya tersebut merupakan milik dari BRI Cabang Jl. Brigjen Katamso Yogyakarta yang juga merupakan Bank milik negara (Bank Pemerintah). Dengan demikian unsur ketiga terpenuhi.

Penerapan ketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kedua terdakwa tersebut menunjukkan bahwa UU. No. 3 Tahun 1971 dapat diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan komputer (dalam kasus ini adalah penyalahgunaan mesin pembukuan yang dikendalikan dengan sistem komputer).

Pengertian unsur "barangsiapa" yang terdapat dalam UU. No.3 Tahun 1971 tersebut ditujukan bagi setiap orang (tidak terbatas pada pegawai negeri saja) sehingga terdakwa yang berstatus sebagai "orang swasta"-pun dapat dikenai ketentuan dalam UU. No. 3 Tahun 1971. Hal ini terbukti dengan diterapkannya Undang-Undang Korupsi terhadap terdakwa A Cen yang bukan sebagai pegawai negeri.

2. Kasus "*Computer Crime Unauthorized Transfer*" dana bank di Bank Negara Indonesia 1946 New York Agency (tahun 1986/1987)<sup>35</sup>.

a. Identitas pelaku sebagai terdakwa:

Terdakwa yang terlibat dalam kasus ini setidaknya ada empat orang yang masing-masing diperiksa dalam perkara secara terpisah. Dalam bahasan ini penulis hanya akan menampilkan dua terdakwa yang dipandang sebagai pelaku utama dalam kasus ini yaitu:

SENO ADJIE, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Direktur Pemasaran PT. Anggun Ayu Indah Jakarta. Dan RUDY DEMSY, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta (eks Karyawan BNI 1946 cabang New York - USA).

b. Kasus posisi:

Pada awal Desember 1986 di berbagai tempat di Jakarta antara lain di Hotel Aryaduta, Hotel Kemang dan di Ciputat diadakan serangkaian pembicaraan antara terdakwa SENO ADJIE dengan terdakwa RUDY DEMSY, Tengku Malik Eldy dan Abdul Malik Darpi. Inti dari pembicaraan tersebut adalah rencana untuk menjalankan suatu "bisnis besar" yang memerlukan beaya.

Sebelumnya perlu terlebih dahulu diketengahkan hubungan dari personil yang mengadakan pembicaraan tersebut dengan

---

<sup>35</sup> Sumber Kasus: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/X/Pid/B/1987/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Maret 1988; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 94/Pid/1988/PT.DKI. tanggal 30 Mei 1988; Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1852 K/Pid/1988 tanggal 21 Desember 1988, masing-masing a.n. Terdakwa Seno Adjie, dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 136/X/Pid/B/87/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Maret 1988; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 82/Pid/1988/PT.DKI. Tanggal 30 Mei 1988; Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1851 K/Pid/1988 tanggal 1 Desember 1988, masing-masing a.n. Terdakwa Rudy Demsy.

terdakwa Seno Adjie. Tengku Malik Eldy adalah karyawan dari Seno Adjie sedangkan Abdul Malik Darpi (pengusaha) dan Rudy Demy (karyawan BNI 1946 New York Agency tahun 1978- 1986) adalah saudara dari terdakwa Seno Adjie.

Rudy Demy sebelum mengundurkan diri, selaku Karyawan BNI 1946 New York Agency, menjabat sebagai *Local Staff* dengan tugas Penyusun Data Komputer. Disamping itu Rudy Demy Juga memegang "*User I.D.*" dan "*Enter Password*" dengan kode "RUDEMS" (merupakan Singkatan dari Rudy Demy) untuk City Bank New York dan *Password* untuk Mantrust Bank New York. Semua *password* tersebut bersifat rahasia. Setelah Rudy Demy mengundurkan diri dari BNI 1946 New York Agency, kode "RUDEMS" tersebut belum diganti dengan kode baru oleh pimpinan BNI 1946 di New York Agency.

Pada tanggal 10 Desember 1986 Seno Adjie, bertemu kembali dengan Rudy Demy, Tengku Malik Eldy dan Abdulmalik Darpi di Orchid Hotel Singapore. Di tempat ini Abdulmalik Darpi menyerahkan uang sebesar U.S.\$ 10.000,00 kepada Rudy Demy untuk modal bisnis tersebut. Beberapa hari kemudian mereka berangkat ke Frankfurt Jerman, lalu setelah tinggal beberapa hari di Frankfurt, mereka meneruskan perjalanannya ke New York - USA.

Pada tanggal 19 - 24 Desember 1986, mereka pergi ke Panama City untuk membuka rekening (A/C) pada beberapa Bank di Panama City. Setelah itu mereka kembali lagi ke New York USA.

Pada tanggal 31 Desember 1986, Seno Adjie ditemani Heri Arendra pergi menjemput Rudy Demy dengan membawa satu set Personal Computer menuju ke "Best Western Hotel Long Island Express Way Queens" New York.

Di salah satu kamar pada hotel tersebut, terdakwa Seno Adjie bersama Rudy Demsy menyetel satu set *Personal Computer* merk *Apple II C* Order No. A-2 M 400 Model No. G.090 H Serial No. T.00443.086, *Keyboard* No. F.23.400 dan *smart Modem* 1200 yaitu satu set *Personal Computer* yang dibawanya itu. Setelah selesai, maka Rudy Demsy yang telah mengerti dan memahami kode rahasia (*Password* serta *Testkey*) BNI 1946 New York Agency yang saat itu masih memakai kode rahasia "RUDEMS" kemudian mengoperasikan komputer tersebut. Cara-cara yang dilakukan adalah memakai "*User I.D.*" dan "*Password Enter*" mengadakan hubungan dengan Komputer Induk (*Main Frame*) City Bank New York serta dengan "*Password Release*" kemudian memasukkan data dan memerintahkan mentransfer dana dari rekening BNI 1946 New York Agency ke rekening bank lain yang ditunjuk. Demikian dan seterusnya. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1987, petugas *Deputy Security Manager* pada Kantor Besar BNI 1946 Jakarta (saksi Bambang Wresniwiro) menerima laporan dari komputer adanya pendebetan pada rekening Kantor Besar BNI 1946 di City Bank New York sebesar U.S.\$ 9.100.000,00. Kemudian Kantor Besar BNI 1946 Jakarta melaporkan pada Kantor BNI 1946 New York Agency yang di terima oleh Saksi Drs. M. Noor Alwi. Selanjutnya bersama saksi J.S. Satoto laporan tersebut diteruskan pada Pimpinan BNI 1946 New York Agency (saksi Hendrik Willem Tehubijuluw).

Atas laporan itu kemudian diadakan penelitian, karena baik pimpinan bank maupun J.S. Satoto yang memegang *Release Password* untuk City Bank - Irving trust dan Mantrust (Manufacturers Hannover Trust Coy), merasa tidak pernah merelease pentansferan (pendebetan) uang milik BNI 1946 tersebut. Hasil akhir dari penelitian tersebut, disimpul-

kan bahwa telah terjadi apa yang disebut "*Unauthorized transfer*" (transfer yang tidak sah) dana milik BNI 1946 New York Agency melalui "*Transfer Electronic Payment*".

Transfer tersebut dilakukan pada 31 Desember 1986 yaitu sejumlah U.S.\$ 9.100.000,00 dari rekening (A/C) Kantor Besar BNI 1946 No. 10957914 pada BNI 1946 New York Agency rekening No. 544772376 pada Mantrust, dan selanjutnya di-transfer lagi untuk keuntungan beberapa rekening di Panama City melalui beberapa Bank perantara di New York. Rekening-rekening di Bank-Bank penerima di Panama tersebut diatas-namakan Tengku Malik Eldy.

Selain itu terjadi pula pendebetan rekening BNI 1946 New York Agency akibat *Unauthorized Transfer* sebesar US.\$ 9.832.500,00 dengan tujuan Bank di Honkong dan Luxemburg melalui beberapa Bank perantara di New York.

Dengan telah terjadinya *Unauthorized transfer* tersebut di atas, maka dana milik BNI 1946 secara resmi telah masuk dan diterima untuk keuntungan rekening pada berbagai Bank penerima tersebut.

Setelah mengetahui kejadian/keadaan ini, oleh pihak BNI 1946 telah diambil langkah penyelamatan dana tersebut dengan cara: "*Stop Payment dan Retour*" pada "Bank yang dilalui (Bank Perantara)" atau juga pada "Bank Tujuan" dari *unauthorized transfer* tersebut. Usaha ini berhasil dengan baik, kecuali pada Banco de Occidente (Panama) dimana BNI 1946 harus membayar biaya atas dibatalkannya "*Forward Contract*" valuta asing Swis (Frans) yang ditutup oleh pemilik/pemegang rekening No. 02-0203701. Biaya sebesar US.\$ 10.734,54 tersebut langsung dipotong oleh Bank yang bersangkutan pada waktu *Retour* dana tersebut ke BNI 1946 New York Agency.

Untuk menghilangkan jejak, Seno Adjie telah menyobek (menghilangkan) beberapa lembaran Paspor RI No. 404377 atas nama Seno Adjie yaitu pada halaman 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 agar tidak diketahui bahwa ia, terdakwa Seno Adjie pernah pergi ke luar negeri. Rudy Demy juga melakukan hal yang sama yakni dengan menghilangkan lembaran Paspor RI No. 405073 atas nama Rudy Demy yaitu pada halaman 15, 16, 33 dan 34.

c. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa:

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam persidangan Pengadilan mengajukan "Surat Dakwaan" terhadap terdakwa SENO ADJIE, tertanggal 1 Oktober 1987 No. P-06/Sus/6/87. dengan dakwaan sebagai berikut:

- **Kesatu:**

= **Primair:**

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, ex. Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

= **Subsidiar:**

Percobaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama, ex. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

= **Lebih Subsidiar:**

Permufakatan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berturut-turut sebagai Perbuatan berlanjut, ex. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

= Lebih Subsidair Lagi:

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, ex. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

= Lebih-Lebih Subsidair Lagi:

Percobaan Pencurian oleh dua orang secara bersama-sama, ex. Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 KUHP.

= Lebih-Lebih-lebih Subsidair Lagi:

Membantu melakukan Tindak Pidana Korupsi, ex. Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 56 KUHP.

- Kedua:

Pengrusakan Dokumen milik negara, ex. Pasal 233 KUHP.

Selanjutnya dalam *requisitoir*"nya, Jaksa Penuntut Umum berpendirian bahwa perbuatan terdakwa SENO ADJIE yang terbukti di persidangan pengadilan adalah merupakan:

- Kesatu: *Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Kedua: *Pengrusakan Dokumen milik Negara*, sebagaimana diatur dan diancam berdasar Pasal 233 KUHP.

Untuk kesalahan terdakwa tersebut, maka Jaksa menuntut kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, antara lain agar:

- Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Terdakwa dijatuhi hukuman denda sebesar: Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;



- Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar US.\$ 40.000,- (empat puluh ribu US dollar); dst.

Sedangkan terdakwa RUDY DEMSY yang disidangkan secara terpisah, juga dijerat dengan dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari surat dakwaan tanggal 1 Oktober 1987 No. P.04/SUS/G/87, yang pada intinya terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana:

- **Kesatu:**

= **Primair:**

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, ex. Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

= **Subsidaire:**

Percobaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama, ex. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

= **Lebih Subsidaire:**

Permufakatan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berturut-turut sebagai Perbuatan berlanjut, ex. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

= **Lebih Subsidaire Lagi:**

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, ex. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

= Lebih-Lebih Subsidaire Lagi:

Percobaan Pencurian oleh dua orang secara bersama-sama, ex. Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 KUHP.

- Kedua:

Pengrusakan Dokumen milik negara, ex. Pasal 233 KUHP.

Selanjutnya terhadap terdakwa RUDY DEMSY ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana:

- Kesatu: *Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Kedua: *Pengrusakan Dokumen milik Negara*, sebagaimana diatur dan diancam berdasar Pasal 233 KUHP.

Untuk kesalahannya tersebut mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar US.\$ 40.000,00; dst.

d. Putusan Pengadilan Negeri:

Setelah melalui proses persidangan yang meliputi pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan bukti-bukti lainnya, pengajuan tuntutan penuntut umum dan pengajuan pembelaan terdakwa/penasihat hukumnya. Selanjutnya masing-masing Majelis Hakim melakukan pertimbangan

terhadap fakta yang terungkap di persidangan, baik yang berupa kajian yuridis praktis maupun kajian yang bersifat ilmiah, dan akhirnya masing-masing Majelis hakim dalam sidangnya menjatuhkan putusan pada kedua terdakwa (dalam sidang terpisah) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1) Untuk terdakwa SENO ADJIE:

- Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana :

I - Korupsi yang dilakukan bersama-sama.

- Percobaan Korupsi yang dilakukan bersama-sama.
- Permufakatan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut.

II- Pengrusakan dokumen milik negara.

- Membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana: "*Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu-Lebih Subsidair Lagi;
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan hukuman penjara lamanya: 3 (tiga) tahun dengan ketentuan lamanya terdakwa dalam penahanan di Rumah Tahanan Negara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya; dst.

Atas putusan Hakim Pertama tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa mengajukan permohonan Banding.

2) Untuk terdakwa RUDY DEMSY:

- Menyatakan bahwa terdakwa: Rudy Demsy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan: Kesatu-Primair; Kesatu-Subsidaair dan Kesatu-Lebih Subsidaair. Oleh karena itu membebaskan dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatanam seperti yang didakwakan pada sub. Kesatu-Lebih Subsidaair Lagi yaitu: *pencurian yang dilakukan secara bersama-sama*, melanggar Pasal 363 KUHP, dan *dengan sengaja merusak dokumen milik negara*, melanggar Pasal 133 KUHP;
- Menghukum terdakwa oleh sebab itu dengan hukuman penjara selama: 4 (empat) tahun, dengan ketentuan lamanya terdakwa berada dalam penahanan di Rumah Tahanan Negara, sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya; dst.

Atas putusan Hakim Pertama tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa mengajukan permohonan Banding.

e. Putusan Pengadilan Tinggi:

1) Dalam perkara terdakwa Seno Adjie:

Setelah mempelajari berkas permohonan banding, membaca Memori Banding dari Pemohon (Jaksa PU dan Terdakwa) dan Kontra Memori Banding dari Termohon (Terdakwa dan Jaksa PU), maka Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menerima permohonan Banding dari terdakwa Seno Adjie dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Maret 1988 No. 135/X/ Pid/B/87/PN.Jkt.Pst. sekedar tentang amarnya mengenai identitas terdakwa dan sebutan tindak pidana yang terbukti serta lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga berbunyi:
  - = Menyatakan terdakwa: Seno Adjie tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: *Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama*;
  - = Menghukum karena itu terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama: 2 (dua) tahun; Menentukan pada waktu melaksanakan putusan ini lamanya terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara hingga putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Maret 1988 No. 135/X/Pid/B/87/-PN.Jkt.-Pst., yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya; dst.

Atas putusan banding tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Kasasi.

2) Dalam perkara terdakwa Rudy Demy:

Setelah mempelajari berkas permohonan banding, membaca Memori Banding dari Pemohon (Jaksa PU dan Terdakwa) dan

Kontra Memori Banding dari Termohon (Terdakwa dan Jaksa PU), maka Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menerima permohonan Banding dari terdakwa Seno Adjie dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 1988 No. 136/X/ Pid/B/87/PN.Jkt.Pst. sekedar amarnya tentang sebutan tindak pidana yang terbukti, sehingga menjadi: "Menyatakan terdakwa Rudy Demy tersebut di atas adalah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tidak pidana: *pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama dan dengan sengaja merusak barang yang digunakan untuk membuktikan sesuatu di hadapan pihak yang berwenang;*
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 1988 No. 136/X/Pid/B/87/-PN.Jkt.-Pst., yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya; dst.

Atas putusan banding tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Kasasi.

f. Putusan Mahkamah Agung:

- 1) Dalam perkaranya terdakwa SENO ADJIE (berdasarkan Setelah mempelajari berkas perkara dan risalah/memori kasasi dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya serta setelah memberikan pertimbangan hukumnya maka

Majelis Hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Mei 1988-No. 94/Pid/1988/PT.DKI., yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Maret 1988, No. 155/X/Pid/B/87/PN.-JKT.PST., sekedar mengenai hal-hal yang telah diper-  
timbangkan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
- = Menghukum terdakwa Seno Adjie tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- = Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dst.

2) Dalam perkara terdakwa RUDY DEMSY:

Setelah mempelajari berkas perkara dan risalah/memori kasasi dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya serta setelah memberikan pertimbangan hukumnya maka Majelis Hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Mei 1988 sekedar mengenai rumusan pengurangan masa tahanan dengan pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi:
- = Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *pen-  
curian yang dilakukan lebih dari dua orang secara*

*bersama-sama dan dengan sengaja merusak barang yang digunakan untuk membuktikan sesuatu di hadapan pihak yang berwajib;*

- Menghukum terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Berdasarkan deskripsi kasus pencurian yang dilakukan dengan sarana komputer (*crime using computer as tool of theft*) tersebut di atas, penulis mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan komputer dan kebijakan penerapan hukumnya:

- a. Dewasa ini dalam dunia perbankan sudah lazim digunakan cara "*Electronic Payment System*" (E.P.S.), yaitu lalu lintas pembayaran antar lintas Bank secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi komputer.
- b. Perbuatan terdakwa dalam kasus ini apabila dikaitkan dengan bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer seperti yang telah diuraikan penulis dalam bab terdahulu, maka cara-cara yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dikenal dengan istilah "*Hacking*" yaitu perbuatan tanpa hak (ijin) memasuki suatu sistem jaringan komputer yang dalam hal ini adalah sistem jaringan komputer milik BNI 1946 (sekarang namanya Bank BNI) dengan Bank-Bank Korespondensinya, diteruskan dengan suatu perbuatan penyalahgunaan komputer yang disebut dengan "*The Trojan Horse*" yakni memanipulasi data atau program komputer yang dalam hal ini dimaksud-



kan untuk melakukan transfer secara tidak sah<sup>36</sup>. Hal tersebut dapat dilakukan terdakwa Seno Ajie karena bekerja sama dengan mantan "orang dalam" (bekas karyawan BNI 1946 yaitu Rudy Demy) yang masih memegang kode-kode rahasia (*password* dan *testkey*) BNI 1946 yang hingga saat terdakwa melakukan perbuatannya, belum sempat diganti.

Dengan teknik *Hacking* tersebut, maka perbuatan *unauthorized transfer* dapat dilakukan dari jarak yang berjauhan yakni dengan cara menghubungkan komputer yang dipergunakan, dengan sebuah alat yang dinamakan "*modem*" (alat yang memungkinkan suatu komputer mengadakan kontak/komunikasi dengan komputer lainnya).

- c. Yang menarik dalam kasus ini, terutama berkaitan dengan kebijakan penerapan hukumnya adalah adanya perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini (baik dalam perkara terdakwa Seno Adjie maupun dalam perkara terdakwa Rudy Demy). Jaksa PU dalam Tuntutan Pidananya berkeyakinan bahwa ketentuan yang paling tepat diterapkan pada terdakwa adalah korupsi karena perbuatan terdakwa tersebut secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negara, namun dalam penyelesaian perkara ini tampak adanya kehati-hatian hakim dalam menerapkan ketentuan Tindak Pidana Korupsi terhadap suatu kasus. Meskipun ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UU. No. 3 Tahun 1971 dirumuskan sedemikian luas untuk bisa

---

<sup>36</sup>Periksa: Bab II Halaman 50 - 53.

menjangkau suatu perbuatan sebagai Tindak Pidana Korupsi, ternyata luasnya rumusan ketentuan dalam UU. No. 3 Tahun 1971 tersebut dibatasi oleh Penjelasan Pasal 1 UU. No. 3 Tahun 1971 (Tambahan Lembaran Negara RI No. 2958) yang berbunyi:

"Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikwalifiseer sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidananya dan Acaranya"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa maksud dari penjelasan pasal 1 UU. No. 3 Tahun 1971 tersebut adalah: bahwa sekalipun subjek hukum atau pelaku yang didakwa itu bisa saja setiap orang (dapat ditinjau dari istilah "Barangsiapa"), tetapi *cara-cara* atau *sarana* yang bersifat melawan hukum yang dipergunakannya itu selalu harus dapat dikaitkan dengan aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas, yang mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri. Dengan demikian cara-cara atau sarana yang dimaksud hanya dapat terwujud jika melibatkan "orang dalam" yang berstatus sebagai Pegawai Negeri.

Dalam proses persidangan ternyata tidak terbukti terdapatnya kerjasama antara terdakwa dengan orang-orang yang berstatus sebagai pegawai negeri, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan terdakwa Seno Adjie tidak dapat dikategorikan sebagai Tindak

Pidana Korupsi. Pertimbangan yang sama juga dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara terdakwa Rudy Demy.

- d. Karena dakwaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim membahas dakwaan berikutnya dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar Lagi yang mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan "pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Ternyata terdapat kesesuaian antara unsur-unsur dari Pasal 363 (1) ke-4 KUHP yang harus dibuktikan, dengan fakta yang berhasil dalam persidangan, yang secara ringkas dapat ditelaah sebagai berikut: (dalam perkara terdakwa Seno Adjie)

1) Unsur "barangsiapa".

Yang dimaksud "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah subjek hukum (pelaku tindak pidana), yang pengertianannya ialah siapa saja sehingga yang dimaksud "barangsiapa" disini tidak lain adalah terdakwa Seno Adjie.

2) Unsur "mengambil suatu barang".

Bahwa terdakwa Seno Adjie bersama dengan Rudy Demy (mantan karyawan BNI 1946 New York Agency), telah mengoperasikan komputer merk Apple II C, dengan memakai kode rumus *password enter* dan *testkey* yang berkode RUDEMS untuk memindahkan (mentransfer) uang milik BNI 1946 ke rekening Bank lain di Panama dan Bank-Bank penerima lainnya yang sengaja telah dibuka sebelumnya untuk menampung dan menerima uang hasil transfer yang dioperasikan komputer oleh Rudy Demy

tersebut melalui "*transfer electronic payment system*".

Bahwa dengan selesainya transfer melalui komputer tersebut, maka beralihlah dana (uang) dari rekening BNI 1946 ke dalam rekening seseorang di Bank lainnya (Bank penerima), sehingga uang milik BNI 1946 ini telah lepas dari kekuasaan Pemiliknya (BNI) dan menjadi milik pemegang rekening di Bank penerima di Panama. Dengan demikian maka "perbuatan mengambil" dalam delik pencurian ini telah merupakan perbuatan yang selesai. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa setelah Pimpinan BNI 1946 New York Agency mengetahui kejadian tersebut, segera ia melakukan langkah penyelamatan dana (uang) itu dengan cara: "*Stop Payment and Retour*" pada Bank yang dituju dalam "*unauthorized transfer*" (transfer tidak sah) tersebut.

Bahwa pengambilan uang dari BNI 1946 oleh Rudy Damsy bersama terdakwa tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komputer.

- 3) Unsur "**barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain**".

Bahwa uang yang dialihkan (ditransfer) oleh terdakwa bersama Rudy Damsy dari BNI 1946 ke Bank-Bank di Panama tersebut di atas adalah bukan milik terdakwa dan Rudy Damsy, melainkan adalah milik BNI 1946.

- 4) Unsur "**dengan maksud untuk memiliki secara/dengan melawan hukum**".

Bahwa transfer uang tersebut dari BNI 1946 pada keempat Bank di Panama sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan dengan tanpa hak. Sedangkan pemin-

dahan ke Bank di Hongkong dan Luxemburg, hanya fiktif saja.

Bahwa uang yang ditransfer tersebut di atas ditujukan untuk keuntungan rekening atas nama Tengku Makmum Eldy. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan antara terdakwa dengan Rudy Demy, Abdul Malik Darpi dan Tengku Makmun Eldy, bahwa setelah rekening tersebut berhasil dicairkan keseluruhannya akan dibagi bersama diantara mereka untuk mereka miliki.

5) Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama".

Bahwa dalam kasus ini terdapat kerjasama yang erat antara terdakwa Seno Adjie dengan Rudy Demy, Abdul Malik Darpi dan Tengku Makmun Eldy, berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Terdakwa menyediakan dan mengeset *Personal Computer*;
- Rudy Demy yang mempunyai pengetahuan cara-cara, tahap-tahap, kode-kode dan prosedur transfer di BNI 1946 New York Agency sebagai eks karyawan Bank tersebut kemudian mengoperasikan komputer tersebut untuk melakukan *unauthorized transfer*.
- Tengku Makmun Eldy menyediakan dirinya sebagai penampung sementara dari hasil tranfer tidak sah tersebut (dengan mengatasnamakan dirinya pada keempat rekening pada Bank-Bank di Panama) untuk kemudian mencairkan guna dibagi diantara mereka.
- Abdul Malik Darpi sebagai penyokong dana untuk terlaksananya rencana terdakwa tersebut.

Dengan terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka terbukti telah dakwaan "Kesatu Lebih Subsidair Lagi" dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Seno Adjie.

Dasar pertimbangan yang sama juga dipergunakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara terdakwa Rudy Demy untuk memidana terdakwa Rudy Demy dengan menerapkan ketentuan tentang "pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama".

Dasar pertimbangan tersebut tetap dipertahankan dan diperkuat oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusannya.

e. Dengan adanya kasus "pencurian gaya baru" ini, maka munculah Yurisprudensi yang terbaru dari MA-RI, (Mahkamah Agung RI) terhadap delik pencurian yang terdapat dalam KUHP. Melalui putusan MA-RI No. 1852 K./Pid/1988 tanggal 21 Desember 1988 dalam perkara terdakwa Seno Adjie Majelis MA-RI telah memperluas pengertian unsur-unsur dalam delik pencurian yaitu: <sup>37</sup>

- 1) Unsur "mengambil barang" dapat pula dilakukan secara non fisik, tanpa menyentuh barang yang diambil itu (yaitu dengan *transfer electronic payment system*).
- 2) Unsur "dengan maksud memiliki" dapat diartikan bahwa dengan selesainya transfer tersebut sehingga sejumlah nilai yang ditransfer telah berpindah dan masuk

---

<sup>37</sup>"Computer Crime Unauthorized transfer Dana Bank" (catatan dari Ali Boediarto), *Varia Peradilan*, No.43 Tahun IV, April 1989. Halaman 16.

ke dalam rekening seseorang dalam suatu Bank (meskipun belum dicairkan berupa uang tunai), maka telah terpenuhi unsur "dengan maksud memiliki".

Jadi yang dijadikan dasar pertimbangan di sini adalah "niat" dari pelaku untuk memiliki sejumlah dana tersebut.

Diharapkan dengan munculnya yurisprudensi baru ini akan menambah wawasan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menafsirkan suatu ketentuan undang-undang dalam menghadapi kasus-kasus baru yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu dengan yurisprudensi baru tersebut diharapkan dapat memacu pengembangan aspek-aspek kebijakan yudikatif atau kebijakan aplikatif terutama berkaitan dengan aspek penemuan hukum dan pengembangan sistem yurisprudensi.

### 3. Kasus "transfer fiktif" di Bank Bumi Daya Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan (tahun 1987)<sup>38</sup>.

#### a. Identitas pelaku sebagai terdakwa:

Kasus ini melibatkan tiga orang pelaku sebagai terdakwa, namun dalam hal ini penulis hanya menampilkan satu orang terdakwa mempunyai peran penting yaitu sebagai pelaksana di lapangan:

- FRITS MARINGKA, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pengusaha.

---

<sup>38</sup> Sumber Kasus: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 144/Pid/B/1987/PN.JS. tanggal 23 April 1988; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 141/Pid/1988/PT.DKI. tanggal 18 Juli 1988 dan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2119 K/Pid/1988 tanggal 12 Januari 1989, masing-masing atas nama Terdakwa Frits Marinka.

b. Kasus posisi:

Terdakwa Frits Maringka bersama-sama dengan terdakwa lainnya yakni Ny. Anneke Maringka Mangidaan dan Onny Huwae alias Achmad Adriani telah melakukan tranfer secara tidak sah yang dilakukan dengan cara-cara yang telah direncanakan disebuah restoran pada bulan februari 1987, sebagai berikut:

- Ny. Anneke sebagai pemrakarsa, pemberi fasilitas dan pengatur langkah. Kebetulan Ny. Anneke pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Dana BBD Cabang Kuningan Jakarta.
- Ny. Anneke menyuruh terdakwa Frits dan Onny Huwae agar mengusahakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu. Pada tanggal 10 Maret 1987 Onny Huwae memperoleh KTP dengan nomor 1703.11450/07045286 atas nama Achmad Adriani. KTP tersebut kemudian dipalsu dengan mengganti photo yang terdapat dalam KTP tersebut (sehingga selanjutnya dalam berkas perkara disebut dengan Onny Huwae alias Achmad Adriani).
- Dengan KTP palsu tersebut Onny Huwae alias Achmad Adriani membuka rekening di City Bank LM yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan dan mendapat nomor rekening 0-505.135.016. dengan setoran pertama sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Selanjutnya Ny. Anneke meminta pada Onny Huwae agar mentransfer uang ke rekeningnya (di City Bank LM) tersebut dari beberapa rekening fiktif beberapa cabang BBD di Jakarta. Maksudnya agar nampak ada kegiatan di rekening tersebut.



- Untuk pelaksanaan rencana selanjutnya diperlukan nomor test kode pengiriman uang dari BBD cabang Karawang. Hal tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 17 Maret 1987 Frits Maringka dengan cara mengirim uang dari BBD Cabang Kebayoran Baru ke rekening milik Hendra Heryanto di BBD Cabang Karawang yang alamatnya sengaja dibuat salah. Kemudian terdakwa atas petunjuk Ny. Anneke menelpon ke BBD Cabang Karawang dengan berpura-pura sebagai Slamet, pejabat transfer BBD Kebayoran Baru, bahwa telah terjadi kesalahan alamat dan sipenerima akan datang sendiri untuk mengambil uangnya di BBD Karawang. Selanjutnya dalam telepon tersebut terdakwa juga mengatakan bahwa pengiriman uang dari BBD Karawang dari Arifin kepada Achmad Adriani di BBD Kebayoran Baru belum diterima, padahal sipenerima sudah datang di BBD Kebayoran Baru tetapi uang belum bisa diserahkan karena petugas pemegang kawat yang baru belum masuk. Untuk itu terdakwa yang masih berpura-pura sebagai Slamet (pejabat transfer BBD Kebayoran Baru) meminta agar dibacakan kembali perintah transfer dari BBD Karawang. Setelah perintah transfer tersebut dibacakan oleh BBD Karawang maka diketahuilah nomor kode test yang diperlukan.
- Pada tanggal 24 Maret 1987 jam 08.00 WIB dengan menggunakan nomor telepon kamar hotel yang telah dipesan oleh Onny Huwae sehari sebelumnya, terdakwa Frits Maringka menelpon bagian transfer BBD Cabang Kebayoran Baru dengan mengaku seolah-olah dari BBD

Cabang Karawang yang bernama ACHMAD J.O.57.A, dengan kata-kata yang telah disusun oleh Ny. Anneke sebagai berikut:

- = Apa ini Cabang Kebayoran Baru.
- = Ini dari Cabang Karawang.
- = Tolong dengan pejabat transfer.
- = Ini dengan siapa saya bicara.
- = Saya adalah Achmad J.O.57.A.
- = Pak Moertejo sudah pindah ke Pasar Minggu ya.
- = Ibu Cahyo bagian apa.
- = Ini pak tolong terima transfer ada 2 (dua) ya.
- = Apa sudah siap.
- = Saya mulai ya:

= Tanggal hari ini 24 Maret 1987.  
Test No.48434  
Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).  
Kepada Achmad Adriani PRP City Bank LM  
AC No. 0-505.135-016.  
Order Abdul Majid, S.H.  
PUDK No. 680008.  
Berita untuk pembayaran rumah/tanah di Simpruk.

= Tanggal hari ini 24 Maret 1987.  
Test No. 40935.  
Rp 685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).  
Kepada Achmad Adriani PRP City Bank LM  
AC No. 0-505.135.016.  
Order Abdul Majid, S.H.  
PUDK No. 680009.  
Berita untuk pembayaran rumah di Pondok Indah.

- = Tolong ulangi ya pak ya.
- = Pak tolong sekalian dites *ya*, takut nanti *incorect* sebab transaksinya hari ini, jangan sampai tidak dilaksanakan hari ini, harap di kliring hari ini juga.

Setelah 2 (dua) buah berita pengiriman uang dengan telepon itu di test oleh pejabat transfer BBD Cabang Kebayoran Baru, ternyata cocok sehingga dikira benar. Pada saat itu juga pejabat transfer pada BBD tersebut segera melaksanakannya dengan perhubungan giro kepada penerima Achmad Adriani PRP City Bank LM .

Sementara itu pada hari itu juga Onny Huwae alias Achmad Adriani menelpon petugas/pejabat City Bank LM untuk menanyakan apakah ada transfer dari BBD Kebayoran Baru ke rekeningnya. Pejabat City Bank yang dihubungi pada saat itu yaitu Yayuk segera mengecek dan ternyata transfer yang ditanyakan tersebut ada yakni sebesar Rp 1.065.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya Onny Huwae alias Achmad Adriani atas petunjuk Ny. Anneke membuka cheque untuk memasukkan uang dari transfer palsu tersebut ke beberapa deposito. Selanjutnya uang tersebut dicairkan untuk membeli mata uang dollar Amerika dari PT. Ayu Mas Agung Jl. Kwitang Jakarta Pusat.

Setelah itu Ny. Anneke memberi petunjuk agar uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- Onny Huwae alias Achmad Adriani diberi bagian sebesar US \$ 150.000,00 (seratus lima puluh ribu dollar US);
- Terdakwa Frits Maringka sendiri menerima bagian sebesar US \$ 200.000,00 (dua ratus ribu dollar US);
- Ny. Anneke Maringka sebesar US \$ 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dollar US).

Selanjutnya terdakwa Frits Maringka mempergunakan uang

pembagian tersebut untuk: membayar utang, biaya perjalanan ke beberapa negara di luar negeri, membeli mobil Honda Accord, dan membeli alat-alat keperluan rumah tangga. Uang kontan yang masih belum dipakai tinggal Rp 13.260.000,00.

c. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa:

Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa Frits Maringka ke persidangan dengan dakwaan:

- Primair:

Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

- Subsidair:

Bersekutu melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

- Lebih Subsidair:

Pencurian yang dilakukan lebih dari dua orang secara bersama-sama sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat (1) sub 4e KUHP;

-Lebih Subsidair Lagi:

Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya dalam *requisitoir*nya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar:

- Terdakwa Frits Maringka dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, hukuman denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah, subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan hukuman ganti rugi sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dst.

d. Putusan Pengadilan Negeri:

Setelah melalui proses persidangan akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa Frits Maringka, menurut hukum dan keyakinan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
- Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- Menentukan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi waktunya selama terdakwa dalam tahanan sementara;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menghukum terdakwa membayar denda sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan; dst.

Atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding.

e. Putusan Pengadilan Tinggi:

Setelah mempelajari berkas permohonan banding dari terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 No. 144/Pid/B/1987/PN.JS., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sepanjang mengenai rumusan pernyataan bersalah dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - = Menyatakan terdakwa Frits Maringka tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "korupsi";
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tersebut yang lain dan selebihnya; dst.

Atas putusan tersebut terdakwa menyatakan akan mengajukan upaya hukum Kasasi.

f. Putusan Mahkamah Agung:

Setelah mempelajari berkas perkara serta mempertimbangkan keberatan-keberatan pemohon kasasi yang dituangkan dalam risalah kasasi maka Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kakasi menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- **Menolak** permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Frits Maringka tersebut;

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 18 Juli 1988 No. 141/Pid/1988/PT.DKI. sekedar mengenai hal-hal yang dipertimbangkan di atas sehingga berbunyi sebagai berikut:

= Menyatakan terdakwa Frits Marinka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi";

= Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun; dst.

Berkenaan dengan deskripsi kasus korupsi yang dilakukan dengan sarana "transfer fiktif" di Bank Bumi Daya Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut, penulis mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan komputer dan kebijakan penerapan hukumnya:

a. Modus operandi yang dipergunakan para pelaku dalam melakukan kejahatannya cukup unik, dimana motif perbuatannya adalah mengambil uang milik BBD Cabang Kebayoran Baru dengan menyalahgunakan komputer (mengakali sistem operasi komputer) untuk melakukan "transfer fiktif", namun hal tersebut dilakukan para terdakwa cukup dengan memberikan instruksi palsu melalui telepon, sehingga tidak perlu dilakukan sendiri oleh terdakwa. Hal tersebut dapat dilakukan karena terdakwa mengetahui kode rahasia pengiriman uang (*testkey*), lalu berpura sebagai Achmad J.O.57.A. pejabat transfer pada BBD Cabang Karawang dan melalui pembicaraan telepon memerintahkan pada pejabat transfer BBD Cabang Kebayoran Baru untuk melakukan transfer.

b. Sebenarnya dengan melihat cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana "penipuan" (*bedrog*)<sup>39</sup>. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang sesuai dengan unsur Pasal 378 KUHP yakni:

- 1) Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dapat dilihat dari perbuatan terdakwa melakukan transfer fiktif terhadap uang/rekening yang bukan hak-nya dengan tujuan untuk kepentingan rekening pribadinya dan terdakwa lainnya (Ny. Anneke Maringka Mangidaan dan Onny Huwae).
- 2) Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu" dapat dilihat dari perbuatan terdakwa mengaku sebagai Achmad J.O.57.A. dan mengaku sebagai pejabat transfer BBD Cabang Karawang.
- 3) Unsur "dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" dapat dilihat dari perbuatan terdakwa melalui pembicaraan telepon telah mengatur kata-kata ataupun nada sedemikian rupa dengan tujuan agar lawan bicaranya mengira bahwa terdakwa adalah pejabat transfer BBD Cabang Karawang yang sedang menjalankan tugasnya.

---

<sup>39</sup> Hal tersebut nampak pula dalam keberatan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan dalam Pembelaan, Memori Banding hingga Risalah Kasasinya. Keberatan-keberatan tersebut pada intinya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang menuntut terdakwa dengan dakwaan primair yaitu korupsi, namun menurut hemat terdakwa/Penasihat Hukumnya, perbuatan terdakwa dengan persekutuan Ny. Aneke Maringka Mangidaan dan Onny Huwae merupakan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan "Lebih Subsidiar Lagi".



- 4) Unsur "mengerakkan seseorang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang" dapat dilihat dari fakta bahwa dengan cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa menggerakkan pejabat transfer BBD Cabang Kebayoran Baru untuk melakukan dua order transfer fiktif untuk keuntungan rekening kelompok terdakwa.
- c. Namun demikian, karena kebetulan Bank yang dijadikan sasaran adalah Bank Pemerintah (dalam hal ini adalah Bank Bumi Daya/BBD) sehingga perbuatan terdakwa akhirnya dikaitkan dengan dakwaan tentang tindak pidana "korupsi", karena memenuhi unsur-unsur: "dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.
- d. Barangkali jika yang dijadikan sasaran adalah Bank Swasta, maka yang diterapkan adalah Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini penulis tidak akan mempermasalahkan ketentuan tentang delik korupsi atau delik penipuan yang paling tepat diterapkan pada terdakwa, namun dalam hal ini penulis hanya akan menunjukkan bahwa ketentuan mengenai delik penipuan (Pasal 378 KUHP) sangat dimungkinkan untuk dapat diterapkan pada kasus penyalahgunaan komputer.

4. Kasus penarikan hasil "setoran warkat fiktif" (melalui pengimputan data komputer) di PT. Bank Bali Jakarta Barat (Tahun 1989)<sup>40</sup>.

a. Identitas pelaku sebagai terdakwa:

Kasus ini hanya melibatkan satu orang pelaku yang kebetulan adalah Karyawan Bank Bali tersebut yakni:

BUDIMAN HIDAYAT, Umur 30 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Eks. Karyawan PT. Bank Bali Jakarta.

b. Kasus posisi:

Terdakwa BUDIMAN HIDAYAT adalah karyawan PT. Bank Bali Jakarta yang bertugas pada bagian kliring. Dalam melakukan tugasnya sehari-hari terdakwa berada pada satu ruangan dengan beberapa karyawan lainnya, antara lain dengan saksi Ng Wie Hung yang bertugas di bagian Giro.

Pada tanggal 10 Februari 1989 sekitar pukul 17.25 WIB. saksi Ng Wie Hung meninggalkan komputer B-3 yang dipergunakannya untuk mengimput data sesuai dengan tugasnya, dengan tujuan untuk melihat hasil cetakan data yang sudah diimput. Pada saat saksi Ng Wie Hung pergi ke belakang tersebut, terminal komputer B-3 yang dipergunakannya masih dalam keadaan "on" (menyala/hidup dan tidak terkunci) karena komputer itu masih akan digunakan lagi untuk mengimput data sesuai dengan tugasnya.

Pada saat tersebut, terdakwa yang bekerja disebelah saksi Ng Wie Hung kemudian memanfaatkan kesempatan

---

<sup>40</sup> Sumber Kasus: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1050/Pid/5/1989/PN.jkt.Bar. tanggal 20 Nopember 1989.

tersebut yaitu menggunakan komputer B-3 yang masih dalam keadaan "on" tersebut dengan cara mencoba-coba menginput data tanpa izin dari petugas yang memakainya. Terdakwa menginput seolah-olah ada setoran warkat sebesar Rp 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening AC. 00111.3618.4 atas nama Diana Kamdani (kakak ipar terdakwa).

Adapun pengimputan data komputer tersebut dilakukan terdakwa dengan *teller* No. 333 (milik saksi Imam Hartono) dan *Code User* I.D. milik saksi Ng Wie Hung.

Setelah itu terdakwa menemui kakak iparnya yaitu saksi Diana Kamdani dan minta tolong agar saksi Diana Kamdani bersedia menarik giro dan *cheque* untuk mencairkan dana tersebut. Ternyata saksi bersedia asal setorannya bagus. Selanjutnya saldo sebesar Rp 43.500.000,00 tersebut berhasil dicairkan terdakwa melalui Kliring Giro Bilyet untuk dimasukkan ke deposito dan tabungan atas nama terdakwa, selebihnya dicairkan tunai dengan *cheque* dan dipakai untuk kepentingannya sendiri.

Adanya penyimpangan pada pengimputan data komputer tersebut akhirnya dapat diketahui dari terdapatnya kegagalan dalam "*Transaction Journal*" tertanggal 10 Februari 1989. Setelah didesak oleh pimpinan Bank tersebut akhirnya kemudian terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya. Uang sebesar Rp 43.500.000,00 hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut, seluruhnya telah dikembalikan terdakwa, yaitu langsung ke Bank Bali Jakarta sebesar Rp 42.400.000,00 dan melalui wesel yang dikirimkan terdakwa pada tanggal 21 Oktober 1989 sebesar Rp 1.100.000,00

c. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa:

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan terdakwa Budiman Hidayat ke Sidang Pengadilan, dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama:

Pemalsuan surat mengenai tanda hutang perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.

- Kedua:

Memakai surat palsu mengenai tanda hutang perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

- Ketiga:

Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Selanjutnya dalam *requisitoir*nya Jaksa Penuntut Umum berpendirian bahwa terdakwa telah bersalah melakukan kejahatan:

- Membuat surat palsu mengenai tanda hutang perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Untuk kesalahan terdakwa tersebut, maka Jaksa mengajukan tuntutan kepada Hakim, antara lain agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

d. Putusan Pengadilan Negeri:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini secara *sumir/singkat* yang dipimpin oleh seorang Hakim Tunggal.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku akan segala perbuatannya dan menyatakan penyesalannya.

Setelah Hakim memeriksa seluruh alat bukti dan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan terdakwa dan unsur-

unsur ketentuan yang didakwakan oleh penuntut umum, maka setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari terdakwa, setelah pula memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa BUDIMAN HIDAYAT sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Budiman Hidayat tidak bersalah atas dakwaan Pertama dan dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Ketiga;
- Memidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun; dst.

Demikianlah proses penyelesaian kasus pencurian melalui "setoran warkat fiktif" (dengan sarana komputer) ini hanya sampai pada tingkat Pengadilan Negeri. Hal ini karena terdakwa menyatakan telah menerima putusan tersebut, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan banding dalam masa pikir-pikir sampai tenggang waktu yang ditentukan, sehingga dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dari uraian kasus penyalahgunaan komputer beserta penyelesaiannya menurut hukum tersebut, penulis mencatat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Yang menarik dalam kasus ini adalah perbedaan persepsi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Hakim berkenaan dengan penafsiran perbuatan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan delik "pemalsuan surat" sedangkan Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan delik "pencurian biasa". Pokok persoalannya adalah: dapatkah "*Transaction Journal*" yang diajukan sebagai bukti, dikategorikan sebagai "surat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 264 KUHP?
- b. Andi Hamzah dalam bukunya "Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer" antara lain mengemukakan bahwa pengertian "surat" dapat pula berupa keterangan yang terdapat dalam media selain kertas yaitu antara lain media disket dan sejenisnya<sup>41</sup>. Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penulis, sebenarnya perbuatan terdakwa Budiman Hidayat dalam kasus di atas dapat pula dikategorikan sebagai "delik pemalsuan Surat", apalagi keterangan yang diimput dan direkam dengan komputer B-3 tersebut sudah dicetak atau sudah dituangkan dalam bentuk tulisan/naskah di atau kertas (dengan alat printer) yang berupa "*Transaction Journal*" yang diajukan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini.
- c. Hakim dalam putusannya berdasarkan atas bukti yang ada, tidak bisa menerima pendirian Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam *requisitoirnya*, yang menilai bahwa

---

<sup>41</sup>Periksa: Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Halaman 35.

perbuatan terdakwa tersebut merupakan delik pemalsuan surat mengenai tanda hutang perseroan. Pendapat Hakim ini berdasarkan alasan, bahwa "*Transaction Journal*" tertanggal 10 Pebruari 1988, yang memuat data pengimputan berupa setoran warkat (fiktif) sebesar Rp 43.500.000,00 adalah bukan merupakan "surat palsu", akan tetapi hanya merupakan hasil cetakan atas pengimputan data komputer yang dilakukan oleh terdakwa.

Karena unsur "surat palsu" ternyata tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan: membuat surat palsu mengenai surat hutang atau tanda hutang perseroan (Pasal 264 ayat (1) KUHP) sebagaimana diajukan dalam dakwaan pertama dan requisitoir Jaksa, dan memakai surat yang isinya tidak benar dan dipalsu (Pasal 264 ayat (2) KUHP) sebagaimana yang diajukan dalam dakwaan alternatif kedua dari Jaksa.

Menurut hemat Hakim, perbuatan terdakwa dengan mengimput data komputer seolah-olah ada setoran warkat kepada rekening nasabah Diana Kamdani No AC. 00111.3618.4 sebesar Rp 43.500.000,00 dan pencairan uang tersebut melalui Giro Bilyet No.10579 dan No. 103790 dengan nominal masing-masing adalah Rp 40.000.000,00 dan Rp 3.000.000,00 serta dengan cheque tunai nominal Rp 500.000,00, hanyalah merupakan salah satu cara untuk "mengambil" uang milik Bank Bali Jakarta. Oleh karenanya Hakim berpendirian bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan delik Pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga.

- d. Sebenarnya Hakim yang memeriksa perkara inipun (dengan melihat bukti berupa "*Transaction Journal*" tersebut) berpendapat bahwa memang bisa saja kasus ini dikategorikan sebagai delik pemalsuan surat, namun berdasarkan analisa dan keyakinannya, hakim berpendirian bahwa lebih dekat (baca: tepat) bila dikaitkan dengan delik pencurian, karena menurut hemat hakim perbuatan terdakwa tersebut hanya merupakan cara-cara untuk mengambil uang<sup>42</sup>.
- e. Menurut Hakim, kasus ini mirip dengan kasusnya terdakwa Seno Adjie (kasus *Unauthorized transfer* dana Bank BNI New York Agency). perbedaannya terletak pada cara pengoperasian komputer yang dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan. Pada kasusnya Seno Adjie pengimputan data dilakukan dari jarak yang berjauhan, sedangkan dalam kasusnya Budiman Hidayat, pengimputan data dilakukan secara langsung pada komputer yang bersangkutan. Oleh sebab itu Hakim berpendirian bahwa kasus ini merupakan delik pencurian, apalagi saldo sebesar Rp 43.500.000,00 hasil setoran warkat fiktif tersebut sudah berhasil dicairkan sehingga uang milik Bank Bali sebesar itu sudah nyata-yata berpindah tempat dari pemiliknya<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup>Pernyataan tersebut penulis peroleh dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini (Stephanus Kasihan) dalam wawancara pribadi di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1990. Selanjutnya dalam topik yang sama telah penulis konfirmasi lagi dengan Hakim tersebut dalam suatu diskusi kecil di Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 1997.

<sup>43</sup>*Ibid.*



- f. Dalam proses penerapan hukum terhadap kasus penyalahgunaan komputer di Bank Bali Jakarta ini nampak adanya peranan yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan pedoman untuk mempermudah hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang serupa<sup>44</sup>.
- g. Dalam hal ini penulis tidak akan mempermasalahkan mengenai delik apa (pemalsuan atau pencurian) yang lebih tepat untuk diterapkan dalam kasus ini, namun penulis hanya bermaksud menunjukkan bahwa delik pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263, 264 KUHP dan seterusnya dengan sarana penafsiran ekstensif, terbuka untuk dapat diterapkan pada kasus-kasus penyalahgunaan komputer.

#### 5. Kasus "Pembajakan Program Komputer Wordstar 5.0 (Tahun 1990)<sup>45</sup>.

##### a. Identitas pelaku sebagai terdakwa:

Kasus pelanggaran hak cipta di bidang komputer ini sebenarnya melibatkan setidaknya tiga orang pelaku yang masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah. Dalam hal ini penulis hanya akan menampilkan seorang terdakwa yang dianggap paling bertanggung jawab dalam serangkaian perbuatan ini, yaitu:

---

<sup>44</sup>Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa Budiman Hidayat ini mengakui bahwa Putusan MA,RI, tanggal 21 Desember 1988 No. 1852 K/Pid/1988 dalam perkaranya terdakwa Senn Ajie secara tidak langsung juga memberi petunjuk dalam hal menentukan kebijakan penerapan hukum terhadap perkara yang ditanganinya tersebut.

<sup>45</sup>Sumber Kasus: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 660/Pid/S/1990/PN.Bdg. tanggal 18 Januari 1991 dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 104/Pid/1991/PT.Bdg. tanggal 18 Desember 1991.

DRS. IWAN SOENARYO bin IBRAHIM SUNARYO, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan: Pimpinan Toko "Data Soft Computer" Jl. Ir. H. Juanda No. 72 Kodya Bandung.

b. Kasus posisi:

Terdakwa Iwan Soenaryo, dalam kedudukannya sebagai pemilik dan Pimpinan Toko "Data Soft Computer" (Surat Ijin Usaha/SBITU No. 3182/D/U/Cbs/AP/A/79), atau dalam kedudukannya sebagai pribadi, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama dan bersekutu dengan Hardiawan, Lindawati binti Tedja dan/atau orang lain, pada bulan Agustus hingga bulan Mei 1990 di Toko "Data Soft Computer" Jl. H. Juanda No 72 Bandung, telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu secara tanpa hak atau tanpa ijin penciptanya (dalam hal ini "*Wordstar International Inc.*", 33 San Pablo Avenue, San Rafael, CA.94903 - California, USA yang resmi terdaftar sebagai pemegang haknya di negara Amerika Serikat, dibawah No. Registrasi TX 2 700 018, tanggal 21 November 1988, dan yang telah diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keppres RI No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat) telah memperbanyak (menggandakan) atau memberi ijin untuk memperbanyak (menggandakan) suatu ciptaan perangkat lunak komputer berupa satu paket program komputer yang disebut "*Wordstar Profesional Version 5.0*" yang terdiri dari 12 (dua belas) buah program yaitu:

- |                              |                          |                            |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| - <i>System,</i>             | - <i>Printer Data 1,</i> | - <i>Advanced Preview,</i> |
| - <i>Telmerge PC Out,</i>    | - <i>Printer Data 2,</i> | - <i>Postscript File,</i>  |
| - <i>Spell Dictionaries,</i> | - <i>Source</i>          | - <i>Instalation,</i>      |
| - <i>Profinder,</i>          | - <i>Tutors,</i>         | - <i>Definitions.</i>      |

Perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk digunakan sendiri.

Adapun penggandaan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 2 (dua) unit perangkat keras (*hardware*) komputer yang terdiri dari *TV Monitor* merk TVM MD 300 *Keyboard* 88 *key*, CPU mini AT, IBM-XT dan *TV Monitor* Merk Thomson VM 310 2 VG, *Keyboard*, dan beberapa buah disket program "DOS", program "Wordstar 5.0" Non Master, serta beberapa buah disket *blank* (kosong) yang telah disiapkan untuk menyimpan program *copyan*. Selanjutnya dengan merangkai seluruh perangkat keras tersebut dan menghubungkan kabel-kabelnya dengan tenaga listrik (PLN) sebagai tenaga penggeraknya, terdakwa telah bekerja sendiri atau memberi ijin/perintah pada karyawannya (Hardiawan dan Lindawati) untuk *mengcopy*, memperbanyak atau menggandakan beberapa program Wordstar Version 5.0 dimaksud, dengan jalan memberikan beberapa perintah (*commands*) tertentu kepada perangkat komputer tersebut melalui ketikan pada *keyboard* sehingga perangkat komputer atau CPU dapat bekerja dengan sendirinya secara magnetis *mengcopy* seluruh program Wordstar 5.0. Program hasil penggandaan tersebut hasilnya sama atau hampir sama dengan aslinya.

Setelah terdakwa berhasil menggandakan program Wordstar tersebut, selanjutnya terdakwa menjual hasil gandaannya

tersebut kepada umum dengan memperoleh pembayaran uang atas harga disket dan jasa penggandaannya. Harga yang ditetapkan terdakwa berkisar antara Rp 1.000,00 (seribu rupiah) jika pemesan membawa disket sendiri, hingga Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) jika disket disediakan oleh terdakwa.

c. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa:

Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa Iwan Soenaryo ke sidang pengadilan dengan dakwaan kumulatif:

- Kesatu:

Dengan sengaja dan tanpa hak telah melakukan perbuatan memperbanyak suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) sub 'k' jo. Pasal 14 sub 'g' jo. Pasal 44 ayat (1) UU. No. 6 Tahun 1982 yang sudah dirubah dan ditambah dengan UU. No. 7 Tahun 1987 jo. Keppres R.I. No. 25 Tahun 1989 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP;

- Kedua:

Dengan sengaja telah menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) sub 'k' jo. Pasal 44 ayat (2) UU. No. 6 Tahun 1982 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU. No. 7 Tahun 1987 jo. Keppres R.I. No. 25 Tahun 1989 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP.

Selanjutnya dalam *requisitoir*nya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan antara lain:

- Menyatakan terdakwa Drs. Iwan Soenaryo bin Ibrahim Sunaryo bersalah melakukan tindak pidana: "Pelanggaran Hak Cipta, yaitu melanggar Pasal 11 ayat (1) sub 'k' jo. Pasal 14 sub 'g' jo. Pasal 44 ayat (1) UU. No. 6 Tahun 1982 yang sudah dirubah dan ditambah dengan UU. No. 7 Tahun 1987 jo. Keppres R.I. No. 25 Tahun 1989 jo Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP, dan melanggar Pasal 11 ayat (1) sub 'k' jo Pasal 44 ayat (2) UU. No. 6 Tahun 1982 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU. No. 7 Tahun 1987 jo. Keppres R.I. No. 25 Tahun 1989 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs Iwan Soenaryo bin Ibrahim Sunaryo dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; dst.

d. Putusan Pengadilan Negeri:

Setelah melalui proses pemeriksaan peradilan pidana secara "singkat/sumir", maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menyatakan terdakwa IWAN SOENARYO bin IBRAHIM SUNARYO telah bersalah melakukan perbuatan kejahatan Hak Cipta, yakni dengan sengaja dan tanpa hak telah melakukan perbuatan memperbanyak suatu ciptaan yang

dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam hal ini Program Komputer Word Star 5.0 sesuai dengan bunyi Pasal 11 ayat (1) sub 'k' jo. Pasal 14 sub 'g' jo. Pasal 44 ayat (1) UU. No. 6 Tahun 1982 yang sudah dirubah dan ditambah dengan UU. No. 7 Tahun 1987 jo. Keppres R.I. No. 25 Tahun 1989 jo Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP, Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan sengaja telah menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta dalam hal ini hasil penggandaan Program Komputer Word Star 5.0, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) sub 'k' jo Pasal 44 ayat (2) UU. No. 6 Tahun 1982 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU. No. 7 Tahun 1987 jo. Keppres R.I. No. 25 Tahun 1989 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP;

- Menghukum terdakwa oleh sebab itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan; dst.

Atas putusan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan banding.

e. Putusan Pengadilan Tinggi:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung setelah memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding akhirnya menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Januari 1991 No. 660/Pid/S/1990/PN.Bdg. sekedar mengenai kualifikasinya, bunyi amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  - = Menyatakan terdakwa Drs. Iwan Soenayo bin Ibrahim Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan: "tanpa hak memperbanyak suatu ciptaan dan tanpa hak menjual kepada umum suatu ciptaan";
  - = Memidana terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  - = Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijatuhkan, kecuali ada perintah lain dari Hakim, oleh karena masa percobaan selama 2 (dua) tahun, sejak terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana; dst.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum lagi sehingga proses pemeriksaan perkara pelanggaran hak cipta di bidang komputer ini hanya sampai di tingkat peradilan banding.

Berkaitan dengan kasus penyalahgunaan komputer yang menyangkut pelanggaran hak cipta beserta kebijakan penyelesaiannya sebagaimana telah dideskripsikan di atas, penulis mencatat beberapa hal sebagai ulasan sebagai berikut:

a. Penggandaan program komputer dengan cara *mengcopy* hingga saat ini masih menjadi dilema di negara-negara berkembang seperti di Indonesia pada saat ini. Di satu sisi Pemerintah Indonesia, baik karena komitmennya sendiri maupun karena tuntutan dunia internasional, wajib menegakkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), namun di sisi lain kebutuhan akan program komputer semakin banyak, terutama untuk kepentingan bidang pendidikan. Sementara harga program komputer yang resmi (yang diproduksi oleh perusahaan pemegang hak cipta atau perusahaan-perusahaan penyalur lainnya yang mendapat lisensi dari perusahaan pemegang hak cipta) untuk ukuran sebagian besar masyarakat Indonesia (terutama pelajar dan mahasiswa) dinilai terlalu mahal dan tak terjangkau.

Untuk menghadapi keadaan demikian setidaknya ada dua pemikiran sebagai solusi alternatif, yakni:

- 1) UUHC ditegakkan secara *strict* namun ditunjang oleh kebijakan pemerintah agar memberikan subsidi pada perusahaan perusahaan penyalur resmi suatu produk program komputer untuk menekan harga program komputer sehingga menjadi terjangkau oleh masyarakat umum.
- 2) Harga resmi program komputer dibiarkan tetap tinggi, namun pemerintah menetapkan kebijakan untuk menerapkan UUHC secara "agak longgar". Misalnya tindakan *mengcopy* program komputer yang harus dituntut/diperkarakan adalah tindakan *mengcopy* program komputer tanpa izin pemilik program dalam jumlah yang banyak dan dimaksudkan untuk kepentingan-kepentingan yang



bersifat komersial, sedangkan jika perbuatan tersebut hanya dilakukan dalam jumlah yang sedikit dan dimaksudkan untuk dipakai sendiri atau untuk keperluan pendidikan/belajar, maka tidak perlu diperkarakan atau dilakukan penuntutan.

- b. Jika mengamati keadaan di Indonesia pada saat ini, nampak bahwa kebijakan penegakan UUHC dibidang program komputer cenderung mengarah pada kebijakan kedua (huruf a. butir 2)). Hal ini nampak dari jaranganya masalah pelanggaran hak cipta di bidang program komputer yang diperkarakan sampai di sidang pengadilan. Padahal jika mengamati perilaku masyarakat pengguna komputer khususnya pelajar atau mahasiswa pada saat ini bisa dipastikan bahwa rata-rata program komputer yang dipergunakannya merupakan hasil *copyan* "tidak resmi" dari program aslinya.
- c. Kasus pembajakan program komputer (WS 5.0) sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat terungkap dan dapat diperkarakan sampai di sidang pengadilan karena beberapa faktor, antara lain karena diadakan oleh perusahaan pemegang ijin resmi sebagai penyalur/distributor program Wordstar 5.0 di Indonesia (dalam hal ini adalah PT Sarana Data Informatika), pelaku melakukan perbuatannya (membajak program komputer) dalam kurun waktu yang lama dan dalam frekuensi yang banyak, dan perbuatannya dimaksudkan untuk tujuan komersial/perdagangan.
- d. Dalam hal penentuan kebijakan aplikatif, aparat penegak hukum terutama Hakim nampaknya tidak menemui permasa-

lahan yang berarti karena kebetulan masalah penyalahgunaan komputer yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta di bidang program komputer telah diatur secara tegas dalam UUHC dalam hal ini adalah UU. No 6 Tahun 1982 yang telah disempurnakan dengan UU. No. 7 Tahun 1987, disamping itu fakta-fakta yang terungkap di persidangan sangat mendukung pemenuhan unsur-unsur ketentuan yang didakwakan terhadap diri terdakwa, terutama yang berkaitan dengan unsur "dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu" dan unsur "tanpa hak menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta"

6. Kasus "manipulasi data saldo pada *Master File*" Bank Dana-  
mon Cabang Glodok Plaza (Tahun 1990)<sup>46</sup>.

a. Identitas pelaku sebagai terdakwa:

Sebenarnya kasus ini dilakukan oleh dua orang, namun salah satu pelakunya yakni Stephen Hidayat (anak terdakwa) yang banyak membantu terdakwa dalam melakukan aksinya, masih merupakan "buron" karena melarikan diri ke luar negeri. Oleh sebab itu dalam hal ini penulis hanya akan menampilkan seorang terdakwa yakni:

ANDY HIDAYAT, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta.

<sup>46</sup>Sumber Kasus: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 033/Pid/B/1992/PN.Jkt.Bar. tanggal 16 Juli 1992; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 92/Pid/1992/PT.DKI. tanggal 12 Oktober 1992 dan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1867 K/Pid/1992 tanggal 22 Februari 1993.

b. Kasus posisi:

Terdakwa Andy Hidayat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama atau bersekutu satu sama lain dengan Stephen Hidayat, sejak 1 April 1990 sampai dengan tanggal 28 Januari 1991 telah melakukan penarikan tabungan pada Bank Danamon Cabang Glodok Plaza yang terletak di Jl. Pinangisia Jakarta Barat yang saldo-nya telah dirubah/dimanipulasi terlebih dahulu.

Pertama-tama yang dilakukan oleh terdakwa Andy Hidayat bersama-sama dengan Stephen Hidayat adalah membuka rekening dengan prosedur biasa sebagaimana dilakukan oleh nasabah lainnya yaitu datang ke bagian *Customer Service* lalu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan. Formulir tersebut kemudian diinput ke komputer oleh *customer*. Kemudian bukti pembukaan rekening dan setorannya diserahkan ke bagian *Teller* untuk diinput. Setelah itu diberi bukti kartu penabung beserta catatan saldo tabungan.

Adapun rekening tabungan "Primadana" yang dibuka oleh dan atas nama Andy Hidayat pada tanggal 23 April 1990 bernomor: 12.96.2821.6 dengan setoran pertama sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan rekening tabungan "Primadana" yang dibuka oleh dan atas nama Stephen Hidayat pada tanggal 1 April 1990 bernomor 12.96.2020.7 dengan setoran pertama Rp 168.541,00 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

Setelah mereka memiliki "rekening penampungan", Stephen

Hidayat yang bekerja di bagian *Electronic Data Processing (EDP) Computer* dan memiliki keahlian di bidang *Basic Programming Computer* yang ditempatkan di bagian rekening koran Bank Danamon Cabang Glodok Plaza, melakukan perbuatan merubah data saldo yang memuat nilai angka tabungan pada *Master File* dari data saldo yang sebenarnya berdasarkan setoran yang sesungguhnya dari Andy Hidayat dan Stephen Hidayat menjadi saldo fiktif yang nilainya menjadi jauh lebih besar dari jumlah setorannya menurut kemauannya sendiri. Misalnya pada rekening No. 12.96.2020.7 a.n. Stephen Hidayat, saldo yang sebenarnya tercatat sebesar Rp 168.541,00 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) pada tanggal 7 April 1990 telah dirubah oleh Stephen Hidayat dengan cara menghapus angka yang tercatat tersebut lalu memasukkan nilai angka baru sehingga saldonya menjadi Rp 15.172.650,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Misalnya lagi pada rekening No. 12.69.2821.6 a.n. Andy Hidayat yang semula tercatat Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah dirubah oleh Stephen Hidayat pada tanggal 30 April 1990, jumlahnya menjadi Rp 302.100.000,00 (tiga ratus dua juta seratus ribu rupiah). Padahal kenyataannya dari tanggal 24 hingga 30 April 1990 yang bersangkutan tidak pernah menyetor uang untuk memasukkan rekening tersebut.

Setelah saldo pada rekening tersebut dirubah, Andy Hidayat dan Stephen Hidayat melakukan penarikan secara tunai ataupun mentransfer pada rekening lain. Misalnya

pada tanggal 4 Mei 1990 terdakwa Andy Hidayat menarik tunai sebesar Rp 227.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun penarikan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan prosedur penarikan biasa yaitu terdakwa mengisi *slip* penarikan di *Banking Hall* dan menyerahkan pada Bagian *Teller*. Setelah oleh *Teller* dicocokkan identitas dan tanda tangan pada *specimen* ternyata cocok maka oleh *Teller* diinput ke Komputer untuk mengetahui apakah saldonya cukup. Setelah dilihat ternyata saldonya cukup maka selanjutnya permintaan penarikan dilayani dan dibayarkan. Bersamaan dengan pengajuan penarikan tersebut, terdakwa Andy Hidayat juga mengisi blanko Aplikasi Transfer dengan permohonan agar sebagian uang yang telah ditarik tersebut yakni sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di transfer ke Lippo Bank Cabang Senen No. 716.30.01033 atas nama Andy Hidayat sendiri.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Andy Hidayat dibantu oleh Stephen Hidayat dengan cara-cara tersebut dilakukan berulang-ulang. Bahkan mereka sempat mengembangkan aksinya, misalnya dengan memperbanyak aplikasi transfer ke berbagai bank di Jakarta, menutup rekening lama dan membuka rekening lagi, bahkan Stephen Hidayat membuka rekening lagi yang jenisnya baru yaitu rekening yang perhitungannya menggunakan mata uang Dollar ("Primadollar"). Dalam membuka rekening baru untuk memperbesar usahanya tersebut terdakwa telah meminjam nama R. Marentek.

Dari serangkaian perbuatan terdakwa Andy Hidayat dan Stephen Hidayat telah berhasil mengambil uang dari Bank Danamon Cabang Glodok Plaza sebesar Rp 6.292.533.283,90 (enam milyar, dua ratus sembilan puluh sembilan dua juta, lima ratus lima puluh tiga ribu, dua ratus delapan puluh tiga rupiah, sembilan puluh sen). Selanjutnya uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa Andy Hidayat dan Stephen Hidayat untuk berbagai keperluan pribadinya.

c. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa:

Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa Andy Hidayat ke persidangan dengan dakwaan berlapis, yaitu:

- Primair:

Pencurian yang dilakukan bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Subsidair:

Pemalsuan surat yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atau bersekutu satu sama lain sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Lebih Subsidair:

Dengan sengaja memakai surat palsu yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Lebih Subsidair Lagi:

Penadahan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP ke-1 dan ke-2 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya dalam *requisitoir*nya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang antara lain berisi:

- Menyatakan terdakwa Andy Hidayat, terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian yang dilakukan bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair;
- Menghukum terdakwa Andy Hidayat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan; dst.

d. Putusan Pengadilan Negeri:

Setelah melalui proses pemeriksaan perkara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dasar-dasar yuridis, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menyatakan bahwa terdakwa ANDY HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berulang kali sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

- Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu; dst.

Atas putusan tersebut terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan Banding.

e. Putusan Pengadilan Tinggi:

Setelah mempelajari berkas permohonan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan disertai dengan dasar-dasar yang cukup maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Andy Hidayat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Juli 1992 No. 033/Pid/B/1992/PN.Jkt.Bar. yang dimohonkan banding tersebut; dst.

Atas putusan tersebut terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi.

f. Putusan Mahkamah Agung:

Setelah membaca risalah kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkeberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa (5 tahun) yang tidak sebanding (terlalu ringan) dengan jumlah hasil kejahatan yang telah dinikmati terdakwa yakni sekitar 6,3 milyar rupiah, dan setelah membaca pula risalah



kasasi dari kuasa hukum terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa yang pada pokoknya berkaitan dengan proses/prosedur pemeriksaan *judex factie* yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini dalam tingkat Kasasi menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat maupun dari terdakwa Andy Hidayat;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 12 Oktober 1992 No. 92/Pid/1992/PT.DKI. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Juli 1992 No. 033/Pid/B/1992/PN.Jkt.Bar sekedar mengenai hal yang dipertimbangkan di atas sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - = Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dst.

Dengan mencermati kasus tentang manipulasi data saldo pada *Master File*" Bank Danamon Cabang Glodok Plaza tersebut maka penulis akan menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Dalam penyelesaian kasus tersebut terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan hingga sampai pada permohonan kasasi yang salah satu intinya adalah hukum perbankan yaitu ketentuan umum tentang tabungan di Bank

Danamon harus dipergunakan sebagai dasar untuk mengkaji perbuatan terdakwa, hal ini mengingat bahwa menurut pendapat terdakwa/penasihat hukumnya, peristiwa ini bukan merupakan tindak pidana biasa yakni berupa pencurian yang berlanjut saja, tetapi merupakan pula kejahatan di bidang perbankan dan komputer sesuai dengan dakwaan. Namun demikian Majelis Hakim pada setiap tingkat pemeriksaan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan delik biasa dengan mempergunakan komputer sebagai sarana untuk mempermudah perbuatannya.

- b. Jika mencermati seluruh uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mulai dari dakwaan Primair hingga dakwaan Lebih Subsidair lagi, maka nampak bahwa sebenarnya yang menjadi sumber awal peristiwa tindak pidana ini adalah perbuatan Stephen Hidayat (yang diduga dilakukan atas anjuran atau setidaknya atas sepengetahuan terdakwa Andy Hidayat) merubah data saldo yang memuat nilai angka tabungan pada *Master File* dari data saldo yang sebenarnya. Perbuatan "merubah data" tersebut dapat ditafsirkan sebagai perbuatan "memalsu data" atau .lh15 membuat "data palsu". Dengan demikian maka perbuatan terdakwa sebenarnya dapat dikaitkan dengan "delik pemalsuan" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidair, dengan catatan bahwa *Master File* yang datanya dirubah/dipalsu tersebut ditafsirkan sebagai "kumpulan arsip/dokumen".
- c. Sekalipun demikian nampaknya Hakim pada setiap tingkat pemeriksaan merasa lebih "aman" (tepat) jika perbuatan

terdakwa dikaitkan dengan "delik pencurian". Hal ini dapat dipahami karena sekalipun perbuatan terdakwa dapat diselesaikan dengan ketentuan tentang pemalsuan surat, namun nampaknya berat bagi Hakim untuk membuktikan bahwa data pada *Master File* dapat disepadankan dengan tulisan/keterangan yang dimuat dalam kumpulan surat/arsip/dokumen. Dalam hal ini Hakim berpikiran praktis bahwa serangkaian perbuatan terdakwa yang dibantu oleh anaknya dalam kasus ini, yang dilakukan dengan cara "mengakali" sistem komputer di Bank Danamon, mempunyai "tujuan akhir" mengambil uang milik Bank Danamon. Hal ini didukung dengan fakta bahwa terdakwa telah berhasil menarik uang dari tabungan yang saldonya fiktif tersebut dan mempergunakannya untuk berbagai keperluan.

Demikianlah pemaparan dan pembahasan beberapa kasus penyalahgunaan komputer yang terjadi di Indonesia beserta penyelesaiannya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan penerapan hukumnya. Dari pemaparan tersebut muncul kesan bahwa kasus penyalahgunaan komputer masih tergolong jarang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini penulis pun memperoleh kesan yang sama dari hasil *survey* (pengamatan dan pelacakan) yang penulis lakukan dalam penelitian di D.I. Yogyakarta dan di D.K.I. Jakarta, dimana penulis hanya berhasil menghimpun tidak lebih dari 10 (sepuluh) buah perkara pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan komputer, yang terjadi sejak tahun 1982 hingga tahun 1996. Namun demikian, sedikitnya jumlah kasus yang terungkap di persidangan dan yang

berhasil penulis himpun di sini belum dapat dijadikan *patokan* untuk menyimpulkan bahwa penyalahgunaan komputer jarang terjadi di Indonesia. Hal ini didasari oleh berbagai asumsi sebagai berikut:

1. Ada kemungkinan kasus penyalahgunaan sering terjadi namun banyak yang tidak terungkap, karena:
  - a. Penyalahgunaan komputer seringkali bersifat khas sehingga sulit untuk diusut dan diungkap. Seringkali pemilik komputer atau pemakai komputer juga sulit untuk membedakan gangguan yang terjadi pada sistem komputernya, apakah gangguan tersebut ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu (pelaku penyalahgunaan komputer) atau sekedar merupakan "gangguan teknis" saja.
  - b. Setiap kali mengalami gangguan/kejanggalan dalam sistem komputer yang diduga kuat adanya indikasi penyalahgunaan komputer, biasanya korban (*victim*) enggan untuk melaporkan pada pihak yang berwajib dan cenderung memilih untuk diselesaikan sendiri (secara intern). Hal ini disebabkan berbagai pertimbangan antara lain:
    - 1) Ketidaktahuan prosedur pengaduan atau pelaporan;
    - 2) Keraguan akan kemampuan aparat untuk mengungkap, mengusut dan menyelesaikan kasus dengan hasil yang memuaskan;
    - 3) Alasan reputasi dan integritas lembaga atau perusahaan. Ada anggapan jika melaporkan penyimpangan atau kriminalitas yang terjadi di lembaga atau perusahaan sama saja dengan mengumumkan kelemahan sistem yang ada dalam lembaga atau perusahaan tersebut, hal ini dikhawatirkan dapat berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau perusahaan tersebut. Apalagi hal ini menyangkut sistem komputer yang

dalam kehidupan modern ini merupakan tolok ukur keunggulan suatu usaha.

c. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia khususnya aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi tinggi.

2. Ada kemungkinan kasus penyalahgunaan komputer yang diselesaikan melalui proses peradilan banyak, namun karena kondisi sistem pengelolaan data kriminal dan sistem pengelolaan berkas peradilan yang sangat lemah, sehingga sulit untuk dilacak kembali. Apalagi penyalahgunaan komputer di Indonesia bukan merupakan delik khusus yang berdiri sendiri, sehingga pengklasifikasiannya mengikuti ketentuan yang diterapkan dalam putusan hakim<sup>47</sup>. Pengelolaan berkas perkara yang nampak asal-asalan juga menambah kesulitan untuk melacak perkara yang menyangkut penyalahgunaan komputer<sup>48</sup>.

Sekedar untuk lebih memudahkan dalam memahami gambaran mengenai variasi modus operandi penyalahgunaan komputer dan kebijakan penerapan hukum secara menyeluruh, berikut ini penulis akan menyajikan rangkuman pembahasan kasus-kasus penyalahgunaan komputer di Indonesia dalam sebuah bagan, sebagai berikut:

---

<sup>47</sup>Dalam penelitian penulis mengamati bahwa jika perkara penyalahgunaan komputer diputus dengan pasal-pasal Korupsi, maka dalam sistem pendokumentasiannya dimasukkan dalam klasifikasi korupsi, jika diputus dengan pasal-pasal pencurian maka pendokumentasiannya dimasukkan dalam klasifikasi pencurian (dicampur dengan berbagai jenis perkara pencurian lainnya). Demikian pula pada saat penulis melihat data kriminal di Biro Pusat Statistik, ternyata penyalahgunaan komputer belum masuk klasifikasi pencatatan.

<sup>48</sup>Selama penelitian, penulis melacak berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan komputer di pengadilan-pengadilan di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Dalam hal ini penulis menyaksikan sendiri bahwa berkas-berkas perkara tersebut bukan saja hanya dikelola secara manual oleh petugas-petugas yang tidak mempunyai latar belakang di bidang pengelolaan arsip, namun terkesan hanya "ditelantarkan" atau hanya sekedar ditumpuk saja di gudang arsip tanpa dilakukan pemeliharaan dan pencatatan lebih lanjut untuk berbagai kepentingan yang akan datang.

NO. URT	NOMOR PERKARA	KERUGIAN (Rp)	PASAL-PASAL YANG DIDAKWAKAN OLEH JAKSA P.U.	PASAL-PASAL YANG DITERAPKAN OLEH HAKIM	SANKSI PIDANA (POKOK) YANG DIJATUHKAN
1a.	- 34/1983/Pid/PN.Yk. tgl. 14 Sept 1983 a.n. terdakwa SALIP DJAMHARI  - 40/1983/Pid/PTY. tgl. 30 Jan 1984	± 845 jt	Ps. 1 ay (1) sub 'b' jo. Ps. 28 UU. No. 3/1971 jo. Ps. 55 ay (1) ke-1 jo. Ps. 64 ay (1) KUHP*)  - sda -	Ps. 1 ay (1) sub 'b' jo. Ps. 28 UU. No. 3/1971 jo. Ps. 55 ay (1) ke-1 jo. Ps. 64 ay (1) KUHP  - sda -	6 tahun dan denda Rp. 2.500.000,00 sub- sidair 3 bulan kurung- an.  6 tahun penjara dan denda Rp. 2.500.000,00 subsidair 3 bulan ku- rungan.
1b.	- 33/1983/Pid/PN.Yk. tgl. 26 Sept 1983 a.n. terdakwa LIAUW JOEN TJIN alias A CEN  - 41/1983/Pid/PTY. tgl. 6 Maret 1984  - 363/K/Pid/1984 tgl. 25 Juni 1984	± 845 jt	Ps. 1 ay (1) sub 'a' jo. Ps. 28 UU. No. 3/1971 jo. Ps. 55 ay (1) ke-1 jo. Ps. 64 ay (1) KUHP*)  - sda -  -	Ps. 1 ay (1) sub 'a' jo. Ps. 28 UU. No. 3/1971 jo. Ps. 55 ay (1) ke-1 jo. Ps. 64 ay (1) KUHP  - sda -  -	10 tahun penjara   10 tahun penjara  (permohonan kasasi ti- dak diterima)
2a.	- 135/X/Pid/8/87/PN. Jkt.Pst. Tgl. 11 Maret 1988 a.n. terdakwa SENO ADJIE	± 30 ml	KESATU: -Primair: Ps. 1 ay (1) sub 'a' jo. Ps. 28 UU. No. 3/1971 jo. Ps. 55 ay (1) ke-1 KUHP *) -Subsidair: Ps. 1 ay (2) jo. Ps. 1 ay (1) sub'a' jo. Ps.28 UU.No. 3/1971 jo. Ps.55 ay (1) ke-1 KUHP -Lebih Subsidair: Ps. 1 ay (2) jo. Ps. 1 ay (1) sub'a' jo. Ps.64 ay (1) KUHP -Lebih Subsidair Lagi: Ps. 363 ay(1) ke-4 KUHP -Lebih-Lebih Subsidair Lagi: Ps. 363 ay(1) ke-4 jo. Ps. 53 KUHP -Lebih-Lebih-Lebih Sub- sidair Lagi: Ps. 1 ay (1) sub'a' jo. Ps.28 UU.No. 3/1971 jo. Ps. 56 KUHP KEDUA: Ps. 233 KUHP*)	Ps. 363 ay(1) ke-4 KUHP	3 tahun penjara

	- 94/Pid/1988/PT.DKI tgl. 30 Mei 1988		- sda -	- sda -	2 tahun penjara
	- 1852 K/Pid/1988 tgl. 21 Des 1988		- sda -	- sda -	2 tahun penjara
2b.	- 136/X/Pid/B/87/PN, Jkt.Pst. tgl. 10 Maret 1988 a.n. terdakwa RUDY DEMSY	± 30 mil	<p>KESATU</p> <p>-Primair: Ps. 1 ay (1) sub 'a' jo. Ps. 28 UU. No. 3/1971 jo. Ps. 55 ay (1) ke-1 KUHP #)</p> <p>-Subsidair: Ps. 1 ay (2) jo. Ps. 1 ay (1) sub 'a' jo. Ps. 28 UU. No. 3/1971 jo. Ps. 55 ay (1) ke-1 KUHP</p> <p>-Lebih Subsidair: Ps. 1 ay (2) jo. Ps. 1 ay (1) sub 'a' jo. Ps. 64 ay (1) KUHP</p> <p>-Lebih Subsidair Lagi: Ps. 363 ay (1) ke-4 KUHP</p> <p>-Lebih-Lebih Subsidair Lagi: Ps. 363 ay (1) ke-4 jo. Ps. 55 KUHP</p> <p>KEDUA: Ps. 233 KUHP #)</p>	-Ps. 363 ay (1) ke-4 KUHP -Ps. 233 KUHP	4 tahun penjara
	- 82/Pid/1988/PT.DKI tgl. 30 Mei 1988		- sda -	- sda -	4 tahun penjara
	- 1851 K/Pid/1988 tgl. 1 Des 1988		- sda -	- sda -	4 tahun penjara
03.	-144/Pid/B/1987/PN.JS tgl. 23 April 1988 a.n. terdakwa FRITS MARINGKA	± 1,1 mil	<p>-Primair: Ps. 1 ay (1) sub 'a' jo. Ps. 28 UU. No. 3/1971 jo. Ps. 55 ay (1) KUHP#)</p> <p>-Subsidair: Ps. 1 ay (1) sub 'b' jo. Ps. 28 UU. No. 3/1971 jo. Ps. 55 ay (1) KUHP</p> <p>-Lebih Subsidair: Ps. 363 ay (1) ke-4 KUHP</p> <p>-Lebih Subsidair Lagi: Ps. 378 KUHP jo. Ps. 55 ay (1) KUHP</p>	Ps. 1 ay (1) sub 'a' jo. Ps. 28 UU. No. 3/1971 jo. Ps. 55 ay (1) KUHP	7 tahun penjara dan denda Rp. 30.000.000,00 subsidiar 6 bulan ku- rungan
	-141/Pid/1988/PT.DKI. tgl. 18 Juli 1988		- sda -	- sda -	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri

	- 2119 K/Pid/1988 tgl. 12 Jan 1989		- sda -	- sda -	7 tahun penjara
04.	- 1050/Pid/S/1989/PN. Jkt.Bar. tgl. 20 November 1989 a.n. Terdakwa BUDIMAN HIDAYAT	±43,5 jt	-Pertama: Ps. 264 ay (1) KUHP *) -Kedua: Ps. 264 ay (2) KUHP -Ketiga: Ps. 362 KUHP	Ps. 362 KUHP	6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun
05.	- 660/Pid/S/1990/PN. Bdg. tgl. 17 Nov 1990 a.n. terdakwa Drs. IWAN SOENARYO bin IBRAHIM SUNARYO	?	-Kesatu: Ps.11 ay (1) sub 'k' jo. Ps.14 sub 'g' jo. Ps.44 ay (1) UU. No. 6/1982 yang telah diubah dan di tambah dengan UU. 7/1987 jo. Keppres R.I. No. 25 /1989 jo. Ps. 55 ay (1) jo. Ps. 64 KUHP *) -Kedua: Ps.11 ay (1) sub 'k' jo. Ps.44 ay (2) UU. 6/1982 yang telah diubah dan di tambah dengan UU. 7/1987 jo. Keppres RI. No. 25/ 1989 jo. Ps. 55 ay (1) jo. Ps. 64 KUHP *)	Ps.11 ay (1) sub 'k' jo. Ps.14 sub 'g' jo. Ps.44 ay (1) UU. No. 6/1982 yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 7/1987 jo. Keppres RI. No. 25/1989 jo. Ps. 55 ay (1) jo. Ps 64 KUHP DAN----- Ps.11 ay (1) sub 'k' jo. Ps.44 ay (2) UU. 6/1982 yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 7/1987 jo. Keppres RI. No. 25/1989 jo. Ps. 55 ay (1) jo. Ps 64 KUHP	1 tahun penjara dan denda Rp.25.000.000,00 subsidaair 3 bulan ku- rungan
	- 104/Pid/1991/PT.Bdg Tgl. 16 Des 1991		- sda -	- sda -	10 bulan penjara dengan masa percobaan 2 tahun
06.	- 033/Pid/B/1992/PN. Jkt.Bar. Tgl. 16 Juli 1992 a.n. terdakwa ANDY HIDAYAT	±6,3 mil	-Primair: Ps. 363 ay (1) ke-4 jo. Ps. 64 ay (1) KUHP *) -Subsidaair: Ps. 263 ay (1) jo. Ps.55 ay (1) ke-1 jo. Ps. 64 ay (1) KUHP -Lebih Subsidaair: Ps. 263 ay (1) ke-4 jo. ay (1) ke-1 jo. Ps. 64 ay (1) KUHP -Lebih Subsidaair Lagi: Ps. 480 ke-1 dan ke-2 jo. Ps 64 Ay (1) KUHP	Ps. 363 ay (1) ke-4 jo. Ps. 64 ay (1) KUHP	5 tahun penjara
	- 92/Pid/1992/PT.DKI. tgl. 12 Okt 1992		- sda -	- sda -	5 tahun penjara
	- 1867 K/Pid/1992 tgl. 8 Feb 1993		- sda -	- sda -	(permohonan Kasasi di- tolak)

KETERANGAN: \*) Pasal-pasal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir)



Dari pembahasan kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang pernah terjadi di Indonesia, nampak bahwa modus operandi yang mendominasi adalah:

1. Menyasiasi celah-celah sistem komputer dan sistem perbankan.
2. Selalu melibatkan "orang dalam" atau setidaknya "mantan orang dalam", baik sebagai pelaku utama, "otak" pelaku (*dolus eventualis*) atau hanya sebagai pelaksana.
3. Tujuan akhirnya adalah mengambil sejumlah uang untuk dimiliki secara tidak sah (*property object*).

Kecenderungan modus operandi penyalahgunaan komputer di Indonesia tersebut dapat dipahami mengingat bahwa sebagai negara berkembang maka biasanya kejahatan muncul karena alasan faktor ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat membuat orang melakukan penyimpangan atau tindak kejahatan dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Lembaga Bank merupakan bentuk sasaran yang konkret untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak. Karena sistem perbankan modern tidak dapat dilepaskan dengan sistem pelayanan/jasa komputer, maka untuk menembus celah-celah sistem perbankan, pelaku kejahatan harus mampu menyiasati sistem komputer. Selanjutnya karena sistem komputer dilengkapi dengan sistem pengamanan yang berupa kode-kode rahasia (*password, testkey, User ID* dll.) maka keterlibatan "orang dalam" sebagai pihak yang mengetahui kode-kode rahasia tersebut sangat diperlukan.

Karena di Indonesia belum ada Undang-Undang Hukum Pidana yang secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan komputer, maka kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan Undang-Undang Hukum pidana yang ada. Adapun ketentuan-ketentuan

tuan yang biasa "diusulkan untuk dapat diterapkan" (baca: diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya) berkisar antara:

1. Ketentuan-ketentuan tentang delik korupsi;
2. Ketentuan-ketentuan tentang delik pencurian;
3. Ketentuan-ketentuan tentang delik pemalsuan surat;
4. Ketentuan-ketentuan tentang delik penipuan;
5. Ketentuan-ketentuan tentang delik penadahan;
6. Ketentuan-ketentuan tentang pelanggaran Hak Cipta.

Diantara ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang paling sering diterapkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer adalah ketentuan-ketentuan tentang delik "korupsi" jika status pelakunya adalah Pegawai Negeri atau sasaran kejahatannya adalah Bank milik Pemerintah, dan ketentuan-ketentuan tentang delik "pencurian" jika status pelakunya orang swasta dan sasarannya Bank swasta. Dalam hal ini nampak bahwa pertimbangan yang mendasari hakim dalam menentukan kebijakan penafsiran undang-undang untuk diterapkan pada perbuatan penyalahgunaan komputer, tidak dikaitkan dengan bentuk perbuatan atau cara-cara melakukan perbuatan, namun cenderung lebih difokuskan pada status pelaku, akibat perbuatan dan tujuan akhir dari perbuatan tersebut.

#### C. Beberapa Gagasan Pemikiran Yang Berkaitan Dengan Masalah Operasionalisasi Perundang-undangan Hukum Pidana Yang Ada Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Komputer

Perkembangan teknologi komputer dengan pengaplikasian yang semakin luas dalam kehidupan modern ini menimbulkan aspek-aspek baru yang kompleks dan rumit. Dalam hal ini hukum

dituntut untuk tetap eksis dalam menjalankan fungsinya memberikan perlindungan secara pasti. Oleh sebab itu idealnya terdapat perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai dalam arti mampu menjangkau perbuatan penyalahgunaan komputer yang bersifat kompleks dan rumit.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia sekarang adalah belum adanya undang-undang hukum pidana yang secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan komputer. Sedangkan untuk menyusun suatu Undang-undang bukan merupakan sesuatu yang mudah dan memerlukan proses yang panjang, sementara kasus-kasus penyalahgunaan komputer sudah mulai bermunculan di Indonesia sehingga perlu segera adanya penyelesaian.

Melihat kenyataan tersebut maka tidak ada jalan lain (sambil menunggu upaya-upaya untuk mengadakan undang-undang yang mampu menjangkau penyalahgunaan komputer di masa mendatang) adalah mengoptimalkan operasionalisasi perundang-undangan hukum pidana atau perundang-undangan lainnya yang memuat sanksi pidana dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut perbuatan penyalahgunaan komputer.

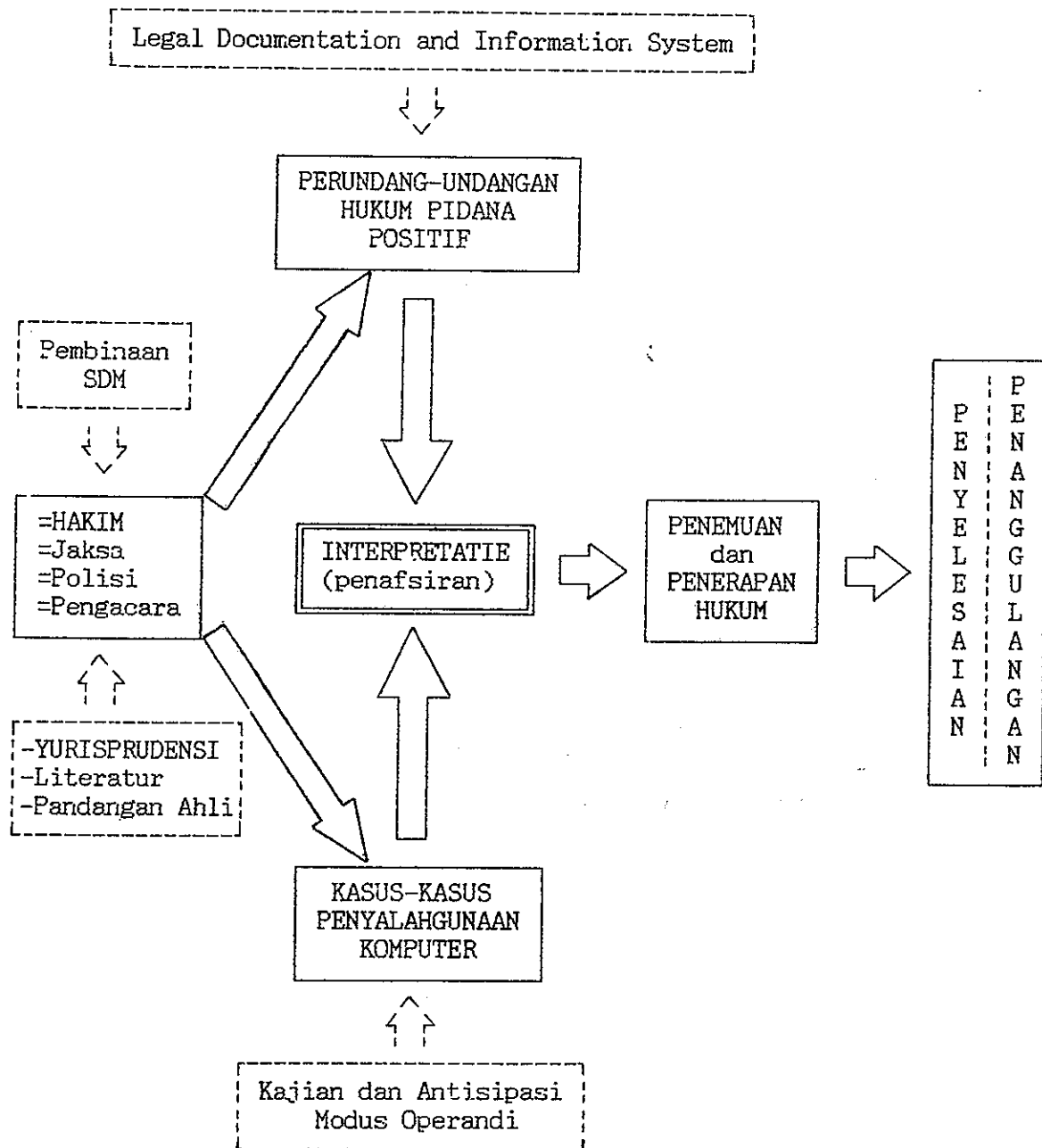
Dalam subbab terdahulu (subbab A) telah dideskripsikan tentang eksistensi dan relevansi perundang-undangan yang ada pada saat ini terhadap penyalahgunaan komputer. Dalam analisis terhadap beberapa undang-undang hukum pidana dan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana nampak bahwa dalam beberapa hal ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer tertentu. Deskripsi yang diperoleh dari hasil analisis ini didukung dengan fakta yang diperoleh dalam penelitian lapangan yaitu tentang penyele-

saian beberapa perkara penyalahgunaan komputer yang terjadi di Indonesia, sebagaimana telah dituangkan dan dibahas dalam subbab selanjutnya (subbab B).

Dari perkara-perkara penyalahgunaan komputer di Indonesia yang telah diuraikan dan dibahas tersebut nampak bahwa operasionalisasi perundang-undangan hukum pidana belum optimal. Operasionalisasi yang hanya berkisar antara ketentuan-ketentuan delik korupsi dan ketentuan-ketentuan delik pencurian tersebut menimbulkan kesan bahwa hakim enggan untuk membuka alternatif penerapan ketentuan yang lain, sekalipun sebenarnya jika dilihat dari cara-cara atau bentuk perbuatannya, ketentuan yang lain lebih sesuai untuk diterapkan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, muncul beberapa gagasan pemikiran untuk mengembangkan operasionalisasi perundang-undangan hukum pidana dalam penyelesaian kasus-kasus penyalahgunaan komputer.

Sekalipun demikian, agar operasionalisasi ketentuan perundang-undangan yang ada pada saat ini dapat dilakukan secara optimal dalam menciptakan kebijakan aplikatif yang baik dan tepat dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer, maka ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Pengembangan operasionalisasi perundang-undangan hukum pidana dalam menunjang kebijakan aplikatif dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer dapat dideskripsikan dalam bagan/skema sebagai berikut:



Dari bagan atau skema tersebut nampak bahwa masalah operasionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer terkait dengan berbagai faktor penunjang. Oleh sebab itu dalam bahasan subbab C ini penulis mencoba untuk mengkaji beberapa faktor yang menunjang kebijakan aplikatif tersebut yakni dengan cara menjelaskan urgensi faktor tersebut, memaparkan kondisi yang ada berdasarkan

pengamatan dan memberikan beberapa gagasan pemikiran sebagai alternatif pemecahannya.

### 1. Pengembangan metode penafsiran.

Sebagaimana diketahui bahwa metode penafsiran (interpretasi) merupakan sarana yang amat penting dalam sistem hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utamanya, seperti di Indonesia ini.

Undang-undang (terutama dalam tradisi *civil law*) sengaja dirumuskan secara abstrak agar bersifat fleksibel dalam arti mampu mengikuti perkembangan jaman<sup>49</sup>. Untuk dapat diterapkan terhadap kasus konkret, rumusan undang-undang tersebut harus ditafsirkan. Dalam ilmu hukum setidaknya ada 7 macam penafsiran yang dapat dipergunakan untuk mengoperasikan rumusan ketentuan perundang-undangan dalam berbagai kasus konkret<sup>50</sup>.

Penyalahgunaan komputer yang memiliki dimensi yang luas dan belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia terkait erat dengan masalah penafsiran ini. Hal ini disebabkan oleh keharusan untuk dapat menerapkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum tersebut terhadap kasus penyalahgunaan komputer yang bersifat khusus dan khas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka metode penafsiran tidak sekedar mengartikan rumusan ketentuan perun-

---

<sup>49</sup>Periksa: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Halaman 241-244 dan Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice Volume 2*, The Free Press A Division of Macmillan Inc., New York, 1983. Halaman 484 - 490.

<sup>50</sup>Baca: Bab II, Halaman 77 - 79.

dang-undangan yang bersangkutan dan mengkaitkannya dengan sifat perbuatan penyalahgunaan tertentu namun juga mencari kesepadanan makna atau maksud yang terkandung dalam rumusan ketentuan tertentu dengan maksud atau tujuan dari perbuatan penyalahgunaan komputer. Dengan demikian penerapan metode penafsiran tidak hanya terbatas pada penafsiran yang bersifat memperluas pengertian yang terdapat dalam rumusan ketentuan tertentu, namun pada dasarnya semua metode penafsiran yang tersedia terbuka untuk dipergunakan.

Dalam praktek penerapan hukum di Indonesia selama ini nampak bahwa metode penafsiran yang banyak diterapkan dalam menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan komputer, aparat penegak hukum banyak mempergunakan penafsiran yang bersifat memperluas pengertian yang terdapat dalam rumusan ketentuan yang bersangkutan dengan memperhatikan maksud atau tujuan pelaku serta akibat yang ditimbulkan<sup>51</sup>, sehingga penerapan pasal-pasal dalam perundang-undangan hukum pidana yang ada berkisar pada ketentuan yang mengatur delik pencurian dan delik korupsi. Pengkaitan kedua delik tersebut terhadap penyalahgunaan komputer tertentu seringkali terkesan pragmatis dan dipaksakan. Padahal dengan mengembangkan penafsiran yakni dengan mencoba menerapkan jenis metode penafsiran yang lain seperti metode penafsiran autentik, metode penafsiran sosiologis, historis dan lain sebagainya, pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain masih terbuka untuk dapat diterapkan<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup>Pelajari: Bahasan Subbab B dalam Bab ini.

<sup>52</sup>Pelajari: Kajian Subbab A dalam Bab ini.

Antara metode penafsiran yang satu dapat dikaitkan dengan metode penafsiran yang lain (tidak menutup kemungkinan mempergunakan lebih dari satu penafsiran) untuk mendapatkan penafsiran yang paling tepat. Misalnya dengan penafsiran sosiologis yakni dengan memprediksi perkembangan masyarakat, dimana nampak bahwa media penyimpanan data secara manual berangsur-angsur beralih ke media penyimpanan elektronik, maka dengan penafsiran ekstensif pengertian surat bisa diperluas sedemikian rupa hingga mencakup pula dokumen yang dituangkan dalam media penyimpanan elektronik. Sebaliknya misalnya dengan penafsiran historis diketahui bahwa pada awalnya yang dimaksudkan pembentuk undang-undang dengan barang adalah "*intangible object*" (objek yang dapat dilihat atau diraba) maka perluasan pengertian barang sehingga mencakup pula berbagai bentuk pulsa elektronik (data, program dll.) perlu dibatasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Untuk menjamin kepastian hukum penafsiran-penafsiran ini perlu didukung dengan sarana lainnya misalnya dituangkan dalam bentuk pedoman penerapan hukum yang diatur dalam Undang-undang suplemen, Peraturan Pemerintah, Keppres, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau berbagai bentuk peraturan pelaksana lainnya. Dengan pedoman penerapan hukum atau "Pedoman Penafsiran" yang dilegitimasikan secara formal dalam berbagai bentuk peraturan pelaksana tersebut segala macam bentuk penafsiran, termasuk penafsiran analogi yang harus dihindari dalam penerapan hukum, diubah statusnya menjadi bentuk metode penafsiran autentik. Isi dari Pedoman Penafsiran tersebut adalah petunjuk



untuk menafsirkan berbagai rumusan ketentuan yang relevan untuk diterapkan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan komputer. Misalnya petunjuk bagaimana menafsirkan pengertian "barang", "surat", "mengambil" dan lain sebagainya agar dapat dikaitkan dengan pengertian "data/program", "file", "mengcopy" dan lain sebagainya.

Sekalipun hanya sebagai petunjuk, namun diharapkan Pedoman Penafsiran ini dapat dimanfaatkan secara luas khususnya bagi aparat penegak hukum sebagai sarana untuk mempermudah tugasnya dalam menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan komputer. Untuk itu Pedoman Penafsiran ini perlu dilegitimasi secara formal agar sedikit mempunyai kekuatan mengikat. Adapun bentuk legitimasi tersebut tidak harus dalam bentuk undang-undang. Justru disarankan agar Pedoman penafsiran ini dilegitimasi dalam bentuk peraturan pelaksanaan, yang proses penyusunannya relatif lebih cepat dan lebih sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan penyalahgunaan komputer yang mengikuti pesatnya perkembangan teknologi komputer itu sendiri.

Disamping itu untuk menjamin persamaan persepsi terhadap ketentuan tertentu dalam menyelesaikan penyalahgunaan komputer dapat pula didukung oleh acuan yang dituangkan dalam bentuk yurisprudensi tetap.

Faktor lainnya yang mendukung pengembangan metode penafsiran ini adalah kualitas dari aparat penegak hukum dan dukungan dari aparat terkait lainnya. Faktor-faktor pendukung tersebut akan dibahas secara khusus dalam butir selanjutnya.

## 2. Pengembangan *Legal Documentation and Information System* .

Dengan menetapkan kebijakan aplikatif yang mendasarkan pada asumsi bahwa penyalahgunaan komputer bukan merupakan delik khusus yang perlu diatur dalam undang-undang khusus, maka pada dasarnya banyak peraturan perundang-undangan yang ada dengan berbagai macam bentuknya (mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, sampai dengan Surat Edaran) terbuka untuk dapat diterapkan pada kasus-kasus penyalahgunaan komputer.

Mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang ada hampir semuanya tidak dirancang untuk menanggulangi penyalahgunaan komputer maka diperlukan pendekatan khusus untuk dapat menerapkan ketentuan yang ada terhadap bentuk penyalahgunaan komputer. Yang dimaksudkan dengan pendekatan khusus di sini adalah penerapan ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang sepadan dengan bentuk perbuatan penyalahgunaan komputer melalui pendekatan penafsiran (interpretasi) dengan tetap mengedepankan aspek kepastian dan keadilan hukum. Pendekatan ini ditempuh dengan cara membuat suatu "Pedoman Penafsiran yang dilegitimasikan secara formal" sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1 di atas.

Kebijakan tersebut menuntut aparat penegak hukum dapat menemukan rumusan hukum yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan berbagai bentuk kasus penyalahgunaan komputer. Apalagi dalam hal ini aparat penegak hukum tidak hanya harus menemukan ketentuan pokok yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan, namun juga harus mengkaitkan dengan "Pedoman Penafsiran" yang diatur secara sporadis dalam berbagai peraturan pelaksanaan. Untuk itu diperlukan

suatu sistem dokumentasi dan informasi hukum dan perundang-undangan yang dikelola secara modern dan profesional.

Sejauh yang diamati penulis dalam penelitian lapangan, pada saat ini kebanyakan pusat dokumentasi hukum masih dikelola secara manual. Hal ini disamping jangkauan pemanfaatannya sangat terbatas, pelayanan penelusuran peraturan perundang-undangnya pun masih sulit dan lambat. Beberapa Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum seperti PDIH Universitas Indonesia, mulai dikembangkan dengan menerapkan sistem komputerisasi, namun sifatnya masih sangat terbatas, baik objeknya maupun jangkauannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka sudah saatnya Indonesia memiliki Pusat Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Perundang-undangan yang dikelola secara modern agar mampu memberikan pelayanan yang cepat dan akurat, yakni dengan menerapkan sistem otomatisasi komputer (misalnya dengan mengembangkan "sistem buku elektronik" seperti program "*Premise*" dalam pengoperasian "CD-Rom Perundang-undangan"<sup>53</sup>). Disamping itu perlu pula adanya sarana penunjang untuk memperluas jangkauannya (misalnya dengan masuk ke jaringan *internet* agar dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja dengan segera). Setidaknya dengan fasilitas media telekomunikasi biasa (telepon, pos, faxemail dll.), Pusat Dokumentasi dan Infor-

---

<sup>53</sup> Akhir-akhir ini telah diterbitkan CD-Rom Perundang-undangan yang memuat Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan (mulai dari UU sampai Keppres) Indonesia dari tahun 1950 sampai Desember 1995. CD data perundang-undangan ini diterbitkan oleh ELIPS PROJECT dan merupakan salah satu perwujudan dari perjanjian kerja sama antara pemerintah Indonesia (diwakili oleh Roeslan Abdul Gani) dengan Pemerintah Amerika Serikat (dalam hal ini USIS). CD perundang-undangan tersebut dapat dioperasikan dengan program PREMISE versi 2.13.

masi Hukum diharapkan mampu memberikan pelayanan pelacakan/penelusuran dan pedistribusian secara profesional.

### 3. Pengembangan sistem yurisprudensi tetap

Sebagaimana telah diuraikan secara sekilas dalam butir 1, yurisprudensi juga sangat diperlukan sebagai acuan dalam menyamakan persepsi terhadap penanganan perkara-perkara tertentu, khususnya terhadap perkara-perkara yang penerapan hukumnya sulit seperti perkara penyalahgunaan komputer. Di sini nampak besarnya peranan yurisprudensi dalam mengisi kekosongan hukum (*recht-vacuum*) yang diakibatkan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi<sup>54</sup>.

Yurisprudensi adalah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai jenis kasus perkara berdasarkan putusan kebijaksanaan para Hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para Hakim lainnya dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara-perkara yang (hampir) sama atau mirip<sup>55</sup>. Dengan adanya yurisprudensi itu para Hakim secara tidak langsung membentuk materi hukum sehingga yurisprudensi juga merupakan sumber hukum<sup>56</sup>.

<sup>54</sup>Sejarah sering menguak pelajaran berharga ketika *Arrest Hoge Raad Nederland* tanggal 23 Mei 1921 yang dikenal dengan "*electriciteitsarrest*" mampu mengakhiri kesulitan dan keragu-raguan para hakim dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan/pencurian listrik. Latar belakang munculnya Keputusan H.R. Belanda tahun 1921 tersebut serta contoh putusan klasik yang lain dapat dijadikan pelajaran berharga untuk memacu hakim-hakim pada saat ini untuk menciptakan yurisprudensi-yurisprudensi yang bermutu yang dapat dijadikan acuan bagi hakim lainnya dalam menghadapi kasus-kasus yang sulit penerapan hukumnya seperti kasus penyalahgunaan komputer.

<sup>55</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, 1977. Halaman 927 - 928.

<sup>56</sup>Kata "yurisprudensi" sebagai istilah teknis sama artinya dengan kata "*Jurisprudentie*" dalam bahasa Belanda atau "*Jurisprudence*" dalam bahasa Perancis, yaitu Peradilan Tetap atau Hukum Peradilan. Hendaknya dibedakan dengan kata "*Jurisprudencia*" dalam bahasa Latin yang berarti pengetahuan hukum, atau "*Jurisprudence*" dalam bahasa Inggris yang artinya teori ilmu hukum (di negara-negara Aglo Saxon istilah untuk menyebut putusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya adalah "*Case Law*" atau "*Judge-made Law*"). Lihat: Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. Halaman 47 - 48.

Sekalipun Indonesia tidak menganut sistem "*precedent*" dan "*stare decises*" yang menentukan bahwa hakim terikat pada putusan hakim terdahulu dalam mengadili kasus yang sama, sebagaimana dianut dalam sistem peradilan di negara-negara Anglo Saxon, namun yurisprudensi merupakan sumber hukum yang penting terutama untuk melengkapi undang-undang yang memiliki jangkauan terbatas dalam mengikuti perkembangan jaman.

Mengingat sedemikian pentingnya peranan yurisprudensi dalam pengembangan kebijakan penerapan hukum maka sudah selayaknya bahwa yurisprudensi dikelola secara baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sejauh yang dapat diamati pada saat ini pengelolaan yurisprudensi di Indonesia masih lemah sekali. Hal ini menyebabkan peran yurisprudensi sangat terbatas, terutama berkaitan dengan fungsinya mengisi kekosongan hukum dan sebagai sumber acuan dalam menghadapi kasus-kasus baru seperti kasus penyalahgunaan komputer. Pernyataan ini didasarkan pada beberapa hal, yakni:

- a. Masih sedikitnya putusan hakim yang terkait dengan perkara penyalahgunaan komputer. Hal ini disebabkan oleh jaranganya kasus penyalahgunaan komputer yang diselesaikan melalui proses peradilan dan tidak setiap perkara diselesaikan sampai ke tingkat Kasasi. Padahal berdasarkan Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung RI. No. 02 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi, antara lain disebutkan bahwa perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti tanpa melalui kasasi tidak mempunyai *richt-lijn*.

- b. Inventarisasi dan pengelolaan lebih banyak dilakukan secara manual dan pendistribusian yang sangat terbatas. Inventarisasi yang dilakukan secara manual tersebut menyebabkan disamping tidak semua masalah dapat dimasukkan ke dalam Buku Yurisprudensi (*Law Report*), proses penyeleksiannyapun seringkali didasarkan pada kriteria yang tidak jelas<sup>57</sup>. Pengelolaan secara manual dan pendistribusian terbatas menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya hakim sulit untuk melacak/menelusuri dan mencari yurisprudensi yang memuat perkara yang berkaitan dengan kasus yang diinginkan. Selama ini pelacakan atau penelusuran yurisprudensi dibantu dengan daftar "Rangkuman Yurisprudensi".
- c. Sistematisasi penyusunan Rangkuman Yurisprudensi yang tidak berkembang juga menyulitkan untuk mencari detail kasus yang diperlukan. Misalkan saja dalam hal ini kita ingin mencari perkara tentang penyalahgunaan komputer, maka kita tidak bisa langsung menemukan dalam daftar Rangkuman Yurisprudensi, karena pembagian Bidang Hukum Pidana yang meliputi 30 (tiga puluh) klasifikasi tersebut hanya didasarkan pada jenis tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang Hukum Pidana Khusus. Hal ini menyebabkan untuk mempero-

<sup>57</sup> Karena tidak semua putusan masuk ke dalam yurisprudensi maka pihak-pihak yang menginginkan putusan tertentu terpaksa harus mendatangi Pengadilan dimana perkara itu disidangkan. Ternyata kesulitan yang dihadapi oleh pihak-pihak tersebut semakin besar. Ia tidak hanya menghadapi sulitnya "menyisir" berkas-berkas perkara yang tidak tertata secara sistematis di Gudang Arsip, namun ia harus pula menghadapi birokrasi yang berbelit-belit, bahkan kadang-kadang ia harus pula menghadapi oknum-oknum petugas yang menentukan imbalan untuk setiap putusan yang diperlukan.

leh putusan mengenai delik-delik baru (seperti delik komputer) pertama-tama harus memperkirakan ketentuan hukum pidana positif yang diterapkan sebagaimana tercantum dalam salah satu klasifikasi, selanjutnya harus dilakukan "penyisiran" dalam arti melihat satu persatu isi atau substansi dari klasifikasi tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan terbatasnya peran yurisprudensi yang diakibatkan oleh keadaan-keadaan tersebut di atas, maka perlu adanya upaya konkret untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

- a. Inventarisasi Yurisprudensi tetap perlu dikembangkan, sehingga yang dijadikan yurisprudensi tidak hanya terbatas pada putusan Mahkamah Agung saja namun juga dibuka kemungkinan terhadap putusan pengadilan dibawahnya yang dinilai bermutu. Kriteria suatu putusan untuk dapat dikatakan bermutu adalah putusan yang pertimbangan hukumnya baik dan dapat dijadikan dasar acuan bagi hakim lainnya terutama untuk menghilangkan ketidakpastian dan keragu-raguan penerapan hukum. Adapun proses penyeleksian putusan-putusan tersebut dilakukan oleh sebuah team yang terdiri dari beberapa hakim senior dari pengadilan yang bersangkutan bekerja sama dengan beberapa utusan dari Fakultas Hukum setempat. Dengan menciptakan "iklim" tersebut diharapkan hakim-hakim menjadi terpacu untuk membuat putusan yang bermutu, termasuk dalam memutuskan perkara-perkara yang menyangkut delik baru seperti delik penyalahgunaan komputer.

- b. Inventarisasi dan pengelolaan putusan yang dijadikan yurisprudensi dilakukan secara profesional yang dilakukan dengan penerapan komputerisasi/otomatisasi. Diharapkan dengan proyek komputerisasi tersebut akan mempercepat administrasi peradilan, minutasasi putusan dan terbentuknya "*computerized judicial (legal) data bank*" serta terutama mampu membina dan menerbitkan yurisprudensi tetap yang *up to date*<sup>58</sup>. Keberhasilan proyek ini perlu didukung dengan kerjasama antara MA-RI dengan perusahaan jasa/konsultan komputer terkemuka dan kalangan Perguruan Tinggi Hukum<sup>59</sup>. Dalam hal ini sistem komputerisasi pelayanan semacam "Akses 121" yang telah dimiliki oleh Mahkamah Agung RI, di masa mendatang dapat dikembangkan untuk pengelolaan yurisprudensi<sup>60</sup>.
- c. Untuk menampung delik baru yang timbul akibat perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat, perlu ditambah satu klasifikasi lagi dalam pembidangan kum-

---

<sup>58</sup>Lihat: Purwoto S. Gandasubrata, "Pembinaan Yurisprudensi Tetap Dalam PJP II", dalam: *Varia Peradilan*, No. 124 Tahun XI, Januari 1996, Halaman 130. Sebenarnya Proyek Komputerisasi dalam rangka pembinaan yurisprudensi tetap ini telah dirintis sejak MA-RI dipimpin oleh Purwoto S Gandasubrata. Kebetulan pada saat itu MA-RI mendapat bantuan dari Belanda (dalam rangka kerja sama di bidang hukum antara Indonesia dengan Belanda) berupa dana, *software* dan tenaga *expert* untuk menggalakkan kembali proyek inventarisasi yurisprudensi dan peningkatan mutu peradilan. Sayang sekali proyek tersebut menjadi terbekalai karena tidak tersedianya tenaga redaksi yang profesional dan *fulltimer* untuk menggarap dan menganalisa puluhan ribu putusan MA.

<sup>59</sup>Untuk menjawab tantangan tersebut diharapkan Fakultas Hukum di beberapa Universitas terkemuka mendirikan Pusat Studi yang mendukung proyek pembinaan yurisprudensi tetap dan peningkatan mutu peradilan.

<sup>60</sup>Sejak tanggal 1 April 1997 di Mahkamah Agung RI mulai dioperasikan sistem informasi komputer yang dinamakan: "LAYANAN AKSES 121 MA-RI". Proyek yang dirintis oleh Hakim Agung J. Djohansjah ini disamping ditujukan untuk masyarakat pencari keadilan yang menginginkan informasi tentang perkaranya, juga dapat dimanfaatkan oleh para pejabat di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam rangka penyelesaian perkara. Baca: J. Djohansjah, "Layanan Akses 121 Mahkamah Agung Langkah Awal Open Court Management", *Varia Peradilan*, No. 140 Tahun XII, Mei 1997. Halaman 1 - 2.



pulan atau rangkuman yurisprudensi bidang hukum pidana. Misalnya nama klasifikasi tambahan tersebut adalah "delik baru" atau "delik dengan modus operandi baru". Jika langkah ini dinilai tidak mungkin karena belum ada aturan khusus tentang delik-delik baru tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana positif sehingga timbul kesulitan untuk menentukan kriteria "baru", maka setidaknya dibentuk sub-sub klasifikasi dalam klasifikasi yang telah ada. Misalnya pada klasifikasi "pencurian" dibagi menjadi sub klasifikasi: pencurian biasa/ringan, pencurian dengan pemberatan/dengan kekerasan dan ditambah dengan pencurian dengan modus operandi baru, sehingga penyalahgunaan komputer yang diputus dengan pasal-pasal pencurian dapat ditampung pada sub klasifikasi tersebut.

#### 4. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (*Human Resource*) dalam hal ini tidak terbatas pada aparat penegak hukum saja, namun meliputi juga seluruh staf yang mendukung proses peradilan.

Sebagaimana diketahui bahwa delik-delik baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat seperti penyalahgunaan komputer yang bersifat rumit dan kompleks harus ditangani oleh tenaga-tenaga ahli yang profesional. Tenaga ahli disini terutama adalah aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum yang tidak hanya menguasai aspek-aspek hukum saja namun juga memahami aspek-aspek teknologi. Sedang pengertian profesional menunjuk pada pengetahuan

(*knowledge*) yang luas dan ketrampilan/kemahiran (*skills*) yang memadai. Disamping itu profesionalisme harus didukung oleh dedikasi yang tinggi, komitmen yang jelas dan sikap atau perilaku (etika.moral) yang terpuji.

Sejauh yang penulis amati di lapangan, SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, khususnya di pengadilan masih belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal, terutama dalam menghadapi kasus-kasus jenis baru (seperti misalnya delik perbankan atau penyalahgunaan komputer). Indikasi yang menunjukkan hasil pengamatan tersebut, antara lain adalah:

- a. Jarangnya "produk peradilan" seperti dakwaan, *requisitoir*, *pleidooi* dan putusan yang berkualitas baik. Hal ini tidak hanya dapat diamati pada penerapan hukumnya namun juga pada pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penerapan hukum tersebut<sup>61</sup>.
- b. Rendahnya minat aparat penegak hukum untuk mengembangkan dirinya dengan belajar sesuatu yang baru<sup>62</sup>.
- c. Merebaknya sorotan negatif terhadap lembaga peradilan, seperti adanya kolusi, terjadinya manipulasi dan lain sebagainya, yang diakibatkan oleh sejumlah putusan yang

---

<sup>61</sup>Periksa: Kajian penulis pada subbab B dalam Bab ini. Di situ nampak kesan bahwa aparat penegak hukum, khususnya Hakim, kurang berani untuk memberikan alternatif penerapan hukum. Disamping itu nampak kesan bahwa dasar-dasar pertimbangannya amat pragmatis dan kadang-kadang agak dipaksakan.

<sup>62</sup>Dari pengamatan dilapangan melalui dialog/wawancara dengan beberapa Hakim di beberapa pengadilan di DI. Yogyakarta dan DKI Jakarta, pada umumnya hakim-hakim tersebut tidak menunjukkan minat untuk mengembangkan profesionalismenya melalui proses belajar. Jangankan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang studi yang stratanya lebih tinggi, dikirim dan dibiayai departemen untuk mengikuti penataran, diklat, lokakarya dan pendidikan tambahan lainnya-pun enggan. Rata-rata alasannya adalah karena sibuk, malas, memandang tidak ada gunanya (tidak ada apa-apanya), dan lebih efektif belajar dari pengalaman menangani perkara. Beberapa diantaranya ada yang mengakui bahwa ketika harus memeriksa perkara yang sulit baru terpacu untuk belajar.

dipandang "kurang memuaskan" dalam arti kurang dapat memberikan rasa keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah dalam hal ini adalah lembaga atau departemen terkait harus mampu menciptakan suasana kondusif dalam rangka pembenahan dan pengembangan SDM di lingkungan peradilan. Beberapa hal yang dipandang sebagai hambatan bagi pengembangan SDM adalah:

- a. Adanya kesan kurangnya kesungguhan lembaga atau departemen terkait pada setiap program yang mengarah pada peningkatan kualitas atau pengembangan SDM di lingkungan peradilan. Hal ini nampak dari penyelenggaraan program Diklat, Penataran, Lokakarya dan berbagai kursus singkat yang tidak terpola, tidak bekesinambungan, serta tidak ada *follow up*-nya. Bahkan sering muncul kesan bahwa penyelenggaraan program-program tersebut hanya untuk menghabiskan anggaran.
- b. Kurangnya penghargaan bagi aparat penegak hukum yang berhasil memiliki keahlian khusus di bidang tugasnya atau yang berhasil meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan nampak kesan bahwa aparat penegak hukum yang pandai (dalam arti berkualitas) biasanya "disingkirkan" dengan menempatkannya di bidang-bidang yang "kering" seperti di Litbang atau sebagai asisten/staf ahli.
- c. Struktur birokrasi yang tertutup dan tidak objektif seperti misalnya kenaikan pangkat yang lebih ditentukan dengan senioritas dan syarat-syarat formal lainnya, sedangkan prestasi, keahlian khusus, pendidikan tambahan serta syarat-syarat fungsional lainnya sering kurang

diperhatikan. Hal ini tidak hanya membuat aparat penegak hukum kehilangan idealisme, enggan mengembangkan dirinya melalui berbagai program pendidikan tambahan dan lebih parah lagi keadaan yang dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi tersebut dapat memperburuk sikap perilaku dan moralitas.

Dengan demikian pengembangan SDM di lingkungan peradilan dalam rangka menciptakan peradilan yang berkualitas dalam arti sehat, bersih, berwibawa dan siap menghadapi perkembangan teknologi dan masyarakat dalam era globalisasi, harus diawali dengan upaya untuk membenahi faktor-faktor penghambat tersebut di atas. Langkah selanjutnya adalah memacu minat SDM untuk mengembangkan diri dengan mempelajari hal-hal baru (termasuk teknologi komputer) dan berprestasi dalam bidang tugasnya. Caranya antara lain dengan memberikan insentif serta berbagai penghargaan (materiel maupun spiritual) sesuai dengan keahlian khusus atau prestasi kerjanya serta dedikasinya.

Pengembangan terhadap beberapa faktor yang mendukung kebijakan aplikatif melalui optimalisasi operasionalisasi perundang-undangan hukum pidana positif dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer tersebut perlu didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti literatur yang memadai dan perangkat komputer yang lengkap. Untuk saat ini di lembaga-lembaga peradilan khususnya di pengadilan-pengadilan di Indonesia, kedua fasilitas yang mutlak diperlukan dalam kehidupan modern tersebut, masih dapat dikatakan sebagai sesuatu yang "langka".

Disamping itu karena penyalahgunaan komputer menyangkut masalah-masalah teknis komputer, maka peranan ahli dalam hal ini adalah para pakar di bidang teknologi komputer, mutlak diperlukan. Oleh sebab itu perlu diwujudkan jalinan kerjasama yang baik antara ahli hukum di lingkungan peradilan dengan para ahli di bidang teknologi komputer dalam upaya mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan komputer.

Akhirnya, karena penyalahgunaan komputer menyangkut modus operandi yang canggih, maka terhadap kemungkinan perkembangannya perlu diantisipasi melalui kajian-kajian interdisipliner secara cermat dan mendalam.

## BAB IV

### KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KOMPUTER DI INDONESIA DI MASA MENDATANG

#### A. Sekilas Mengenai Pengaturan Penyalahgunaan Komputer di Beberapa Negara

Dalam pembahasan Bab terdahulu nampak bahwa sekalipun perundang-undangan hukum pidana positif di Indonesia dengan pendekatan penafsiran secara "kreatif" dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk Penyalahgunaan Komputer, namun dalam banyak hal dijumpai adanya kelemahan-kelemahan, sehingga guna menjamin adanya kepastian hukum perlu adanya kebijakan legislatif untuk mewujudkan perundang-undangan hukum pidana yang mampu menjangkau berbagai penyalahgunaan komputer secara tepat. Oleh sebab itu disamping pentingnya kajian-kajian terhadap kebijakan penerapan Undang-undang Hukum Pidana Positif yang ada pada saat ini terhadap penyalahgunaan komputer, perlu pula dikaji secara mendalam pemikiran untuk mengadakan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam rangka menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan perkembangan penyalahgunaan komputer di masa mendatang.

Berkaitan dengan kompleksitas dan rumitnya permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer, maka langkah untuk mengadakan kebijakan legislatif tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang mudah, mengingat sulitnya merumuskan penyalahgunaan komputer sebagai suatu delik. Hal ini juga dialami oleh negara-negara maju seperti Amerika dan negara-

negara di daratan Eropa<sup>1</sup>. Permasalahan penanggulangan penyalahgunaan komputer semakin rumit dengan perkembangannya yang tidak lagi menjadi masalah nasional tetapi telah bersifat transnasional.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penanggulangan penyalahgunaan komputer telah menjadi persoalan yang serius di antara negara-negara di dunia, apalagi dalam konggres PBB ke-7 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Havana-Cuba pada tanggal 27 Agustus - 7 September 1990, masalah "*Computer-related crimes*" merupakan salah satu topik yang dibicarakan secara khusus. Hasil pembahasan dari topik tersebut menghasilkan resolusi yang antara lain menyatakan:

"2. *Calls upon Member States, in view of the work already done in the field of computer-related crimes, to intensify their efforts to more effectively combat computer abuses that deserve the application of criminal sanctions at the national level, including the consideration, if necessary, of the following measures:*

(a) *Modernization of national criminal laws and procedures including measures to:*

- (i) *Ensure that existing offences and laws concerning investigative powers and admissibility of evidence in judicial proceedings adequately apply and, if necessary, make appropriate changes;*
- (ii) *In the absence of laws that adequately apply, create offences and investigative and evidentiary procedures, where necessary, to deal with novel and sophisticated form of criminal activity;*
- (iii) *Provide for the forfeiture or restitution of illegally acquired assets resulting from the commission of computer-related crimes*"<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Amerika sebagai negara yang pertama kali mengembangkan teknologi komputer, Jepang sebagai negara kedua yang mengembangkan teknologi komputer setelah Amerika dan Jerman yang termasyur karena teknologinya, hingga saat ini merasa belum mampu membuat rumusan yang tepat dalam rangka mengatur delik komputer. Periksa: Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987. Halaman 51.

<sup>2</sup>United Nations, Document A/CONF.144/L.11 Eighth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Havana-Cuba, 4 September 1990. Halaman 3. (garis bawah dari penulis)

Karena penanggulangan penyalahgunaan komputer telah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia internasional, maka kebijakan legislatif yang mengarah pada pembaharuan perundang-undangan hukum pidana, perlu pula memperhatikan politik hukum pidana negara lain dalam rangka mengatur permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer.

Pengaturan tentang penyalahgunaan komputer diberbagai negara tidaklah sama (bervariasi). Hal ini tentu saja berkaitan dengan perbedaan kebijakan masing-masing negara, terutama berkaitan dengan perbedaan tradisi atau sistem hukum masing-masing negara.

Negara-negara di Eropa Kontinental yang menganut tradisi hukum *Civil Law* sudah pasti menempatkan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) sebagai sumber hukum yang paling utama. Hal ini tentu saja berbeda dengan negara-negara *Anglo Saxon* yang menganut tradisi hukum *Common Law*, cenderung menitikberatkan pembentukan hukum melalui kasus-kasus konkret (*law in cases*). Negara-negara tersebut menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum yang utama bagi pertimbangan terhadap kasus-kasus berikutnya. Namun demikian dewasa ini ada kecenderungan yang umum, baik pada tradisi hukum kontinental maupun anglo saksis, makin pentingnya peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>. Perbedaan tradisi hukum yang dianut oleh berbagai negara tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap keragaman kebijakan pengaturan penyalahgunaan komputer, belum lagi jika dikaitkan dengan perbedaan sistem hukum pada masing-masing negara.

---

<sup>3</sup>Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Hukum Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987. Halaman 10.



Disamping karena perbedaan tradisi hukum yang melandasi sistem hukum suatu negara, keanekaragaman pengaturan mengenai penyalahgunaan komputer di berbagai negara tersebut juga dikarenakan perbedaan pendekatan dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan komputer. Secara umum terdapat tiga cara penyelesaian dalam menilai tentang ukuran-ukuran isinya yaitu:<sup>4</sup>

1. *Property Approach*. Penyalahgunaan komputer di sini dilihat sebagai suatu bagian dari delik terhadap harta kekayaan (*property*). Dengan demikian isi inti dari catatan-catatan komputer tersebut diterjemahkan menurut nilai finansialnya. Disamping itu kepentingan-kepentingan yang dikaitkan dengan penggunaan sistem komputer dimasukkan ke dalam pengertian "*property*". Perlu diketahui bahwa pendekatan ini merupakan yang tertua dan paling banyak dilakukan.
2. *Forgery Approach*. Di sini penyalahgunaan komputer dilihat terutama sebagai bagian dari delik-delik pemalsuan, dimana integritas dari keterangan-keterangan catatan komputer merupakan hal yang terutama harus diperhatikan dalam suatu penyelesaian.
3. *Information Approach*. Merupakan penyelesaian yang terutama diarahkan pada sifat dipercayainya isi dan arti dari catatan-catatan komputer.

Selanjutnya perbedaan tradisi hukum yang melatarbelakangi dan cara pendekatan dalam penyelesaian penyalahgunaan komputer menyebabkan bervariasinya bentuk pengaturan terhadap

---

<sup>4</sup>Roeslan Saleh, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Di Beberapa Negara dan Hukum Pidana Sehubungan Dengan Penyalahgunaan Komputer Di Beberapa Negara*, t.p., t.k., 1995. Halaman 34.

delik penyalahgunaan komputer di beberapa negara, yang secara garis besarnya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tetap diatur dalam sistem kodifikasi yakni dengan cara memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Code Penal*);
2. Dengan sarana amandemen memperbaharui beberapa ketentuan dalam undang-undang hukum pidana yang terkait;
3. Menciptakan undang-undang hukum pidana yang secara khusus mengatur masalah penyalahgunaan komputer.

Berdasarkan asumsi, keanekaragaman pengaturan mengenai penyalahgunaan komputer di berbagai negara tersebut maka perlu kiranya diadakan kajian perbandingan hukum guna mengetahui bagaimana model pengaturan, perumusan delik dan (jika dipandang perlu) penetapan sanksi terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan komputer. Dari kajian yang bersifat *yuridis komparatif* tersebut, selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk mengkaji dimana posisi tradisi dan sistem hukum Indonesia serta bagaimana bagaimana sebaiknya model pengaturan, perumusan delik dan penetapan sanksi terhadap perbuatan penyalahgunaan komputer dalam perundang-undangan hukum pidana di Indonesia<sup>5</sup>.

Berikut ini penulis akan memaparkan secara sekilas mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan komputer pada beberapa negara. Mengingat keterbatasan yang ada pada

---

<sup>5</sup>Menurut Van Apeldorn, salah satu manfaat perbandingan hukum adalah merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim. Lihat: Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996. Halaman 12. Bandingkan pula dengan pendapat Rene David/Brierly, Soerjono Soekanto dan Tahir Mahadi, dalam: Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994. Halaman 18 - 19.

penulis, maka tidak semua negara akan dibahas dalam tulisan ini, namun penulis akan memilih beberapa negara yang dianggap mewakili dari beberapa model pengaturan dan pendekatan yang ada. Disamping itu deskripsi mengenai perlindungan hukum di sini lebih difokuskan pada bagaimana kebijakan pengaturan penyalahgunaan komputer di bidang hukum pidana materiel<sup>6</sup>.

### 1. Amerika Serikat (*United State*)

Sesuai dengan latar belakang sejarahnya maka tradisi hukum yang dianut oleh Amerika adalah *Common Law System* sebagaimana negara-negara *Anglo Saxon* lainnya<sup>7</sup>.

Permasalahan yang dihadapi oleh Amerika hingga saat ini berkaitan dengan penanggulangan penyalahgunaan komputer berkisar pada pengertian "*property*" atau "*article*" terhadap data dan program komputer. Masalah hukum yang sangat memusingkan pengadilan tersebut khususnya mengenai perbedaan antara "*tangible*" dan "*intangible*"<sup>8</sup>.

<sup>6</sup>Sebenarnya perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan komputer dapat juga dikaitkan dengan perundang-undangan mengenai hak cipta atau hak oktroi, namun ketentuan pidana yang ada dalam bidang tersebut berlaku untuk semua karya yang bersifat hak cipta dan hak oktroi, disamping itu juga sangat mempunyai sifat *accessoir*, sehingga perlindungan melalui aturan perundang-undangan mengenai hak cipta dan hak oktroi dari program komputer tidak begitu dapat digunakan untuk mengkaji perbandingan hukum yang bersifat hukum pidana. Periksa: Roeslan Saleh, *Perbandingan Hukum Pidana Sehubungan Dengan Penyalahgunaan Komputer*, t.p., t.k., t.t., Halaman 2.

<sup>7</sup>Sistem hukum di Amerika berkembang secara dinamis mengikuti karakteristik masyarakatnya yang plural (terdiri dari para pendatang) dan keadaan wilayahnya yang luas (terdiri dari banyak negara bagian). Hal ini membuat hukum di Amerika memiliki karakteristik yang khas yang tidak sama persis dengan sistem hukum negara asalnya (Inggris). Sistem hukum ini lalu dikenal dengan istilah: "*Anglo-American Common Law System*". Periksa: Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice: Volume 2*, The Free Press Advision of Macmillan Inc., New York, 1988, Halaman 507.

<sup>8</sup>Rostoker dalam *Computer Jurisprudence* mengatakan bahwa: "*The concept of property and the specifically the differences between tangible and intangible property, has been the area of greatest confusion for the courts*". Lihat: Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV. Tanjung Agung, Jakarta, 1993, Halaman 80.

Dengan sistem *common law*-nya, maka hukum di Amerika lebih nampak dalam putusan-putusan pengadilan. Berkaitan dengan penyelesaian terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer, dari berbagai kasus di pengadilan-pengadilan di berbagai negara bagian nampak bahwa masih ada perbedaan pendapat mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan *property data/program komputer*<sup>9</sup>. Dari beberapa putusan pengadilan negara bagian, nampak bahwa hakim "enggan" memperluas pengertian *article/property* ini pada data/program komputer, sehingga hakim telah membebaskan terdakwa dalam beberapa kasus pencurian data yang berisi rahasia perusahaan atau milik pemerintah. Sementara dari putusan negara federal atau negara bagian yang lain, nampak bahwa hakim "berimprovisasi" dengan memperluas pengertian *article/property* sehingga meliputi pula *intangible objek* yang dalam hal ini adalah data/program komputer.

Dari sekilas gambaran tersebut di atas nampak bahwa cara penyelesaian melalui *property aproach* menjadi sangat populer di Amerika<sup>10</sup>, sekalipun dalam perkembangannya cara penyelesaian melalui *information aproach* juga banyak dilakukan.

---

<sup>9</sup>Beberapa putusan pengadilan yang menerima data/program komputer sebagai *article/property* nampak dalam putusan pengadilan negara federal/bagian atas perkara: United States Vs DiGilio (1976), Hancok Vs State (1978), United States Vs Lambert (1978), United States Vs Girard (1979), United States Vs Hubard (1979), People Vs Weg (1982) dan United States Vs Carpenter (1987). Sedangkan putusan pengadilan yang menolak data/program komputer sebagai *article/property* antara lain: Ward Vs Superior Court (1972), Lund Vs Commonwealth of Virginia (1977), United States Vs Siedlitz (1978), Dowling Vs United States (1985), dan United States Vs Sampson (1978). Baca selengkapnya dalam: Ibid. Halaman 81 - 86.

<sup>10</sup>Periksa: Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, Halaman 4.

Sekalipun di Amerika terdapat beberapa undang-undang negara bagian yang "tradisional" yang dapat diterapkan (sebagai alternatif) untuk menanggulangi penyalahgunaan komputer namun dalam perkembangannya, undang-undang yang dibangun sebelum era komputer tersebut semakin sulit untuk mengikuti perkembangan penyalahgunaan komputer<sup>11</sup>. Oleh sebab itu sejak tahun 1980-an di Amerika bermunculan Undang-undang yang mengatur masalah penyalahgunaan komputer, baik pada tingkat federal maupun pada negara-negara bagian<sup>12</sup>.

Undang-Undang yang mengatur tentang penyalahgunaan komputer di Amerika banyak sekali dan sangat bervariasi, karena disamping negara federal telah membuat Undang-Undang tentang penyalahgunaan komputer yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang bersifat lintas negara bagian atau bersifat transnasional, negara-negara bagian yang berjumlah 52 diberi kewenangan penuh untuk membuat undang-undang tentang penyalahgunaan komputer sendiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara bagian tersebut.

---

<sup>11</sup>Christopher D. Chen, *Computer Crime and The Computer Fraud and Abuse Act of 1986* dalam *Computer/Law Journal*, Vol. X, 1990. Halaman 75 - 76. Antara lain disebutkan pula bahwa: "There are forty federal statutes and eleven areas of traditional state law that can be used to attack computer crime. The areas of state law include: arson, burglary, embezzlement, larceny, criminal mischief, extortion, forgery, theft, receipt of stolen property, theft of services of labor under false pretenses, and theft of trade secrets".

<sup>12</sup>Sekalipun sistem peradilan di Amerika menganut sistem "precedent" dan dikenal dengan "judge made law"-nya, hal ini tidak berarti bahwa di Amerika tidak ada atau tidak diperlukan suatu peraturan perundang-undangan, bahkan dalam perkembangannya ada kecenderungan semakin pentingnya arti peraturan perundang-undangan dalam upaya memperlancar tugas-tugas peradilan.

Berkaitan dengan keterbatasan halaman untuk mengkaji seluruh undang-undang tentang penyalahgunaan komputer yang terdapat di Amerika secara lengkap dan terperinci maka dalam hal ini penulis hanya akan menguraikan hasil pengamatan yang bersifat umum (hal-hal pokoknya saja):<sup>13</sup>

- a. Sekalipun Amerika tergolong negara maju yang memiliki sistem hukum modern, namun nampaknya badan legislatif sulit untuk membuat undang-undang penyalahgunaan komputer yang sempurna. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kali muncul amandemen terhadap *The U.S. Penal Code* hingga muncul *Computer Fraud and Abuse Act of 1984* yang disempurnakan lagi dalam *Computer Fraud and Abuse Act of 1986*. Hal ini menunjukkan pesatnya perkembangan bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer yang sering kali tidak terbayangkan oleh pembuat Undang-Undang. Perkembangan atau penyempurnaan *Computer Fraud and Abuse Act* tersebut biasanya berupa penambahan bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan komputer yang dapat dipidana. Perkembangan pengaturan delik komputer di negara federal biasanya diikuti oleh negara-negara bagian.
- b. Bentuk pengaturan penyalahgunaan komputer di Amerika adalah diatur dalam undang-undang khusus tentang penyalahgunaan komputer. Adapun undang-undang tersebut di

---

<sup>13</sup> Sumber kajian: *The Federal Computer Systems Protection Act*; *Computer Fraud and Abuse Act 1984*; *Computer Fraud and Abuse Act of 1986*; *Computer Security Act of 1987*; Jeffrey A. Pritt, "Computer Crime In West Virginia: A Statutory Proposal", dalam *West Virginia Law Review*, Vol. 91, 1989, Halaman 569 - 596; Christopher D. Chen, *Op.Cit.*, Halaman 71 - 86; Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, Halaman 37 - 41; Eddy Djunaedy Karnasudirdja, *Op.Cit.*, Halaman 80 - 87, dan Darryl C. Wilson, "Viewing Computer Crime: Where Does The Systems Error Really Exist?", dalam *Computer/Law Journal*, Vol. XI, 1991, Halaman 265 - 285.

negara federal disebut dengan nama "*Computer Fraud and Abuse Act*", sedangkan di negara-negara bagian ada pula yang disebut dengan nama "*Computer Misuse Act*". Sekali-pun nampak seperti undang-undang yang berdiri sendiri, namun pada hakekatnya undang-undang yang mengatur penyalahgunaan komputer tersebut merupakan bagian dari *Crimes Act*, *Criminal Code* atau *Penal Code*<sup>14</sup>.

- c. Penempatan *Computer Misuse Act* dan sejenisnya dalam *Code* biasanya dibawah artikel yang mengatur masalah "*Crimes against property*"<sup>15</sup>. Namun demikian ada pula yang mengkaitkan pengaturan penyalahgunaan komputer dengan ketentuan mengenai perlindungan informasi oleh penguasa terhadap dapat diketahuinya informasi itu secara melawan hukum oleh orang lain<sup>16</sup>. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dipergunakan oleh pembuat undang-undang di Amerika tidak hanya terbatas pada *property approach*, namun juga telah menggunakan *information approach*.
- d. Model pengintegrasian delik komputer ke dalam *criminal code* di Amerika yaitu dengan cara menambahkan ketentuan baru atau memperbaharui dengan amandemen sangat dimung-

<sup>14</sup>Hal ini ditegaskan lagi oleh pernyataan Presiden Reagan pada tanggal 12 Oktober 1984 yang antara lain dikatakan bahwa: "...*Computer Fraud and Abuse Act of 1984 (the "1984 Act") as part of the Comprehensive Crime Control Act of 1984*". Lihat: Christopher D. Chen, *Op.Cit.*, Halaman 76 - 77.

<sup>15</sup>Sebagai contohnya adalah di negara bagian Virginia Barat, amandemen mengusulkan untuk menempatkan "*The West Virginia Computer Crime Act*" pada Chapter 61 "*The West Virginia Code*" yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda, tepatnya di bawah artikel 61-3A dan 61-3B. Sehingga Chapter 61 tersebut ditambah dengan Article 3C yang terdiri dari 14 section.

<sup>16</sup>Hal ini dapat dilihat dari penempatan "*Counterfeit Acces and Computer Fraud and Abuse Act*" ke dalam 18 U.S. Code, tepatnya dalam s. 1030 yang mengatur mengenai informasi yang disimpan dalam sistem komputer.

kinkan di Amerika karena "*code*" dalam *common law system* tidak sama dengan pengertian "*codification*" dalam *civil law system*, namun lebih nampak sebagai "kumpulan undang-undang".

- e. Delik komputer dalam undang-undang penyalahgunaan komputer di Amerika biasanya dirumuskan secara sederhana (*simple*) dan dibuat secara terperinci sehingga mencakup aspek-aspek yang akan dilindungi<sup>17</sup>. Disamping itu biasanya dalam "*Act*" tersebut juga dilengkapi dengan definisi-definisi guna mempertegas ruang lingkup atau batasan pengertian dari komputer beserta sarana-sarana penunjangnya yang akan dilindungi<sup>18</sup>.

Demikian sekilas gambaran mengenai pengaturan penyalahgunaan komputer di Amerika. Dengan model pengaturan tersebut diharapkan hukum di Amerika akan mampu mengikuti perkembangan bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer yang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer. Jika suatu ketika undang-undang penyalahgunaan komputer sudah tidak sesuai lagi atau ada bentuk baru penyalahgunaan komputer yang perlu ditanggulangi, maka *senate* tinggal mengajukan usulan pada *Congress* agar segera membuat amandemen untuk merubah atau menambahi (menyempurnakan) *Computer*

---

<sup>17</sup>Lihat sampel *Computer Crimes Act* pada lampiran I.

<sup>18</sup>Misalnya, pengertian computer dalam section 61-3C-3(c) antara lain dirumuskan: "*Computer* means an electronic, magnetic, optical, electronic, or other high speed data processing device performing logical, arithmetic, or storage functions, and includes any data storage facility or communications facility directly related to or operating in conjunction with such device, but such term does not include an automated typewriter or typesetter, a portable hand-held calculator, or other similar device". Nampak dalam rumusan tersebut bahwa tidak setiap mesin elektronik atau yang diotomatisasikan, disebut sebagai komputer. Bandingkan: *Infra*, catatan kaki 41 dan teks yang menyertainya.



*Fraud and Abuse Act* yang ada, sehingga dengan demikian *Criminal Code* di Amerika selalu terbuka untuk diperbaharui. Pembaharuan "*Code*" atau "*Act*" di Amerika tersebut sering kali juga didukung oleh peradilan di Amerika dengan "*judge made law*"-nya, dimana dalam menghadapi kasus-kasus baru (termasuk kasus penyalahgunaan komputer) hakim sering kali harus membuat penemuan-penemuan hukum baru yang dapat dijadikan ide dalam memperbaharui undang-undang yang ada.

## 2. Inggris (*United Kingdom*).

Inggris seringkali disebut-sebut sebagai induk dari *common law system*. Sekalipun demikian sebenarnya sistem hukum di Inggris telah berkembang sedemikian rupa hingga nampak pula adanya pengaruh-pengaruh dari sistem hukum di Eropa Kontinental.

Keterbatasan dianutnya doktrin *precedent* seperti sifatnya yang kaku (mengikat hakim), kadang-kadang dalam kasus tertentu sulit mencari alasan logis untuk tidak mengikuti *precedent* dan jumlah kasus yang banyak dan bersifat rumit, merupakan salah satu alasan untuk mewujudkan sistem kodifikasi di Inggris<sup>19</sup>. Pada saat ini Inggris telah memiliki beberapa undang-undang yang disebut-sebut sebagai kodifikasi (sekalipun bersifat parsial) atau setidaknya diformulasikan sebagai bagian dari program kodifikasi hukum pidana, seperti misalnya yang sangat populer yaitu: *Theft*

---

<sup>19</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, Halaman 43 - 44.

Act 1968 dan *Theft Act* 1973<sup>20</sup>, *Murder Act* 1965, *Forgery and Counterfeiting Act* 1981<sup>21</sup> dll.

Pada awalnya penyelesaian kasus-kasus penyalahgunaan komputer di Inggris mempergunakan Undang-Undang yang telah ada, yang dianggap relevan dengan bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer. Misalnya masalah pencurian data/program komputer atau penipuan dengan memanfaatkan komputer sebagai sarannya, biasanya dapat dituntut dengan ketentuan yang terdapat dalam *Theft Act* 1968 dan 1978, masalah pemalsuan data komputer dapat dituntut dengan *Forgery and Counterfeiting Act* 1981, masalah perusakan data atau program komputer dengan *Criminal Damage Act* 1971, *Hacking* dengan *Interception of Communication Act* 1971, dan lain sebagainya<sup>22</sup>. Karena berbagai undang-undang tersebut di atas tidak ditujukan untuk mengatur penyalahgunaan komputer secara khusus maka penerapannya biasanya mempergunakan penafsiran rasional<sup>23</sup>. Misalnya dengan memasukkan data atau program komputer ke dalam pengertian "harta benda" sebagai salah satu unsur pencurian berdasar *section 1*

---

<sup>20</sup>Periksa: J.C. Smith and Brian Hogan, *Criminal Law: Six Edition*, ELBS Butterworths & Co. (Publishers) Ltd, London, 1988. Halaman 489. Antara lain disebutkan: "The law of theft was codified by the *Theft Act* 1968 and 1978".

<sup>21</sup>Periksa: *Ibid.*, Halaman 645. Antara lain disebutkan: "This Act is largely based upon the recommendations of the Law Commission, and forms part of the programme for the codification of the criminal law".

<sup>22</sup>Periksa selengkapnya dalam: David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Halaman 211 - 213.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Halaman 178.

(1) *Theft Act* 1968<sup>24</sup>, dimana hal itu dimungkinkan karena definisi "harta benda berdasarkan *section* 4 (1) *Theft Act* 1968 meliputi pula "*intangible property*"<sup>25</sup>.

Beberapa perundang-undangan di Inggris memang telah diperbaharui sedemikian rupa sehingga menjangkau perkembangan teknologi informatika. Masalah pemalsuan data komputer misalnya dapat dijaring dengan *Forgery and Counterfeiting Act* 1981 karena dalam *section* 8 undang-undang tersebut dijelaskan mengenai "peralatan yang salah"<sup>26</sup> meliputi pula media penyimpanan elektronik<sup>27</sup>.

Pemerintah Inggris akhirnya menyadari bahwa perkembangan penyalagunaan komputer mengikuti pesatnya perkembangan teknologi komputer sehingga merasa perlu membuat undang-undang yang khusus mengatur mengenai penyalahgunaan komputer. Salah satu persoalan rumit yang sulit dipecahkan dengan undang-undang yang ada di Inggris adalah perbuatan *hacking*, oleh sebab itu komisi hukum pada bulan oktober 1989 telah merekomendasikan pembuatan tiga ketentuan pidana baru, yang menyangkut persoalan tindakan-tindakan

<sup>24</sup>Section 1 (1) *Theft Act* 1968 berbunyi: "A person is guilty of theft if he dishonestly appropriates property belonging to another with the intention of permanently depriving the other of it; and 'thief' and 'steal' shall be construed accordingly"

<sup>25</sup>Section 4 (1) *Theft Act* 1968 menyatakan: "'Property' includes money and all other property, real or personal, including things in action and other intangible property"

<sup>26</sup>Pengertian umum dari pemalsuan diatur dalam *section* 1 *Forgery and Counterfeiting Act* 1981 yang berbunyi: "A person is guilty of forgery if he makes a false instrument, with the intention that he or another shall use it to induce somebody to accept it as genuine, and by reason of so accepting it to do or not to do some act to his own or any other person's prejudice"

<sup>27</sup>Menurut *section* 8 (1), pengertian "instrument" meliputi: a) any document, whether of formal or informal character; b) any stamp issued or sold by the Post Office; c) any Inland Revenue stamp; and d) any disk, tape, sound track or other device on or in which information is recorded or stored by mechanical, electronic or other means.

secara tidak sah dalam hubungan dengan sistem-sistem komputer, termasuk *hacking*<sup>28</sup>. Rekomendasi tersebut telah dijadikan landasan dalam sebagian besar materi Rancangan Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer (*Computer Misuse Bill*) yang disampaikan oleh Michael Calvin MP dan memperoleh dukungan pemerintah, selanjutnya telah disahkan menjadi Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer (*Computer Misuse Act 1990*) pada tanggal 29 Juni 1990.

Adapun tindak pidana baru yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:<sup>29</sup>

- a. Akses tidak sah ke suatu materi komputer (*Unauthorised access to computer material*). Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak £ 1.000 (seribu pounds) ini meliputi pula *hacking* komputer. Syarat agar seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana ini adalah orang tersebut *secara sadar mengetahui* bahwa akses yang dilakukannya pada suatu sistem komputer adalah melawan hukum<sup>30</sup>.
- b. Akses tidak sah kepada sebuah komputer untuk maksud melakukan atau memudahkan pelaksanaan suatu tindak pidana yang lebih lanjut (*Unauthorised access with intent to commit or facilitate commission of further offences*). Tindak pidana yang dapat diadili di pengadilan mana saja (di *Crown Court* ataupun di *Magistrate*

<sup>28</sup>David I. Brainbridge, *Op.Cit.*, Halaman 209.

<sup>29</sup>Lihat/periksa: *Ibid.* dan section 1 - 3 *Computer Misuse Act 1990* (dalam lampiran II).

<sup>30</sup>Ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Inggris sangat memperhatikan aspek "*Mens-Rea*" (berasal dari maxim "*Actus non est reus nisi mens sit rea*") dalam menentukan kesalahan.

*Court*) ini mencakup pula perbuatan dimana seorang *hacker* mengakses ke sistem komputer dengan maksud menghapus/-merusak data atau bermaksud mencuri uang.

- c. Modifikasi tidak sah terhadap materi komputer (*Unauthorised modification of computer material*). Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun ini dimaksudkan untuk memperkokoh dan menkonsolidasi hukum tentang perusakan, karena berlaku terhadap program dan data komputer. Bedanya dengan kejahatan perusakan barang (sebagaimana di atur dalam *Criminal Damage Act 1971*) adalah bahwa tindak pidana ini tidak dapat disangkal dengan alasan 'kelalaian'.

Dari gambaran tersebut nampak bahwa sekalipun tindak pidana penyalahgunaan komputer dirumuskan secara luas dalam *Computer Misuse Act*, namun pada dasarnya undang-undang tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang ada dalam undang-undang atau dalam kodifikasi parsial yang ada. Dengan kata lain *Computer Misuse Act 1990* ini lebih merupakan "*lex specialis*" dari *Theft Act 1968/1978*, *Forgery and Counterfeiting Act 1981*, *Criminal Damage Act 1971* dan undang-undang yang sudah ada lainnya.

Selanjutnya mengingat karakteristik yang khas dari penyalahgunaan komputer maka undang-undang ini, disamping mengatur masalah perbuatan penyalahgunaan komputer (*Computer misuse offences*), juga dilengkapi dengan ketentuan mengenai yurisdiksi (*jurisdiction*) berlakunya undang-undang ini (diatur dalam *section 4 - 9*) dan masalah keten-

tuan lain-lain dan ketentuan umum (*Miscellaneous and general*: diatur dalam *section 10 - 18*) yang di dalamnya antara lain diatur pula masalah penafsiran (*interpretation*), yakni dalam hal apa saja seseorang dapat dikatakan memperoleh akses data atau program komputer<sup>31</sup>.

### 3. Perancis

Dalam pembagian keluarga hukum yang ada di dunia, hukum Perancis termasuk ke dalam *Civil Law System*. Sebagai konsekuensinya sistem hukum di Perancis mengacu pada sistem kodifikasi. Demikian pula hukum pidana di Perancis terpusat pada KUHP-nya (*Code Penal*) sebagai sumber hukum utama.

Sebagaimana kebiasaan negara Eropa Kontinental lainnya dalam mengatasi setiap persoalan (hukum pidana) yang muncul, maka pertama-tama yang dilakukan adalah mencari padanan unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam *Code Penal*. Demikian pula terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang muncul, pertama-tama akan dicarikan padanannya dalam *Code Penal*. Biasanya penerapannya dikaitkan dengan delik terhadap kejahatan berat atau kejahatan ringan (*delit*) terhadap harta benda, misalnya pencurian<sup>32</sup>. Dalam perkembangannya karena timbul kesulitan-kesulitan untuk memaksakan penerapan ketentuan-ketentuan tradisional

<sup>31</sup>Selengkapnya lihat dalam lampiran II.

<sup>32</sup>Pencurian dalam *Code Penal* dirumuskan secara simpel, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 379 CP yakni: "seorang yang mengambil secara menipu sesuatu barang yang ia bukan pemiliknya, dipersalahkan melakukan pencurian". Periksa: Andi Hamzah (Ed.), *KUHP Prancis: Sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Halaman 187.

dalam *Code Penal*, maka muncul pemikiran untuk membuat ketentuan hukum pidana komputer di Perancis.

Undang-Undang penyalagunaan komputer yang ada sekarang ini dapat terwujud setelah melalui proses perdebatan yang panjang. Pada awalnya hukum pidana komputer di Perancis merupakan bagian dari peninjauan kembali terhadap *Code Penal* yang telah diterima oleh *Assembles Nationale*<sup>33</sup>. Pergantian pemerintah yang dipegang oleh oposisi sejak tahun 1986 dan reaksi dari kepustakaan (terutama berkaitan dengan masalah teknik perundang-undangan) menyebabkan usulan pengaturan penyalahgunaan komputer berjalan *alot*. keadaan tersebut memuncak dengan munculnya dua model rancangan yakni rancangan pemerintah yang dikenal dengan sebutan: "Rancangan Banditer" dan rancangan atas inisiatif anggota parlemen yang disebut sebagai: "Rancangan Godfrain". Kedua rancangan tersebut menerapkan pendekatan yang berbeda. Rancangan Banditer bermaksud menambah ketentuan baru dalam *Code Penal* (sekali pun data/informasi dari sistem komputer di sini dipresentasi sebagai objek kekayaan) misalnya: "*Capter* (Ind. = mendapat dengan menipu) *une donnee ou tout autre element de traitement automatique d'informations*" (Pasal 307-1) dan "*detruire ou alterer*" dari keseluruhan atau sebagian dari suatu sistem yang mengusahakan lebih jauh suatu keterangan (Pasal 307-3 CP)<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, Halaman 41.

<sup>34</sup>Lihat: *Ibid.*, Halaman 41 - 42.

Sedangkan Rancangan Godfrain tidak membuat ketentuan baru namun hanya menambahkan beberapa unsur baru pada ketentuan pidana yang sudah ada, misalnya: Pasal 165 CP tentang pemalsuan dalam tulisan (*faux en ecritures*) ditambah dengan unsur: "dipandang pula sebagai tulisan adalah: *tout enregistrement informatique*", Pasal 401 CP tentang pencurian yang dikualifikasi diperluas dengan unsur: "dengan sengaja dan melawan hukum *capter des donnees ou programme enregistres*" dan seterusnya<sup>35</sup>.

Setelah terjadi kompromi antara kedua rancangan tersebut akhirnya terwujudlah undang-undang yang sifat dan jangkauannya lebih terbatas dari rancangan semula. Undang-undang yang berlaku sekarang tersebut berisikan ketentuan-ketentuan pidana sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Diancam pidana berdasarkan Pasal 462-3 CP barangsiapa menghambat atau mengganggu bekerjanya suatu sistem komputer. Termasuk dalam pengertian menghambat atau mengganggu adalah sabotase yang bersifat fisik, sabotase yang bersifat logis, manipulasi data dan program.
- b. Diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 462-4 CP barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan sesuatu kedalam sistem komputer, atau merobah, atau mencetak catatan-catatan yang ada di dalamnya atau merobah cara pengerjaannya.

<sup>35</sup> *donnees* dalam hal ini meliputi pula data komputer. Periksa: *Ibid.*, Halaman 42 - 43.

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 44.



- c. Diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 462-5 CP barangsiapa memalsukan *document informatives* dengan cara merekam catatan-catatan secara elektromagnetis yang jika kemudian dipindahkan pada benda lain (misalnya kertas) dapat menghasilkan suatu tulisan yang dapat berfungsi sebagai pembuktian, dan diancam berdasarkan Pasal 462-6 barangsiapa memakai dokumen yang dipalsukan tersebut<sup>37</sup>.
- d. Dipandang sebagai ketentuan sentral adalah larangan memasuki suatu sistem komputer secara tidak legal. Masuk ke dalam sistem komputer menjadi suatu *fraudileux* jika dilakukan dengan cara merusak pengamanan jalan untuk masuk atau melampaui wewenangnya. Jadi masuk tanpa wenang ke dalam sistem yang terbuka (misalnya internet -pen.) dan tidak diamankan bukanlah suatu perbuatan pidana.

Dari sekilas gambaran mengenai pengaturan delik penyalahgunaan komputer di Perancis, nampak bahwa objek dari tindakan penyalahgunaan komputer adalah "sistem komputer" dan bukanlah isi daripadanya (data/keterangan/informasi). Disamping itu nampak bahwa pembaharuan perundang-undangan hukum pidana di Perancis dalam menanggulangi penyalahgunaan komputer telah berkembang dari *property approach* ke *information approach*.

---

<sup>37</sup> Ketentuan ini dirumuskan untuk mengatasi doktrin Perancis yang berkaitan dengan "*faux en ecriture*" dimana suatu tulisan tidak dapat terdiri atas rekaman tape atau disk, sebab tanda-tanda dalam tulisan tersebut harus langsung dapat dilihat.

#### 4. Belanda.

Sebagai bagian dari negara Eropa Kontinental dengan tradisi *Civil Law*-nya, Belanda juga menerapkan sistem kodifikasi sebagai sumber hukum utamanya. Demikian pula dalam mengatasi kasus-kasus penyalahgunaan komputer, maka pertanyaan yang mesti dijawab terlebih dahulu adalah: sejauhmana KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) dapat diterapkan terhadap bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan komputer yang terus berkembang.

Belanda termasuk negara yang paling konsisten menjalankan sistem kodifikasinya. Di bidang hukum pidana, hal ini terbukti bahwa satu-satunya undang-undang hukum pidana khusus yang ada di luar kodifikasi di Belanda pada saat ini hanya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (*Wet op de Economische Delicten*). Dalam hal ini yang dijadikan dasar pertimbangan oleh pembentuk undang-undang di Negeri Belanda adalah selama pengintegrasian suatu delik kedalam KUHP tidak merusak sistem yang dibangun dalam kodifikasi tersebut maka tidak perlu dibuat undang-undang khusus.

Dalam mengatasi penyalahgunaan komputer, maka yang pertama kali dikaji adalah: bagaimana eksistensi sistem kodifikasinya. Para ahli hukum di negeri Belanda telah lama memperbincangkan masalah ini dan muncul pula pemikiran untuk memperluas pengertian barang (*enig goed*) dalam *Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya akan disebut dengan singkatan: "Sr") sehingga meliputi pula program dan data komputer (*computerprogramma en gegevens*). Dengan metode penafsiran tersebut maka beberapa kasus penyalahgunaan komputer dapat diselesaikan dengan pasal-pasal "tradisio-

nal" seperti Pasal 310 Sr (sepadan dengan Pasal 362 KUHP) untuk kasus pencurian data, Pasal 139a Sr (tidak ada padanannya dalam KUHP) untuk kasus "*hacking*", Pasal 350 Sr (sepadan dengan Pasal 406 KUHP) untuk kasus perusakan data dan lain sebagainya<sup>38</sup>.

Salah satu putusan pengadilan yang cukup menarik berkaitan dengan masalah penerapan hukum terhadap kasus penyalahgunaan komputer adalah Putusan Pengadilan Tinggi Arnhem (*Hof Arnhem*) tanggal 27 April 1983 yang dikenal dengan nama "*disc-pack arrest*". Dalam putusan ini *Hof Arnhem* telah memperluas pengertian barang (*goed*) dalam kasus penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 321 Sr (sepadan dengan Pasal 372 KUHP) sama dengan data (*gegevens*)<sup>39</sup>. Nampaknya putusan kontroversial ini diilhami oleh putusan *Hoge Raad* dalam "*electriciteit arrest*" tahun 1921.

Banyak ahli hukum di Negeri Belanda yang tidak setuju dengan langkah-langkah hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Arnhem tersebut, salah satunya adalah Kaspersen yang antara lain berkomentar:

"...data adalah merupakan hasil dari informasi intelektual sehingga lebih condong masuk ke dalam *intellectual property* dari pada masuk bagian kebendaan. .... Dengan mempersamakan data dengan barang, orang akan beranggapan bahwa itu hanya mempunyai nilai ekonomi yang sem-

---

<sup>38</sup>Kajian tentang hal tersebut selengkapnya dapat dilihat pada: H.W.K. Kaspersen dan M. Keijzer, *Hukum Pidana Belanda dan Penyalahgunaan Komputer* (terjemahan dari: "*Het Nederlandse Strafrecht en Computermisbruik*" dalam *Strafrecht in de Informatiemaatschappij*, Symposium, Vrije Universiteit Amsterdam, 22 April 1986), t.p., t.k., t.t., Halaman 27 - 37.

<sup>39</sup>Kasus ini mengenai seorang *system analyst* dari suatu perusahaan yang memproduksi program komputer, yang sering melakukan perbuatan *engcopy* data yang terdapat dalam *data carrier* milik majikannya ke dalam *data carriernya*. Perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut semata-mata untuk kepentingan usaha pribadinya. Periksa: *Ibid.*, Halaman 16 dan H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Op.Cit.*, Halaman 78.

pit, padahal data mempunyai nilai-nilai khusus yang lebih berharga dari barangnya sendiri. Oleh karenanya tidak dapat dimasukkan dalam pengertian barang dalam hukum harta kekayaan (*property concept*)<sup>40</sup>

Prof. Franken Ketua Komisi Rancangan Undang-Undang mengenai Kejahatan Komputer Negeri Belanda (*Franken Commissie*) berpendapat sama sehingga merasa perlu untuk memperjuangkan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yang mampu menjangkau delik komputer yang bersifat khas, baik bentuk perbuatannya maupun bentuk atau sifat objeknya. Pada sekitar bulan April 1987 Komisi ini akhirnya berhasil menyusun suatu rancangan usul untuk memasukkan delik komputer ke dalam KUHP Belanda (Sr) dan KUHPA Belanda (Sv). Hal-hal yang menarik yang dapat dikaji dari usulan Komisi Franken tersebut adalah:

- a. Rancangan Komisi Franken terdiri dari 29 Usul (*voorstel*) yang terdiri dari 19 Usul bertalian dengan KUHP (*ten aanzien van het Wetboek van Strafrecht*) dan 10 Usul bertalian dengan KUHPA (*ten aanzien van het Wetboek van Strafvordering*). Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan bidang hukum pidana materiel harus diikuti pula dengan pembaharuan bidang pidana formalnya guna memperlancar tugas aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.
- b. Rancangan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat undang-undang tentang penyalahgunaan komputer sebagai undang-undang khusus yang berdiri sendiri di luar

<sup>40</sup> Kaspersen, "Standards for Computer Crime Legislation: A Comparative Analysis" dalam *Computer Law Series No. 3*, 1987. Halaman 53-55, sebagaimana dikutip oleh H. Edy Djunaedi Karnasudirdja, *Op.Cit.*, Halaman 79.

sistem kodifikasi, namun dimaksudkan sebagai usul untuk menyempurnakan ketentuan dalam sistem kodifikasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa Belanda merupakan negara yang sangat konsekuen dengan sistem kodifikasinya.

c. Guna penyempurnaan ketentuan dalam KUHP (Sr) dan KUHP (Sv) tersebut ada beberapa langkah yang ditempuh oleh Komisi yakni:

- 1) Melengkapi (*aanvulling*) ketentuan yang sudah ada, yakni dengan cara menambah atau menyisipkan usur baru (yang berkaitan dengan komputer, misalnya data, program, media penyimpanan dll.) pada beberapa pasal yang relevan. Sebagai contoh adalah usul ke-3 yakni melengkapi Pasal 351 Sr dengan menambahkan unsur "*geautomatiseerde werken voor opslag of verwerking van gegevens of voor telecommunicatie*" (yang diotomatisasikan untuk menyimpan atau mengolah data atau telekomunikasi) diantara kata "...*electriciteitwerken*" dan kata "*werken diemend tot...*"
- 2) Merubah (*wijziging*) ketentuan yang ada. Pengertian merubah di sini adalah merombak sedemikian rupa sehingga rumusan delik tersebut menjadi baru (tidak hanya sekedar menambah atau menyisipi saja). Sebagai contohnya adalah usul ke-8 mengenai perubahan Pasal 139a Sr.
- 3) Membuat ketentuan baru (*Nieuwe bepaling*). Hal ini dilakukan jika dipandang tidak ada ketentuan yang relevan untuk bentuk penyalahgunaan komputer tersentu atau jika dipaksakan merubah atau melengkapi ketentuan yang ada justru akan mengaburkan substansi

dari ketentuan tersebut. Sekalipun berupa ketentuan baru namun tetap diintegrasikan ke dalam sistem kodifikasi. Selanjutnya usul mengenai ketentuan baru ini terbuka untuk diperbaharui dengan amandemen, Sebagai contoh adalah usul ke-4 yaitu ketentuan baru mengenai delik merusak data atau program atau sistem komputer.

- d. Sekalipun usul rancangan tersebut dimaksudkan untuk menangkal delik penyalahgunaan komputer namun jika diamati tidak ada satu ketentuan-pun yang memuat kata atau pengertian "komputer". Nampaknya komisi ini juga kesulitan untuk merumuskan pengertian "Komputer" dan mengupayakan agar rumusan ketentuan yang diusulkannya mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa mendatang, sehingga komisi memilih untuk menggunakan kata "alat-alat yang diotomatisasikan" (*geautomatiseerde werken*)<sup>41</sup>.
- e. Jika diamati dari materi usulan tersebut maka nampak bahwa Komisi Rancangan Undang-Undang tentang Penyalahgunaan Komputer di Negeri Belanda tersebut cenderung menerapkan "*information approach*". Hal ini nampak dari perumusan ketentuan pada setiap usul yang mengarah pada perlindungan terhadap integritas data atau informasi yang dihasilkan oleh alat-alat yang diotomatisasikan atau alat telekomunikasi.

---

<sup>41</sup> Dalam hal inipun Komisi Franken tidak menjelaskan batasan pengertian dari istilah "*geautomatiseerde werken*" tersebut. Bandingkan: *Supra*, catatan kaki 18.

Bahasan terhadap hasil rancangan Komisi Franken tersebut sangat penting sebab selama ini negara yang paling sering disebut-sebut sebagai model pengembangan hukum modern di Indonesia, terutama pada sistem kodifikasinya. Apalagi dalam salah satu hasil Sidang Kelompok II (yang membahas masalah Kejahatan Komputer) Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman di Jakarta pada tanggal 18-19 Januari 1988 antara lain dicapai kesepakatan untuk mempergunakan sejauh mungkin cara pendekatan yang dilakukan oleh Komisi Kejahatan Komputer Belanda (Komisi Franken) yang disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia<sup>42</sup>.

Isyarat tersebut menunjukkan bahwa kita jangan tergesa-gesa untuk mencontoh langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Franken, sebab menurut informasi yang penulis peroleh hingga saat tulisan ini disusun, ternyata usulan Komisi Franken tersebut masih menjadi bahan perdebatan serius bagi para ahli di Belanda. Kanspersen sendiri berpendapat bahwa rancangan Komisi Franken tersebut terlalu rumit sehingga justru akan menyulitkan bagi aparat untuk menegakkannya<sup>43</sup>.

Sekalipun sulit untuk diterapkan namun Komisi Franken tetap memperjuangkan terus hasil rancangannya. Hal ini

---

<sup>42</sup>Laporan hasil Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, BPHN Depkeh. RI., Jakarta, 1988 Halaman 16.

<sup>43</sup>Informasi ini diperoleh dari H. Eddy Djunaedi Karnasudiroja dalam wawancara pribadi dengan penulis di Gedung Pusdiklat dan Litbang MA RI di Jakarta pada bulan November 1996. Eddy Djunaedi adalah Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan mendapat tugas di Litbang Diklat MA RI yang pada bulan Maret - Juli 1991 mendapat tugas untuk mengamati Permasalahan Hukum Kejahatan Komputer di Universitas Leiden, Belanda.

terbukti dengan diusulkannya lagi perumusan delik "mengu-ping" atau "menyadap" (perbuatan mendengar secara diam-diam pembicaraan orang lain tanpa izin) yang diatur dalam Pasal 139a Sr untuk diperbaiki oleh Komisi Kejahatan Komputer sehingga ketentuan Pasal 139a tersebut mampu menjangkau bentuk penyalahgunaan komputer yang dinamakan "*Hacking*"<sup>44</sup>.

Demikianlah gambaran singkat dari upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Belanda dalam rangka menanggulangi delik Penyalahgunaan Komputer. Rumusan usul Komisi Franken untuk memasukkan delik komputer ke dalam Sr dan Sv Belanda, selengkapnya dapat dilihat pada lampiran III.

## B. Pengaturan Penyalahgunaan Komputer Dalam Konsep KUHP Baru

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu bahwa kebijakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia mengarah pada sistem kodifikasi. Hal ini berarti bahwa penciptaan perundang-undangan hukum pidana khusus (di luar kodifikasi) sangat dibatasi.

Demikian pula dalam rangka menanggulangi delik-delik baru seperti penyalahgunaan komputer, maka sejauh mungkin diupayakan agar formulasinya diintegrasikan dalam KUHP. Oleh sebab itu sudah semestinya apabila Tim Penyusun Konsep KUHP Nasional (Baru) mempertimbangkan hal tersebut<sup>45</sup>. Apalagi

---

<sup>44</sup>Periksa: A. Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Halaman 13 - 14.

<sup>45</sup>Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru telah dipersiapkan sejak tahun 1963. Mulai saat itu lalu terciptalah konsep-konsep Rancangan KUHP Baru yang dari masa ke masa terus mengalami perubahan (perbaikan), dari Konsep Pertama (1964) hingga Konsep Terakhir (1991/1992 yang telah disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993). Pada saat tulisan ini disusun, Konsep Rancangan KUHP Baru yang terakhir tersebut telah diserahkan pada pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Istilah "Nasional" atau "Baru" di belakang kata KUHP tersebut hanya sekedar untuk membedakan dengan KUHP yang masih berlaku pada saat ini (UU. No. 1 Tahun 1946).



hasil Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI pada tahun 1988 telah mengisyaratkan tekad untuk sedapat mungkin tidak membuat Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur secara khusus masalah Penyalahgunaan Komputer.

Berikut ini penulis akan memberikan gambaran mengenai bagaimana formulasi Konsep Rancangan KUHP Baru dalam rangka mengantisipasi muncul dan berkembangnya delik penyalahgunaan komputer.

Setelah mengamati dengan seksama seluruh Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru) yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU-KUHP 1991/1992 (yang telah disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993), ternyata diantara keseluruhan pasal yang berjumlah 614 pasal, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur masalah penyalahgunaan komputer, kecuali hanya satu pasal dalam Buku Kesatu (Ketentuan Umum) yaitu dalam Bab V (pengertian-pengertian) tepatnya pada Pasal 162 (144) yang selengkapnya berbunyi:

"Yang dimaksud dengan pengertian barang *termasuk* selain barang berwujud juga aliran listrik, gas, air, uang giral, *data dan program komputer* dan jasa serta jasa telepon, jasa telekomunikasi dan *jasa komputer*"

Selanjutnya dalam Buku Kedua (Tindak Pidana), sekalipun telah terjadi pembaharuan baik yang menyangkut masalah perubahan/-perbaikan ketentuan-ketentuan lama maupun penambahan-penambahan ketentuan baru, namun materinya tidak jauh berbeda dengan KUHP Lama. Hal ini nampak dari banyaknya ketentuan-ketentuan KUHP lama yang diambil-alih ke dalam KUHP Baru dan

beberapa ketentuan baru-pun materinya berasal dari berbagai Undang-Undang Hukum Pidana di luar KUHP yang telah ada.

Berdasarkan kajian atas materi yang terdapat dalam KUHP Baru tersebut, maka nampak arah kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan komputer sebagai berikut:

1. Dengan model pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Tim Penyusun RUU-KUHP berpendapat bahwa Penyalahgunaan Komputer bukan merupakan delik khusus yang berdiri sendiri dalam arti bahwa Penyalahgunaan Komputer merupakan delik biasa atau delik umum (ada yang menyebutnya sebagai delik tradisional atau delik konvensional) yang berkaitan dengan proses komputer.
2. Karena bukan merupakan delik khusus, maka penanggulangan penyalahgunaan komputer cukup mempergunakan pasal-pasal yang mengatur delik biasa dengan mempergunakan pendekatan penafsiran (interpretasi). Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Asas Legalitas tetap dipertahankan dalam Konsep KUHP (Baru). Sekalipun Asas Legalitas dalam Konsep dirumuskan secara lebih luas, yaitu dirumuskan secara materiel, namun penafsiran analogi (kiyas) tetap tidak diperbolehkan<sup>46</sup>. Sebagai konsekuensinya maka penafsiran ekstensif yang sering dipandang sebagai "analogi semu" sebaiknya juga dihindari.
3. Dengan hadirnya ketentuan Pasal 162 (144) Konsep KUHP tersebut, maka pengertian "barang" diperluas sehingga

---

<sup>46</sup>Dalam Konsep masalah pelarangan penggunaan analogi justru lebih dipertegas lagi sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) Konsep KUHP (Baru) yang berbunyi: "Untuk menetapkan adanya tindak pidana tidak dapat digunakan penafsiran undang-undang secara analogi"

meliputi pula "*intangible object*" seperti data, program dan jasa komputer. Penempatan ketentuan tersebut dalam Ketentuan Umum dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penerapan pasal-pasal yang relevan dalam Buku Kedua. Dengan demikian operasionalisasi pasal-pasal delik umum dalam Buku Kedua KUHP (Baru) nantinya tidak lagi harus mempergunakan penafsiran ekstensif, atau penafsiran analogi untuk menanggulangi bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan komputer yang bersifat khas, namun telah mempergunakan "penafsiran otentik" atau "penafsiran undang-undang". Penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas<sup>47</sup>.

Kini pertanyaan yang muncul adalah: apakah dengan diaturnya ketentuan mengenai perluasan pengertian barang sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 (144) Konsep KUHP (Baru) tersebut berarti semua permasalahan penanggulangan penyalahgunaan komputer dengan sarana hukum pidana (terutama yang berkaitan dengan delik harta kekayaan) sudah terpecahkan seluruhnya? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka berikut ini penulis akan menyajikan hasil pengkajian mengenai bagaimana gambaran penerapan pasal-pasal dalam Konsep KUHP (Baru) terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan komputer, dalam sebuah tabel sebagai berikut:<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Dengan model pengaturan Konsep KUHP Baru tersebut nampak bahwa landasan pemikiran yang diterapkan dalam menyusun kebijakan formatif oleh Tim Penyusun RUU-KUHP berbeda dengan landasan pemikiran yang pada umumnya dipergunakan oleh para ahli di Belanda, Inggris maupun negara-negara maju lainnya dalam merumuskan aturan delik penyalahgunaan komputer pada sistem perundang-undangannya.

<sup>48</sup> Bandingkan dengan kajian yang berkaitan dengan kemungkinan penerapan KUHP terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer, dalam Bab III (subbab A) terutama pada Tabel di Halaman 149 - 152.

JENIS PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PENYALAHGUNAAN KOMPUTER	PASAL YANG DAPAT DITERAPKAN	CATATAN
Menggunakan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau melampaui wewenang yang diberikan ( <i>Joy Computing</i> )	460 (22.01) dst. (ttg. Pencurian) jo. 162 (144) Konsep KUHP Baru	Dengan penafsiran Autentik: <i>Jasa pemakaian komputer</i> merupakan perluasan dari pengertian 'barang'
Menyambung dengan cara menambah terminal komputer baru tanpa izin dari pemilik sah jaringan komputer ( <i>Hacking</i> )	230 (05.11) Konsep KUHP Baru	' <i>Computervredebreuk</i> ' dianalogkan sebagai ' <i>Huisvredebreuk</i> '
	231 (05.14.a) Konsep KUHP Baru (perbuatan menguping/menyadap pembicaraan tanpa izin)	' <i>Computer Network System</i> ' merupakan perluasan pengertian ruangan atau halaman tertutup dan ' <i>Modem</i> ' atau sarana komunikasi antar komputer lainnya merupakan perluasan pengertian 'alat bantu teknis', melalui penafsiran Ekstensif
Manipulasi data atau program komputer yaitu menambah, mengurangi atau merubah data atau instruksi pada program sehingga program tersebut selain menjalankan tugas yang sebenarnya juga akan melakukan tugas lain yang tidak sah ( <i>The Trojan Horse</i> )	471 (24.01) Konsep KUHP Baru (ttg. penggelapan)	Jika terdapat unsur kepercayaan dari pemilik program
	473 (24.03) Konsep KUHP Baru	Kepercayaan karena unsur pekerjaan, profesi atau upah
Membocorkan data atau informasi yang dihasilkan oleh Komputer ( <i>Data Leakage</i> )	174 (01.11) Konsep KUHP Baru	Rahasia Negara
	175 (01.12) dan 176 (01.13) Konsep KUHP Baru	Rahasia Militer/Hankam
	426 (17.01) Konsep KUHP Baru	Rahasia Jabatan/Profesi
	427 (17.02) Konsep KUHP Baru	Rahasia Perusahaan

Pemalsuan data/informasi komputer: merubah data sah/valid dengan cara yang tidak sah yaitu dengan mengubah input atau output data ( <i>Data Diddling</i> )	362 (12.01) dst. Konsep KUHP Baru (ttg. pemalsuan surat)	Data atau informasi yang dihasilkan komputer, baik yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik/magnetik, maupun hasil cetak printer, dikategorikan sebagai 'surat'
Merusak data atau program komputer dengan memasukkan <i>virus</i> , <i>time bomb</i> / <i>logic bomb</i> atau dengan cara lainnya ( <i>Damage to Stored Data and Program</i> )	513 (27.01) dst. jo. 162 (144) Konsep KUHP Baru (ttg. perusakan barang)	Pengertian barang ditafsirkan secara autentik sehingga meliputi pula <i>Computer software</i> yang dalam hal ini Data dan Program Komputer
Menyebarkan gambar, uraian atau informasi lainnya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno melalui jaringan internet, sehingga dapat diakses oleh siapa saja ( <i>Cybersex</i> )	378 (14.02) dst. Konsep KUHP Baru (ttg. pelanggaran kesusilaan)	Pengertian gambar/tulisan/rekaman/benda meliputi pula hasil dari denyut elektronik atau sinyal magnetik
Agitasi dan propaganda (dalam arti negatif: mendeskreditkan pemerintah yang sah) melalui jaringan internet atau sistem jaringan komputer	214 (05.02) dst. Konsep KUHP Baru (ttg. perbuatan penghasutan dll)	Tergantung pada substansi dari 'agipro' tersebut
Memperbanyak data, informasi atau program komputer dengan cara meng-copy atau menggandakan secara tidak sah atau tanpa izin dari pemiliknya	460 (22.01) dst. jo. 162 (144) Konsep KUHP Baru	Dengan penafsiran autentik pengertian 'barang' meliputi pula data (dan informasi yg ada di dalamnya) dan program komputer. Pengertian 'mengambil' dapat dilakukan dengan transmisi elektronik (meng-kopi)

Berdasarkan gambaran dari kajian tersebut di atas nampak bahwa permasalahan penanggulangan penyalahgunaan kom-

puter dengan model formulasi dalam Konsep KUHP Baru, belum semuanya dapat terpecahkan. Dalam bagan/tabel tersebut di atas nampak bahwa permasalahan yang telah terpecahkan adalah delik komputer yang berkaitan dengan perluasan pengertian "barang" melalui pendekatan penafsiran autentik (mengacu pada Pasal 162), seperti bentuk perbuatan: *Joy Computing* (pencurian jasa komputer), *Unauthorized Transfer* dengan sarana *computer system* (pencurian data), meng-kopi secara tidak sah (pencurian data/program komputer) dan *penyia-nyiaan data* (perusakan data). Sedangkan bentuk perbuatan yang berkaitan dengan perluasan pengertian "surat" seperti misalnya: *Data Diddling* (pemalsuan data), belum ada pemecahannya karena data atau catatan yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer tetap harus ditafsirkan secara ekstensif agar dapat dikategorikan sebagai surat.

Sementara itu, sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab Pendahuluan, bahwa penyalahgunaan komputer tidak hanya berkaitan dengan property, namun menyangkut pula perlindungan *privacy* dan integritas nilai-nilai tertentu.

Yang berkaitan dengan perlindungan terhadap *privacy* seperti misalnya terhadap bentuk perbuatan *Hacking*, maka untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Konsep KUHP Baru, tetap harus mempergunakan penafsiran ekstensif. Perbedaannya dengan KUHP Lama, dalam Konsep KUHP Baru nanti dimungkinkan pula untuk mengkaitkan perbuatan *Hacking* dengan ketentuan yang mengatur masalah "delik penyadapan/pengupingan" yang termuat dalam Pasal 231. Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan baru yang tidak ada dalam KUHP Lama. Jika dilihat dari rumusannya, nampak bahwa idenya berasal dari

Pasal 139a KUHP Belanda (WvS). Untuk lebih jelasnya maka berikut ini akan dikutipkan isi dari pasal-pasal tersebut:

Pasal 231 (05.14.a) Konsep KUHP Baru berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III, barangsiapa dengan alat bantu teknis mendengar pembicaraan yang berlangsung di dalam maupun di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup atau yang berlangsung melalui telepon umum tanpa menjadi peserta pembicaraan tersebut"

Dari rumusan tersebut nampak : bahwa penerapan Pasal tersebut terhadap bentuk perbuatan *Hacking* harus pula dilakukan melalui penafsiran ekstensif dimana pengertian "ruangan" meliputi pula terminal komputer, jaringan "telepon" meliputi pula jaringan "sistem komunikasi komputer" dan "alat bantu teknis" meliputi pula "Modem" dan peralatan sejenisnya yang memungkinkan komputer dapat kontak atau berkomunikasi dengan komputer lainnya.

Kekurangan Konsep KUHP Baru dalam mengantisipasi bentuk-bentuk delik penyalahgunaan komputer antara lain disebabkan karena Tim Penyusun Konsep tidak sempat membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer secara khusus<sup>49</sup>. Sehingga dapat dipahami jika rumusan Pasal 162 (144) Konsep KUHP Baru yang sedianya dimaksudkan untuk mengantisipasi delik penyalahgunaan komputer, secara umum masih nampak terlalu sumir dan mengandung banyak kelemahan.

Sehubungan dengan masih terdapatnya kekurangan pada formulasi delik dalam rangka penanggulangan bentuk-bentuk

---

<sup>49</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (salah seorang anggota Tim Penyusun RUU KUHP) kepada penulis, bahwa pada saat tiba waktunya Naskah Rancangan KUHP (Baru) harus diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman, ternyata masih ada satu "pekerjaan" yang belum sempat dibahas yaitu masalah pengaturan tentang penyalahgunaan komputer, oleh sebab itu secara "tergesa-gesa" Tim Penyusun merumuskan dan menambahkan Pasal 162 ke dalam Konsep dengan harapan ketentuan tersebut akan dibahas lagi dalam proses selanjutnya.

penyalahgunaan komputer tersebut, maka perlu adanya pemikiran lebih lanjut guna mengupayakan rumusan atau model pengaturan yang lebih baik. Bahasan tentang pemikiran-pemikiran pengaturan delik penyalahgunaan komputer di masa mendatang yang meliputi pula kemungkinan menyepurnakan Konsep KUHP Baru akan diuraikan dalam Subbab selanjutnya (baca: Subbab D dalam Bab ini).

### C. Pandangan Umum Dari Pihak-Pihak Yang Terkait Atau Yang Berkepentingan Dengan Masalah Pengaturan Penyalahgunaan Komputer

Kebijakan hukum pidana tidak hanya terkait dengan masalah yang bersifat yuridis-normatif atau yuridis-doktriner saja, namun juga terkait erat dengan masalah-masalah yang bersifat empiris atau sosiologis. Demikian pula dalam mengkaji masalah pengaturan penyalahgunaan komputer di masa mendatang diperlukan pula bahan-bahan pertimbangan yang berasal dari masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengaturan tersebut. Langkah ini diperlukan agar jika kebijakan formulatif tersebut terwujud dalam suatu peraturan perundangan-undangan dan jadi diterapkan pada masyarakat nantinya, diharapkan dapat berjalan dengan baik<sup>50</sup>.

Kajian berikut ini akan mendeskripsikan pandangan umum bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengaturan penyalahgunaan komputer, terutama guna menjajagi harapan-harapan mereka

---

<sup>50</sup>Oleh sebab itu salah satu langkah penelitian penunjang perencanaan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh BPHN adalah: Penelitian Sosiologi (tahap kelima). Baca selengkapnya dalam: Moh. Hasan Wargakusumah, *Beberapa Langkah Penelitian Penunjang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah, disampaikan pada Penataran Metodologi Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen PTS se-Indonesia, Cisarua-Bogor, 15 - 20 Desember 1991.



mengenai bagaimana sebaiknya bentuk pengaturan penyalahgunaan komputer di masa mendatang.

Dalam hal ini penulis akan membagi pandangan pihak-pihak yang terkait dengan pengaturan penyalahgunaan komputer berdasarkan sifat kepentingannya, yakni masyarakat yang berkepentingan terhadap teknologi komputer itu sendiri sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum terhadap ancaman penyalahgunaan komputer (dalam hal ini akan diwakili oleh Perusahaan yang bergerak di bidang komputer), Aparat Penegak Hukum sebagai pihak yang akan menerapkan peraturan tersebut (dalam hal ini akan diwakili oleh Hakim) dan Badan Legislatif sebagai pihak yang akan membuat peraturan perundang-undangan (dalam hal ini diwakili oleh Komisi III DPR RI).

#### 1. Perusahaan yang bergerak di bidang komputer<sup>51</sup>.

Sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung dengan teknologi komputer sebagai sarana utama dalam melaksanakan usaha, pekerjaan, kegiatan ataupun kepentingan-kepentingan lainnya, maka jelas perusahaan komputer yang didalamnya meliputi unsur pengguna (*user*), pengusaha, dan ahli komputer, memerlukan berbagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan atau ancaman penyalahgunaan komputer yang sangat merugikan.

Sebagaimana diakui oleh beberapa staf perusahaan komputer bahwa rata-rata mereka pernah mengalami gangguan yang diduga akibat dari suatu perbuatan yang dikategorikan

---

<sup>51</sup>Dihimpun dari beberapa narasumber staf PT. Usaha Sistem Informasi Jaya dan PT. Microsoft Indonesia, Perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi komputer (terutama berkaitan dengan *software* dan *hardware* komputer)

sebagai penyalahgunaan komputer. Adapun bahaya yang dirasakan dengan adanya gangguan tersebut berupa kerugian atau ancaman terhadap:

- a. integritas data/program;
- b. aset perusahaan;
- c. rahasia perusahaan.

Dari bentuk-bentuk gangguan tersebut ada kecenderungan pendapat bahwa perbuatan yang menimbulkan gangguan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal<sup>52</sup>. Dengan demikian terhadap ancaman diperlukan suatu bentuk perlindungan yang salah satunya berupa perlindungan hukum (dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai upaya menanggulangi penyalahgunaan komputer yang mengarah pada tindak kriminal).

Selama ini jika terjadi kasus gangguan yang diketahui atau diduga karena perbuatan penyalahgunaan komputer biasanya diselesaikan secara intern. Cara ini dipandang lebih baik karena pernah suatu ketika melaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindak secara hukum namun ternyata dalam proses pemeriksaan banyak menemui hambatan/kesulitan sehingga akhirnya kasus tersebut tidak jadi diproses secara hukum.

Sekalipun dengan pengetahuan yang terbatas tentang hukum khususnya yang berkaitan dengan perundang-undangan

---

<sup>52</sup>Sebagaimana diungkapkan oleh Lilies, staf *Product Support Services* pada PT. Microsoft Indonesia, bahwa perbuatan gangguan penyalahgunaan komputer tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal, alasannya adalah bahwa perbuatan tersebut bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya.

hukum pidana di Indonesia<sup>53</sup>, para staf perusahaan komputer cenderung berpendapat bahwa perundang-undangan hukum pidana yang ada pada saat ini telah cukup memberikan perlindungan dari ancaman berbagai gangguan yang berupa penyalahgunaan komputer, namun dimasa yang akan datang perundang-undangan tersebut sudah tidak cukup memberikan perlindungan lagi terhadap penyalahgunaan komputer yang bentuk-bentuknya berkembang terus.

Selanjutnya perusahaan komputer cenderung menghendaki bentuk pengaturan delik komputer di masa mendatang diatur secara umum dan diterapkan secara fleksibel. Hal ini mengacu pada pandangan beberapa pengamat perkembangan teknologi komputer yang menyatakan bahwa pengaturan delik komputer secara terperinci dengan disertai penerapan sanksi yang terlalu berat dikhawatirkan justru akan menimbulkan dampak menghambat upaya pengembangan teknologi komputer itu sendiri. Sebagai perusahaan yang ingin eksis dalam persaingan bisnis komputer, maka perusahaan komputer dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi komputer. Itulah sebabnya mengapa perusahaan komputer tidak menghendaki pengaturan delik komputer secara terperinci, alasannya adalah karena komputer berkembang dengan pesat dalam waktu yang relatif singkat sehingga ketentuan yang disusun secara terperinci dan lengkap dalam waktu yang tidak lama harus direvisi lagi untuk mengantisipasi perkembangan baru di bidang komputer.

---

<sup>53</sup> Kebetulan narasumber dari perusahaan komputer yang penulis temui tidak ada yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum. Rata-rata mereka memiliki latar belakang pendidikan, S-1 Ekonomi, Teknik Informatika atau Manajemen informatika.

Terhadap model pengaturan mengenai penyalahgunaan komputer dalam Konsep Rancangan KUHP (Baru), terutama yang berkaitan dengan Pasal 162 (144) Konsep, perusahaan komputer cenderung berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah cukup baik namun perlu disempurnakan. Hal ini bisa dipahami karena dilihat dari perumusannya nampak bahwa pengaturan tentang komputer dalam Pasal 162 Konsep tersebut masih terlalu singkat dan tidak lengkap, sehingga barangkali siapapun akan berpendapat bahwa ketentuan tersebut perlu disempurnakan atau dilengkapi.

## 2. Hakim<sup>54</sup>.

Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum dalam penyelesaian suatu kasus/perkara atau dengan kata lain bertugas mengoperasionalkan produk legislatif dalam praktek di lapangan, maka Hakim merupakan pihak yang secara langsung dan aktif terlibat dalam proses kebijakan aplikatif dan sangat berkepentingan dalam penentuan kebijakan formulatif.

Berkaitan dengan masalah penanggulangan penyalahgunaan komputer, maka berikut ini penulis akan mencoba untuk memaparkan gambaran umum mengenai pandangan hakim terhadap masalah pembaharuan perundang-undangan hukum pidana di masa mendatang yang mendukung tugasnya menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan komputer.

Hingga saat ini komputer masih merupakan sesuatu yang "baru" di lingkungan hakim dan peradilan di Indonesia.

---

<sup>54</sup> Dihimpun dari narasumber beberapa Hakim di Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kebanyakan hakim terutama yang bertugas di daerah, masih dapat dikatakan sebagai "awam" komputer. Hal ini disebabkan karena tugas mereka sehari-hari tidak pernah bersinggungan dengan teknologi komputer (sebagian besar pekerjaannya dilakukan secara manual) dan tidak pernah menangani kasus-kasus yang modus operandinya berkaitan dengan komputer<sup>55</sup>. Sebagian besar hakim yang tidak pernah menghadapi kasus penyalahgunaan komputer, telah sedikit mengenal delik penyalahgunaan komputer beserta problema penerapan hukumnya melalui deskripsi putusan peradilan mengenai penyelesaian perkara penyalahgunaan komputer yang dimuat dalam Majalah "Varia Peradilan" (Majalah bulanan yang diterbitkan oleh IKAHI) atau melalui penataran-penataran yang diadakan oleh Diklat dan Litbang Mahkamah Agung.

Dengan keterbatasan-keterbatasan pemahaman mengenai masalah komputer dan pengaplikasiannya tersebut, pada umumnya (terdapat kecenderungan) para hakim mempunyai pandangan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penerapan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang berkembang pada saat ini, ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana yang ada saat ini pada umumnya masih relevan dengan unsur-unsur perbuatan penyalahgunaan komputer

---

<sup>55</sup>Dari 11 (sebelas) responden/narasumber hakim yang penulis temui hanya ada 2 (dua) hakim yang pernah menangani perkara tentang penyalahgunaan komputer. Kedua hakim tersebut kebetulan seorang sedang bertugas sebagai hakim di Jakarta dan seorang lagi pernah bertugas di Jakarta. Menurut pengakuannya, kedua hakim tersebut baru sedikit memahami seluk beluk pengoperasian komputer dengan belajar melalui penanganan kasus penyalahgunaan komputer tersebut, pada awalnya mereka tidak memahami sama sekali permasalahan yang berkaitan dengan teknologi komputer.

yang bersifat khas<sup>56</sup>. Bahkan diantaranya berpendapat bahwa terhadap penyalahgunaan komputer dapat diterapkan beberapa pasal dalam KUHP misalnya mengenai pencurian<sup>57</sup>

- b. Para hakim tidak setuju dengan penerapan metode analogi (kiyas) untuk perkara-perkara penyalahgunaan komputer yang tidak ada padanannya dalam KUHP, alasannya adalah bahwa hal tersebut bertentangan dengan asas *nullum delictum* (asas legalitas). Sedangkan terhadap metode penafsiran ekstensif terdapat dua kelompok pendapat. Kelompok pertama berpendapat bahwa dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan komputer yang unsur-unsurnya sulit dicari padanannya dalam KUHP mau-tidak mau hakim harus menerapkan penafsiran ekstensif, dan ini dapat dibenarkan sepanjang tujuan utamanya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan kelompok kedua cenderung berpendapat tidak setuju dengan alasan antara lain menyangkut masalah kepastian hukum<sup>58</sup>.
- c. Para hakim cenderung menyatakan bahwa untuk saat ini perlu ada kebijakan yang mengarah pada pembaharuan KUHP dalam mengatisipasi bentuk perbuatan penyalahgunaan kom-

---

<sup>56</sup>Kecenderungan pernyataan ini merupakan hal yang menarik bagi penulis karena sangat berbeda sekali dengan pernyataan para hakim yang penulis temui pada sekitar tahun 1989 (ketika pada awal munculnya masalah kasus penyalahgunaan komputer) yang rata-rata berpendapat bahwa perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sudah tidak relevan untuk diterapkan terhadap kasus penyalahgunaan komputer.

<sup>57</sup>Wawancara pribadi dengan Pipin Purba, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 3 Januari 1997. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Stephanus Kasihan, Hakim Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta yang pernah menerapkan pasal tentang pencurian (Pasal 362 KUHP) terhadap kasus penyalahgunaan komputer ketika bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

<sup>58</sup>Pipin Purba (Hakim PN Yogyakarta) dan Soenarjo (Hakim PN Sleman) kurang dapat menerima penafsiran ekstensif karena yang diperluas dengan penafsiran ekstensif biasanya justru terhadap padanan yang ada dan terlalu sering memperluas arti unsur pasal tanpa adanya pedoman yang pasti dikhawatirkan akan meracunkan aspek kepastian hukumnya.

puter, namun pembaharuan yang mengarah pada pengaturan perbuatan dan sanksi pidana terhadap delik penyalahgunaan komputer tersebut belum bersifat mendesak, karena bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer yang terjadi di Indonesia pada saat ini masih dapat ditanggulangi dengan perundang-undangan hukum pidana yang ada.

- d. Mengenai bentuk pengaturan penyalahgunaan komputer di masa mendatang, pada umumnya para hakim menghendaki agar diintegrasikan dalam KUHP dengan cara merumuskan secara umum dalam Buku I sebagai pedoman untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam Buku II. Model ini dipandang lebih fleksibel dan lebih mudah untuk diterapkan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang banyak variasinya dan terus berkembang<sup>59</sup>.
- e. Berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, maka penyelesaian kasus penyalahgunaan komputer di masa mendatang haruslah dikaitkan dengan "tujuan akhir" dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini komputer dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan<sup>60</sup>. Oleh sebab itu pada umumnya para hakim berpendapat bahwa model pengaturan penyalahgunaan komputer dalam Pasal 162 (144) Konsep Rancangan KUHP (Baru) sudah tepat, hanya saja rumusannya perlu disempurnakan lagi agar menjangkau bentuk perbuatan yang lebih luas (misalnya menjangkau pula

---

<sup>59</sup> Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh H. Eddy Djunaedi K. (Hakim PT DKI Jakarta yang diperbantukan di Diklat/Litbang MA RI) yang memandang bahwa pengaturan delik komputer secara terperinci selain menyulitkan proses penyusunannya dan nantinya juga akan menyulitkan penerapannya terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang banyak variasinya dan terus berkembang.

<sup>60</sup> Pendapat ini diutarakan oleh Pipin Purba, Ny. Sugiarti dan Sunu Hernawa (Hakim PN Yogyakarta) dalam wawancara pribadi dengan penulis pada tanggal 3 Januari 1997.

perkembangan pengertian dari bentuk "mengambil", "memalsu", "memasuki ruangan" dan lain sebagainya).

Dari deskripsi tersebut di atas nampak bahwa secara umum pandangan para hakim terhadap masalah penyalahgunaan komputer dan pemikiran tentang bentuk pengaturan yang mudah untuk dapat diterapkan, masih bersifat "meraba-raba". Oleh sebab itu seandainya pengaturan penyalahgunaan komputer dalam KUHP (Baru) nantinya dapat terwujud, maka perlu diadakan semacam penataran atau pendidikan dan latihan guna memberi arahan bagi para hakim tentang metode penerapan yang tepat (sesuai dengan maksud dari pengaturan tersebut). Dengan demikian kerancuan atau kesimpangsiuran persepsi dalam operasionalisasi ketentuan baru tersebut dapat dihindari.

### 3. Dewan Perwakilan Rakyat RI<sup>61</sup>.

DPR sebagai badan legislatif memiliki peranan penting dalam proses penyusunan kebijakan formulatif yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu permasalahan yang muncul di masyarakat dalam menyongsong era globalisasi pada saat ini adalah munculnya ancaman jenis kejahatan baru seperti delik penyalahgunaan komputer yang semakin sulit diatasi dengan perundang-undangan hukum pidana yang ada. Dengan demikian sudah semestinya jika masalah penyalahgunaan komputer menjadi topik penting dalam membahas perundang-undangan di masa mendatang.

<sup>61</sup> Dikompilasi dari narasumber anggota Komisi III (Hukum) DPR RI.



Sekalipun selama ini DRR RI belum pernah menerima secara langsung keluhan atau pengaduan dari masyarakat atau pemerintah mengenai masalah penyalahgunaan komputer, namun pada setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang yang terkait bidang hak milik intelektual (HAKI), bidang IPTEK, bidang komunikasi atau bidang perekonomian, masalah perkembangan teknologi komputer selalu dijadikan salah satu topik bahasan<sup>62</sup>.

Sebagaimana ahli hukum lainnya, Anggota Komisi III DPR RI yang pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum berpendapat bahwa untuk saat ini kasus-kasus penyalahgunaan komputer masih dapat ditanggulangi dengan pasal-pasal dalam KUHP ataupun Undang-Undang Tindak Pidana Khusus lainnya. Hal ini mengacu pada anggapan bahwa dalam kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, motivasi pelakunya mengarah pada unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam hukum pidana positif, misalnya "mencuri" (mengambil uang), "korupsi" (memperkaya diri) dan lain sebagainya, sedangkan teknologi komputer beserta teknik-teknik canggihnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Pembuatan Undang-Undang memerlukan proses yang panjang dan rumit. Sekalipun Konsep Rancangan KUHP (Baru) telah diserahkan kepada pemerintah, namun nantinya jika telah dilimpahkan di DPR, masih akan melalui proses pembahasan yang panjang lagi sampai disahkan menjadi Undang-Undang.

---

<sup>62</sup> Contohnya adalah pada waktu pembahasan RUU Hak Cipta, RUU Telekomunikasi, RUU Kepabeanan dan lain sebagainya, yang akhirnya masalah pengaturan tentang kemungkinan pengaplikasian teknologi komputer dalam arti luas dimasukkan sebagai materi salah satu pasal dalam Undang-Undang tersebut.

Apalagi sejak diserahkan pada pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehakiman) pada tanggal 17 Maret 1993 lalu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan segera dilimpahkan ke DPR. Mengingat hal tersebut maka sementara ini aparat penegak hukum (utamanya hakim) benar-benar dituntut untuk mampu mengoperasionalisasikan ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang ada seoptimal mungkin<sup>63</sup>.

Pada waktu yang tidak lama lagi KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yang ada pada saat ini dipastikan semakin tidak mampu menjangkau perkembangan penyalahgunaan komputer lagi, sehingga sebenarnya perlu ada kebijakan pengaturan perbuatan dan sanksi pidana yang tepat (lebih sesuai) terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer. Bahkan kebutuhan akan perundang-undangan yang baik dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan menjelang era kehidupan global ini dapat dikatakan sudah mendesak. Sayang sekali dalam hal ini DPR sering dianggap kurang tanggap dan terbiasa bersikap pasif (dalam arti terkesan hanya menunggu inisiatif dari pemerintah melalui RUU yang diajukan untuk dibahas).

Mengenai bagaimana bentuk pengaturan penyalahgunaan komputer di masa mendatang, DPR belum dapat menentukan secara pasti, karena hal tersebut perlu dikaji terlebih

---

<sup>63</sup>Bahkan menurut Soenarto (anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi ABRI) dan Moeliono (anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Karya Pembangunan) dalam wawancara dengan penulis di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1996, berpendapat bahwa dalam hal-hal yang sangat mendesak bentuk penafsiran yang dianggap sebagai analogi atau ekstensif dapat dibenarkan asal mengacu pada pathokan yang pasti, misalnya dengan yurisprudensi tetap.

dahulu, namun yang jelas nampaknya belum perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Penyalahgunaan Komputer, atau dengan kata lain pengaturannya cukup diintegrasikan ke dalam KUHP.

Berkaitan dengan kecenderungan pendapat mengenai bentuk pengaturan tersebut di atas, maka anggota Komisi III DPR memandang bahwa model pengaturan penyalahgunaan komputer dalam Konsep Rancangan KUHP (Baru) terutama yang berkaitan dengan Pasal 162 (144) Konsep, sudah tepat. Sekalipun demikian jika nantinya Konsep Rancangan KUHP tersebut diajukan ke DPR untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang, maka DPR melalui mekanisme yang ada melakukan kajian atau bahasan untuk menyempurnakan ketentuan tersebut. Adapun caranya kira-kira adalah diawali dengan menginventarisasi pasal-pasal atau ketentuan dalam Konsep RUU KUHP yang sekiranya relevan dengan bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer, selanjutnya pasal-pasal tersebut dikaji satu persatu untuk dipertimbangkan apakah dapat diterapkan dengan "dijembatani" penafsiran otentik yang termuat dalam ketentuan umum (Buku I) atau pasal yang bersangkutan harus disempurnakan/diperbaharui. Jika sekiranya dapat dijembatani dengan penafsiran otentik maka perlu dikaji lebih lanjut apakah ketentuan dalam Pasal 162 (144) Konsep telah cukup memadai untuk menafsirkan unsur-unsur berbagai bentuk penyalahgunaan komputer, atau masih perlu dilengkapi lagi.

D. Beberapa Gagasan Pemikiran Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer Dengan Hukum Pidana di Masa Mendatang

Kebijakan legislatif dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan komputer merupakan pekerjaan yang sangat rumit dan harus dilakukan secara cermat. Penentuan kebijakan tersebut setidaknya harus didasari atas pertimbangan faktor-faktor:

1. Arah kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*) secara menyeluruh dan tak terpisahkan<sup>64</sup>.
2. Penentuan kebijakan tersebut dalam butir 1 dikaitkan dengan kompleksitas permasalahan tentang penyalahgunaan komputer, dan kemungkinan perkembangannya<sup>65</sup>.
3. Eksistensi Perundang-undangan Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan komputer dan praktek penerapannya<sup>66</sup>.
4. *Trend* pengaturan penyalahgunaan komputer di beberapa negara maju<sup>67</sup>.
5. Pandangan atau harapan dari pihak-pihak terkait, yang nantinya dalam menjalankan tugasnya akan banyak bersinggungan dengan pengaturan tentang penyalahgunaan komputer<sup>68</sup>.

---

<sup>64</sup>Periksa: faktor-faktor kebijakan yang harus dipertimbangkan dalam penentuan perbuatan dan sanksi pidana, dalam Bab II Halaman 28 - 30.

<sup>65</sup>Periksa: faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan perbuatan dan sanksi penyalahgunaan komputer, dalam Bab II Halaman 84 - 87.

<sup>66</sup>Nasalah ini telah dibahas dalam Bab III subbab A dan subbab B.

<sup>67</sup>Nasalah ini telah dibahas dalam awal Bab ini (Bab IV subbab A).

<sup>68</sup>Nasalah ini telah dibahas dalam subbab sebelumnya (Bab IV subbab C).

Berdasarkan faktor-faktor pertimbangan yang seluruhnya telah dibahas atau telah dikaji tersebut, maka berikut ini penulis akan mencoba untuk menguraikan beberapa gagasan pemikiran tentang pengaturan penyalahgunaan komputer di masa mendatang, sebagai berikut:

#### 1. Bentuk pengaturan.

Pemilihan bentuk pengaturan merupakan sesuatu hal yang penting dalam kebijakan legislatif, sebab bentuk pengaturan yang ditetapkan nantinya akan mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu.

Berdasarkan atas faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang ada di Indonesia sebagaimana telah dikaji bahasan-bahasan sebelumnya, maka nampaknya bentuk pengaturan dengan mengatur penyalahgunaan komputer secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana (Khusus tentang Penyalahgunaan Komputer) dan merumuskannya secara terperinci sebagai delik yang berdiri sendiri bukan merupakan pilihan yang tepat. Hal ini tidak semata-mata didasarkan pada hasil survei mengenai kecenderungan pandangan umum pihak-pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, namun juga didasari oleh pertimbangan mendasar, antara lain:

- a. Kebiasaan menciptakan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus secara sporadis dan tidak tersistematisasi atau tidak terpolakan dikhawatirkan akan merusak sistem kodifikasi hukum pidana yang sedang dibangun.
- b. Pengaturan dengan merumuskan secara terperinci baik ditempatkan dalam Undang-Undang Khusus maupun diintegrasikan ke dalam KUHP seringkali justru dapat menjebak

ke hal-hal yang bersifat sangat teknis. Teknologi komputer dan pengaplikasiannya serta pengembangannya bersifat teknis sekali dan sulit dipahami oleh orang yang bukan bidangnya. Dengan kondisi sebagian besar Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum dan anggota legislatif yang ada pada saat ini, maka penetapan kebijakan untuk mengatur penyalahgunaan komputer secara terperinci justru akan menyulitkan proses perumusan<sup>69</sup> dan penerapannya<sup>70</sup>.

- c. Teknologi komputer berkembang sangat cepat dalam waktu yang relatif singkat, sehingga pengaturan secara terperinci justru membuat aturan mengenai penyalahgunaan komputer sulit mengikuti perkembangan bentuk penyalahgunaan komputer<sup>71</sup>.

Melihat kondisi-kondisi di Indonesia pada saat ini dan prediksinya beberapa saat mendatang, maka dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer, diperlukan bentuk pengaturan yang fleksibel dan mendukung atau memudahkan aparat penegak hukum dalam menegakkannya serta bersifat

---

<sup>69</sup>Kompleksitas dan kerumitan penyalahgunaan komputer nampak misalnya dalam masalah sulitnya membuat definisi dan klasifikasi yang uniform mengenai penyalahgunaan komputer. Disamping itu teknologi komputer menyangkut istilah-istilah yang teknis sekali yang disamping sulit dipahami oleh pembuat undang-undang (yang biasanya bukan ahli di bidang komputer) juga akan menyulitkan untuk merumuskan ke dalam pengertian yuridis yang sistematis (berkaitan dengan teknik perundang-undangan).

<sup>70</sup>Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini hampir semua aparat penegak hukum yang tersebar di Indonesia dapat dikatakan kurang memahami masalah yang berkaitan dengan teknologi komputer dan kondisi-kondisi yang menyertainya sulit untuk dipaksakan agar segera mampu menguasai seluk-beluk teknologi komputer yang bersifat teknis, sehingga dikhawatirkan perumusan secara terperinci justru akan mempersulit upaya penerapannya terhadap kasus konkret yang modus operandinya sangat bervariasi.

<sup>71</sup>Jika bentuk pengaturan secara terperinci yang dipilih maka badan legislatif harus siap untuk merevisi atau mengajukan amandemen terhadap aturan tentang penyalahgunaan komputer setiap muncul perkembangan baru.

"elastis" terhadap perkembangan penyalahgunaan komputer yang relatif cepat. Oleh sebab itu kebijakan pengaturan yang dipandang tepat adalah mengatur penyalahgunaan komputer secara umum dan ditempatkan dalam ketentuan umum (Buku I) KUHP. Ini berarti bahwa dengan melalui pendekatan kebijakan (*policy approach*) maka dipandang belum perlu dilakukan kriminalisasi penyalahgunaan komputer dengan cara menciptakan delik komputer sebagai delik khusus yang berdiri sendiri.

Berdasarkan gambaran tersebut maka nampaknya kebijakan pengaturan penyalahgunaan komputer di Indonesia di masa mendatang bersesuaian dengan konsep atau model pengaturan penyalahgunaan komputer dalam Konsep Rancangan KUHP (Baru) yang telah diserahkan pada pemerintah pada tanggal 17 Maret 1993, terutama berkaitan dengan Pasal 162 (144)-nya. Oleh sebab itu maka bahasan selanjutnya akan lebih difokuskan pada kajian terhadap perumusan ketentuan dalam Konsep KUHP (Baru) agar mampu dijadikan sarana yang baik dalam penanggulangan penyalahgunaan komputer.

## 2. Perumusan Ketentuan.

Dalam bahasan subbab sebelumnya (subbab B) telah dipaparkan bahwa satu-satunya ketentuan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan komputer adalah Pasal 162 (144) Konsep KUHP (Baru) yang pada intinya memasukkan data, program dan jasa komputer ke dalam pengertian "benda". Ketentuan yang dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam mengoperasionalisasikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan delik terhadap harta kekayaan yang terdapat dalam

Buku II Konsep KUHP (Baru) tersebut mengandung konsekuensi yang cukup luas.

Sebagaimana diketahui bahwa para ahli di negara-negara maju rata-rata tidak sependapat jika data atau program komputer yang merupakan "*intangible object*" dimasukkan ke dalam pengertian "benda" (*property*). Oleh sebab itu dalam implementasinya banyak negara maju yang menempatkan data atau program komputer ke dalam pengertian khusus dalam memperbaharui perundang-undangan hukum pidananya<sup>72</sup>. Dengan demikian sebenarnya pilihan kebijakan yang tertuang dalam Pasal 162 (144) Konsep KUHP (Baru) tersebut berbeda dengan kebijakan yang pada umumnya diterapkan di negara-negara maju. Oleh sebab itu agar tidak hanya berkesan "berbeda" dengan model pengaturan yang lain, maka pilihan kebijakan sebagaimana diterapkan dalam Konsep KUHP (Baru) tersebut sebaiknya disertai dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu guna membuktikan bahwa kebijakan tersebut merupakan pilihan yang tepat bagi Indonesia, yakni antara lain:

- a. Perumusan dan penerapannya harus konsekuen dengan sistem kodifikasi;
- b. Sekalipun bersifat fleksibel/elastis namun juga harus tetap mengedepankan aspek kepastian dan keadilan hukum;
- c. Sebelum diberlakukan sebaiknya terlebih dahulu disosialisasikan kepada aparat penegak hukum secara terpadu dan berkesinambungan agar aparat penegak hukum nantinya

---

<sup>72</sup> Kebanyakan negara-negara di Eropa dan Amerika mengatur penyalahgunaan komputer dengan menempatkan data dan program komputer di luar pengertian benda pada umumnya, sehingga kebijakan legislatif yang diterapkan adalah mengatur delik penyalahgunaan komputer secara terperinci, baik dengan cara membuat undang-undang baru, membuat ketentuan baru yang disisipkan ke dalam *Code Penal*-nya maupun dengan cara memperbaharui rumusan delik yang telah ada dalam KUHP-nya. Periksa Subbab A dalam Bab ini (Bab IV).



mempunyai persepsi yang sama, dan mampu mengembangkan secara optimal dan terarah dalam penerapannya terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang modus operasinya amat bervariasi dan terus berkembang<sup>73</sup>.

- d. Tidak boleh dipaksakan, artinya jika suatu saat nanti dalam perkembangannya aturan tersebut sudah tidak memadai lagi dalam mengikuti perkembangan penyalahgunaan komputer, maka harus terbuka untuk direvisi, termasuk model/bentuk pengaturannya harus terbuka pula untuk ditinjau kembali.

Ide dasar dari Pasal 162 (144) Konsep KUHP (Baru) sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa pada hakekatnya perbuatan penyalahgunaan komputer merupakan bentuk lain dari tindak pidana biasa yang telah diatur dalam KUHP misalnya pencurian, pemalsuan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu untuk mengkaji apakah ketentuan dalam Pasal 162 (144) Konsep telah memadai untuk menanggulangi semua bentuk penyalahgunaan komputer, terlebih dahulu harus dilakukan inventarisasi perbuatan apa saja yang perlu dipidana dalam menanggulangi penyalahgunaan komputer. Berkaitan dengan hal tersebut maka berikut ini akan dikutipkan kesimpulan dari B. Mardjono Reksodiputro mengenai apa saja yang perlu mendapatkan perlindungan hukum pidana, untuk dijadikan semacam *pathokan*:<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Dalam bahasan tentang penerapan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer yang pernah terjadi di Indonesia, nampak bahwa sebenarnya Hakim di Indonesia cukup "kreatif" dalam mengoperasionalkan ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang ada melalui metode penafsiran hukum. Periksa: bahasan dalam Bab III subbab B.

<sup>74</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Komputer: Suatu Catatan Sementara Dalam Rangka KUHP Nasional Yang Akan Datang*, Makalah/Prasaran dalam Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, BPHN, Jakarta, 18-19 Januari 1988, Halaman 10 - 11.

"A. Untuk melindungi kepentingan 'tersedianya' (*beschikbaarheid*) sarana (*middelen*), maka perbuatan yang perlu dipidana adalah:

- sabotase, penghancuran, kerusakan, membuat tidak bisa dipakai, mengambil, mengganggu dan membuat tidak dapat digunakan oleh pemakai yang sah;

Sedangkan untuk data (*gegevens*), maka perbuatan yang perlu dipidana adalah:

- menghapus, menghilangkan, membuat cacat, dan membuat tidak dapat 'dimasuki';

B. Untuk melindungi kepentingan 'integritas' (*integriteit*) sarana, maka perbuatan yang perlu dipidana adalah:

- manipulasi;

Sedangkan untuk data, maka perbuatan yang perlu dipidana adalah:

- memasukkan data yang tidak benar, dan menambah;

C. Untuk melindungi kepentingan 'eksklusifitas' (*exclusiviteit*) sarana, maka perbuatan yang perlu dipidana adalah:

- secara tidak sah mencari 'jalan masuk', dan memakai secara tidak sah;

Sedangkan untuk data, maka perbuatan yang perlu dipidana adalah:

- memperoleh pengetahuan, menyebarkan, mengumumkan, pemakaian secara tidak benar dan melanggar undang-undang, mengkopi, menggunakan untuk tujuan komersial"

Dari deretan perbuatan penyalahgunaan komputer yang harus dipidana tersebut maka nampak bahwa Pasal 162 (144) Konsep KUHP (Baru) baru mengatasi bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer yang berupa delik terhadap barang atau harta kekayaan (*property*) seperti perbuatan-perbuatan yang sebagian besar tercantum pada daftar A dalam kutipan di atas (*property approach*).

Untuk mengatasi perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam daftar B dalam kutipan tersebut di atas (*forgery approach*) nampaknya perlu merumuskan (menambah) ketentuan baru yang sejenis dengan Pasal 162 (144) Konsep KUHP (Baru) yang isinya memperluas pengertian "surat" sehingga meliputi pula media penyimpanan data elektronik/komputer. Dengan demikian perbuatan penyalahgunaan komputer yang berupa "manipulasi data" atau "pemalsuan data" dapat ditanggulangi dengan ketentuan yang mengatur masalah "delik pemalsuan surat" melalui metode "penafsiran oten-

tik" atau "penafsiran undang-undang". Adapun penempatan ketentuan baru tersebut dapat dilakukan dalam sebuah ayat yang ditambahkan dalam Pasal 162 Konsep. Untuk memperjelas gagasan tersebut, berikut ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan dalam contoh model perumusan sebagai berikut:

Pasal 162 (144) (Baru)

- (1) Yang dimaksud dengan pengertian barang termasuk selain barang berwujud juga aliran listrik, gas, air, uang giral, data dan program komputer dan jasa serta jasa telepon, jasa telekomunikasi dan jasa komputer.
- (2) Yang dimaksud dengan pengertian surat termasuk selain surat yang tertulis di atas kertas juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam *disket*, *floppy disc*, *pita magnetik*, *Compact Disc* atau media penyimpanan komputer atau media penyimpanan data elektronik lainnya.

Sementara itu, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa penyalahgunaan komputer tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap "*property*" namun menyangkut pula perlindungan terhadap *privacy* atau kerahasiaan data atau informasi. Oleh sebab itu untuk mengatasi perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam daftar C tersebut di atas (*information approach*) terutama terhadap perbuatan yang dikenal dengan sebutan "*Hacking*", maka perlu dirumuskan ketentuan baru yang isinya memperluas pengertian "masuk", "ruangan" dan "jaringan telepon" sehingga meliputi pula pengertian "mengakses (memasuki) sistem komputer", "terminal komputer" dan "sistem komunikasi komputer". Dengan demikian perbuatan penyalahgunaan komputer yang berupa "memasuki" secara tidak sah atau "memakai" (mengakses) secara tidak sah dapat diatasi dengan menerapkan

ketentuan yang berkaitan dengan delik mengganggu ketenteraman rumah/kantor (delik memasuki rumah atau ruangan tanpa izin atau delik "menyadap" atau "menguping" pembicaraan orang lain), melalui metode penafsiran otentik.

Penempatan ketentuan-ketentuan baru tersebut dapat ditambahkan atau disisipkan pada pasal-pasal yang memberi penjelasan tentang pengertian memasuki rumah/ruangan yakni Pasal 158 (140) dan Pasal 159 (141) Konsep KUHP (Baru). Untuk memperjelas gagasan tersebut, berikut ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan dalam contoh model perumusan sebagai berikut:

Pasal 158a (Baru)

Termasuk dalam sebutan ruangan adalah terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.

Pasal 158b (Baru)

Termasuk dalam pengertian masuk adalah mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer.

Pasal 158c (140) (99 KUHP)

Termasuk dalam sebutan memanjat adalah masuk dengan melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat lalu, atau masuk melalui lobang dalam tanah yang sengaja digali, demikian pula melalui selokan atau parit yang gunanya untuk menutup halaman.

Pasal 159 (141) (100 KUHP)

- (1) Termasuk dalam pengertian anak kunci adalah kode rahasia atau password komputer, kartu magnetik atau sinyal elektronik yang telah diprogram agar dapat dipergunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.
- (2) Termasuk dalam pengertian anak kunci palsu adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci tetapi yang tidak dibuat untuk maksud tersebut.

Pasal 159a (Baru)

Termasuk dalam pengertian jaringan telepon adalah jaringan komputer (*computer network*) atau sistem komunikasi komputer.

Dengan model pembaharuan terhadap rumusan yang terdapat dalam beberapa Pasal dalam Bab V (tentang Pengertian-Pengertian) Buku Kesatu KUHP sebagaimana telah digambarkan dalam contoh tersebut di atas, diharapkan penerapan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan komputer melalui penafsiran analogi atau penafsiran ekstensif dapat dihindarkan karena kini telah disediakan sarana penafsiran otentik atau penafsiran undang-undang. Model tersebut di atas bersandar pada kebijakan penanggulangan penyalahgunaan komputer dengan bersandar pada sistem kodifikasi yang dibangun pada Konsep KUHP Baru.

Disamping masalah perumusan "perbuatan" sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan komputer dengan sarana penal, perlu pula dipikirkan masalah sentral yang kedua yaitu masalah penetapan "sanksi". Dalam hal ini perlu pula dipertimbangkan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku pelaku penyalahgunaan komputer. Sekilas mengamati Konsep KUHP (Baru) yang paling akhir (1993) nampak bahwa permasalahan tersebut belum tersentuh. Hal ini dapat dipahami karena konsep tidak memandang delik komputer sebagai delik khusus yang berdiri sendiri, sehingga tidak memerlukan sanksi yang bersifat khusus pula.

Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam penentuan sanksi terhadap perbuatan penyalahgunaan komputer yang bersifat khas, antara lain adalah:

- a. Menyangkut sesuatu yang sangat peka/sensitif, seperti program, data atau informasi yang dihasilkan dalam proses komputer.

- b. Dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas tertentu seperti profesi, keahlian dan posisi atau kedudukan atau jabatan tertentu (pada umumnya penyalahgunaan komputer selalu melibatkan "orang dalam").
- c. Tidak setiap penyalahgunaan komputer berorientasi pada *property* atau *money*, namun seringkali mengarah pada kepuasan yang bersifat *challenge* atau *adventure*.

Dalam hal ini untuk dapat menjawab apakah Konsep KUHP (Baru) telah mengakomodasi sanksi yang tepat berkaitan dengan karakteristik penyalahgunaan komputer yang berbeda dengan delik biasa, maka setidaknya ada dua hal yang harus dikaji yaitu: *pertama*, jenis sanksi pidana (aspek kualitas) dan *kedua*, bobot pidana (aspek kuantitas).

Sejauh yang penulis kaji dan amati hingga saat ini tidak ada jenis pidana yang spesifik untuk perbuatan penyalahgunaan komputer dan nampaknya dalam waktu dekat ini belum perlu diadakan. Artinya jenis pidana pokok dan tambahan, baik yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku maupun dalam Konsep KUHP (Baru) dipandang sudah cukup memadai untuk mengatasi pelaku penyalahgunaan komputer<sup>75</sup>. Bahkan jenis pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu yang salah satunya adalah pencabutan hak menjalankan profesi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (81) ke-6 Konsep KUHP (Baru) sangat relevan berkaitan dengan pertimbangan huruf "b" tersebut di atas.

---

<sup>75</sup>Dalam Pasal 58 (57) ayat (1) Konsep KUHP Baru disebutkan bahwa: "Pidana pokok adalah: Ke-1 pidana penjara; ke-2 pidana tutupan; ke-3 pidana pengawasan; ke-4 pidana denda; ke-5 pidana kerja sosial", sedangkan dalam Pasal 60 (59) ayat (1) Konsep KUHP Baru disebutkan bahwa: "Pidana tambahan adalah: ke-1 pencabutan hak-hak tertentu; ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan; ke-3 pengumuman putusan hakim; ke-4 pembayaran ganti kerugian; ke-5 pemenuhan kewajiban adat".

Selanjutnya ancaman maksimum sanksi pidana yang terdapat dalam masing-masing pasal dalam Buku Kedua (tentang tindak pidana) dipandang relatif cukup memadai. Jika perlu Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari ancaman maksimum yang ditetapkan dalam pasal yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 (97) Konsep KUHP (Baru). Dalam Pasal 115 (97) ayat (1) ke-3 Konsep diatur: "Pidana diperberat dalam hal: ...ke-3 seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian atau profesinya...", dipandang relevan pula dengan pertimbangan huruf "b".

Pertimbangan lainnya (huruf "a" dan "c") nampaknya sangat sulit untuk diakomodasi melalui kebijakan formulasi untuk menetapkan jenis sanksi dan bobot sanksi yang tepat, karena hal tersebut lebih bersifat kasuistis, sehingga sebaiknya hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim agar secara kreatif dapat menentukan sanksi yang tepat, sesuai dengan sifat-sifat khusus pelakunya dan tipologi kasusnya serta tujuan dari ppidanaan itu sendiri.

Yang perlu dibahas lebih lanjut adalah perlunya penjelasan mengenai pengertian "profesi" dalam Konsep KUHP (Baru) tersebut. Sebenarnya pengertian "profesi" (*profession*) tidak sama dengan "pekerjaan" (*occupation*) atau kegiatan yang memerlukan keahlian lainnya, sebab untuk dapat disebut sebagai profesi setidaknya harus memenuhi

tiga syarat, yakni:<sup>76</sup>

- a. Ada nilai yang dijunjung dijunjung tinggi dalam masyarakat yang ingin dilayani oleh profesi tersebut;
- b. Ada proses pendidikan (biasanya panjang) sebelum orang berhak menyandang gelar profesi tersebut;
- c. Ada Kode Etik (*Code of Ethics*) yang menentukan aturan main dalam menjalankan suatu profesi.

Dengan demikian sebenarnya secara tradisional hanya dikenal empat macam profesi yakni: kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan<sup>77</sup>.

Pertanyaannya adalah apakah pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan keahlian di bidang komputer seperti *programmer*, *opterator*, *system analys* dan sebagainya, dapat disebut profesi? Jika dikaitkan dengan ketiga syarat tersebut di atas, terutama syarat ketiga (kode etik), nampaknya pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai profesi.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas maka ada dua cara dalam memperbaharui Konsep KUHP Baru agar aparat penegak hukum tidak rancu dalam menafsirkan pengertian profesi dalam menghadapi pelaku penyalahgunaan komputer yang memiliki latar belakang keahlian tertentu.

Cara pertama adalah dengan membuat/menambah rumusan ketentuan baru yang menguraikan tentang pekerjaan apa saja

<sup>76</sup> Bandingkan: E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Halaman 33 - 34. Antara lain disebutkan bahwa ciri khusus yang terdapat dalam pandangan umum tentang profesi meliputi: a) persiapan atau training khusus; b) menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan yang lain; c) aseptabilitas sebagai motif pelayanan.

<sup>77</sup> Suhrwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Halaman 10.



yang dimaksudkan sebagai profesi dan memperluas pengertian profesi sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus misalnya di bidang teknologi komputer, akuntansi, analisis dan sebagainya termasuk di dalamnya. Misalnya ketentuan baru tersebut diletakkan sebelum Pasal 147 (129) Konsep KUHP (Baru) yang menjelaskan tentang pengertian pegawai negeri.

Cara kedua adalah dengan memperbaharui (menambah) Ketentuan Pasal 82 (81) ke-6 Konsep KUHP (Baru) dan Pasal 115 (97) ayat (1) ke-3 Konsep KUHP (Baru) serta beberapa pasal dalam buku kedua Konsep KUHP (Baru) yang menyangkut masalah profesi. Adapun caranya dapat digambarkan dalam model perumusan sebagai berikut:

Pasal 82 (81) [35 ayat (1) KUHP]  
Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya ialah:

...ke-6 hak menjalankan profesi tertentu, pekerjaan tertentu atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu;...

Pasal 115 (97) (Baru)  
Hal-hal yang Memperberat Pidana

(1) Pidana diperberat dalam hal:

...ke-3 seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian, profesi atau pekerjaannya;...

Sedangkan pasal-pasal dalam buku kedua Konsep KUHP (Baru) yang menyangkut tindak pidana profesi, misalnya Pasal 426

(17.01) dan Pasal 473 (24.03) Konsep, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maksud atau tujuannya yaitu apakah pasal tersebut dimaksudkan untuk ditujukan secara khusus terhadap profesi tertentu atau meliputi pula bidang-bidang pekerjaan lainnya.

Cara kedua ini sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dipandang lebih tepat disamping perumusan dan penerapannya lebih sederhana dan fleksibel, juga apabila dilihat dari segi historisnya, sebenarnya istilah "profesi" yang tercantum dalam pasal-pasal Konsep KUHP (Baru) tersebut diambil alih dari istilah "*beroep*" dalam KUHP Lama (WvSNI) yang oleh Moeljatno diterjemahkan dengan istilah "pencarian" (mungkin yang dimaksud adalah "pencabarian" -pen.) dan oleh R. Soesilo diterjemahkan dengan istilah "pekerjaan"<sup>78</sup>.

Demikian beberapa gagasan pemikiran yang berkaitan dengan kebijakan legislatif dalam penetapan dan perumusan perbuatan dan sanksi pidana dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan komputer dalam perundang-undangan hukum pidana di masa mendatang. Apa yang telah diuraikan tersebut di atas sebenarnya baru merupakan kajian awal dan belum merupakan hasil final, sehingga dalam rangka penetapan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan komputer dengan sarana hukum

---

<sup>78</sup> Untuk membuktikannya, bandingkan: Pasal 426 (17.01) dan Pasal 473 (24.03) dalam: Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, *Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru)*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1993, Halaman 135 dan 150, dengan Pasal 322 dan 374 KUHP dalam: d/h Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesië*, P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989, Halaman 1198 dan 1204, dan dalam: Moeljatno, *KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Halaman 141 dan 159 serta dalam: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1956, Halaman 183 dan 207.

pidana, pihak yang berwenang dalam proses penetapan kebijakan legislatif nantinya (dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR) perlu mengupayakan keselarasan antara perumusan perbuatan dan sanksi pidana tersebut. Demikian pula mengenai daya tangkal efektifitasnya perlu dikaji secara empiris dan interdisipliner serta perlu diuji dalam penerapannya kelak.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Penyalahgunaan komputer merupakan persoalan yang sangat kompleks. Hal ini nampak dalam bahasan pada bab-bab terdahulu. Permasalahannya menjadi lebih rumit lagi ketika dikaitkan dengan upaya penanggulangannya dengan sarana hukum pidana. Realita tersebut tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, namun juga dialami oleh negara-negara maju di dunia.

Sekalipun demikian, hal tersebut bukan berarti penyalahgunaan komputer merupakan masalah yang sama sekali tidak dapat diatasi. Setidaknya berdasarkan fakta yang diperoleh dalam penelitian dan dari hasil analisis telah ditemukan pemikiran-pemikiran untuk mengupayakan penanggulangannya melalui kebijakan hukum pidana yang dirancang dengan cermat.

Berdasarkan pembahasan terhadap dua pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan penyalahgunaan komputer pada saat ini dititikberatkan pada kebijakan hukum pidana yang bersifat aplikatif yaitu dengan cara mengoperasionalisasikan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana positif dan berbagai Undang-Undang lainnya yang memuat ketentuan pidana. Simpulan ini didasarkan pada hasil kajian sebagai berikut:

- a. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan beberapa undang-undang tentang tindak pidana khusus (misalnya UU. No. 3 Tahun 1971 dan UU. No. 11/PnPs/1963) serta beberapa undang-undang lainnya yang memuat ketentuan pidana seperti Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Kepabeanan pada dasarnya dapat diterapkan pada beberapa bentuk penyalahgunaan komputer. Bahkan jika dikaitkan dengan tujuan akhir atau akibat dari beberapa bentuk perbuatan penyalahgunaan komputer, beberapa ketentuan dipandang masih relevan untuk diterapkan, sekalipun seringkali harus melalui pendekatan penafsiran ekstensif. Sedangkan beberapa bentuk perbuatan penyalahgunaan komputer yang harus dianalogkan dengan unsur-unsur ketentuan tertentu, masih harus diupayakan pemecahannya.
- b. Kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan komputer yang terjadi di Indonesia selama ini, dapat diatasi melalui proses peradilan. Dalam hal ini ternyata aparat penegak hukum mampu menerapkan pasal-pasal dalam KUHP maupun perundang-undangan yang lain sekalipun karena berbagai keterbatasan sehingga kadang-kadang terkesan agak dipaksakan. Dari kajian terhadap beberapa sampel kasus nampak bahwa sebenarnya banyak alternatif ketentuan yang secara kreatif dapat diterapkan terhadap kasus-kasus tersebut, namun pada kenyataannya para hakim cenderung lebih suka memilih untuk menerapkan pasal-pasal sekitar delik korupsi (Pasal 1 ayat (1) sub a atau sub b jo. Pasal 28 UU. No. 3/1971) atau delik pencurian (Pasal 362 atau Pasal 363 KUHP).

2. Di masa mendatang dapat dipastikan kasus-kasus penyalahgunaan komputer akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan pengaplikasiannya, sehingga perundang-undangan hukum pidana yang ada pada saat ini semakin tidak relevan untuk diterapkan lagi. Hal ini perlu diantisipasi dengan pemikiran-pemikiran untuk mengupayakan penanggulangannya melalui kebijakan hukum pidana yang menitikberatkan pada aspek formulasinya, yakni upaya untuk merancang rumusan perbuatan dan sanksi yang sesuai dengan karakteristik penyalahgunaan komputer yang khas. Berdasarkan hasil kajian maka ditemukan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

- a. Bentuk pengaturan tentang penyalahgunaan komputer di Indonesia yang dipandang tepat adalah diintegrasikan ke dalam KUHP dan tidak dijadikan delik khusus yang berdiri sendiri. Dipandang sesuai dengan pemikiran tersebut adalah model pengaturan yang diterapkan dalam Konsep KUHP (Baru) yang dirumuskan oleh Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992. Sekalipun model tersebut mengandung prinsip yang bertolak belakang dengan prinsip yang pada umumnya dianut oleh negara-negara maju, namun hasil kajian yang didasarkan pada pengamatan kondisi-kondisi yang ada di Indonesia nampak bahwa model tersebut adalah yang paling sesuai. Bahkan jika disempurnakan dan dilaksanakan secara konsekuen serta didukung dengan profesionalisme aparat penegak hukum, model dalam konsep tersebut mengandung kelebihan-kelebihan seperti: menghindari terjadinya *overcriminalization*, bersifat fleksibel dan tetap memperhatikan aspek kepastian hukumnya.

b. Hingga saat ini belum ditemukan jenis sanksi khusus untuk perbuatan penyalahgunaan komputer dan nampaknya di masa mendatang jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam Konsep KUHP (Baru) telah cukup memadai untuk dijatuhkan pada pelaku penyalahgunaan komputer. Sedangkan unsur latar belakang profesi tertentu atau keahlian khusus atau motif-motif tertentu pada pelaku penyalahgunaan komputer dapat dijadikan unsur pemberat sanksi pidana, dan perlu diatur lebih lanjut untuk menjadi bagian dari pola pemidanaan. Selanjutnya dalam implementasinya penetapan jenis dan bobot sanksi diserahkan sepenuhnya pada kebijakan hakim dengan memperhatikan semua aspek kasus terutama berkaitan dengan modus operandi, kepentingan yang harus dilindungi, latar belakang pelaku secara individual dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

## B. Saran/Rekomendasi

Dengan mengacu pada simpulan yang merupakan jawaban permasalahan tersebut di atas, maka sebagai rekomendasi hasil penelitian akan diajukan saran sebagai berikut:

1. Sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada pada dasarnya dapat diterapkan pada bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer, dan hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan kebijakan aplikatif melalui berbagai metode penafsiran, namun akan lebih baik jika ada semacam pola atau pedoman operasionalisasi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bentuk-

bentuk penyalahgunaan komputer tertentu. Pedoman yang bentuk konkretnya dapat berupa yurisprudensi tetap atau semacam peraturan pelaksanaan tersebut, dimaksudkan untuk membantu tugas para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan komputer dan menjamin aspek kepastian hukum. Selanjutnya guna meningkatkan upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer dengan mengoperasionalisasikan ketentuan-ketentuan yang ada, perlu didukung dengan keberadaan berbagai faktor penunjang kebijakan aplikatif seperti: pengembangan metode penafsiran; pengembangan *legal documentation and information system*; pengembangan sistem yurisprudensi tetap dan pengembangan Sumber Daya Manusia (dalam hal ini adalah aparat penegak hukum).

2. Bentuk pengaturan dan perumusan ketentuan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan komputer dalam Konsep KUHP (Baru) perlu dikaji dan disempurnakan lagi. Hal ini mengingatkan bahwa pengaturan tentang perluasan pengertian barang sehingga meliputi pula program, data dan jasa komputer yang sering dijadikan objek penyalahgunaan komputer sebagaimana diatur dalam Pasal 162 (144) Konsep tersebut dipandang masih terlalu sumir dan belum menjangkau seluruh aspek penyalahgunaan komputer. Oleh sebab itu sekalipun Naskah Konsep KUHP (baru) tersebut kini telah diserahkan pada pemerintah, namun masalah penyalahgunaan komputer yang bentuk pengaturannya telah disepakati seperti pada Konsep tersebut, masih perlu dibahas secara khusus dengan melibatkan semacam panitia ad-hoc yang terdiri dari berba-



gai departemen, instansi, perusahaan, asosiasi atau pihak lainnya yang berkepentingan terhadap pengaturan penyalahgunaan komputer di masa mendatang. Hasil dari kajian atau pembahasan tersebut nantinya diharapkan pula dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berarti dalam proses *penggodakan* Konsep KUHP Nasional di DPR.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Ameln, Fred, *Kriminalitas Di Bidang Komputer Dilihat Dari Segi Hukum*. t.k.: t.p., t.t.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Anwar, H.A.K. Moch. (Dading), *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*. Bandung: Alumni, 1979.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Bainbridge, David I., *Komputer dan Hukum (Computer and The Law*, terjemahan oleh: Prasadi T. Susmaatmadja). Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Black, Henry Campbell, et.al., (ed), *Black's Law Dictionary: Fifth Edition*, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979.
- Brown, R.A., *Computer-Related Crime Under Commonwealth Law and The Draft Federal Criminal Code* dalam *Criminal Law Journal*, Sydney: University of Sydney, 1986.
- Chen, Christopher D., *Computer Crime and The Computer Fraud and Abuse Act of 1986*, dalam *Computer/Law Journal*, Volume I, t.k.: t.p., 1990.
- Geis, Gilbert and Robert F. Meier (ed), *White-Collar Crime: Offenses in Business, Politics, and in Professions*. New York: The Free Press A Division of Mac millan Inc, 1977.
- Hamzah, Andi, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- , *KUHP Prancis: Sebagai Perbandingan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- , *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Hardjodarsono, Ina M. Samadikun, *Kejahatan Dengan Sarana Komputer*, Sumbangan Pikiran Dalam Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 18 - 19 Januari 1988.

Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, Jakarta: CV. Tanjung Agung, 1993.

Kaspersen, H.W.K. dan N. Keijzer, *Hukum Pidana Belanda dan Penyalahgunaan Komputer (Het Nederlandsche Strafrecht en Computermisbruik*, diterjemahkan oleh BPHN), t.k.: t.p., t.t.

Keijzer, Nico, *Asas Legalitas blok I bagian I (Legaliteitsbeginsel*, diterjemahkan oleh Wonosutanto). t.k.: t.p., t.t.

Loqman, Loebby, *Delik Politik di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hil-Co, 1993.

Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Manan, Bagir dan Kuntana Magna, *Peranan Peraturan Hukum Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.

Mayer, Robert R. dan Ernest Greendwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial (The Design of Social Policy Research*, alih bahasa oleh: Sutan Santi Arbi, et.al.). Jakarta: Rajawali, 1984.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

-----, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juli 1994.

- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- , *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 9-13 September 1991.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Patch, Edward F., *Addressing Computer Crime in Massachusetts*, dalam *New England Law Review*, Volume 21, t.k.: t.p., 1985-1986.
- Pritt, Jeffry A., *Computer Crime in West Virginia: A Statutory Proposal*, dalam *West Virginia Law Review*, Vol. 91. t.k.: t.p., 1989.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Randy, Jusuf, *Kejahatan Komputer*, Prasaran Dalam Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 18 - 19 Januari 1988.
- , Edi Noer Sasongko dan Gayatri Kusumawardhani, *Proteksi Terhadap Kriminalitas Dalam Bidang Komputer*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA), 1985.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kejahatan Komputer: Suatu Catatan Sementara Dalam Rangka KUHP Nasional Yang Akan Datang*, Prasaran Dalam Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 18 - 19 Januari 1988.

- Roden Q.C., The Hon. Adrian, *Computer Crime and The Law* dalam *Criminal Law Journal*. t.k.: t.p., 1991.
- Saefullah W., E., *Metode dan Teknik Pengumpulan Data Melalui Penelusuran Dokumentasi Hukum*, Bahan Penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia, Cisarua Bogor, Desember 1991.
- Saleh, Roeslan, *Perlindungan Hukum Sehubungan Dengan Penyalahgunaan Komputer*. t.k.: t.p., t.t.
- , *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Di Beberapa Negara dan Hukum Pidana Sehubungan Dengan Penyalahgunaan Komputer Di Beberapa Negara*. t.k.: t.p., 1995.
- Sanford, H. Kadish (ed), *Encyclopedia of Crime and Justice: Volume I*. New York: The Free Press A Division of Macmillan Inc., 1983.
- , *Encyclopedia of Crime and Justice: Volume II*. New York: The Free Press A Division of Macmillan Inc., 1983.
- Sastraandjaja. J. Sudama, *Kejahatan Komputer: Suatu Masalah Hukum Kontroversial Yang Perlu Diperhatikan/Dipecahkan Dalam Era Pembangunan*, Prasaran Dalam Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 18 - 19 Januari 1988.
- Smith, J.C., and Brian Hogan, *Criminal Law: Six Edition*. London: ELBS Butterworths & Co. (Publisher) ltd., 1988.
- Soemitro, *Tindak Pidana Korupsi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1989.
- , *Tindak Pidana Subversi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soenaryo, *Metode Riset I*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1985.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977.

-----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Tim Perumus BPHN, *Laporan Hasil Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1988.

Wargakusumah, Moh. Hasan, *Beberapa Langkah Penelitian Penunjang Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Bahan Penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia, Cisarua Bogor, Desember 1991.

Wilson, Darryl C., *Viewing Computer Crime: Where Does The Systems Error Really Exist?*, dalam *Computer/Law Journal*, Vol. XI, t.k.: t.p., 1991.

Wiratno, S. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1979.

Wisnubroto, Aloysius, *Quo Vadis Tata Hukum Indonesia: Suatu Pemikiran Berdasarkan Kajian Teori Hukum*, (Paper - Pascasarjana UNDIP), t.p., Semarang, 1996.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

*De Wet Boeken, Wetten en Verordeningen, Benevens De Grondwet van De Republiek Indonesië* (d/h Engelbrecht). Jakarta: PT. Ichtiar Baru - van Hoeve, 1989.

*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (disusun menurut sistem Engelbrecht). Jakarta: PT. Ichtiar Baru - van Hoeve, 1989.

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992, *Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru)*, disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.*

-----, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabea-*  
*nan.*

Saleh, K. Wantjik, *Pelengkap KUHP.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-*  
*Komentarnja Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Penerbit  
Politeia, 1956.

United Nations, *Document A/CONF.144/L.11, Eighth United*  
*Nations Congress on The Prevention of Crime and The*  
*Treatment of Offenders,* Havana-Cuba, 4 September 1990.

*Computer Misuse Act 1990* (1990 c 18)

*The Proposed West Virginia Computer Crimes Act*

*Victoria Crimes Act*

#### PUTUSAN PERADILAN:

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, No. 660/Pid/S/-  
1990/PN.Bdg. Tanggal 17 November 1990, atas nama Terdak-  
wa Iwan Soenaryo bin Ibrahim Sunaryo.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 1050/-  
Pid/S/1989/PN.Jkt.Bar. Tanggal 20 November 1989, atas  
nama Terdakwa Budiman Hidayat.

-----, No. 033/Pid/B/1992/PN.Jkt.Bar. Tanggal 16 Juli 1992,  
atas nama Terdakwa Andy Hidayat.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 135/X/-  
Pid/B/1987/PN.Jkt.Pst. Tanggal 11 Maret 1988, atas nama  
Terdakwa Seno Adjie.

-----, No. 136/X/Pid/B/1987/PN.Jkt.Pst. Tanggal 10 Maret  
1988, atas nama Terdakwa Rudy Demsy.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 114/-  
Pid/B/1987/PN.JS. Tanggal 23 April 1988, atas nama Frits  
Maringka.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No 33/1983/-  
Pid/PN.Yk. Tanggal 26 September 1983, atas nama Terdakwa  
Liauw Joen Tjiin alias A Cen.

-----, No. 34/1983/Pid/PN.Yk. Tanggal 14 September 1983,  
atas nama Terdakwa Salip Djamhari.

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta, No. 40/-  
1983/Pid/PTY. tanggal 30 Januari 1984, atas nama Terdak-  
wa Salip Djamhari.

-----, No. 41/1983/Pid/PTY. tanggal 6 Maret 1984, atas nama  
Terdakwa Liauw Joen Tjiin alias A Cen.

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No. 82/Pid/-  
1988/PT.DKI. tanggal 30 Mei 1988, atas nama Terdakwa  
Rudy Demy.

-----, No. 94/Pid/1988/PT.DKI. tanggal 30 Mei 1988, atas  
nama Terdakwa Seno Adjie.

-----, No. 141/Pid/1988/PT.DKI. tanggal 18 Juli 1988, atas  
nama Terdakwa Frits Maringka.

-----, No. 92/Pid/1992/PT.DKI. tanggal 12 Oktober 1992,  
atas nama Terdakwa Andy Hidayat.

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, No. 104/Pid/-  
1991/PT.Bdg. tanggal 18 Desember 1991, atas nama Terdak-  
wa Iwan Sunaryo bin Ibrahim Sunaryo.

Salinan Putusan Mahkamah Agung RI., No. 363 K/Pid/1984, ta-  
nggal 25 Juni 1984, atas nama Terdakwa Liauw Joen Tjiin  
alias A Cen.

-----, No. 1851 K/Pid/1988, tanggal 1 Desember 1988, atas  
nama Terdakwa Rudy Demy.

-----, No. 1852 K/Pid/1988, tanggal 21 Desember 1988, atas  
nama Terdakwa Seno Adjie.



-----, No. 2119 K/Fid/1988, tanggal 12 Januari 1989, atas nama Terdakwa Frits Maringka.

-----, No. 1867 K/Pid/1992, tanggal 8 Februari 1993, atas nama Terdakwa Andy Hidayat.

MEDIA MASSA CETAK:

*Bernas*, 3 November 1995.

*Clipping Hukum dan Peradilan*, Bagian Humas dan Protokol, Biro Umum Mahkamah Agung RI., 24 Oktober 1989.

*Forum Keadilan*, Nomor 17, Maret 1990.

-----, Nomor 15 Tahun IV, 6 November 1995.

*Jawa Pos*, 5 April 1995.

-----, 30 Mei 1995.

-----, 20 Oktober 1995.

-----, 24 September 1996.

*Kompas*, 5 November 1995.

*Komputer dan Elektronika*, Nomor 5 Tahun III, April 1985.

*Suara Merdeka*, 14 Juli 1988.

*Tempo*, Nomor 30 Tahun XVII, 26 September 1987.

-----, Nomor 34 Tahun XVII, 26 Oktober 1987.

-----, Nomor 6 Tahun XIX, 8 April 1989.

*Varia Peradilan*, Nomor 21 Tahun II, Juni 1987.

-----, Nomor 43 Tahun IV, April 1989.

-----, Nomor 124 Tahun XI, Januari 1996.

-----, Nomor 127 Tahun XI, Juni 1996.

-----, Nomor 140 Tahun XII, Mei 1997.

BUKU ELEKTRONIK (CD-ROM):

Elips, *Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara 1950 - Des 31, 1995*, (Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Penggandaan, Kantor Menteri Koordinator Bidang Keuangan dan Pengawasan Pembangunan RI), West Publishing & Wang Labs. Inc., t.k., 1995.